

PROFIL KAMPUNG-KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Kondisi Sosial Ekonomi Kampung-kampung



Ade Cahyat, Belly Iranon, Brigitta Edna, Darius Dalip, Doni Tiaka,
Haripuddin (Lado), Kukuh Tugiono, Maria Goretti Dau Himang,
Samudin Muksin, Supiansyah, Yohanis, Christian Goenner

2005



Pemerintah
Kabupaten
Kutai Barat



Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

**PROFIL KAMPUNG-KAMPUNG
DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

Kondisi Sosial Ekonomi Kampung-kampung

**Ade Cahyat, Belly Iranon, Brigitta Edna, Darius Dalip, Doni Tiaka,
Haripuddin (Lado), Kukuh Tugiono, Maria Goretti Dau Himang,
Samudin Muksin, Supiansyah, Yohanis, Christian Goenner**

Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi

2005

© 2005 oleh Center for International Forestry Research
Diterbitkan oleh Center for International Forestry Research

Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel.: +62 (251) 622622 Fax.: +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

DAFTAR ISI

Ucapan terima kasih	xiii
PENDAHULUAN	1
Kata Pengantar	1
Ringkasan Hasil Survei.....	2
Profil Kampung Cempedas	6
1. Sejarah Kampung	6
2. Kelembagaan Kampung	7
3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	7
4. Sosial Budaya	10
5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	12
6. Pendidikan	16
7. Kesehatan	17
8. Sejarah Bencana	19
9. Resume Kecenderungan Perubahan	19
10. Persepsi Kemiskinan	20
11. Lampiran	20
Profil Kampung Delang Kerohong.....	22
1. Sejarah Kampung	22
2. Kelembagaan Kampung	23
3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	23
4. Sosial Budaya	25

5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	27
6.	Pendidikan	31
7.	Kesehatan	32
8.	Sejarah Bencana	34
9.	Persepsi Kemiskinan	35
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	35
11.	Lampiran	36

Profil Kampung Empakuq..... 37

1.	Sejarah Kampung	37
2.	Kelembagaan Kampung	38
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	39
4.	Sosial Budaya	41
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	44
6.	Pendidikan	47
7.	Kesehatan	49
8.	Sejarah Bencana	50
9.	Persepsi Kemiskinan	51
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	52
11.	Lampiran	52

Profil Kampung Engkuni Pasek 54

1.	Sejarah Kampung	54
2.	Kelembagaan Kampung	55
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	56
4.	Sosial Budaya	58
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	61
6.	Pendidikan	64

7.	Kesehatan	66
8.	Sejarah Bencana	67
9.	Persepsi Kemiskinan	68
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	69
11.	Lampiran	69
Profil Kampung Gemuhan Asa		71
1.	Sejarah Kampung	71
2.	Kelembagaan Kampung	72
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah.....	73
4.	Sosial Budaya	75
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	78
6.	Pendidikan	83
7.	Kesehatan	84
8.	Sejarah Bencana	87
9.	Persepsi Kemiskinan	87
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	88
11.	Lampiran	89
Profil Kampung Jambuq.....		90
1.	Sejarah Kampung	90
2.	Kelembagaan Kampung	90
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten.....	91
4.	Sosial Budaya	93
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	95
6.	Pendidikan	99
7.	Kesehatan	100
8.	Sejarah Bencana	101

9.	Persepsi Kemiskinan	102
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	102
11.	Lampiran	103
Profil Kampung Jerang Melayu		105
1.	Sejarah Kampung	105
2.	Kelembagaan Kampung	105
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	106
4.	Sosial Budaya	108
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	111
6.	Pendidikan	115
7.	Kesehatan	116
8.	Sejarah Bencana	118
9.	Persepsi Kemiskinan	118
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	119
11.	Lampiran	119
Profil Kampung Jontai		121
1.	Sejarah Kampung	121
2.	Kelembagaan Kampung	122
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	122
4.	Sosial Budaya	124
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	127
6.	Pendidikan	131
7.	Kesehatan	132
8.	Sejarah Bencana	134
9.	Persepsi Kemiskinan	135
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	135

11.	Lampiran	136
Profil Kampung Naha Aruq		138
1.	Sejarah Kampung	138
2.	Kelembagaan Kampung	139
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	139
4.	Sosial Budaya	141
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	144
6.	Pendidikan	148
7.	Kesehatan	150
8.	Sejarah Bencana	152
9.	Persepsi Kemiskinan	153
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	153
11.	Lampiran	154
Profil Kampung Karanganyar		155
1.	Sejarah Kampung	155
2.	Kelembagaan Kampung	155
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	156
4.	Sosial Budaya	158
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	161
6.	Pendidikan	164
7.	Kesehatan	165
8.	Sejarah Bencana	167
9.	Persepsi Kemiskinan	167
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	168
11.	Lampiran	168

Profil Kampung Lempunah..... 170

1.	Sejarah Kampung	170
2.	Kelembagaan Kampung	170
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	171
4.	Sosial budaya	173
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	175
6.	Pendidikan	178
7.	Kesehatan	179
8.	Sejarah Bencana	181
9.	Persepsi Kemiskinan	181
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	182
11.	Lampiran	182

Profil Kampung Long Daliq 184

1.	Sejarah Kampung	184
2.	Kelembagaan Kampung	184
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	185
4.	Sosial Budaya	187
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	189
6.	Pendidikan	193
7.	Kesehatan	195
8.	Sejarah Bencana	196
9.	Persepsi Kemiskinan	197
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	197
11.	Lampiran	198

Profil Kampung Long Pananeh II 199

1.	Sejarah Kampung	199
----	-----------------------	-----

2.	Kelembagaan Kampung	200
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	200
4.	Sosial Budaya	202
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	205
6.	Pendidikan	209
7.	Kesehatan	211
8.	Sejarah Bencana	212
9.	Persepsi Kemiskinan	213
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	213
11.	Lampiran	214
	Profil Kampung Lotaq.....	215
1.	Sejarah Kampung	215
2.	Kelembagaan Kampung	216
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	217
4.	Sosial Budaya	219
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	222
6.	Pendidikan	227
7.	Kesehatan	228
8.	Sejarah Bencana	230
9.	Persepsi Kemiskinan	230
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	231
11.	Lampiran	232
	Profil Kampung Muara Nayan	233
1.	Sejarah Kampung	233
2.	Kelembagaan Kampung	233
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	234

4.	Sosial budaya	236
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	238
6.	Pendidikan	242
7.	Kesehatan	243
8.	Sejarah Bencana	244
9.	Persepsi Kemiskinan	245
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	245
11.	Lampiran	246

Profil Kampung Naha Tivab..... 247

1.	Sejarah Kampung	247
2.	Kelembagaan Kampung	248
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	248
4.	Sosial Budaya	250
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	253
6.	Pendidikan	256
7.	Kesehatan	258
8.	Sejarah Bencana	260
9.	Persepsi Kemiskinan	260
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	261
11.	Lampiran	261

Profil Kampung Sembuan..... 263

1.	Sejarah Kampung	263
2.	Kelembagaan Kampung	264
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	265
4.	Sosial Budaya	266
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	269

6.	Pendidikan	274
7.	Kesehatan	275
8.	Sejarah Bencana	277
9.	Persepsi Kemiskinan	278
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	278
11.	Lampiran	279
Profil Kampung Tanjung Soke		281
1.	Sejarah Kampung	281
2.	Kelembagaan Kampung	281
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	282
4.	Sosial Budaya	284
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	286
6.	Pendidikan	289
7.	Kesehatan	290
8.	Sejarah Bencana	292
9.	Persepsi Kemiskinan	293
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	293
11.	Lampiran	294
Profil Kampung Tebisaq		295
1.	Sejarah Kampung	295
2.	Kelembagaan Kampung	295
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	296
4.	Sosial budaya	298
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	301
6.	Pendidikan	305
7.	Kesehatan	307

8.	Sejarah Bencana	309
9.	Persepsi Kemiskinan	309
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	310
11.	Lampiran	311

Profil Kampung Ujoh Halang 312

1.	Sejarah Kampung	312
2.	Kelembagaan Kampung	313
3.	Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten	313
4.	Sosial Budaya	315
5.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	317
6.	Pendidikan	321
7.	Kesehatan	322
8.	Sejarah Bencana	324
9.	Persepsi Kemiskinan	325
10.	Resume Kecenderungan Perubahan	325
11.	Lampiran	326

Daftar lampiran

Kuesioner Responden Kunci: Kepala Adat	328
Kuesioner Responden Kunci: Petinggi	332
Kelompok Diskusi: Tokoh Masyarakat	337
Kuesioner Responden Kunci: Ketua BPK	342
Kuesioner Responden Kunci: Dokter/Bidan/Dukun	347
Kuesioner Responden Kunci: Kepala Sekolah	351
Kelompok Diskusi: Masyarakat Biasa	354
Kuesioner Responden Rumah Tangga	359
Kelompok Diskusi Perempuan	367
Kuesioner Responden Kunci: Masyarakat Kurang Mampu	372
Kuesioner Responden Kunci: Warung	375

Ucapan terima kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu dalam pembuatan buku ini, diantaranya Bapak Silas Sinar, BA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kutai Barat, masyarakat kampung lokasi survei, petinggi dan tokoh masyarakat di kampung lokasi survei, Kepala Adat dan masyarakat Kampung Jengan Danum, peserta pelatihan dan uji coba yang tidak jadi ikut survei, serta Ir. Magdalena Silvia, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Sendawar (Unsen) yang telah banyak membantu mencari mahasiswa Unsen untuk dapat ikut survei.

PENDAHULUAN

Kata Pengantar

Sejak akhir tahun 1996, ada banyak perubahan terjadi di tingkat nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kehidupan di tingkat kabupaten bahkan tingkat kampung. Dampak juga dapat dirasakan pada kehidupan di daerah-daerah yang saat ini menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Beberapa kejadian penting yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

- krisis politik nasional sejak akhir tahun 1996 yang diakhiri dengan jatuhnya kekuasaan mantan Presiden Soeharto, yang menandai berakhirnya era orde baru dan dimulainya era reformasi;
- kebakaran hutan besar-besaran dan kemarau panjang yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998;
- krisis moneter sejak tahun 1997;
- dikeluarkannya paket Undang-undang Desentralisasi pada bulan Mei 1998 yang benar-benar efektif pada tanggal 1 Januari 2001 sebagai awal dimulainya era otonomi daerah yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada pemerintahan kabupaten dan kota;
- Kabupaten Kutai Barat berdiri pada bulan Oktober 1999 sebagai salah satu pecahan dari Kabupaten Kutai;
- DPRD Kutai Barat terbentuk dan Ir. Rama A. Asia terpilih sebagai Bupati Kutai Barat pertama, yang dilanjutkan dengan pengesahan APBD pertama Kabupaten Kutai Barat tahun 2001. Hal ini menandai permulaan berjalannya Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dengan perangkat yang lengkap;
- dikeluarkannya Kebijakan Kehutanan Daerah yang memperbolehkan masyarakat menebang hutan untuk kepentingan komersil dengan rincian sebagai berikut:
 - kebijakan IPPK dari Kabupaten Kutai pada bulan April 1997 yang juga diterapkan di wilayah Kutai Barat;
 - penerapan Kebijakan IHPHH dari Kabupaten Kutai sebagai pengganti IPPK pada tahun 1999/2000;
 - penerapan Kebijakan IHPHH oleh Bupati Kutai Barat pada tahun 2000 sampai dengan akhir 2002.
 - Penerapan Kebijakan IUPHHK mulai tahun 2003.

Seluruh peristiwa-peristiwa tersebut telah memberikan dampak kepada perubahan kehidupan di masyarakat.

Program penelitian aksi "desentralisasi dan kemiskinan" mencoba untuk melihat dampak tersebut dengan sedikit fokus kepada dampak dari desentralisasi kepada upaya pemerintah kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam rangka meningkatkan efektivitas usaha-usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukannya dengan cara memperbaiki sistem monitoring. Sistem monitoring ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan dan kalangan-kalangan penting lainnya di Kabupaten dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dalam waktu yang relatif lebih

cepat. Dengan demikian diharapkan penggunaan dana pembangunan dapat lebih berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kami mengadakan survei pada bulan Oktober dan November 2003 dengan tujuan untuk mendapatkan:

- data dan informasi dasar situasi kehidupan masyarakat di kampung-kampung yang dianggap miskin di Kabupaten Kutai Barat;
- persepsi perubahan di tingkat masyarakat dalam masa desentralisasi;
- persepsi masyarakat tentang akar penyebab kemiskinan.
- Pengujian beberapa kemungkinan indikator-indikator kemiskinan berdasarkan model-model kemiskinan.

Ringkasan Hasil Survei

Data dasar kampung miskin

- terdapat 27% rumah tangga yang memiliki anak putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang sebagian besar diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan;
- sebagian besar rumah terbuat dari bahan kayu pada bagian lantai, dinding dan atap. Sebagian besar rumah dialiri oleh arus listrik;
- sebagian besar pendapatan uang diperoleh dari:
 - pertanian: sayuran, pisang, singkong, kopi;
 - mencari ikan;
 - kebun karet;
 - kerja kayu;
 - kebun rotan;
 - gaji perusahaan.
- sumber daya alam yang penting dan yang paling banyak dapat diakses oleh masyarakat adalah kayu;
- sektor perusahaan swasta yang paling banyak berpengaruh kepada pendapatan uang rumah tangga masyarakat adalah perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan, namun sebagian besar pendapatan berupa *fee* yang tidak diperoleh secara reguler;
- kebijakan IHPHH dipraktekkan secara beragam di beberapa kampung, ada yang mendapatkan *fee* secara merata ada juga yang tidak, tergantung kepada status 'kepemilikan' kawasan hutan dan dinamika negosiasi aktor-aktor yang terlibat;
- terdapat perbedaan tingkat harga untuk beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Pada umumnya, harga di dataran tinggi sedikit lebih murah dibandingkan harga dataran rendah, sedangkan harga di hulu riam mencapai sekitar 50% sampai dengan 100% lebih tinggi dibanding harga di dataran tinggi;
- pada tahun 2003, hanya sekitar 65% rumah tangga yang berladang dengan jumlah bibit kebanyakan sekitar 3 kaleng. Kecilnya ladang membuat mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan beras dari hasil ladang. Ditambah dengan sedikitnya rumah tangga yang berladang, membuat tingginya kebutuhan untuk mendapatkan beras dari luar. Kebutuhan beras tambahan kebanyakan diperoleh dengan cara membeli,

selain itu banyak juga yang mengaku mendapatkan bantuan beras subsidi dari program pemerintah (raskin);

- sebagian besar lahan ladang merupakan lahan milik sendiri;
- sebagian besar rumah tangga makan rata-rata 3 kali sehari (60%), kebanyakan sisanya makan 2 kali sehari (39%);
- nasi, daging dan telur kebanyakan diperoleh dengan cara membeli. Sedangkan ikan dan sayuran diperoleh dari produksi sendiri;
- nasi, ikan dan sayuran paling sering dikonsumsi. Sedangkan daging dan telur lebih jarang;
- ketika ada kebutuhan uang yang mendesak, sebagian besar rumah tangga memperoleh bantuan (95%). Sebagian besar yang membantu adalah dari pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat solidaritas masih cukup baik.

Persepsi perubahan tingkat kehidupan

- Sebagian BPK mengaku:
 - kualitas dan frekuensi musyawarah di kampung semakin baik;
 - hubungan kampung dengan pemerintah kabupaten dirasakan semakin membaik dari sisi: jarak ke pemkab; tingkat kepedulian pemkab; pelayanan pemkab; keterbukaan informasi dan bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung.
- Sebagian besar lembaga adat mengaku:
 - tidak ada banyak perubahan pada upacara lembaga adat dan tingkat solidaritas masyarakat;
 - terjadi peningkatan konflik lahan.
- Sebagian besar pemerintah kampung mengaku:
 - kondisi jalan untuk transportasi dan ekonomi kampung secara umum telah mengalami perbaikan;
 - kondisi hutan, *simpukng*, sungai dan keanekaragaman hayati diyakini mengalami kondisi yang semakin buruk.
- Sebagian besar rumah tangga mengaku:
 - memiliki sumber pendapatan baru. Pendapatan baru tersebut kebanyakan berasal dari aktivitas penebangan hutan seperti menebang dan menggergaji kayu (menyenso), *fee* HPHH, gaji perusahaan (kayu, tambang dan kebun);
 - merasakan pendapatan menurun, pengeluaran meningkat dan kesejahteraan sama saja. Kebanyakan perubahan negatif diakibatkan oleh meningkatnya pengeluaran, ketidakpastian usaha serta keadaan rumah tangga. Sedangkan perubahan positif diakibatkan oleh terbukanya peluang usaha baru;
 - setelah tahun 2000, terdapat peningkatan jumlah pembelian barang-barang mewah seperti televisi, mesin *genset* dan sepeda motor. Tetapi pembelian mesin *chainsaw* terlihat tidak mengalami peningkatan, padahal aktivitas penebangan hutan meningkat;
 - jumlah rumah tangga yang berladang terus mengalami penurunan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

- Sebagian besar guru atau kepala sekolah mengaku:
 - gaji atau honor guru dan tingkat keaktifan mengajar serta jumlah masyarakat yang baca tulis telah mengalami perbaikan;
 - kondisi bangunan sekolah, peralatan dan alat bantu proses belajar serta jumlah staf pengajar mengalami penurunan;
 - jumlah sekolah, pendidikan guru dan tingkat kelulusan tidak mengalami perubahan.
- Sebagian besar pelayan kesehatan mengaku:
 - penyakit TBC telah mengalami penurunan;
 - mutu air bersih, mutu air sungai sebagai air minum, jumlah ahli pengobatan tradisional dan jumlah upacara pengobatan telah mengalami penurunan;
 - jumlah fasilitas kesehatan, kondisi fasilitas kesehatan, jumlah staf, obat dan peralatan, gaji/honor, penyakit malaria dan penyakit diare tidak mengalami banyak perubahan.

Persepsi akar kemiskinan

- Menurut kelompok perempuan
 - pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah;
 - masalah-masalah kesehatan;
 - bencana alam yang sering terjadi;
 - sulitnya mendapat pekerjaan;
 - kualitas air bersih yang menurun.
- Menurut kelompok masyarakat biasa
 - pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah;
 - masalah-masalah kesehatan;
 - bencana alam yang sering terjadi;
 - sulitnya mendapat pekerjaan;
 - rendahnya penghasilan.
- Menurut kelompok tokoh masyarakat
 - pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah;
 - masalah-masalah kesehatan;
 - bencana alam yang sering terjadi;
 - dukungan pemda;
 - masalah transportasi.

Catatan mengenai sumber informasi:

Untuk semua kampung, sumber-sumber informasi diperoleh dari survei, kecuali:

- jumlah rumah tangga: perkiraan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda BPS), 2000.
- jumlah jiwa: Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda BPS), 2000.
- jumlah KK prasejahtera & sejahtera: pendataan Keluarga BKKBN, 2002.

- jumlah KK: pendataan Keluarga BKKBN, 2002.
- jumlah rumah tangga miskin: Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda BPS), 2000.
- nama petinggi: petinggi adalah panggilan resmi untuk menyebut kepala kampung.
- kampung: kampung adalah istilah resmi untuk menyebut desa.

Jika data diperoleh dari sumber lain, ditunjuk dengan catatan kaki.

Profil Kampung Cempedas

Jumlah rumah tangga: 64	Jumlah jiwa: 263
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 49	Jumlah KK: 59
Jumlah rumah tangga miskin: 9	Suku mayoritas: Benuaq
Nama Ketua BPK: Ongkar Bahrin	Jumlah TK: -
Nama Kepala Adat: Ramad B.	Jumlah SD: 1
Nama Petinggi: Farida, S.Sos	Jumlah SLTP: -
Waktu tempuh ke kecamatan: 10 menit (sepeda motor)	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke Sendawar: 60 menit (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Posisi administratif: Kecamatan Muara Lawa, Kab. Kutai Barat	Jumlah Pusban: 1
Posisi geografis: 115.45 LS dan 29 BT	Jumlah Polindes: -
Tanggal survei: 4 - 7 November 2003	

1. Sejarah Kampung

Kampung Cempedas telah ada sejak sekitar 200 tahun. Keberadaan Kampung ini ditandai dengan bangunan lamin (*lou*) kampung yang telah berganti hingga 5 kali (lamin diganti atau direnovasi setiap 40 tahun).

Masyarakat Cempedas secara historis berasal dari Mencimai. Saat ini masyarakat Cempedas tidak lagi tinggal di Lou, mereka telah mendiami rumah-rumah pribadi yang berjajar sepanjang sekitar 1 kilometer di tepi kiri mudik Sungai Lawa.

Kampung Cempedas

2. Kelembagaan Kampung

2.1 Kelembagaan Kampung

Terdapat tujuh lembaga yang ada di Kampung Cempedas yaitu:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Kelompok Tani;
- Koperasi; dan
- Karang Taruna.

Pada kelembagaan kampung yang lama terdapat LMD (Lembaga Musyawarah Desa), sejak adanya Peraturan Daerah tahun 2001 diganti menjadi BPK (Badan Perwakilan Kampung).

BPK Cempedas telah dilantik pada tahun 2002 di Kecamatan Muara Lawa, namun hingga saat survei ini dilaksanakan mereka belum melakukan konsultasi program kerja Kampung dengan masyarakat. Alasannya adalah karena meskipun sudah diterbitkan surat keputusan sebagai BPK, namun tidak dicantumkan ketentuan mengenai honor. Sampai dengan November 2003, belum ada kejelasan mengenai honor tersebut.

Karang Taruna hingga saat ini aktif menggerakkan kegiatan kesenian tari dan olah raga. Karang taruna telah mengajukan usulan bantuan fasilitas olah raga ke partai politik, namun belum ada tanggapan.

2.2 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Dampak keputusan	Sama saja	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Sama saja	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Menurut Petinggi Cempedas, usulan bantuan kampung pernah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan DPRD Kutai Barat, terhadap usulan ini pemerintah selalu menjawab harus ditentukan skala prioritas. Bagi masyarakat usulan bantuan kampung yang diajukan sudah merupakan skala prioritas. Dua usulan bantuan yaitu rehabilitasi lamin dan rehabilitasi bangunan sekolah telah diusulkan selama 2 tahun berturut-turut. Terhadap usulan rehabilitasi sekolah dasar, Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat pernah meninjau langsung kondisi fisik sekolah, tapi hingga kini belum direhabilitasi. Usulan bantuan pembuatan jalur jalan kelompok tani "Karya Bersama" yang ditujukan untuk memudahkan kerja kelompok tani sehingga mampu menaikkan produksi pertanian, hingga kini belum ada realisasi. Jalan ini sedianya akan

Kampung Cempedas

dijadikan jalan pintas, karena jika mengikuti jalur jalan raya yang ada sekarang harus memutar sampai sekitar 9 km.

Daftar usulan bantuan yang pernah diajukan dalam 5 tahun terakhir adalah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Rehabilitasi lamin	Harus ada skala prioritas
Rehabilitasi sekolah Inpres	Harus ada skala prioritas
Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah	Harus ada skala prioritas
Jalan kelompok tani karya bersama	Harus ada skala prioritas
Semenisasi jalan kampung sepanjang 1 km	Harus ada skala prioritas

Selama 5 tahun terakhir ini terdapat 5 bantuan program pemerintah. Dua program dilaksanakan pada tahun 2001-2002, dua program pada tahun 1999 dan satu program pada tahun 2003. Dengan demikian terdapat 5 program yang dilakukan sejak otonomi daerah. Secara umum pada 5 tahun terakhir terdapat peningkatan bantuan dari pemerintah.

Program bantuan itu adalah bangunan sarana produksi pertanian (tahun 2002), pembangunan jembatan ulin sepanjang sekitar 300 meter di sebelah hilir dan hulu kampung yang menghubungkan kampung dengan jalan poros (tahun 1999), reboisasi hutan (tahun 2001) dan penanaman budidaya karet dan kemiri (tahun 2003). Program-program ini telah dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut petinggi, salah satu bantuan yang dirasa belum tepat adalah program irigasi sawah sepanjang sekitar 600 meter. Pemilihan lokasi dianggap kurang tepat karena terdapat di lahan kering, hanya terdapat sungai kecil di sekitar lokasi. Sarana ini belum dilengkapi dengan pompa air untuk menaikkan air dari sungai ke lahan. Saat ini sarana irigasi ini belum berfungsi.

Bantuan lainnya berasal dari Yayasan Rio Tinto dan Yayasan Care Indonesia. Bantuan Yayasan Rio Tinto berupa susu dan bubur makanan anak-anak. Yayasan Care membantu beras dan susu untuk ibu hamil. Bantuan Care dikaitkan dengan program pembuatan lahan persawahan sebagai alternatif lain dari ladang berpindah. Ketika program Care untuk persawahan ini gagal maka bantuan beras pun dihentikan. Organisasi keagamaan tidak memberikan bantuan.

Bantuan pemerintah kecamatan yang dinikmati masyarakat berupa rehab rumah pada tahun 1998, bantuan ini dirasa cukup memuaskan bagi masyarakat kurang mampu.

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut Ketua BPK
1	Saprotan lahan pertanian	Rehab rumah pada tahun 1998	Susu dan bubur makanan anak-anak dari Yayasan Rio Tinto
2	Jembatan ulin 300 meter	-	Beras dan susu ibu hamil dari Care
3	Irigasi sawah 600 meter	-	-
4	Reboisasi hutan jenis tanaman karet dan kemiri	-	-

Kampung Cempedas

3.2 Hubungan masyarakat dengan pemerintah kabupaten

Menurut ketua BPK, kunjungan pejabat pemerintah ke Kampung Cempedas hampir tidak pernah ada. Selama ini kunjungan hanya dilakukan di Kecamatan Muara Lawa. Masyarakat tidak dapat menyampaikan kondisi kampungnya secara langsung.

Pada tahun 2003, akademisi dari Universitas Mulawarman mengadakan kunjungan penelitian lingkungan tentang analisis dampak lingkungan (amdal) dengan meneliti kondisi air dan sanitasi. Program ini terlaksana, namun dokumen penelitian tidak disampaikan ke masyarakat.

Dinas Kehutanan bersama mahasiswa Jerman pada tahun 2002 mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan agenda permasalahan kebakaran hutan dan antisipasi kebakaran hutan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama bagi pembentukan petugas pengendali kebakaran hutan dan ladang. Personel petugas direkrut dari masyarakat setempat.

Dinilai dari sisi perubahan keterjangkauan, jarak, tingkat kepedulian, pelayanan, keterbukaan informasi, dan partisipasi pengambilan keputusan, hubungan masyarakat dengan pemerintah kabupaten semakin baik. Transportasi darat juga semakin mudah karena telah dibangun prasarana jalan dari Cempedas ke Sendawar.

Sarana jalan sebelumnya telah ada, hanya saja telah terjadi peningkatan kualitas jalan. Pada tahun 1990-an, sarana jalan Cempedas ke Melak hanya berupa pengerasan, jalan antara Cempedas ke Muara Lawa hanya berupa tanah yang banyak lubang dan licin, sangat sulit dilalui saat hujan. Saat ini kondisi jalan dari Cempedas ke Simpang Damai berupa jalan dengan pengerasan batu, dan antara Simpang Damai ke Sendawar berupa jalan aspal. Perbaikan jalan mengakibatkan ongkos transportasi jauh lebih murah dan lebih cepat.

Partisipasi pengambilan keputusan meningkat. Setiap tahun Pemerintahan Kampung Cempedas disertakan pada rapat koordinasi pembangunan di kecamatan dan kabupaten.

Secara rinci perubahan menurut ketua BPK dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Lebih baik

3.3 Sumber dan alat informasi

Informasi diterima masyarakat melalui 3 cara yaitu melalui kunjungan pemerintah kecamatan; mendengar dari orang lain; dan lewat pengumuman. Lembaga pemerintah yang sering memberikan informasi adalah Puskesmas, dengan cara mengadakan penyuluhan kesehatan. Kendala informasi saat ini adalah tidak tersedianya *Handy Talky (HT)* di kampung, sehingga informasi tentang kondisi kampung sekitar Cempedas tidak dapat diterima dan disampaikan dengan cepat.

Kampung Cempedas

3.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Lebih baik	Ketua BPK

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Perpindahan penduduk dalam jangka waktu sementara, selama 5 tahun terakhir ini terjadi dengan alasan mencari pekerjaan. Jumlah penduduk yang berpindah hanya 3 orang. Informasi dari responden rumah tangga menyatakan bahwa keluarganya yang bekerja di perusahaan kayu PT. Rimba Karya Raya (RKR) diperkirakan dalam bulan-bulan ini akan kembali ke kampung karena ada pengurangan tenaga kerja di PT. RKR. Tidak terdapat penduduk yang meninggalkan kampung dalam waktu yang lama.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perpindahan penduduk seperti dirincikan pada tabel di bawah ini:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan meninggalkan kampung
Waktu pendek/sementara	3	Mencari pekerjaan
Waktu panjang/selamanya	-	-

3.2 Upacara adat

Upacara adat yang masih dilakukan adalah:

- Adat *kuangkai* yaitu upacara penguburan ulang. Adat *kuangkai* merupakan salah satu adat mati;
- *Gugu tautn* yaitu upacara adat pengembalian cuaca atau musim dalam satu tahun;
- Upacara adat *belian*, penyembuhan orang sakit. Dua upacara adat yang terakhir merupakan adat atau budaya kehidupan.

Dibandingkan dengan masa lalu, pelaksanaan upacara adat sama saja, baik dari sisi waktu, bahan-bahan, gotong-royong adat maupun tujuan pelaksanaan adat. Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah tidak ada generasi muda yang tertarik mendapatkan pengetahuan asli atau tradisi dari orang tua, sehingga jika kondisi ini berlanjut adat tidak dikenal lagi di generasi muda.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Tingkat kerja sama antara masyarakat selama 5 tahun terakhir tetap sama. Indikasinya dapat dilihat dari aktivitas masyarakat. Bentuk kerjasama tetap sama yakni terbatas pada kegiatan menebas ladang, menanam padi, dan membersihkan lingkungan. Dari

Kampung Cempedas

sisi partisipasi, hanya separuh yang ikut kerjasama. Rumah tangga kurang mampu mendapat bantuan dari keluarga maupun bukan keluarga.

4.4 Konflik

Jenis konflik yang pernah terjadi adalah konflik rumah tangga, namun intensitasnya kecil atau jarang, perkembangannya dalam 5 tahun ini tetap sama. Konflik lahan, konflik antar suku, konflik agama, dan konflik sumber daya air tidak pernah terjadi, meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam suku dan agama. Konflik air tidak pernah terjadi, selama ini masyarakat secara bersama mempergunakan air dari Sungai Lawa.

Konflik yang ada diselesaikan secara adat dengan mempergunakan hukum adat. Jika tidak dapat diselesaikan, konflik diselesaikan dengan mempergunakan hukum negara dan menyerahkan permasalahan ke Kecamatan Muara Lawa. Menurut keterangan kepala adat, lebih dari separuh konflik yang terjadi di kampung ini bisa diselesaikan di tingkat lembaga adat kampung.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Terdapat dua masalah utama yang dihadapi yaitu:

- masalah ekonomi, yaitu mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok;
- tidak adanya tempat pemasaran atau penjualan hasil bumi.

Situasi umum rumah tangga kurang mampu dalam 5 tahun terakhir ini tetap sama, karena belum ada usaha yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang layak. Bantuan berupa modal usaha belum pernah diberikan oleh pemerintah. Menurut responden rumah tangga kurang mampu, lahan yang ada tidak subur sehingga tidak menghasilkan panen yang dapat dijual untuk peningkatan ekonomi keluarga. Kendala lain adalah banjir sehingga gagal panen.

Bagi responden rumah tangga kurang mampu, pendidikan dan kesehatan merupakan beban yang sangat berat. Tidak terdapat kemampuan mandiri dalam menanggulangi masalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan keluarga tergantung pada bea siswa dan kartu sehat, bantuan itu pun masih sangat terbatas.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, akses dalam pengambilan keputusan juga bermasalah, selama ini mereka jarang diikutsertakan pada proses pengambilan keputusan.

Rumah tangga kurang mampu menginginkan bantuan yang berupa: modal kerja pengembangan keterampilan kerajinan pandai besi dan modal kerja pengembangan usaha pertukangan serta meubeler.

4.6 Hiburan

Sumber hiburan secara umum adalah televisi dan VCD. Hiburan lain, kendati jarang dilakukan adalah upacara *adat belian* atau upacara adat lainnya. Upacara adat pada dasarnya merupakan upacara ritual, namun aktivitasnya di kampung mempunyai fungsi pula sebagai sarana hiburan.

Kampung Cempedas

4.7 Resume trend perubahan

Komponen perusahaan	Keadaan kini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Kepada adat
Bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepada adat
Gotong-royong adat	-	Sama saja	Kepada adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama saja	Kepada adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama saja	Kepada adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama saja	Kepada adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama saja	Kepada adat
Konflik sumber daya alam/ air	Tidak pernah	Sama saja	Kepada adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama saja	Kepada adat
Jumlah konflik	-	Sama saja	Kurmam
Kerja sama/solidaritas masyarakat	-	Sama saja	Kurmam

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan

Menurut ketua BPK, di Cempedas, penggunaan lahan untuk kebun tanaman rotan Jepung adalah yang paling luas. Mencapai antara seperempat hingga setengah dari luas lahan secara keseluruhan.

Tipe lahan lainnya adalah sawah, kebun sayur, kebun rotan, kebun karet, simpung/lembo/buah, kebun kemiri, peternakan dan hutan.

Luas tata guna lahan tidak tetap, beberapa diantaranya mengalami penambahan, sebagian lainnya berkurang. Luasan tata guna lahan bertambah pada penanaman/pemeliharaan jenis komoditi yang mudah terjual dan harganya relatif stabil atau bahkan cenderung naik atau memiliki prospek pasar yang baik yaitu padi, kebun sayur, rotan, kemiri, dan ternak.

Berbeda dengan karet yang secara ekonomis harganya cenderung turun atau tidak terlalu menguntungkan, luasan lahannya tetap. Demikian pula dengan simpukng dan ladang. Penggunaan lahan tetap karena tidak semua petani berladang.

Pada penggunaan tata guna lahan sawah, terdapat beberapa kendala. Penggunaan tata guna lahan sawah mengalami penambahan hanya pada saat ada bantuan dari Care bagi pengembangan proyek pengerjaan lahan sawah. Proyek ini terlaksana, tapi setelah proyek pembuatan sawah ini berakhir, lahan sawah yang tersedia tidak dikelola lebih lanjut.

Tata guna lahan tanaman kakao dan kopi belum dilakukan. Masyarakat belum mencoba dan mengetahui informasi tentang budidaya tanaman dan pemasarannya. Meskipun mendengar bahwa tanaman kakao dan kopi telah dikembangkan di kabupaten lain dan harga jualnya bisa mencukupi penghasilan ekonomi keluarga.

Penambahan luasan lahan secara umum, mengakibatkan berkurangnya hutan. Hutan dikonversi menjadi ladang atau jenis tata guna lainnya. Dari tujuh jenis hutan, yaitu hutan perawan atau bengkar, hutan sekunder tua atau *batekng* (>30 tahun), hutan sekunder muda atau *batekng uraq* (10-30 tahun), belukar tua atau *batekng uraq* (15-10 tahun), belukar atau *uraq* (2-5 tahun), hutan rawa atau *payak*, dan hutan kerangas (hutan yang tidak subur). Lahan hutan belukar (*uraq*) bertambah sebagai

Kampung Cempedas

akibat dari penebangan hutan belukar tua (*batakng uraq*), lahan hutan kerangas bertambah setelah bekas penebangan lahan jenis hutan tidak dikelola dengan baik.

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan adalah:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Kebakaran, dijadikan ladang	Kalau terkena rotan, maka sumber ekonomi masyarakat berkurang
Lebih mudah diakses	Terbukanya jalan dan alat transportasi	Hutan makin berkurang, ekonomi masyarakat meningkat
Berkurangnya jenis tumbuhan dan hewan	Kebakaran dan dijadikan ladang serta berburu	Jenis hewan dan tumbuhan berkurang

Kurangnya jenis hutan perawan, hutan sekunder tua, hutan sekunder muda dan belukar dikarenakan adanya pengalihan tata guna lahan. Dari jenis lahan hutan menjadi ladang. Penyebab lainnya adalah adanya bencana kebakaran yang terjadi sebelum tahun 1990. Kebakaran di lahan hutan tanaman rotan masyarakat telah mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Pengurangan hutan terjadi pula karena dibukanya jalur jalan di sekitar hutan. Kemudahan akses transportasi dan pengangkutan melalui jalur jalan telah mempercepat dan mempermudah aktivitas penebangan hutan sehingga luasan lahan hutan berkurang secara cepat.

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Luas Kampung Cempedas hanya sekitar 16 km², tidak mempunyai wilayah hutan yang bisa diajukan sebagai usaha PPPK/IPHH dan wilayah hutan lindung, sehingga tidak terdapat aturan kampung mengenai hutan lindung karena obyek aturannya tidak ada.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Lahan masyarakat terletak berdekatan dengan kampung, sekitar sepanjang jalur darat atau sungai antara Cempedas dan Lotaq. Lahan bisa dicapai melalui jalur darat dan jalur Sungai Lawa dengan jarak sekitar 4 sampai 8 kilometer. Permasalahan kondisi jalan, lebih ditujukan pada peningkatan kualitas jalan. Kelompok Tani "Karya Bersama" telah mengajukan usulan peningkatan kualitas jalan lahan kelompok tani ke pemerintah kabupaten. Usulan ini merupakan skala prioritas di kampung, namun belum ada realisasi pelaksanaan dari pemerintah kabupaten.

Menurut petinggi, seluruh rumah tangga memiliki lahan meskipun belum didaftarkan ke petugas PPAT. Selama 5 tahun terakhir ini, bukti kepemilikan lahan lebih didasarkan pada surat keterangan dari kepala kampung dan kepala adat. Praktek jual lahan oleh masyarakat belum terjadi baik secara resmi maupun tidak resmi. Namun dengan beroperasinya PT. Truba Indo di sekitar wilayah kampung, memungkinkan akan terjadi penjualan lahan masyarakat ke perusahaan.

5.4 Perladangan

Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari separuh responden rumah tangga di Cempedas berladang. Antara 25-31% responden juga bertanam padi di sawah. Tidak ada responden yang mengolah rapak untuk bertanam padi.

Kampung Cempedas

Menurut ketua BPK, upaya penanaman padi sawah pernah dilakukan dengan dukungan oleh LSM Care. Pengelolaan sawah tidak berlanjut karena beberapa kendala, diantaranya:

- kebiasaan berladang di lahan kering, rumah tangga di kampung tidak terbiasa mengelola lahan sawah yang memerlukan banyak tahap pengelolaan dibanding dengan cara berladang di tanah kering. Pengelolaan ladang di rumah tangga dilakukan secara TOT atau tanam tanpa olah artinya tanpa dipupuk, tanpa diberi racun serangga, hanya dilakukan tebas, bakar dan tugal;
- pemilihan lokasi persawahan. Meskipun terdapat pembuatan jalur irigasi, namun air tidak mampu masuk ke lokasi sawah, dan tidak tersedia alat bantu penyedot air guna memasukkan air ke lokasi persawahan.

Hampir semua responden rumah tangga yang berladang mengolah lahan milik sendiri, sedikit lainnya berladang di lahan bebas. Hampir separuh sawah yang digarap responden adalah sawah pinjaman, sisanya adalah milik sendiri.

Pada tahun 2002, benih yang ditanam petani berkisar antara 0.5 - 10 kaleng. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2003 dimana benih yang ditanam hanya berkisar antara 0.5 - 5 kaleng padi. Kebanyakan responden menanam 3 kaleng padi pada setiap musim tanam.

Sejumlah 50% responden yang bertani mengaku gagal panen, sebaliknya 50% lainnya menyatakan hasil panen mereka akan mencukupi hingga panen berikutnya. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan beras dari manapun. Lebih dari separuh (60%) mendapatkan beras tambahan dari membeli. Sepertiga responden berladang pada lahan bekas ladang yang berusia antara 10-20 tahun, sisanya berladang pada lahan yang berusia di bawah 10 tahun dan yang berusia diatas 20 tahun.

Dalam program peralihan kebiasaan berladang di lahan kering ke persawahan yang difasilitasi Care, masyarakat yang menggarap sawah diberi subsidi beras. Namun karena program tersebut tidak berhasil maka bantuan subsidi beras pun di hentikan. Tidak ada informasi lengkap mengenai waktu (tahun berapa) program ini dilaksanakan.

Waktu tempuh dari kampung ke ladang bervariasi antara 5-60 menit, dimana sebagian besar bisa ditempuh dengan waktu 30 menit. Pada umumnya masyarakat berjalan kaki menuju ladang, tetapi ada juga sebagian kecil yang menggunakan sepeda motor.

5.5 Pendapatan uang

Penghasilan sebagian besar responden adalah dari rotan. Yang lainnya mendapatkan penghasilan uang dari peternakan, pengerjaan kerajinan rotan, penjualan sayuran, usaha warung, bekerja di perusahaan dan aparat kampung. Usaha dari kerajinan rotan bisa mencukupi keperluan rumah tangga. Terdapat satu keluarga yang telah berhasil mengelola rotan dalam skala yang cukup besar, dengan produk kerajinan berupa meja, kursi dan tikar. Produk mebel rotan ini telah banyak dipesan oleh orang-orang dari kampung di luar Cempedas. Harga bervariasi tergantung jenisnya. Satu set meja-kursi bisa mencapai harga Rp.1 juta, tergantung pada kualitas pesanan yang diinginkan. Satu rumah tangga lainnya, berusaha sebagai pengumpul rotan dengan menerima dan membeli rotan dari kampung sekitarnya. Usaha pengumpulan rotan ini cukup besar, beberapa rumah tangga dari Kampung Lotaq menyetero ke pengumpul ini.

Kampung Cempedas

Dengan mempergunakan variabel barang-barang rumah tangga yang dimiliki di beberapa rumah tangga, rumah tangga yang mengerjakan kerajinan rotan memiliki barang elektronik lebih banyak dibandingkan rumah tangga lainnya. Pengrajin rotan di Cempedas tergabung pada P3R yaitu perkumpulan pengrajin rotan di Kutai Barat yang secara aktif didampingi oleh LSM Sistem Hutan Kerakyatan Kalimantan Timur (SHK Kaltim).

Usaha lain yang cukup banyak menghasilkan uang adalah usaha peternakan sapi, namun sebagian pengusaha ternak ini juga melakukan usaha kerajinan rotan, seperti halnya rumah tangga yang disebut pertama. Harga ternak sapi bisa mencapai Rp. 3.000.000 - Rp. 7.000.000/ekor. Penjualan ternak ini tidak bisa dilakukan setiap saat, terkadang hanya satu kali dalam satu tahun.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Sarana kegiatan ekonomi berupa pasar hanya terdapat di Kecamatan Muara Lawa, yang secara formal buka seminggu sekali setiap hari Rabu. Namun setiap hari tetap pula ada yang berjualan terutama orang-orang yang memiliki lokasi/kios penjualan di pasar.

Di Cempedas belum ada pasar tetap, aktivitas ekonomi dalam jumlah terbatas guna mencukupi keperluan sehari-hari dilakukan melalui warung-warung yang ada di kampung. Terdapat lebih dari 3 warung di kampung. Pemenuhan barang-barang rumah tangga dalam jumlah yang cukup banyak dan variatif dapat dilakukan dengan berbelanja di Muara Lawa yang berjarak sekitar 3 kilometer atau 7 menit dengan sepeda motor atau mobil.

Ongkos reguler ke Muara Lawa adalah Rp. 3000,- sekali jalan, sedangkan melalui jalur air diperlukan Rp. 15.000 karena cukup jauh mengikuti jalur sungai. Kondisi jalur sungai dan jalan darat ke kecamatan kurang baik, meskipun demikian tetap dapat dilalui. Jalur sungai relatif aman kecuali di saat banjir atau saat air surut dan dangkal. Jalur darat telah mengalami peningkatan kualitas pada 5 tahun terakhir ini, jalur mulai dari simpang Damai sampai ke Sendawar (ibukota kabupaten) telah diaspal dan telah terbuka jalur jalan dari Cempedas ke Tenggarong atau Samarinda.

5.7 Keterjangkauan energi

Terdapat empat macam sumber energi yang dipergunakan yaitu kayu bakar, minyak tanah, gas dan listrik. Energi gas dan listrik baru dipergunakan dalam 5 tahun terakhir ini. Dari 63 jumlah rumah, 22 rumah mempergunakan listrik atau sekitar 30%. Kayu bakar sudah lama dipergunakan. Berdasarkan sisi keterjangkauan masyarakat, 3 sumber energi yaitu kayu bakar, minyak tanah, dan listrik masih terjangkau. Gas semakin sulit terjangkau, hanya dipergunakan oleh sebagian kecil rumah tangga.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Hampir separuh atap rumah responden rumah tangga terbuat dari keping, sisanya menggunakan seng dan sirap. Hampir seluruh responden rumah tangga dinding rumahnya terbuat dari papan kayu biasa, sedikit lainnya menggunakan bambu. Semua lantai rumah responden menggunakan papan kayu biasa.

Hampir separuh (43%) rumah responden sudah dialiri listrik dari PLN. Sebagian besar responden rumah tangga memanfaatkan WC sungai (jamban) dan hanya sedikit yang sudah menggunakan WC dalam rumah.

5.9 Resume trend perubahan

Komponen	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat menjangkau lahan	Sama	Petinggi
Jalan	Kurang baik	Sama saja	Petinggi
Sungai	Kurang baik	Sama saja	Petinggi
Ladang	Ada	Tetap	Ketua BPK
Sawah	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Kebun sayur	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Kebun karet	Ada	Tetap	Ketua BPK
Simpukng/buah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Kebun kokoa	Tidak Ada	-	Ketua BPK
Kebun kopi	Tidak Ada	-	Ketua BPK
Kemiri	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan	Ada	Kurang	Ketua BPK
Hutan perawan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (>30 tahun)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (10-30 tahun)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua (5-10 tahun)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar(2-5 tahun)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Rawa	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas	Ada	Bertambah	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Di Kampung Cempedas ini, hanya sekitar 12% dari 16 responden rumah tangga yang menyatakan bahwa ada anak putus sekolah dalam keluarganya. Anak putus sekolah ini semuanya terjadi pada tingkat SD dengan alasan ketidakmampuan secara ekonomi dan lemahnya motivasi belajar.

Anak-anak usia sekolah sebagian besar mengikuti pendidikan di sekolah, hanya sedikit yang meninggalkan sekolah dalam waktu sementara, terutama pada saat musim berladang, membantu orang tuanya yang kerja di ladang, dan setelah selesai musim berladang siswa ini kembali bersekolah.

Berdasarkan data kelulusan tahun lalu, dari jumlah anak yang mengikuti ujian, semua anak yang mengikuti ujian lulus semua atau 100% lulus. Ini artinya kualitas daya serap anak terhadap pelajaran yang diterima sangat baik. Jumlah siswa baru yang mendaftar tahun ajaran ini 9 orang.

Selama ini guru aktif mengajar sehingga proses belajar siswa berlangsung dengan baik. Permasalahannya adalah pemerintah setempat belum mengupayakan peningkatan kualitas mengajar guru melalui kesempatan melanjutkan pendidikan formal. Di lain pihak, tingkat orang dewasa yang dapat membaca dan menulis meningkat.

Kampung Cempedas

6.2 Infrastruktur dan pelayanan

Fasilitas pendidikan yang ada hanyalah Sekolah Dasar. Siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bisa ke Lambing dengan jarak sekitar 3 kilometer dari Cempedas. Perguruan tinggi terdekat ada di Melak berjarak sekitar 60 kilometer yaitu di Universitas Sendawar, namun aktivitas pelajaran belum berjalan stabil. Alternatif lain adalah ke Universitas Kertanegara di Tenggarong atau Universitas lainnya di Samarinda.

Sarana pendidikan masih memerlukan pembenahan terutama pada 3 hal yaitu pada kondisi fisik sekolah, alat-alat dan buku, serta tenaga pengajar. Jumlah sekolah tetap, belum diperlukan penambahan sekolah dasar. Hanya saja fasilitas pendidikan taman kanak-kanak belum ada di kampung ini.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama saja	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan mengajar	-	Lebih aktif	Kepala Sekolah
Persentase kelulusan	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat orang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Menurut Bidan Kampung, jenis penyakit yang lazim diderita di kampung ini adalah:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	Dema, Diare
Orang dewasa	Rematik, asam urat
Perempuan	Keputihan biasa
Orang lanjut usia	-

Penyakit diare (mencret) sering kali diderita anak-anak, pada tahun terakhir ini jumlah anak terkena diare bertambah. Penyakit lainnya yang sering diderita anak-anak adalah penyakit demam. Kelompok orang tua seringkali terkena penyakit asam urat, rematik, dan malaria. Akhir-akhir ini tingkat keseringan penyakit malaria menurun. Kelompok ibu-ibu lebih sering terkena penyakit keputihan.

Ibu-ibu rata-rata berumur 17 tahun saat melahirkan pertama kali. Dalam 12 bulan terakhir ini, 4 orang penduduk meninggal termasuk seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Jumlah kelahiran dalam 12 bulan terakhir adalah 6 bayi dengan berat

Kampung Cempedas

rata-rata 3 kg dan satu orang bayi meninggal. Tidak terdapat anak berusia di bawah 10 tahun yang meninggal. Rata-rata orang meninggal umur 70 tahun karena usia lanjut.

7.2 Fasilitas air bersih

Lebih dari separuh rumah tangga mengambil air dari Sungai Lawa dan dipergunakan untuk memasak dan air minum. Air ditampung didalam ember dan gentong kecil. Kampung-kampung di sepanjang Sungai Lawa dari hulu hingga hilir mempergunakan air sungai Lawa untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK). Di hulu Sungai Lawa terdapat aktivitas pertambangan batu bara PT. Truba Indo. Kondisi air Sungai Lawa keruh dan kadang kala berbusa.

Sumber air bersih bisa didapatkan dari sumur timba, jumlah air tetap hanya mutu air berubah-ubah karena tergantung pada musim kemarau atau musim hujan. Selama musim kemarau masyarakat tidak pernah mendapat bantuan dari luar, masyarakat tetap mempergunakan air Sungai Lawa sebagai sarana MCK.

7.3 Infrastruktur dan pelayanan medis

Pelayanan kesehatan hanya dilakukan oleh dukun kampung yang menempati gedung PKK, yang didanai pelayanannya secara swadaya. Pengguna pelayanan kesehatan hanya terbatas pada masyarakat setempat. Fasilitas kesehatan terdekat berjarak sekitar 3 kilometer atau 15 menit bermotor atau naik mobil dengan biaya Rp. 5.000 sekali jalan. Selama 5 tahun terakhir jumlah staf kesehatan sama saja, ketersediaan obat dan peralatan dan gaji/honor meningkat.

Pengobatan penyakit dilakukan juga oleh ahli pengobatan tradisional, jumlah ahli pengobatan tradisional berkurang dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam satu bulan hanya dilakukan satu kali pengobatan melalui upacara pengobatan tradisional, frekuensi pengobatan makin menurun. Biaya pengobatan sekitar Rp. 100 ribu.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Sumur timba	Sama saja	Bidan Kampung
Mutu air bersih	Sumur timba	Berfluktuasi	Bidan Kampung
Mutu air sungai	Warna coklat, kadang berbusa	Berkurang	Bidan Kampung
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	Bidan Kampung
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	Bidan Kampung
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Ada	Sama saja	Bidan Kampung
Ketersediaan obat dan peralatan	Ada	Lebih besar	Bidan Kampung
Gaji/honor	Ada	Lebih besar	Bidan Kampung
Penyakit malaria	Ada	Meningkat	Bidan Kampung
Penyakit diare	Ada	Meningkat	Bidan Kampung
Penyakit TBC	Tidak ada	Sama	Bidan Kampung
Jumlah ahli pengobatan tradisional	2 orang	Berkurang	Kepala Adat
Jumlah pengobatan tradisional	Kurang dari sekali sebulan	Berkurang	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Dalam 20 tahun terakhir ini, Kampung Cempedas mengalami 2 kali bencana besar yaitu pada tahun 1982 dan 1997. Tahun 1982 terjadi bencana kelaparan, kekeringan, banjir dan hama. Bencana kekeringan telah mengakibatkan banyak orang terkena muntaber, ini dikarenakan pada tahun 1982 masyarakat hanya mengandalkan sumber mata air dari Sungai Lawa dan tidak memiliki sumber mata air alternatif. Debit air Sungai Lawa yang minim dipergunakan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Bersamaan dengan bencana kekeringan terjadi pula serangan hama walang sangit dan burung pipit. Bencana kekeringan yang mengakibatkan panen gagal, berlanjut menjadi bencana kelaparan yang mengakibatkan banyak orang sakit karena daya tahan tubuh menurun karena kurang makan.

Tahun 1997 terjadi bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kebun rotan hampir habis dan panen gagal.

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan tahun 1997	Kebun rotan terbakar habis. Panen gagal
2	Banjir tahun 1998	Tanaman habis, panen gagal

9. Resume Kecenderungan Perubahan

Hampir tidak ada perubahan dari sisi kelembagaan. Lembaga BPK yang dirancang untuk memperkuat musyawarah (berinuaq) di kampung, ternyata tidak berfungsi karena tidak ada insentif bagi pengurus.

Hubungan dengan pemerintah kabupaten secara umum membaik, hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi, akses dan pelayanan yang dirasakan membaik oleh masyarakat. Kepala Adat menjelaskan bahwa konflik yang ada di kampung ini hanya konflik keluarga dengan tingkat keserangan yang sama.

Sekitar 60% dari responden rumah tangga mengakui tidak memiliki sumber pendapatan baru. Sedangkan sisanya memiliki pendapatan baru sebagai pegawai tetap (PTT) di pemerintah kabupaten, pegawai perusahaan kayu, menjual burung dan menjual sayur. Ada satu rumah tangga yang mengaku mendapatkan pendapatan baru dari hasil menjual lahannya kepada perusahaan batubara.

Luasan hutan diakui menurun, sementara luasan kebun meningkat kecuali kebun karet dan simpukng yang jumlahnya tetap.

Kondisi fasilitas pendidikan menurun baik dilihat dari kondisi bangunan sekolah maupun peralatan dan jumlah tenaga pengajarnya. Walaupun demikian, gaji guru diakui meningkat. Tidak ada fasilitas kesehatan di kampung, keadaan ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, kualitas air sungai diakui menurun karena adanya pencemaran dari perusahaan batu bara. Jumlah pelayanan kesehatan tradisional menurun. Jumlah penyakit malaria dan diare meningkat.

10. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Cempedas. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- tidak dapat mewujudkan peluang pasar dan peluang usaha;
- kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
- kurangnya pendidikan/pelatihan bagi masyarakat.

Menurut masyarakat biasa:

- lemahnya kualitas SDM;
- kurangnya prasarana pertanian;
- peluang usaha kurang.

Menurut tokoh masyarakat:

- lemahnya semangat usaha;
- rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- lemahnya profesionalisme kerja, tidak ada fokus usaha tertentu.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Cempedas, survei dilakukan dengan melibatkan:

- rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- bidan kampung;
- warung.

Kampung Cempedas

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Delang Kerohong

Jumlah rumah tangga: 34	Jumlah jiwa: 141
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 43	Jumlah KK: 51
Jumlah rumah tangga miskin: 6	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Kayan	Jumlah SD: -
Nama Kepala Adat: Hajang Ibrahim	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Kaspul Anwar	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 2 jam (ces 10 PK)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 29 jam (long boat + kapal)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Long Pahangai, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 115 ^o 28' BT, 0 ^o 47' LU	
Tanggal survei: 12 - 14 November 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, kampung Delang Kerohong resmi berdiri pada tahun 1931. Pendiri Kampung Delang Kerohong berasal dari Long Buleng yang kemudian bermigrasi ke Long Pakaq. Pada tahun 1931 mereka pecah menjadi Long Pakaq B dan Long Pakaq A (Long Pakaq Asing). Long Pakaq B sekarang lebih dikenal dengan Long Kuling yang mayoritas beragama katolik sedangkan warga Long Pakaq A yang 95% beragama Islam pindah ke seberang kampung yang sekarang dikenal dengan Delang Kerohong. Sekarang Long Kuling dan Delang Kerohong berseberangan kampung dan hanya dibatasi oleh Sungai Mahakam.

Menurut Kepala Adat, daerah tempat kampung ini dahulu adalah hamparan terung, karenanya kampung ini dinamai Delang Kerohong. (Delang=dataran; kerohong=terung).

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung ini adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Posyandu;
- Kelompok Tani.

Lembaga adat di kampung ini baru berdiri pada tahun 2002, sedangkan Badan Perwakilan Kampung berdiri pada Oktober 2001.

Menurut Ketua BPK, sejak dibentuk pada tahun 2001 hingga sekarang, BPK Delang Kerohong belum bekerja, sehingga dapat dikatakan bahwa BPK belum pernah melakukan konsultasi dengan masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa alasan ketidakaktifan mereka adalah karena tidak adanya honor dari pemerintah.

2.1 Resume trend perubahan:

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Sama saja	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah kampung Delang Kerohong pernah beberapa kali mengajukan permohonan kepada pemerintah. Daftar permohonan dan tanggapan pemerintah adalah sebagai berikut:

Permohonan Bantuan	Tanggapan Pemerintah
Pembangunan Mesjid (2002)	Belum ada jawaban
Reboisasi dan Kebun buah	Belum ada jawaban
Peternakan (2000)	Belum ada jawaban
Pembangunan rumah layak huni	Belum ada jawaban
SSB (radio)	Belum ada jawaban

Berikut adalah hasil wawancara dengan 3 pihak tentang dukungan yang pernah diperoleh oleh kampung ini:

No	Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut Ketua BPK
1	Nihil	Bantuan pembangunan rumah oleh warga kampung	Bantuan guru mengaji dari relawan yang juga tidak bertahan lama
2	-	Bantuan sembako dari keluarga	-

Kampung Delang Kerohong

Menurut petinggi, tidak pernah ada bantuan pemerintah kepada kampung ini dan intensitasnya dalam 5 tahun terakhir adalah sama saja.

Responden rumah tangga dalam eksplorasi melalui diskusi kelompok mengungkapkan bahwa pernah ada bantuan penerangan (genset) kepada kampung ini, namun karena biaya operasionalnya terlalu tinggi maka genset tersebut terbengkalai hingga rusak.

Bantuan beras miskin juga ada namun mereka harus membelinya ke kampung lain.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut petinggi, frekuensi kunjungan petugas pelayanan dari pemerintah ke Delang Kerohong adalah lebih dari sekali dalam sebulan. Pihak/instansi yang pernah datang adalah:

- Camat;
- Ketua dan anggota DPR;
- Dinas Kesehatan.

Petugas kesehatan dari Puskesmas Long Pahangai adalah petugas pelayanan yang rutin mengunjungi kampung ini setiap bulan.

Menurut Ketua BPK, hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah kabupaten dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Berikut adalah gambaran perubahan secara rinci:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih buruk
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Sama saja

Ketua BPK menjelaskan bahwa keterjangkauan dari sisi jarak menjadi lebih baik karena sekarang transportasi menuju kabupaten relatif lebih mudah (ada *speedboat* dan *longboat* reguler), namun tingkat kepedulian dirasakan lebih buruk karena sekarang belum ada bukti nyata kepedulian itu dalam pembangunan.

3.3 Sumber dan alat informasi

Pada umumnya masyarakat mengetahui informasi tentang program-program pemerintah dari petinggi. Petinggi memperoleh informasi melalui pertemuan-pertemuan di kecamatan. Informasi juga didapat dari orang lain yang berkunjung. Satu-satunya sarana untuk mengakses informasi yang terjangkau adalah radio transistor. Ada masyarakat yang mempunyai pesawat televisi namun hanya digunakan untuk VCD karena tidak mempunyai antena parabola. Siaran televisi hanya bisa diakses melalui antena parabola. Sarana telepon dan radio terdekat adalah di kampung Long Lunuk yang berjarak 1,5 jam perjalanan dengan perahu ces 10 pk.

Kampung Delang Kerohong

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih buruk	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Sama	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Tidak ada data yang valid tentang perpindahan penduduk dari dan ke Kampung Delang Kerohong dalam 5 tahun terakhir.

Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa ada cukup banyak masyarakat dari luar daerah terutama dari Lombok dan Kalimantan Tengah yang menikah dengan perempuan warga kampung ini dan menetap. Mereka dulunya adalah pencari gaharu di daerah sekitar Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, tidak ada lagi upacara adat tertentu yang masih dilaksanakan di kampung ini. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi yang mempelajari secara khusus dan ketidakhadiran upacara adat membuat penguasaan generasi muda juga tidak ada tentang adat. Beliau menjelaskan bahwa secara umum yang masih mempunyai wawasan tentang adat yang dulunya pernah dilaksanakan adalah masyarakat yang berusia 30 tahun ke atas.

Di lain pihak, Kepala Adat juga menjelaskan bahwa jumlah ahli pengobatan tradisional dan jumlah upacara pengobatan dalam 5 tahun terakhir malah bertambah, mereka adalah warga setempat dan juga beberapa pendatang dari luar kampung.

Upacara pengobatan biasanya dilakukan lebih dari sekali dalam seminggu, dan tidak ditentukan biaya untuk pengobatan ini, tergantung pada kerelaan pasien.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini berfluktuasi, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang sedikit. Kadang-kadang penduduk yang berusia produktif lebih banyak berada di hutan untuk bekerja. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 12 bulan terakhir adalah:

- menebas sekitar kampung;
- membantu menanam padi bagi masyarakat yang tidak mampu;
- membantu mengangkut bahan bangunan bagi yang akan membangun rumah;
- membantu membangun rumah bagi masyarakat tidak mampu.

Menurut responden keluarga kurang mampu, tingkat solidaritas masyarakat di kampung ini cukup tinggi. Bila dirinya mengalami kesulitan maka serta-merta

Kampung Delang Kerohong

masyarakat yang lain akan membantu sebisanya. Selama ini dia merasa sangat terbantu dengan bantuan sembako setiap bulan dari kerabat, bahkan rumah yang dia huni saat inipun dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dari bahan bangunan yang juga sumbangan dari masyarakat kampung.

Menurut Kepala Adat, dulu, bila terjadi bencana kelaparan maka petinggi akan menghadap ke kepala padang yang ada di kecamatan. Kepala padang akan melihat apakah masyarakat cukup pangan atau tidak, bila tidak cukup maka akan diberikan bantuan. Tidak ada informasi apakah pola ini masih berlanjut atau tidak.

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, hampir tidak pernah terjadi konflik serius pada masyarakat Delang Kerohong. Konflik-konflik yang muncul biasanya adalah konflik dalam rumah tangga akibat cemburu dan bisa diselesaikan dengan cepat. Konflik sumber daya alam juga tidak pernah terjadi karena di wilayah Delang Kerohong tidak ada gua sarang burung. Responden keluarga kurang mampu juga menyampaikan bahwa tidak pernah terjadi konflik di kampung ini.

Menurut Kepala Adat penyelesaian konflik di dalam kampung dan konflik dengan pihak luar kampung dilakukan dengan berlandaskan pada hukum adat. Bila tidak terselesaikan dengan hukum adat maka atas dasar kesepakatan masyarakat akan diselesaikan dengan hukum negara. Kepala Adat menegaskan bahwa seluruh konflik di Kampung Delang Kerohong dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden keluarga kurang mampu, masalah utama yang mereka hadapi adalah:

- tidak punya cukup uang untuk membiayai keluarga;
- ladang tidak berhasil;
- sakit-sakitan;
- ternak terkena wabah.

Responden keluarga kurang mampu juga menjelaskan bahwa situasi mereka dalam 5 tahun ini berfluktuasi, namun belakangan sudah semakin baik. Baru-baru ini warga bergotong-royong membangun rumah sederhana untuk ditempatinya. Pendidikan dan kesehatan adalah hal yang tidak terjangkau. Masalah pembayaran biaya sekolah selalu menjadi masalah, sedangkan untuk masalah kesehatan biasanya mendapat bantuan dari tetangga dan keluarga. Bantuan yang diperlukan dari pihak luar adalah bantuan pangan dan kepedulian.

Kader posyandu menjelaskan bahwa bila seseorang tidak mampu membayar biaya pengobatan maka yang akan dilakukan adalah meminta bantuan keluarga dan memanfaatkan kartu JPS (Jaring Pengaman Sosial) untuk pengobatan gratis di puskesmas.

Dalam pengambilan keputusan di kampung, responden keluarga kurang mampu mengaku sering sekali dilibatkan.

Kampung Delang Kerohong

4.6 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di Kampung Delang Kerohong adalah dengan menonton VCD. Ada 3 rumah yang memiliki VCD. Alternatif lain adalah dengan pergi ke Long Kuling apabila ada keramaian.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	Tidak ada upacara adat	Sama	Kepala adat
Bahan-bahan upacara adat	Tidak ada upacara adat	Sama	Kepala adat
Gotong-royong dalam upacara adat	Tidak ada upacara adat	Sama	Kepala adat
Tujuan upacara adat	Tidak ada upacara adat	Sama	Kepala adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama	Kepala adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama	Kepala adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala adat
Konflik sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Kepala adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Berfluktuasi	Kepala adat
Jumlah konflik	Tidak ada	Sama	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Meningkat	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna hutan dan lahan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Kampung Delang Kerohong adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun buah;
- kebun kopi;
- hutan.

Dari jenis tata guna lahan tersebut, yang terluas adalah hutan dengan komposisi setengah dari luasan kampung.

Kebun sayur yang ada di kampung ini bersifat tidak tetap, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebun rotan cenderung berkurang, karena sejak rotan tidak mempunyai harga maka tidak ada lagi yang menanam.

Menurut Ketua BPK, kebun buah dan kebun kopi kemungkinan akan bertambah karena koperasi yang mereka bentuk untuk proyek Dana Reboisasi berencana untuk menanam kopi dan buah.

Kampung Delang Kerohong

Buah langsung dari Delang Kerohong dikenal bagus dan manis. Sayangnya belum ada tata niaga untuk penjualan buah dari kampung ini. Pada musim buah, hasil dari kebun hanya untuk konsumsi sendiri.

Jenis hutan dan lahan yang ada di kampung Delang Kerohong adalah:

- hutan perawan (*tu'an tung*);
- hutan sekunder tua (*tu'an tung*);
- hutan sekunder muda (*ivut*);
- belukar tua (*ivut*);
- belukar (*ivut*);
- hutan rawa (*deneap*);
- hutan kerangas (*tana atup*).

Hutan perawan luasannya berkurang karena kayu-kayunya diambil untuk bahan bangunan dan diambil oleh perusahaan kayu PT. Surapati yang pernah beroperasi di kawasan hutan Delang Kerohong. Luasan hutan rawa tidak berubah karena tidak pernah dimanfaatkan.

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan adalah sebagai berikut:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	- Ladang - Bahan bangunan - Diambil perusahaan - Pengurangan batas wilayah oleh Long Kuling	- Kayu-kayu yang bernilai ekonomis berkurang - Hutan berkurang, tidak ada kompensasi dari perusahaan
Lebih mudah diakses	Transportasi lebih mudah (ada ces)	Kayu makin jauh dijangkau
Sering terjadi banjir	Penebangan di hulu sungai	Sungai keruh dan kotor, banjir tidak tentu

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut petinggi, belum ada luasan atau jenis hutan tertentu yang telah dijadikan hutan yang dilindungi. Belum ada peraturan kampung atau aturan adat yang secara khusus mengatur tentang hal ini. Namun demikian, sudah ada perencanaan dari lembaga-lembaga yang ada di kampung untuk membentuk atau melindungi kawasan tertentu supaya tidak terjadi krisis kayu. Untuk tahap awal, direncanakan seluas 5 hektar. Pihak manapun yang akan memasuki kawasan itu harus ijin dengan pemimpin kampung, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat.

Sebagai gambaran umum, menurut informasi masyarakat di Long Pahangai, bila ada pihak dari kampung lain yang memanfaatkan kayu dari kampung tertentu maka *fee* yang ditetapkan adalah:

Jenis Kayu	Harga per m ³	<i>Fee</i> /m ³
Ulin	Rp. 1.200.000	Rp. 150.000
Kayu lain selain ulin	Rp. 750.000	Rp. 25.000

Kampung Delang Kerohong

Perusahaan yang pernah bekerja pada wilayah kampung Delang Kerohong adalah PT. Surapati. Pada waktu itu masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut operasional dan wilayah kerja perusahaan tersebut. Hingga kini, masyarakat kampung ini tidak pernah menerima *fee*/kompensasi dari perusahaan tersebut. Menurut Ketua BPK, pada tahun 2001 masyarakat pernah melakukan aksi demonstrasi ke PT. Surapati karena merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut. Pada waktu itu, utusan masyarakat menuntut hingga ke kantor perusahaan di Samarinda, namun usaha ini tidak mendapatkan hasil yang berarti. Perusahaan hanya memberi Rp. 25.000.000,- untuk kompensasi kepada masyarakat. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kerugian masyarakat atas kehilangan potensi kayu dan biaya yang dikeluarkan selama melakukan aksi.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut petinggi, seluruh rumah tangga di Kampung Delang Kerohong memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Hal ini tergambar dari kenyataan bahwa seluruh rumah tangga memiliki lahan sendiri. Praktek jual-beli lahan baik resmi maupun tak resmi belum pernah terjadi. Namun di pihak lain, petinggi juga menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini keterjangkauan masyarakat terhadap lahan semakin menurun.

5.4 Perladangan

Di Kampung Delang Kerohong, hampir seluruh masyarakat menanam padi di lahan kering (ladang), hanya sekitar 10% dari responden yang juga menanam padi di sawah. Pada umumnya mereka berladang pada lahan bekas ladang yang berusia kurang dari 10 tahun, sisanya berladang pada lahan yang lebih tua.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah yang berladang semakin meningkat. Hampir semua responden rumah tangga menanam padi di lahan sendiri, sedikit sisanya menanam di lahan bebas dan lahan pinjaman.

Pada tahun 2002, rata-rata jumlah benih yang ditanam adalah 2 - 4 kaleng. Terjadi peningkatan pada tahun 2003 dimana jumlah benih yang ditanam berkisar antara 2 - 15 kaleng.

Tidak ada responden yang menyatakan bahwa hasil panen tahun sebelumnya cukup hingga panen berikutnya. Rata-rata hasil panen hanya cukup untuk 6 bulan saja, selebihnya mereka bergantung pada beras yang dibeli.

Jarak tempuh ladang dari kampung adalah antara 10 - 60 menit, dimana kebanyakan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Jarak ini ditempuh dengan berjalan kaki atau memakai perahu ces.

5.5 Pendapatan uang

Mayoritas masyarakat mengandalkan ladang sebagai sumber untuk kehidupan sehari-hari. Usaha lain yang banyak dilakukan kaum laki-laki di kampung ini adalah '*ngerebo*' yaitu mencari sarang lumut atau sisa-sisa sarang burung walet di gua yang tidak dijaga pemilikinya. Penghasilan dari *ngerebo* ini tidak menentu, tergantung peruntungan. Beberapa pemuda bekerja sebagai penjaga gua sarang burung walet pada warga Long Apari. Sebagian kecil mendapatkan gaji sebagai aparat pemerintahan kampung. Kegiatan lain yang cukup sering dilakukan adalah '*ngelele*' yaitu menjual sayur hasil

Kampung Delang Kerohong

kebun ke kampung lain di hulu. Umumnya mereka berjualan ke Long Pananeh dan kampung-kampung lain di dekat Tiong Ohang kecamatan Long Apari. Pekerjaan 'ngelele' ini banyak dilakukan kaum perempuan.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Kampung Delang Kerohong tidak mempunyai pasar. Bahkan warung kelontong yang menjual sembako atau keperluan rumah tangga lainnya pun tidak ada. Untuk berbelanja keperluan sehari-hari, masyarakat Delang Kerohong harus menyeberang ke Kampung Long Kuling dengan mendayung atau menggunakan perahu ces. Untuk berbelanja dalam jumlah yang agak banyak mereka harus ke Long Lunuk, Datah Suling atau Long Pahangai.

Jalur transportasi utama masyarakat adalah jalur sungai. Jalan darat hanyalah jalan yang melintasi kampung dan jalan setapak menuju ladang yang berada di dekat kampung. Untuk jarak yang lebih jauh masyarakat menggunakan perahu ces.

Menurut petinggi, kondisi jalan dalam 5 tahun terakhir semakin berkurang. Jalan yang ada adalah jalan tanah yang becek dan tergenang bila turun hujan. Kondisi sungai sebagai jalur transportasi dirasakan sedang. Dalam 5 tahun terakhir kondisi sungai semakin berkurang, kemarau dan banjir tidak lagi bisa diprediksi. Bila turun hujan, air sungai menjadi keruh, namun masyarakat tidak mempunyai alternatif lain. Permasalahan lain yang baru muncul adalah gelombang yang terjadi bila *speedboat* melintas dengan cepat. Gelombang akibat *speedboat* ini menyebabkan erosi serta merusak perahu dan jamban masyarakat.

Transportasi reguler yang melintasi kampung ini semakin beragam. Untuk jarak dekat, masyarakat menggunakan perahu ces, namun untuk jarak yang lebih jauh masyarakat menggunakan *long boat* atau *speedboat*. *Speedboat* tujuan Long Bagun tarifnya adalah Rp. 250.000/penumpang, sedangkan *long boat* Rp. 150.000/penumpang. Di Delang Kerohong, jumlah rumah tangga yang memiliki mesin ces sangat terbatas.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik (dari genset);
- bensin;
- solar.

Kayu bakar dan minyak tanah sudah lama dipakai sebagai sumber energi. Kayu bakar masih mudah dicari dan tidak perlu dibeli, namun minyak tanah, bensin dan solar semakin sulit terjangkau. Kesulitan tersebut muncul karena daya beli masyarakat yang memang rendah dan pedagang yang jarang datang. Untuk membeli mereka harus ke kampung lain. Mesin *genset* berbahan bakar solar yang digunakan sebagai sumber penerangan hanya sesekali digunakan, biasanya pada saat ada tamu atau ada keramaian dan kegiatan. Bila dihidupkan mulai pukul 18.00 hingga pukul 23.00 maka diperlukan 4 liter solar.

Kampung Delang Kerohong

5.8 Kondisi rumah penduduk

Pada umumnya rumah penduduk terbuat dari kayu yang bukan ulin atau bengkirai. Hanya ada 1 rumah yang terbuat dari beton. Sebagian besar atap rumah terbuat dari sirap/keping dan sebagian kecil menggunakan seng. Satu rumah biasanya dihuni oleh 3 - 5 rumah tangga. Karena rumah yang kecil dan dihuni banyak KK maka setiap KK bergiliran pulang dari ladang. Tidak semua rumah memiliki aliran listrik yang bersumber dari *genset*. Seluruh rumah tangga memanfaatkan WC sungai (jamban). Di Delang Kerohong hanya ada 3 WC sungai dengan kondisi yang tidak begitu bagus.

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Terjangkau seluruh masyarakat	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Kurang baik	Menurun	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Menurun	Petinggi
Luasan ladang	Berkurang	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Tidak ada	Sama	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Tidak ada	Sama	Ketua BPK
Luasan kebun buah	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	Sama	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan peternakan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan hutan perawan (tu'an tung)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan hutan sekunder tua	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan hutan sekunder muda	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan belukar tua	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan belukar	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan hutan rawa	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan hutan kerangas	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan hutan lindung	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Akses kepada hutan	Mudah	Meningkat	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan dan hewan	-	Sama	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Ada beberapa rumah yang bagus	Lebih baik	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar sepertiga dari responden rumah tangga yang diwawancarai mengaku bahwa terdapat anak putus sekolah dalam keluarga mereka. Sebagian besar anak-anak putus sekolah di kampung Delang Kerohong putus sekolah pada tingkat SD. Putus sekolah

Kampung Delang Kerohong

biasanya terjadi karena harus membantu orangtua di ladang dan permasalahan biaya. Namun ada beberapa kasus dimana putus sekolah terjadi karena secara tidak langsung diakibatkan oleh kondisi geografis. Pada musim hujan, biasanya Sungai Mahakam meluap dan banjir serta berarus deras. Kondisi ini membuat anak-anak tidak berani berangkat ke sekolah yang berada di seberang kampung. Hal ini bisa berlangsung antara 2 - 6 hari. Ketika banjir surut, banyak anak yang merasa malu dan takut ke sekolah, karena sudah tertinggal pelajaran dan akan ditegur oleh guru. Frekuensi absen yang tinggi menyebabkan banyak dari anak-anak ini tidak naik kelas. Menurut beberapa orang tua murid, ada anak yang berusia 15 tahun masih di kelas 4 SD, dan ada murid kelas 5 SD yang belum lancar membaca.

Petinggi mengaku tidak mengetahui secara persis tingkat pendidikan guru, namun beliau menyatakan bahwa tingkat keaktifan guru dalam mengajar berkurang. Persentase kelulusan siswa juga menurun dan tingkat orang yang dapat membaca dan menulis di kampung ini sama saja dengan sebelumnya.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Delang Kerohong tidak terdapat institusi pendidikan. Sekolah Dasar terdekat adalah SDN Long Kuling yang berada di seberang kampung. Bila anak-anak dari kampung ini ingin bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi maka mereka harus ke Long Pahangai tempat SMP dan SMA tersedia. Di Long Pahangai mereka harus tinggal dengan keluarga atau kerabat karena jarak tempuh yang cukup jauh yaitu 2,5 - 3 jam perjalanan dengan perahu ces.

Menurut petinggi, keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan dalam 5 tahun terakhir sama saja. Hal ini tergambar dari belum adanya sekolah di kampung ini.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	Tidak ada	Sama saja	Petinggi
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Petinggi
Alat-alat dan buku-buku	-	Sama saja	Petinggi
Jumlah staf	-	Sama saja	Petinggi
Gaji/honor guru	-	Tidak tahu	Petinggi
Tingkat pendidikan guru	-	Tidak tahu	Petinggi
Tingkat keaktifan guru	-	Berkurang	Petinggi
Persentase kelulusan	-	Menurun	Petinggi
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Sama saja	Petinggi

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut Kader Posyandu, jenis penyakit yang ada di kampung ini adalah:

Kampung Delang Kerohong

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Demam, diare, sakit kepala, batuk
Orang dewasa	Sakit kepala, tekanan darah tinggi, rematik, maag
Perempuan	-
Orang lanjut usia	-

Kader Posyandu menyatakan bahwa kelompok yang paling rentan terhadap penyakit malaria adalah anak-anak, namun tingkat keseringannya sudah menurun. Anak-anak juga rentan terhadap penyakit diare dan tingkat keseringannya adalah sama saja.

Dalam 12 terakhir di kampung ini telah lahir 3 bayi dengan rata-rata berat 2,3 kg - 3,5 kg. Umur ibu pada kehamilan pertama rata-rata 18 tahun. Dalam 12 bulan terakhir tidak ada warga yang meninggal, baik bayi, ibu melahirkan maupun orang dewasa. Di kampung ini rata-rata umur orang yang meninggal karena penyakit adalah 60 tahun dengan asumsi penyebabnya adalah usia lanjut. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di kampung ini adalah sesak napas dan batuk darah.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut Kader Posyandu, seluruh masyarakat Kampung Delang Kerohong memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih. Jumlah dan mutu sumber air bersih tersebut berfluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan mutu terjadi terutama pada musim hujan yang mengakibatkan air sungai menjadi sangat keruh akibat longsor di pinggir-pinggir sungai. Tidak ada sumber air bersih lain bagi masyarakat, sehingga apapun kondisinya baik kemarau maupun banjir masyarakat tetap mengkonsumsinya.

Pada umumnya masyarakat menyimpan air di dalam tong plastik (yang berwarna merah). Kampung ini tidak mempunyai fasilitas penampungan air bersih untuk kepentingan umum.

7.3 Kebersihan Kampung

Keadaan kampung ini cukup bersih. Masyarakat umumnya membuang sampah di sungai atau di belakang rumah. Walaupun belum banyak namun pada musim buah, sampah di sekeliling rumah meningkat akibat kulit buah yang dibuang ke halaman. Jalan kampung adalah jalan tanah yang tergenang bila hujan turun.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Dukun beranak adalah satu-satunya pendukung kesehatan yang ada di Delang Kerohong. Dukun beranak yang membantu masyarakat dalam persalinan normal ini berjumlah 3 orang dan pernah dilatih oleh pemerintah. Sarana kesehatan terdekat adalah Puskesmas Pembantu yang ada di Kampung Long Kuling. Sayangnya saat ini tidak ada petugas kesehatan (mantri) yang bertugas di sana sehingga juga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk penyakit ringan masyarakat memilih untuk berobat pada pensiunan mantri kesehatan di rumahnya di Long Kuling. Banyak masyarakat yang terpaksa harus ke Long Lunuk atau ke Long Pahangai untuk berobat. Waktu tempuh ke Long Lunuk dengan ces 10 PK adalah 1,5 jam dan ke Long Pahangai 2,5 jam yang menghabiskan bensin 16 liter untuk pulang pergi. Di puskesmas atau puskesmas pembantu alat kontrasepsi tetap harus di beli.

Kampung Delang Kerohong

Pengobatan tradisional cukup diminati di kampung ini. Dari keterangan Kepala Adat, paling sedikit ada 2 orang ahli pengobatan tradisional di sini. Upacara pengobatan dilakukan lebih dari sekali setiap minggu. Jumlah ahli pengobatan dan jumlah upacara pengobatan mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Tidak ditentukan biaya tertentu untuk pengobatan tradisional ini, karena hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam proses pengobatan karena dukun biasanya hanya memberikan 'air tawar' saja.

7.5 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai	Berfluktuasi	Kader Posyandu
Mutu air bersih	Air sungai	Menurun	Kader Posyandu
Mutu air sungai		Menurun	Kader Posyandu
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Kader Posyandu
Kondisi fasilitas kesehatan		Sama	Kader Posyandu
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Kader Posyandu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	Sama	Kader Posyandu
Gaji/honor	Tidak ada	Sama	Kader Posyandu
Penyakit Malaria	Ada	Menurun	Kader Posyandu
Penyakit Diare	Ada	Sama	Kader Posyandu
Penyakit TBC	Ada	Sama	Kader Posyandu
Jumlah ahli pengobatan tradisional	2 orang	Meningkat	Kader Posyandu
Upacara pengobatan tradisional	Lebih dari sekali per minggu	Meningkat	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir adalah:

No	Bencana	Dampak
1	Kelaparan	- Masyarakat terpaksa mengkonsumsi singkong dan sagu - Wabah penyakit terutama sakit perut
2	Kekeringan	- Ladang menjadi kering sehingga hasil panen kurang - Masyarakat kesulitan mendapatkan beras
3	Banjir	- (banjir sering terjadi di Delang Kerohong sehingga sudah dianggap biasa dan tidak berbahaya; Delang Kerohong berada di dataran rendah)
4	Hama	- Hama gurem dan walang sangit menyebabkan hasil panen kurang
5	Perubahan Pemerintahan	- Membingungkan, kadang bersifat terbuka, kadang tertutup - Pengurus yang ada sekarang masih terlalu muda

Kampung Delang Kerohong

Kepala Adat menjelaskan bahwa banjir sekarang terjadi begitu sering sehingga sudah dianggap hal yang biasa. Namun beberapa responden rumah tangga menyampaikan bahwa ada hubungan yang erat antara banjir dan mutu pendidikan anak-anak. Bila banjir tiba, anak-anak Delang Kerohong tidak bisa berangkat sekolah ke Long Kuling yang berada di seberang kampung karena sangat berbahaya. Hal ini bisa terjadi sehari-hari sehingga anak-anak tertinggal dalam pelajaran dan akhirnya banyak yang tidak naik kelas.

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Delang Kerohong. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- hasil ladang yang tidak memuaskan, karena diserang hama dan binatang pengganggu;
- tidak ada guru agama;
- tidak ada sekolah;
- tidak ada usaha lain selain bertani, jadi tidak bisa membeli alat (obat) KB;
- harga barang mahal.

Menurut masyarakat biasa:

- penghasilan yang rendah karena tidak ada usaha/pekerjaan tetap, pemasaran hasil bumi tidak ada;
- SDM rendah: sekolah minim, tidak bisa kelola ladang dengan baik;
- kesehatan, tenaga medis kurang, sarana kesehatan jauh;
- penerangan kampung tidak ada;
- potensi alam minim, dihabisi perusahaan.

Menurut tokoh masyarakat:

- pendidikan rendah (sarana tak ada);
- pemasaran/distribusi hasil hutan/kebun selain bertani, tidak ada penyuluhan/penelitian untuk pertanian untuk masyarakat;
- kesehatan: jauh bila pergi berobat, sarana kesehatan tidak ada;
- peternakan (tidak ada bantuan sekarang) bantuan yang dulu kena wabah;
- infrastruktur.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Tidak ada perubahan pada kualitas dan frekuensi musyawarah. Walaupun saat ini sudah ada BPK yang berperan untuk memperkuat proses-proses musyawarah, namun BPK belum bekerja. Jarak ke pemerintah kabupaten, pelayanan dan keterbukaan informasi pemerintah dirasakan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Namun kepedulian pemkab dirasakan menurun karena program-program pembangunan tidak dapat dirasakan dampaknya di lapangan.

Kampung Delang Kerohong

Hampir tidak ada konflik di kampung ini, kecuali konflik keluarga yang jarang terjadi. Jarangnya konflik terjadi karena di kampung ini hampir tidak ada sumber daya alam yang bernilai uang. Sementara keterjangkauan terhadap lahan masih bukan permasalahan.

Hampir tidak ada perubahan luasan hutan dalam 5 tahun terakhir. Kebun kopi dan kebun buah meningkat luasannya, sementara kebun rotan menurun.

Tidak ada fasilitas sekolah, keadaan ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Juga tidak ada perubahan pada fasilitas kesehatan. Sampai dengan saat ini tidak ada fasilitas kesehatan medis di kampung, yang ada hanyalah tenaga tradisional seperti dukun beranak. Walaupun demikian, pemerintah sudah memberikan pelatihan pada tenaga dukun beranak.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Delang Kerohong, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 10 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi (merangkap untuk responden warung);
- ketua BPK;
- petinggi (menggantikan unsur pendidikan/kepala sekolah);
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- kader posyandu (menggantikan unsur kesehatan).

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 2 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Empakuq

Jumlah rumah tangga: 51	Jumlah jiwa: 209
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 58	Jumlah KK: 65
Jumlah rumah tangga miskin: -	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Tunjung	Jumlah SD: 1
Responden Pengganti Kepala Adat: Alipudin B.	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Suniq	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: 30 menit (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: 40 menit (sepeda motor)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Melak, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: 1
Posisi geografis: 115 ⁰ 52' BT, 0 ⁰ 17' LS	
Tanggal survei: 22 - 24 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung¹

Menurut mantan petinggi, Kampung Empakuq sudah ada sejak sekitar 33 tahun yang lalu. Kampung Empakuq terletak di sisi kiri mudik Sungai Mahakam. Kampung Empakuq merupakan kampung yang baru. Hingga saat ini bila dihitung sejak berdirinya kampung ini sudah berganti 7 petinggi. Kampung ini merupakan pindahan dari Lamin Empakuq yang terletak antara Empas dan Bunyut, yang sebelumnya sudah tinggal di Lamin Empakuq sekitar 75 tahun. Masyarakat yang sekarang tinggal di Empakuq berasal dari Lamin Empakuq yang terletak di bagian darat kampung, sekitar 5 kilometer dari Empakuq yang sekarang. Lokasi Lamin Empakuq yang lama sekarang sudah menjadi hutan kembali.

¹ Informasi dari Mantan Petinggi.

2. Kelembagaan Kampung²

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- Kelompok Tani "Karya Cinta Maju";
- Karang Taruna;
- PKK.

BPK yang dibentuk disahkan dengan Surat Keputusan No.140-49/144/01/1/2003 di awal bulan Januari 2003. BPK telah melakukan konsultasi dengan masyarakat sekali dalam setahun.

Beberapa hal yang dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik diskusi	Keputusan
Masalah tapal batas dengan Kampung Empas (adanya tanda batu bura)	Urusan sudah disampaikan ke pihak kecamatan dan sedang menunggu hasilnya
Lahan persiapan untuk pembangunan kampung	Lahan sudah ditentukan
Usulan pembangunan lembaga adat	- Dalam perencanaan usulan (panitia sudah dibentuk) - Mengajukan usulan reboisasi ke Dinas Kehutanan
Pendapatan masyarakat masih minim	Merubah sistim berladang tradisional menjadi pola kebun
Masalah jalan dan listrik	Diperhatikan dan disetujui oleh pihak pemerintah

Perubahan kelembagaan musyawarah dalam 5 tahun terakhir dari sisi kualitas semakin baik. Keputusan musyawarah semakin berdampak dan dipatuhi, dan intensitas musyawarah semakin sering.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Semakin baik	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Semakin berdampak dan dipatuhi	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin sering	Ketua BPK

² Informasi dari Petinggi, Ketua BPK.

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten¹⁰

3.1 Dukungan

Menurut Petinggi, pemerintah kampung pernah mengajukan permohonan bantuan pembangunan kampung ke pemerintah, bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Daftar berikut ini menunjukkan usulan bantuan dari pemerintah kampung dan tanggapan dari pemerintah kabupaten:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Usulan PLN	Kalau listrik dipasang di Empakuq, listrik PLN akan rugi
Bangunan rumah yang layak huni	Nanti akan diturunkan tim
Kantor kampung dan balai pertemuan	Masih diprioritaskan pembangunan kantor bupati dan kantor dinas pemerintah
Tenaga medis	Tenaga medis masih kurang

Berdasarkan perbandingan antara usulan bantuan dari pemerintah kampung dengan program pemerintah di kampung, menunjukkan bahwa tidak satu pun usulan bantuan dari pihak pemerintah kampung direalisasikan dalam bentuk program pemerintah. Program pemerintah lebih menitikberatkan pada pengadaan sarana infrastruktur yang lebih bermanfaat secara umum (program P2D dan jembatan) dan peningkatan ekonomi masyarakat (program reboisasi dan bantuan bibit). Pemerintah kampung menyusun program yang kurang bermanfaat secara umum (usulan bantuan rumah layak huni dan kantor kampung), demikian pula tidak mencantumkan usulan peningkatan ekonomi.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, program bantuan P2D berupa pelebaran jalan berdampak baik, namun mereka merasa tidak puas dengan program tersebut dan minta bantuan kepada pemerintah, agar jalan yang telah diperbaiki melalui program P2D tersebut diperbaiki lagi atau ditingkatkan kualitasnya. Sedangkan terhadap program jembatan mereka merasa puas dan menilai program berdampak lebih baik.

Lebih lanjut, bantuan yang pernah diterima oleh kampung ini tergambar melalui keterangan yang diperoleh dari 3 pihak:

No	Menurut Petinggi	Menurut Responden Rumah Tangga Kurang Mampu	Menurut Ketua BPK
1	Pengembangan prasarana Desa (P2D)	P2D	-
2	Pembuatan jembatan antar kampung	Pelebaran jalan	-
3	Dana kesejahteraan/pembinaan kampung	Pembuatan jembatan	-
4	Reboisasi tanaman rotan jepung (dishut)	-	-
5	Bantuan bibit jeruk dari Dinas Pertanian	-	-

¹⁰ Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, Orang Kurang Mampu.

Kampung Empakuq

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, kurang dari sekali dalam sebulan petugas dari kecamatan dan kabupaten datang ke Empakuq. Instansi yang pernah datang adalah:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM);
- Pemerintah Kecamatan;
- Badan Pembangunan Daerah (Bapeda);
- Dinas Kesehatan/ Staf dan Tenaga Medis;
- Dinas Pertanian;
- Dinas Kehutanan.

Dalam 5 tahun terakhir, perubahan hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah mengarah menjadi lebih baik. Namun sisi partisipasi pengambilan keputusan dan transparansi informasi masih tetap seperti kondisi sebelumnya. Transparansi informasi hanya dapat diakses secara terbatas bagi kalangan-kalangan tertentu.

Tabel berikut ini menjelaskan perubahan secara rinci:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Sama saja
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Informasi tentang program-program pembangunan pemerintah diperoleh masyarakat dengan cara mendatangi kantor pemerintah dan menanyakan program-program pemerintah. Informasi diperoleh pula melalui teman-teman di kampung setempat dan teman di kampung tetangga. Di Empakuq terdapat *Handy Talky* (HT) yang masih berfungsi, sehingga melalui kontak HT ini diperoleh informasi program pemerintah dan kampung-kampung sekitar.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemerintah kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemerintah kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan pemerintah kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Sama saja	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya³

4.1 Perpindahan penduduk

Perpindahan penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan meninggalkan kampung
Waktu pendek atau sementara	5 orang	Sekolah ke Samarinda
Waktu panjang atau selamanya	1 kepala Keluarga	Mencari pekerjaan dan berkeluarga

4.2 Upacara adat

Menurut mantan petinggi, upacara adat yang masih dilakukan di Empakuq adalah:

- *Belian gugu tautn*;
- *Belian*, yang merupakan upacara adat penyembuhan orang sakit;
- *Kuangkai*, yang merupakan upacara adat kematian yang dipimpin oleh seorang *wara*. Dalam upacara ini tulang belulang keluarga yang sudah meninggal digali lagi, dibersihkan kemudian dikuburkan lagi;
- *Setangih*, adalah juga upacara adat kematian. Upacara ini biasanya dilaksanakan selama 7 - 9 hari. Upacara ini dilaksanakan pada saat ada anggota keluarga yang meninggal.

Perubahan upacara adat masa lalu dibandingkan upacara adat sekarang, hanya berubah pada sisi jumlah bahan-bahan, biaya bahan upacara adat dulu masih murah, biaya upacara adat sekarang sudah mahal. Sedangkan pada sisi waktu upacara adat, gotong-royong upacara adat, dan tujuan adat, tidak terjadi perubahan atau masih sama. Perkembangan yang perlu dicermati saat ini adalah bahwa tidak ada satu pun dari generasi muda yang mendapatkan pengetahuan asli atau tradisi dari orang tua.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut mantan petinggi, dalam 5 tahun terakhir, tingkat kerjasama antar masyarakat masih tetap sama. Kerjasama atau gotong-royong biasanya diikuti oleh separuh dari total masyarakat. Bentuk gotong-royong yang pernah dilakukan dalam 12 bulan terakhir adalah:

- pembuatan rumah. Ada dua rumah yang dibangun secara gotong-royong;
- menanam padi.

Bila terjadi kekurangan makanan secara merata di kampung, biasanya masyarakat meminta bantuan beras Dolog atau *beras murah* ke pemerintah.

Menurut rumah tangga kurang mampu, dalam 5 tahun terakhir tingkat kerjasama atau solidaritas masyarakat semakin menurun. Sebagai rumah tangga kurang mampu, selama ini mereka hanya mendapatkan bantuan dari tetangga yang tinggal di sekitar kampung, sedangkan orang yang memiliki hubungan keluarga atau saudara tidak pernah membantunya.

³ Informasi dari Mantan Petinggi, Orang Kurang Mampu, Dukun Bayi.

Kampung Empakuq

4.4 Konflik

Konflik yang umum terjadi di Empakuq adalah:

- konflik lahan. Intensitas konflik lahan jarang, sedangkan perubahan konflik masih tetap sama. Konflik lahan lebih sering disebabkan oleh perebutan lahan dengan Kampung Bunyut. Lokasi konflik Empakuq dengan Kampung Bunyut oleh orang kampung disebut dengan lokasi "papan putih" yang terletak antara Empakuq dan Bunyut;
- konflik keluarga, tingkat intensitasnya jarang dan perubahannya berfluktuasi. Penyebab konflik adalah masalah perkelahian anak dan batas rumah antar rumah tangga;
- konflik air/sumber daya alam, tingkat intensitasnya jarang dan perubahannya berfluktuasi. Penyebabnya adalah perebutan hutan dengan orang Bunyut sejak tahun 1973.

Terdapat dua mekanisme penyelesaian konflik ditinjau dari jenis konflik, yaitu:

- penyelesaian konflik di dalam kampung, diselesaikan secara adat dengan menggunakan dasar hukum adat;
- penyelesaian konflik di/dengan pihak luar kampung, diselesaikan melalui pemerintah kecamatan dan mempergunakan dasar hukum negara.

Pada kejadian konflik sumber daya alam antara Empakuq dan kampung lain, pemerintah kecamatan sempat turun tangan, tetapi tidak ada penyelesaian secara tuntas dan akhirnya hutan yang menjadi obyek konflik ditinggalkan saja.

Putusan yang diputuskan lembaga adat tidak mendapatkan kendala, karena semua putusan adat selalu diterima oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Sehingga sampai saat ini, lembaga adat dapat menyelesaikan konflik yang terjadi hanya sampai tingkat kampung. Artinya konflik yang terjadi tidak pernah harus diselesaikan sampai di luar kampung. "Lembaga adat dapat menyelesaikan konflik, tanpa harus mengajukan konflik yang tidak terselesaikan ke kecamatan" Demikian menurut Mantan Petinggi.

Sedangkan menurut rumah tangga kurang mampu, terdapat dua macam konflik di Empakuq yaitu:

- konflik lahan, penyebabnya pengakuan kepemilikan lahan secara sepihak oleh satu rumah tangga terhadap lahan yang telah diakui sebagai milik oleh satu rumah tangga lainnya;
- konflik antar kampung, penyebabnya penentuan tapal batas lahan karet.

Meskipun terdapat konflik, namun demikian dalam 5 tahun terakhir jumlah konflik yang terjadi semakin menurun.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang dihadapinya adalah:

- usaha yang tidak tetap, tidak ada penghasilan tetap;
- tidak adanya keterampilan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang mendukung peningkatan ekonomi rumah tangga.

Kampung Empakuq

Diakui pula bahwa dalam 5 tahun terakhir, keadaan ekonomi sudah semakin baik. Perubahan ini terjadi karena adanya jalan darat yang dibuka dan pelebaran jalan yang menghubungkan Empakuq ke Kecamatan Melak, dan dari Empakuq ke kampung-kampung lainnya, sehingga usaha yang dilakukan menjadi agak lancar.

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, rumah tangga kurang mampu ini tidak mempunyai kemampuan membiayai pendidikan anak dan pelayanan kesehatan, dan selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan. Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan tentang kampung jarang diikutsertakan. Pernyataan rumah tangga kurang mampu ini berbeda dengan pendapat dukun bayi. Menurut Dukun Bayi, jika orang di Empakuq tidak memiliki uang yang cukup bagi keperluan membayar biaya pengobatan maka orang itu akan meminjam uang dari orang lain.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, bantuan yang diperlukan dari pihak luar agar dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya adalah: pelatihan-pelatihan keterampilan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Responden rumah tangga kurang mampu juga menjelaskan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keputusan mengenai konsesi kehutanan.

4.6 Hiburan

Masyarakat Empakuq mendapatkan hiburan dari televisi dan VCD. Terdapat 1 rumah tangga yang memiliki televisi beserta parabola serta VCD, orang-orang berkumpul menonton televisi bersama. Bahkan di siang hari hiburan televisi dan VCD sering ditonton dan tidak ada kendala karena sumber listriknya dari mesin *generator* atau *genset* pemilik televisi.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Kondisi saat ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-		Mantan Petinggi
Bahan-bahan upacara adat	-	Berubah dari sisi jumlah	Mantan Petinggi
Gotong-royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Mantan Petinggi
Tujuan upacara adat	-	Sama dengan tujuan menurut adat	Mantan Petinggi
Konflik lahan	Jarang	Sama saja	Mantan Petinggi
Konflik keluarga	Jarang	Berfluktuasi	Mantan Petinggi
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Mantan Petinggi
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Mantan Petinggi
Konflik air/sumber daya alam	Jarang	Sama saja	Mantan Petinggi
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama saja	Mantan Petinggi
Jumlah konflik	-	Menurun	Orang kurang mampu
Tingkat kerjasama dan solidaritas	-	Menurun	Orang kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam ⁴

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Empakuq, adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- kebun simpukng/lembo/buah;
- kebun pisang;
- hutan.

Jenis tata guna lahan yang terluas di Empakuq adalah hutan sekunder dan kebun rotan dengan luasan lebih dari setengah dibandingkan dengan total luasan kampung.

Perubahan luasan jenis tata guna lahan tersebut sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- luasan ladang berkurang karena banyak dijadikan perkebunan;
- luasan sawah tetap karena transportasi menuju lokasi sawah dan pengangkutan hasil masih cukup sulit;
- luasan kebun sayur bertambah. Peminat yang ingin menanam kebun sayur bertambah karena sudah ada jalan darat tembus ke Melak, sehingga sayur mudah dijual di Melak;
- luasan kebun rotan bertambah, sudah ada upaya budidaya dan akan dibuka sekitar 75 hektar. Saat ini baru terealisasi penanaman seluas sekitar 46 hektar;
- kebun karet dan kebun lembu atau buah serta hutan, berkurang akibat kebakaran lahan. Sebagian hutan telah dijadikan areal kebun dan ladang.

Menurut Mantan Petinggi, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Empakuq, adalah:

- hutan sekunder tua (*humaq*);
- hutan sekunder muda (*batakng petagak*);
- belukar tua (*batekng manyur*);
- belukar (*urat*);
- hutan rawa (*urat payak*);
- hutan kerangas (*jaras*).

Sejak tahun 1999, luasan hutan sekunder tua, hutan sekunder muda dan belukar tua berkurang karena digunakan atau dirubah penggunaannya menjadi ladang dan kebun. Luasan hutan yang mengalami penambahan luasan adalah hutan rawa dan hutan kerangas.

⁴ Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, rumah tangga kurang mampu.

Kampung Empakuq

Menurut Mantan Petinggi, perubahan yang pernah terjadi terhadap luasan kawasan hutan:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Kebakaran	- Melumpuhkan perekonomian masyarakat - Kebun rotan, kebun karet dan kebun lembo habis terbakar
Hutan lebih mudah diakses sehingga memudahkan orang menebang	-	-
Berkurangnya jenis tumbuhan dan hewan	Diburu dan kebakaran	Sulit mendapatkan hewan buruan

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Di Empakuq tidak terdapat jenis hutan lindung, sehingga tidak ada pula aturan yang mengatur tentang hutan lindung. Pemerintah kampung dan orang di Empakuq tidak ada yang mengajukan ijin konsesi, hutan yang ada dikelola bagi keperluan rumah tangga. Demikian pula tidak ada pihak luar yang mengajukan ijin konsesi di dalam wilayah Empakuq, sehingga tidak terdapat rumah tangga yang berpenghasilan dari ijin konsesi, demikian menurut Petinggi.

Sedangkan menurut responden rumah tangga kurang mampu yang juga anggota kelompok tani "Cinta Karya Maju", terdapat pihak luar kampung yang mengajukan konsesi perkebunan, namun dia tidak mengetahui lebih banyak lagi tentang ijin konsesi perkebunan tersebut, karena kemudian tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat proses pengambilan keputusan tentang konsesi.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Seluruh rumah tangga memiliki keterjangkauan terhadap lahan, dan dalam 5 tahun terakhir keterjangkauan terhadap lahan menjadi meningkat. Seluruh rumah tangga memiliki lahan, dan pada tahun 2000 sebagian rumah tangga telah menjual lahannya ke rumah tangga lainnya di kampung. Bahkan terdapat orang yang sudah menjual lahannya ke orang dari kampung tetangga.

5.4 Perladangan

Pada umumnya masyarakat Empakuq berladang pada lahan kering, hanya 7,7% yang membuat sawah dan rapak, 76,9% pada bekas ladang di bawah 10 tahun. Sejak tahun 1999 - 2003 sebanyak 92,3% masyarakat membuat ladang, namun terjadi penurunan pada tahun 2002 yaitu hanya 84,6% yang membuat ladang. Pada tahun 2002 masyarakat menanam padi antara 0.3 - 5 kaleng padi. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2003 dimana masyarakat rata-rata menanam padi sejumlah 0.3 - 4 kaleng. Hanya 46,2% responden yang hasil panennya pada tahun 2002 bertahan hingga panen berikutnya. Untuk beras tambahan masyarakat biasanya membeli karena tidak mendapatkan bantuan beras dari pihak manapun.

Sejumlah 84,6% ladang adalah lahan milik sendiri. Sebanyak 76,9% masyarakat berladang pada bekas ladang yang berusia di bawah 10 tahun, sisanya sejumlah 15,4% berladang pada bekas ladang yang berusia antara 10 - 20 tahun. Ladang biasanya bisa

Kampung Empakuq

ditempuh dalam waktu 5 - 60 menit. Sejumlah 53,8% responden pergi ke ladang dengan berjalan kaki, sisanya sejumlah 15,4% pergi ke ladang dengan perahu dan 15,4% dengan sepeda motor.

5.5 Pendapatan uang

Pendapatan uang sebagian besar rumah tangga bersumber dari hasil karet, rotan, kebun sayur, buah-buahan dan pisang. Sebagian dari produk tersebut dijual ke Melak terutama setelah transportasi jalan darat lebih mudah. Kemudahan pemasaran hasil tanaman dikarenakan pula karena jumlah penduduk yang bertambah banyak di Kutai Barat, terutama di Melak, sehingga memudahkan memasarkan hasil kebun dan hasil hutan.

Pendapatan dari hasil menangkap ikan atau nelayan mengalami kendala karena selama ini sering terjadi peracunan ikan di Sungai Mahakam, sehingga mengakibatkan penghasilan dari tangkapan ikan menurun dan selama ini belum ada upaya pembudidayaan ikan.

Pendapatan lainnya adalah dari honor atau gaji sebagai aparat kampung dan guru sekolah dasar, pegawai perusahaan yang terletak di luar kampung serta warung.

5.6 Infrastruktur

Di Empakuq tidak terdapat pasar. Pasar terdekat terletak di Melak sekitar 60 menit dari Empakuq, dengan ongkos transportasi mobil sebesar Rp. 20.000 sekali jalan, dan transportasi ojek Rp. 20.000 sekali jalan.

Kondisi jalan saat ini sedang dan dalam 5 tahun terakhir tetap sama saja. Kondisi sungai sebagai jalan masih cukup baik atau sedang dan perubahannya sama saja.

Dalam 5 tahun terakhir, waktu perjalanan ke kecamatan, kabupaten, dan kota menjadi lebih cepat.

5.7 Keterjangkauan energi

Terdapat 3 sumber energi yang dipakai di Empakuq, perubahan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- kayu bakar, sudah pernah digunakan sebelumnya, dan dari sisi harga serta ketersediaan masih terjangkau;
- minyak tanah, sudah dipergunakan sebelumnya dan masih terjangkau dari sisi harga dan ketersediaan;
- gas, baru dipergunakan dan masih terjangkau dari sisi harga dan ketersediaan.

Energi listrik PLN belum dipergunakan dan dinilai belum terjangkau dari sisi harga. Penggunaan energi listrik PLN masih terkendala pada kecilnya pendapatan rumah tangga yang disebabkan kurangnya peluang usaha bagi peningkatan pendapatan rumah tangga.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian rumah penduduk berada di tepian Sungai Mahakam, sisanya berlokasi di darat. Sebagian besar rumah penduduk berukuran sekitar 6 x 10 meter.

Kampung Empakuq

Sebanyak 69,2% atap rumah responden terbuat dari seng, dan sebanyak 23,1% adalah atap sirap, sisanya adalah atap daun/rumbia. Dinding rumah responden 93,3% terbuat dari kayu biasa yang bukan ulin dan bengkirai dan masih ada 7,7% responden yang dinding rumahnya terbuat dari kulit kayu. Lantai rumah umumnya (84,6%) terbuat dari kayu biasa yang bukan ulin dan bengkirai. Sebanyak 76,9% rumah responden tidak dialiri listrik, dan hanya 15,4% responden yang mempunyai listrik pribadi. Seluruh masyarakat menggunakan WC sungai.

5.9 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruhnya	Meningkat	Ketua BPK
Kondisi jalan	Sedang	Sama saja	Ketua BPK
Kondisi sungai sebagai jalan	Sedang	Sama saja	Ketua BPK
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan simpukng/lembo	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun pisang	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Hutan sekunder tua	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan rawa	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan kerangas	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan lindung	Tidak ada	-	Ketua BPK
Akses kepada hutan	-	-	Ketua BPK
Jenis tumbuhan dan hewan	Kebakaran dan diburu	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	-	Membaik	Ketua BPK

6. Pendidikan⁵

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar 23% responden rumah tangga di Empakuq menyatakan bahwa ada anak putus sekolah di keluarganya. Sekitar 15% putus sekolah pada tingkat SD yang umumnya disebabkan karena kekurangan biaya.

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pendidikan guru menjadi lebih baik, terdapat 3 orang guru yang berpendidikan diploma dua. Tingkat keaktifan guru dalam mengajar

⁵ Informasi dari Wakil Kepala Sekolah Dasar.

Kampung Empakuq

masih sama saja, demikian pula dengan prestasi kelulusan murid. Prestasi kelulusan murid ada kalanya meningkat, ada kalanya menurun.

Peningkatan terjadi pula pada jumlah orang yang dapat membaca dan menulis di kampung, terutama setelah ada program pendidikan informal bagi orang dewasa dari pemerintah yang berupa program paket A dan paket B pada tahun 1990. Program pendidikan dan pelatihan informal lainnya dari pemerintah adalah program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berupa cara merangkai bunga, memasak, dan lain-lain.

Dalam musim ujian yang lalu, dari 2 orang murid yang mengikuti ujian keduanya lulus. Jadi kelulusan ujian yang lalu adalah 100%. Jumlah murid yang mendaftar 15 orang, namun kecenderungannya akan menurun pada akhir tahun karena ada yang keluar.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Empakuq hanya terdapat 1 sekolah dasar. Semua muridnya berasal dari Empakuq dan tidak ada murid yang berasal dari luar kampung, karena masing-masing kampung sudah memiliki sekolah dasar. Murid yang akan melanjutkan sekolah ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dapat melanjutkan ke sekolah terdekat di Melak yang berjarak sekitar 9 kilometer dari kampung. Sebenarnya sudah ada pula perguruan tinggi di Melak yaitu Universitas Sendawar, namun hingga kini belum aktif perkuliahannya.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah sekolah tetap sama yaitu 1 sekolah dasar. Kondisi sekolah menjadi lebih baik. Alat-alat dan buku-buku berkurang. Permasalahan lain adalah dalam proses belajar mengajar, buku paket hanya terbatas bagi guru, sementara bagi tidak tersedia buku paket. Sehingga dalam setiap pelajaran murid-murid harus mencatat. Padahal jika ada buku paket bagi guru dan murid, akan lebih memudahkan proses belajar dan mengajar. Jumlah staf tetap sama, 2 orang staf dari Melak dan 3 orang staf dari Empakuq. Sedangkan gaji atau honor meningkat lebih besar sesuai dengan usulan.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1 (satu)	Sama saja	Wk. Kep. Sekolah
Kondisi sekolah	Cukup baik	Lebih baik	Wk. Kep. Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	Tidak ada buku paket	Berkurang	Wk. Kep. Sekolah
Jumlah Staf	5 Staf	Sama saja	Wk. Kep. Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Wk. Kep. Sekolah
Tingkat pendidikan guru	Diploma dua	Lebih baik	Wk. Kep. Sekolah
Tingkat keaktifan guru		Sama saja	Wk. Kep. Sekolah
Persentasi kelulusan	2 orang lulus	Sama saja	Wk. Kep. Sekolah
Tingkat orang bisa membaca dan menulis	-	Meningkat	Wk. Kep. Sekolah

7. Kesehatan⁶

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut dukun bayi, jenis penyakit umum diderita masyarakat Empakuq adalah:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	Diare - Malaria
Orang dewasa	Diare - Malaria
Perempuan	Keputihan
Orang usia lanjut	TBC

Tingkat keseringan terjangkitnya penyakit adalah sebagai berikut:

- penyakit malaria paling mungkin diderita kelompok umur anak-anak serta orang dewasa namun tingkat keseringan terjangkitnya sudah menurun;
- penyakit diare paling mungkin diderita pada anak-anak dan orang dewasa dengan tingkat keseringan terjangkitnya penyakit yang berfluktuasi;
- penyakit TBC paling mungkin terkena pada orang usia lanjut, namun tingkat keseringan terjangkitnya sudah menurun.

Dalam 12 bulan terakhir tidak ada orang yang meninggal dunia. Kelahiran anak berjumlah 6 bayi dengan berat-rata-rata 3 kg. Tidak terdapat bayi yang meninggal dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata umur ibu pada saat kelahiran pertama adalah 22 tahun. Tidak terdapat anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal. Rata-rata umur orang meninggal adalah 65 tahun dengan asumsi meninggal karena terkena penyakit. Penyebab kematian terbanyak di kampung ini adalah karena usia lanjut.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut dukun bayi, semua rumah tangga di Empakuq mendapatkan sumber air bersih dari sungai. Mutu air selama ini sama saja, hanya dari sisi jumlah masih berfluktuasi. Perubahan ini terjadi karena tergantung pada hujan. Jika di hulu sungai hujan, jumlah air meningkat. Demikian pula sebaliknya jika tidak terdapat hujan di hulu sungai maka jumlah air menurun.

Pada musim kemarau atau musim kering, Kampung Empakuq tidak pernah mendapatkan bantuan air bersih. Di Empakuq juga tidak terdapat tempat penampungan air yang dipergunakan secara umum. Pada tingkat rumah tangga penyimpanan air dilakukan di gentong, drum dan jerigen.

7.3 Infrastruktur pelayanan kesehatan

Di Empakuq hanya ada dukun bayi dan polindes yang didanai oleh pemerintah. Polindes tidak aktif melakukan aktivitas pelayanan kesehatan karena tidak ada bidannya. Tidak ada seorangpun yang berobat ke Polindes, baik itu orang dari Empakuq atau pun dari luar Empakuq.

Fasilitas kesehatan terdekat adalah Puskesmas Melak yang berjarak sekitar 9 kilometer atau 40 menit perjalanan dengan sepeda motor. Ongkos transportasi

⁶ Informasi dari Dukun Bayi dan Mantan Petinggi.

Kampung Empakuq

ketinting dari Empakuq ke Terminal Melak adalah Rp. 30.000, dilanjutkan dari Terminal Melak ke Puskesmas Rp. 10.000. Jadi total transportasi sekali jalan dari Empakuq ke Melak adalah Rp. 40.000.

Perubahan keterjangkauan terhadap perawatan kesehatan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: jumlah fasilitas kesehatan selama ini tetap atau sama saja. Sedangkan kondisi fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat-obatan perubahannya kurang baik.

Jumlah ahli pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir berkurang. Jumlah upacara pengobatan tradisional tidak dapat ditentukan secara pasti. Dalam setahun bisa terjadi 1 atau 2 kali upacara pengobatan tradisional. Namun secara umum jumlah upacara pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir ini menurun.

Biaya upacara pengobatan tradisional tergantung pada jenis penyakitnya dan bahan upacaranya. Jika upacara pengobatan tradisional dilakukan 1-2 hari dan hanya menggunakan bahan upacara dari ayam, biayanya bisa mencapai Rp. 500.000. Namun jika digunakan bahan upacara dari babi, biayanya bisa mencapai Rp. 1.500.000.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai	Berfluktuasi	Dukun bayi
Mutu air bersih	Air sungai	Sama saja	Dukun bayi
Jumlah fasilitas kesehatan	1 polindes	Sama saja	Dukun bayi
Kondisi fasilitas kesehatan	Kurang baik	Sama saja	Dukun bayi
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada bidan	Sama saja	Dukun bayi
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	-	Lebih kecil	Dukun bayi
Gaji / honor	-	Tidak tahu	Dukun bayi
Penyakit malaria	Ada	Berfluktuasi	Dukun bayi
Penyakit diare	Ada	Berfluktuasi	Dukun bayi
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Dukun bayi
Jumlah ahli pengobatan tradisional	3 orang, (1 orang pengobatan tradisional, 2 orang dukun beranak)	Berkurang	Mantan Petinggi
Upacara pengobatan tradisional	-	Menurun	Mantan Petinggi

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir menurut mantan petinggi:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan tahun 1982	Hutan habis, kebun rotan habis, lembo-lembo ikut terbakar
2	Kekeringan, tahun 1982	Panas
3	Banjir	Tanaman dan pemukiman ikut tenggelam
4	Hama	Tanaman padi gagal terserang walang sangit
5	Perubahan pemerintahan	Ada pembangunan sarana dan prasarana

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Empakuq. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- sarana dan prasarana seperti penciptaan sarana produksi (pertanian dan perkebunan), jalan belum maksimal, belum ada sumber listrik PLN;
- masalah ekonomi, tidak ada modal usaha untuk membuat perkebunan (baik musiman maupun jangka panjang), juga untuk mengembangkan peternakan selain masalah modal juga masalah keterampilan;
- masalah pendidikan, perlu ada pendidikan non formal seperti kursus-kursus mengenai pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Perlu ada beasiswa agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- masalah kesehatan dan gizi, perlu ada puskesmas pembantu (pusban) beserta tenaga medisnya. Pengadaan air bersih, karena air dari sungai sudah tidak bersih lagi. Perlu ada WC umum;
- struktur, perlu ada sistem informasi dari pemerintah yang mudah diperoleh (akses) oleh masyarakat.

Menurut masyarakat biasa:

- akar masalahnya adalah pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mencari solusi (penyelesaian) terhadap masalah yang dihadapi. Pendidikan bagi orang dewasa (informal) melalui pengikutsertaan pada seminar, pelatihan, loka karya dan lain-lain untuk peningkatan sumber daya manusia.

Menurut tokoh masyarakat:

- masalah ekonomi; karena ladang dan kebun sering terkena banjir dan serangan hama. Hutan dan kebun sering terbakar. Ikan di sungai semakin sulit dicari akibat banyak yang menangkap ikan dengan menggunakan racun. Oleh karena itu diusulkan agar pemerintah menciptakan atau mengembangkan sarana produksi (saprodi) seperti membuka areal pertanian atau perkebunan, mencari tempat pemasaran hasil pertanian/perkebunan serta memberikan modal usaha. Hasil pertanian penduduk masih sulit pemasarannya;
- masalah pendidikan; sumber daya manusia masih rendah akibat tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah tidak membuka atau memberikan pelatihan atau kursus pertanian dan perkebunan atau pelatihan usaha lainnya;
- struktur; pemerintah kurang pendampingan atau pembinaan. Selain itu di pemerintahan sendiri ada kelemahan karena antar instansi tidak solid koordinasinya sehingga fokus untuk pemberdayaan masyarakat tidak jelas;
- sarana atau prasarana; fasilitas jalan masih belum memadai;
- masalah kesehatan dan gizi; fasilitas kesehatan belum ada, biaya berobat mahal.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Kelembagaan masyarakat diakui cenderung membaik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas musyawarah. Hubungan dengan pemerintah kabupaten cenderung membaik terutama dari sisi jarak, kepedulian dan layanan.

Terdapat beberapa perubahan pada kondisi sosial budaya. Beberapa hal dalam upacara adat telah mengalami perubahan, terutama pada sisi bahan-bahan. Intensitas konflik tidak mengalami perubahan, konflik jarang terjadi di kampung ini. Walaupun demikian, diakui bahwa tingkat kerjasama antar masyarakat cenderung menurun.

Penjualan lahan cenderung meningkat. Lahan kebanyakan dijual kepada rumah tangga lain yang ada di kampung. Beberapa rumah tangga mengakui adanya pendapatan baru dari hasil menyadap karet. Luasan hutan diakui menurun, sementara itu kebun sayur, simpukng dan kebun kopi cenderung meningkat.

Tidak ada perubahan pada jumlah sekolah. Kondisi sekolah cenderung semakin menurun. Gaji dan pendidikan guru cenderung meningkat, namun keaktifan guru tidak mengalami peningkatan. Jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis diakui meningkat.

Jumlah fasilitas kesehatan tidak mengalami perubahan, yaitu ada 1 polindes. Frekuensi terjadinya penyakit TBC sudah menurun, sementara penyakit malaria dan diare berfluktuasi. Fasilitas pengobatan tradisional cenderung menurun.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Empakuq, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 13 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- mantan petinggi;
- petinggi;
- ketua BPK;
- wakil kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- dukun bayi;
- warung.

Kampung Empakuq

Diskusi kelompok dilakukan bersama dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Engkuni Pasek

Jumlah rumah tangga ¹ : 119	Jumlah jiwa: 491
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 100	Jumlah KK: 133
Jumlah rumah tangga miskin: 42	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah SD: 1
Nama Petinggi: Y.F.Badong, B.K.	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPK: Yosep Darius	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 30 menit (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 1 jam (sepeda motor/mobil)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: 1
Posisi geografis: 115 ^o 39' BT, 0 ^o 20' LS	
Tanggal survei: 4 - 7 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Engkuni Pasek sudah berdiri lebih dari 40 tahun lalu. Pendiri Kampung Engkuni pada umumnya berasal dari kampung-kampung yang berada di Sungai Kedang Pahu seperti Sepan, Bomboi, Bengkirak, Muara Nyahikng, Mantar dan Nilik.

Kebanyakan orang dari Engkuni Pasek berasal dari Lamin Medakng, yang ditiggalkan kira-kira pada tahun 1920. Orang dari sana pernah membangun lamin Rui yang pernah terletak di antara Pasek dan Benung dan lamin di Engkuni. Kampung Engkuni berada di pinggir Sungai Idaatn, oleh karena itu masyarakat menjadikan Kampung Engkuni sebagai pelabuhan sejak pertamakali kampung tersebut didirikan. Kira-kira dalam tahun 1930-an lamin yang sekarang di Engkuni dan di Pasek dibangun, waktu pembangunan tersebut hampir sama dengan waktu pembangunan lamin di Pepas. Pada tahun 1960, Engkuni dan Pasek akhirnya menjadi satu kampung.

¹ Perkiraan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) BPS, 2000. Menurut hasil survei langsung oleh Michaela Haug (Mahasiswa S3 Freiburg Univ. Jerman) awal tahun 2004 hanya ditemukan 61 rumah tangga.

Kampung Engkuni Pasek

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- LKMD;
- POSYANDU (Cabang PKK);
- Karang Taruna.

BPK Engkuni Pasek dibentuk pada tanggal 15 Juli 2002 dan periode jawaban anggotanya akan berlangsung sampai tahun 2007. BPK melakukan konsultasi dengan masyarakat sebanyak sekali dalam 3 bulan yang biasanya dilakukan di Lou (lamin).

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Rencana pembangunan kampung	Pengusulan proyek pembangunan Lokakarya perencanaan kampung yang difasilitasi oleh CSF dan Putijaji
Peraturan kampung	Pernah membuat dua peraturan kampung yaitu peraturan tentang pengelolaan tempat wisata di air terjun dan peraturan tentang pengelolaan hutan
Dana honorarium BPK	Harus ada honorarium kerja bagi BPK. Namun sampai dengan saat ini belum ada honorarium sehingga kerja menjadi tidak efektif

Menurut Ketua BPK, musyawarah semakin jarang terjadi karena tingkat kesibukan masyarakat semakin tinggi, sehingga terjadi penurunan pada kualitas musyawarah. Walaupun demikian, tingkat keputusan lembaga adat masih berdampak dan dipatuhi oleh masyarakat.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Menurun	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Engkuni Pasek pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

	Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
1	Usulan perbaikan dan bantuan untuk perumahan penduduk	Belum ada tanggapan
2	Usulan jalan Engkuni - Pepas Eheng	Pada bulan Maret 2004 jalan sudah diukur dan katanya mau diaspal setelah pemilu
3	Usulan semenisasi kampung	Belum ada tanggapan
4	Usulan perbaikan kantor kampung yang dibongkar karena pelebaran jalan	Belum ada tanggapan

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak.

No.	Menurut kepala kampung	Menurut orang kurang mampu	Menurut ketua BPD
1	Pembuatan jembatan Sungai Encuik dari Pemkab (2002)	Beras miskin dari pemerintah	Pengadaan air bersih dari PT.KEM
2	Pembuatan gorong-gorong dan jalan antar kampung dari pemda (2002)	Air bersih dan WC umum dari PT. KEM dan Pemda	Pemberian makanan gizi dan beasiswa bagi anak SD dari Yayasan Rio Tinto
3	Bantuan untuk pemerintahan kampung Rp.10 juta per tahun dari Pemkab (2000 - 2004)	-	-

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, bantuan raskin dari pemerintah berjumlah 20 kg per KK dirasa tidak memuaskan. Sedangkan bantuan sarana air bersih dan WC umum dari PT.KEM dirasakan sangat memuaskan.

Dari wawancara dengan beberapa pihak diketahui terjadi pemotongan dari bantuan rutin ke pemerintahan kampung yang seharusnya sebesar Rp.10.000.000/ tahun.

POSYANDU Engkuni Pasek pernah membangun 1 kebun gizi pada November 2002 dengan bantuan dari Yayasan Rio Tinto. Bantuan berupa bibit, pupuk, dan bantuan dalam pembinaan kebun tersebut. Petugas Yayasan Rio Tinto biasanya mengunjungi Engkuni 1 kali per minggu. Semua ibu yang mempunyai anak balita biasa mengambil sayuran dan buah dari kebun itu.

Kampung Engkuni Pasek

Dari Engkuni Pasek 2 kelompok ikut dalam proyek reboisasi hutan. Kelompok dari Pasek sedang dalam proses dan kelompok Engkuni sudah ikut dengan luas 50 hektar yang ditanami karet, buah dan rotan jepung.

Gereja Pantekosta di Engkuni pernah menerima bantuan dari pemda dan dari perorangan (pribadi) di Jakarta untuk membangun gedung gereja baru.

3.2 Penelitian

Center for Social Forestry (CSF) Unmul pernah meneliti tentang hutan. Selain CSF, Kehati pernah pula melakukan penelitian tumbuhan obat tradisional. Hasil klasifikasi sudah diberikan kepada masyarakat, namun belum ada informasi tentang kegunaannya. Menurut Kepala Adat, kalau ada informasi kegunaan maka masyarakat dapat membudidayakan tanaman obat tersebut untuk dibuat jamu atau obat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh sumber penghasilan baru.

3.3 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Kunjungan dari pihak pemerintahan ke Engkuni Pasek rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Instansi yang pernah datang adalah:

- Bagian Pemberdayaan Masyarakat dari Kantor Kecamatan;
- Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dari Kabupaten.

Menurut Ketua BPK, hubungan masyarakat dengan Pemda Kabupaten dalam 5 tahun terakhir telah mengalami perubahan. Pada umumnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik. Perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kutai menjadi wilayah Kabupaten Kutai Barat sehingga pusat pemerintahan menjadi lebih dekat. Ketua BPK merasa pemda lebih memprioritaskan anggaran untuk pembuatan jalan sebagai bagian pembangunan perkampungan.

3.4 Sumber dan alat informasi

Pada umumnya sumber informasi masyarakat tentang program-program pemerintah adalah:

- kunjungan petugas pemerintah;
- dengar dari orang lain;
- pengumuman.

Masyarakat kadang-kadang mendapatkan informasi tentang keuangan dari orang-orang yang mengusulkan proyek-proyek pembangunan di Pemda.

Menurut petinggi, di kampung ini tidak ada alat komunikasi.

Kampung Engkuni Pasek

3.5 Resume perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Migrasi penduduk

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perpindahan penduduk seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	± 3 orang	Karena sekolah
Waktu panjang atau selamanya	± 10 orang	Untuk mencari pekerjaan

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Engkuni Pasek adalah:

- upacara *kwangkai* yang merupakan bagian dari adat kematian;
- upacara *beliatn* untuk mengobati orang sakit;
- upacara *ngugu tautn*;
- upacara *nuak*;
- upacara *pelulukng* (pengantin) yang dilakukan selama 2 hari 2 malam.

Di Kampung Engkuni Pasek, komersialisasi upacara adat belum terjadi.

Tingkat gotong-royong dalam upacara dirasakan semakin kuat, sedangkan tujuan upacara dirasakan masih sama dengan tujuan menurut adat. Biasanya masyarakat Engkuni Pasek akan mengundang masyarakat dari kampung lain untuk memeriahkan pelaksanaan upacara adat.

Masih menurut kepala adat, kira-kira setengah sampai dengan separuh dari generasi muda mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari para orang tua. Pengetahuan yang dimaksud misalnya pengetahuan tentang adat. Transfer pengetahuan ini terjadi karena ada minat dari generasi muda. Para orang tua biasanya melihat karakter anak muda sebelum memberikan pengetahuan.

Kampung Engkuni Pasek

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan sama saja. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- upacara *kwangkai*;
- membantu orang yang sakit;
- membuat kebun;
- membuat rumah.

Sedangkan menurut responden rumah tangga kurang mampu, tingkat kerjasama di kampung dirasakan meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Mereka juga berpendapat bahwa kualitas gotong-royong untuk upacara adat dan bantuan orang yang sakit atau orang kurang mampu masih tetap baik dan sama seperti dahulu. Hanya diakui bahwa gotong-royong untuk pekerjaan umum atau pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi seperti kerja di ladang atau di kebun memang sudah menurun.

Menurut Kepala Adat, solidaritas masyarakat masih sangat terasa ketika ada warga masyarakat yang meninggal dunia. Biasanya sekitar setengah sampai dengan separuh dari masyarakat turut membantu (gotong-royong). Jika ada suara gong yang menandakan ada penduduk yang meninggal, maka biasanya bantuan langsung berdatangan termasuk dari masyarakat kampung tetangga seperti Benung dan Eheng. Hal ini terjadi karena masyarakat di kampung tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat Engkuni Pasek.

Jika terjadi krisis pangan seperti kekurangan beras, biasanya masyarakat meminta bantuan dari:

- pemerintah;
- kampung tetangga;
- Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bantuan dari kampung tetangga biasanya jarang terjadi karena mereka juga mengalami kesulitan.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, jika dirinya mengalami kesulitan biasanya bantuan datang dari keluarga. Warga kampung lain yang bukan keluarga umumnya tidak memberi bantuan.

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, di Engkuni Pasek seringkali terjadi konflik lahan, konflik keluarga dan konflik sumber daya alam. Khusus untuk konflik sumber daya alam terjadi peningkatan karena adanya rebutan hak waris hutan. Konflik suku dan konflik agama sejak dahulu memang jarang terjadi di sini. Namun menurut orang kurang mampu, tidak pernah terjadi konflik di Engkuni Pasek.

Penyelesaian konflik masih menggunakan hukum adat, baik untuk di dalam kampung maupun konflik di atau dengan pihak luar kampung. Jika terdapat ketidakpuasan pada putusan lembaga adat, barulah biasanya kasus bisa diserahkan kepada mekanisme hukum negara. Pada kasus seperti ini biasanya melibatkan pihak kepolisian. Walaupun demikian, pada prinsipnya diusahakan untuk diselesaikan di dalam kampung dengan menggunakan hukum adat.

Kampung Engkuni Pasek

Pengalaman selama ini menunjukkan lebih dari separuh konflik di tingkat kampung dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang dihadapi adalah:

- sulit mendapatkan usaha;
- berladang kurang mendapatkan hasil karena tanah kurang subur;
- melamar pekerjaan ke perusahaan sangat sulit karena hanya memiliki ijazah SD.

Secara umum, situasi kehidupan dirasakan berfluktuasi kadang baik dan kadang buruk. Hal ini terjadi karena tidak ada modal usaha dan tidak ada usaha yang pasti.

Mereka merasa mampu untuk membayar pendidikan walaupun sangat terasa berat. Sedangkan untuk biaya kesehatan, mereka merasa tidak mampu. Oleh karena itu, mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kesehatan.

Mereka mengaku jarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di kampung.

Jika ada yang ingin memberikan bantuan, mereka merasa bahwa bantuan yang paling penting adalah bantuan modal usaha berupa uang.

Perawat yang tinggal di Engkuni Pasek membenarkan pengakuan responden rumah tangga kurang mampu tentang kemampuan membayar biaya kesehatan. Menurut perawat, biasanya rumah tangga kurang mampu menggunakan kartu sehat dari program JPS kesehatan. Selain itu, kadang-kadang mereka berobat dahulu di tempat pelayanan kesehatan, kemudian biayanya dibayar dengan cara mencicil setelah sembuh dari sakit.

4.6 Hiburan

Menurut Kepala Adat, beberapa kesenian dan upacara tradisional dapat menjadi sumber hiburan. Kesenian dan upacara tradisional yang ada di kampung adalah:

- *ngeluaq*;
- menyanyi atau *ngelengot*;
- pantun;
- menari gantar;
- *beliatn*;
- *ngerangkau*;
- gendang.

Kampung Engkuni Pasek

4.7 Resume perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Semakin lama	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Gotong royong dalam upacara adat	-	Semakin kuat	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Konflik lahan	Sering sekali	Sama	Kepala Adat
Konflik keluarga	Sering sekali	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Jarang	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Jarang	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Sering sekali	Meningkat	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama	Kepala Adat
Jumlah konflik	Tidak ada	-	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Meningkat	Rumah tangga kurang mampu

Dari wawancara dengan pihak-pihak lain di kampung diketahui bahwa waktu upacara adat di Engkuni Pasek tidak mengalami perubahan, masih sesuai dengan ketentuan adat.

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Engkuni Pasek adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- simpukng;
- kebun kopi;
- peternakan;
- hutan.

Dari tipe tata guna lahan tersebut, ladang merupakan tata guna lahan terluas dengan komposisi sekitar seperempat sampai dengan setengah dari total luas lahan. Namun luas ladang terus mengalami penurunan karena adanya konversi ke kebun karet. Dari pengamatan di lapangan dan juga data sekunder berupa peta tata guna lahan kampung, dapat diyakini bahwa yang dimaksud dengan ladang adalah kawasan perladangan dimana kawasan lahan yang diberakan masuk dalam kategori ini.

Kampung Engkuni Pasek

Jenis hutan dan lahan bera yang ada di Engkuni Pasek adalah:

- hutan perawan;
- hutan sekunder tua;
- hutan sekunder muda;
- belukar tua;
- belukar;
- hutan rawa;
- hutan kerangas.

Pada umumnya luasan hutan terus berkurang.

Perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan sebelum tahun 1990:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Kebakaran hutan	- Jumlah kayu berkurang - Peningkatan kesadaran untuk membuat sekat bakar
Lebih mudah diakses	Lebih mudah menebang pohon, ditambah dengan adanya chainsaw dan kemudahan transportasi	- Hutan menjadi rusak - Mengakibatkan banjir, walaupun banjirnya kurang merusak
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Kebakaran hutan	Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan asli seperti bangkiri dan ulin. Padahal pertumbuhan ulin sangat lambat.

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Menurut petinggi, lembaganya pernah mengusulkan kepada lembaga adat untuk menetapkan kawasan hutan lindung. Namun sampai dengan saat ini belum direalisasikan karena ada tanaman adat yang harus diambil dari hutan.

Tidak pernah ada yang mengajukan konsesi hutan berupa IPPK atau HPHH di dalam wilayah kampung. Pernah ada pihak luar yang berencana membuka *sawmill*, namun sampai dengan saat ini belum ada realisasi.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut ketua BPK, seluruh rumah tangga di Engkuni Pasek memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Keterjangkauan berarti memiliki hak, lahan masih tersedia dan tercapai dari sisi jarak. Keadaan ini sudah terjadi sejak dahulu.

Jual beli lahan sudah terjadi kira-kira sejak tahun 2001. Yang diperjualbelikan adalah lahan kebun karet. Sebagian kebun karet yang ada di Engkuni Pasek adalah dukungan dari proyek Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB).

5.4 Perladangan

Sebagian besar rumah tangga membuat ladang dalam 5 tahun terakhir. Beberapa rumah tangga juga membuat sawah untuk menghasilkan beras. Hampir seluruh rumah tangga yang berladang memiliki lahan sendiri. Sekitar setengah dari rumah tangga melakukan perladangan di lahan bera dengan umur kurang dari 10 tahun. Pembukaan ladang di areal hutan rimba masih dilakukan dengan jumlah yang sedikit sekali.

Kampung Engkuni Pasek

Sebagian besar masyarakat pergi ke ladang dengan cara jalan kaki kurang dari setengah jam perjalanan.

Pada panen padi tahun 2003, lebih dari setengah rumah tangga yang berladang menghasilkan padi dengan jumlah yang kurang untuk kebutuhan selama 1 tahun. Sehingga sebagian besar dari mereka masih harus membeli beras untuk tambahan.

5.5 Pendapatan uang

Penghasilan uang kebanyakan didapat dari hasil kebun karet. Harga karet naik sampai Rp. 3.200 per kg dan sekarang pedagang yang membeli karet datang secara teratur ke Kampung Engkuni Pasek (Maret, 2004). Biasanya 1 atau 2 kali setiap minggu. Pedagang ada yang lokal dan juga dari Banjarmasin. Beberapa rumah tangga memiliki penghasilan dari menggergaji kayu di hutan, hasil panen rotan, pembuatan kerajinan dan hasil penjualan ternak. Selain itu, beberapa rumah tangga menggantungkan penghasilan kepada gaji sebagai guru dan honor pengurus kampung. Juga ada rumah tangga yang menggantungkan penghasilannya pada anggota rumah tangga yang bekerja pada satu perusahaan tambang di Propinsi NTB.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Di kampung ini tidak ada pasar. Pasar terdekat terletak di Barong Tongkok yang dapat dicapai selama 20 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ongkos perjalanan menuju Barong Tongkok adalah Rp. 5000,- jika menggunakan taksi mobil, jika menggunakan ojek diperlukan biaya sekitar Rp.10.000 untuk sekali jalan.

Kondisi jalan di dalam dan ke luar kampung dalam kondisi baik walaupun masih dalam bentuk jalan tanah dan agregat batu. Dibandingkan 5 tahun lalu, kondisi jalan sudah lebih baik. Kondisi sungai juga baik walaupun tidak dapat dilewati alat transportasi karena ukurannya yang kecil.

Aksesibilitas ke dalam dan ke luar kampung menggunakan jalan darat, yang dapat dicapai dengan menggunakan mobil taksi atau ojek. Karena adanya perbaikan jalan ke luar kampung maka waktu perjalanan ke kecamatan dan kabupaten dirasakan semakin cepat.

5.7 Keterjangkauan energi

Sumber energi yang digunakan di kampung ini adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- gas;
- listrik.

Minyak tanah, gas dan listrik adalah sumber energi yang baru digunakan. Menurut petinggi, seluruh sumber energi tersebut masih dapat terjangkau sampai dengan saat ini.

Kampung Engkuni Pasek

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian besar rumah terbuat dari kayu yang bukan jenis ulin atau bengkirai. Sekitar setengahnya memiliki aliran listrik dimana sebagian besar berasal dari PLN. Seluruh rumah tangga memiliki WC dimana sekitar sepertiganya berada di dalam rumah.

5.9 Resume perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Meningkat	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik	Sama	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan simpukng	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun koko	Tidak ada		Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan peternakan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>bengkar</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>batang</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>urat</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua (<i>kloako</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar (<i>babarr</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>payaq</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>jaras</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan lindung	Tidak ada		Ketua BPK
Akses kepada hutan	Mudah	Lebih mudah	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan hewan	-	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Ada proyek-proyek bangunan yang mempekerjakan masyarakat	Membaik	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Dari responden rumah tangga diketahui sekitar seperdelapan dari anak-anak di kampung ini putus sekolah, dimana sebagian besar putus di tingkat SLTP. Dari anak-anak yang putus sekolah, sebagian besar karena biaya dan kurangnya motivasi.. Di

Kampung Engkuni Pasek

kampung ini masih ada anak yang tidak bersekolah karena dibawa ke ladang oleh orangtuanya.

Tingkat pendidikan para guru meningkat karena beberapa orang guru ada yang mengambil program pendidikan Diploma II, sedangkan yang lainnya mendapat penataran di Balai Pelatihan Guru (BPG). Para guru cukup aktif dalam mengajar. Jumlah masyarakat di kampung yang dapat membaca meningkat dalam 5 tahun terakhir. Selain pendidikan formal, juga ada pendidikan untuk orang dewasa yang biasanya dibuat oleh program pemerintah atau lembaga penelitian.

Persentase kelulusan siswa biasanya 100%, keadaan ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Jumlah siswa baru pada tahun ini 9 orang. Jumlah murid keseluruhan 51 orang yang dibimbing oleh 10 orang guru.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Sekolah yang ada di Engkuni Pasek hanyalah Sekolah Dasar. Sehingga untuk sekolah di tingkat yang lebih tinggi harus ke luar kampung. Umumnya anak-anak melanjutkan sekolah di Barong Tongkok yang dapat ditempuh lewat darat dengan jarak sekitar 11 kilometer dengan kondisi jalan baik. Tidak ada anak-anak dari luar kampung yang sekolah di Engkuni Pasek.

Sementara itu, kondisi bangunan sekolah semakin buruk karena bangunan sudah berumur tua sehingga atap sudah mulai bocor. Alat-alat peraga dan buku-buku berkurang jumlahnya. Jumlah staf pengajar berkurang karena pihak sekolah tidak bebas memasukkan tenaga pengajar dari luar. Gaji untuk pengajar tidak mengalami perubahan, sama seperti pegawai negeri sipil lainnya.

6.3 Resume perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Lebih baik	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Aktif	Kepala Sekolah
Persentase kelulusan	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

Baru pada bulan Maret 2004 ini SD di Engkuni Pasek mendapat tawaran dari Perusahaan CV. Pinang Sendawar untuk membangun gedung sekolah baru.

7. Kesehatan

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat secara umum lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka masyarakat yang terkena penyakit seperti penyakit TBC dan malaria. Menurut perawat kesehatan yang tinggal di kampung, belum pernah ada wabah diare menyerang kampung ini.

Jenis penyakit yang biasanya diderita anak-anak adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sedangkan pada orang dewasa adalah penyakit asma dan hipertensi. Masyarakat cukup tertolong dengan program kartu sehat Jaringan Pengaman Sosial (JPS), sehingga biaya berobat dapat lebih murah.

Dalam 12 bulan terakhir, terdapat 10 orang anak yang baru lahir dengan berat rata-rata sekitar 2,5 kg. Dalam periode yang sama, tidak ada bayi yang meninggal pada saat kelahiran, juga tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Rata-rata umur ibu pada saat melahirkan pertama adalah 20 tahun.

Jumlah anak-anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir, dan penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	1	Infeksi paru-paru
6 - 10 tahun	-	-

Terdapat 5 orang yang meninggal dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata umur orang yang meninggal karena penyakit sekitar 60 tahun. Pada dasarnya penyakit yang menyebabkan kematian pada orang tua tidak menentu, sebagai contoh beberapa orang meninggal karena diabetes.

Di bulan-bulan terakhir ada beberapa program pengobatan gratis dari pemda dan rumah sakit swasta di Engkuni, Pasek dan Eheng. Selain itu juga pernah ada kunjungan dokter ke SD untuk periksa gigi dan penyakit gondok pada anak-anak.

7.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih di kampung ini berasal dari mata air, seluruh rumah tangga dapat mengaksesnya. Jumlah dan mutu air sering mengalami perubahan terutama ketika musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan jumlah air memang lebih banyak tetapi kondisinya keruh, sedangkan pada musim kemarau jumlah air akan berkurang walaupun tidak pernah kering.

Bagian Pasek mendapatkan bantuan dari PT. KEM berupa fasilitas untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke tempat penampungan yang berada di kampung, sehingga masyarakat dapat menjangkau air bersih di tengah kampung dengan mudah. Beberapa rumah tangga memiliki tempat penampungan air sendiri di rumah masing-masing.

Kampung Engkuni Pasek

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Engkuni Pasek terdapat 1 buah polindes dengan 1 orang tenaga perawat. Namun bangunan polindes belum dapat digunakan, sehingga biasanya tenaga perawat langsung pergi ke rumah-rumah. Polindes dan tenaga perawat dibiayai oleh pemerintah. Jarak ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sekitar 11 kilometer yaitu di Barong Tongkok. Untuk mencapai Barong Tongkok masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 5000 jika naik taksi untuk sekali jalan, sedangkan jika menggunakan ojek harus membayar sekitar Rp.15.000.

Dalam 5 tahun terakhir hampir tidak ada perubahan kondisi fasilitas kesehatan. Hanya saja kondisi bangunan polindes dirasakan kurang baik sedangkan ketersediaan obat-obatan serta peralatan kesehatan dapat dikatakan lebih baik.

Selain pelayanan pengobatan medis, di kampung ini ada tenaga pengobatan tradisional sebanyak 10 orang. Jumlah tenaga pengobatan tradisional cenderung berkurang karena saat ini masyarakat lebih banyak memilih berobat di pengobatan medis. Upacara pengobatan tradisional semakin jarang dilaksanakan, rata-rata kurang dari 1 kali per bulan.

Biaya yang diperlukan untuk upacara pengobatan sangat bervariasi antara Rp. 200.000 - Rp. 3.000.000, tergantung kepada kemampuan keluarga yang sakit. Kadang-kadang orang sakit hanya membayar piring kalau tidak punya uang. Satu upacara pengobatan (*beliatn*) dapat memakan waktu 3 - 4 malam.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air pancuran	Berfluktuasi	Perawat
Mutu air bersih	Air pancuran	Berfluktuasi	Perawat
Jumlah fasilitas kesehatan	Ada	Sama	Perawat
Kondisi fasilitas kesehatan	-	Kurang baik	Perawat
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Satu orang	Sama	Perawat
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Ada	Lebih besar	Perawat
Gaji/honor	Gaji dari puskesmas Barong	Sama saja	Perawat
Penyakit Malaria	Ada	Menurun	Perawat
Penyakit Diare	Tidak Ada		Perawat
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Perawat
Jumlah ahli pengobatan tradisional	10 orang	Menurun	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Kurang sekali per bulan	Menurun	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Menurut kepala adat, peristiwa penting yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat adalah bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan berdampak pada hilangnya sebagian kekayaan masyarakat, juga berdampak pada menurunnya produksi pangan.

Kampung Engkuni Pasek

Secara lengkap, tabel di bawah ini menyajikan peristiwa penting yang terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan	- Hasil ladang berkurang - Kayu-kayu terbakar - Tanah kurang subur
2	Kelaparan, tidak ada bantuan beras	- Sampai makan pucuk singkong ²
3	Kekeringan	- Banyak yang sakit perut - Kelaparan karena tidak ada beras. - Banyak yang kena demam
4	Banjir	Kegagalan panen pada tanaman padi yang berada di pinggir sungai

Bencana yang pernah terjadi lebih dari 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kekeringan	- Banyak yang sakit perut - Kelaparan karena tidak ada beras. - Banyak yang kena demam
2	Banjir	Juga terjadi kegagalan panen. Banjir yang terjadi lebih besar dibandingkan yang 10 tahun terakhir
3	Hama	Padi rapak diserang oleh burung pipit sehingga gagal panen. Keadaan ini membuat masyarakat harus makan singkong

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Engkuni Pasek. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga kurang mampu menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
- kurangnya dukungan dan dorongan dari orang tua kepada anaknya, sehingga anak tersebut menjadi malas bersekolah;
- usaha tidak maju atau tidak ada peningkatan. Produksi tidak tetap dan tidak terus menerus. Sehingga merasa miskin sejak dulu;
- perempuan di Kampung Engkuni Pasek tidak terfokus satu macam usaha, sehingga tidak ada satu usaha pun yang berhasil.

Menurut masyarakat biasa:

- keadaan usaha tidak menunjang, ada usaha tapi kurang menghasilkan uang. Beberapa orang tidak ada memiliki usaha dan pekerjaan sama sekali;

² Ada orang lain yang bilang itu tidak terjadi dalam 10 tahun terakhir, tapi lebih dulu dan pada waktu itu akibatnya hama.

Kampung Engkuni Pasek

- sarana transportasi (perhubungan) dan informasi belum memadai termasuk sarana jalan;

Menurut tokoh masyarakat:

- masalah ekonomi: kekurangan modal dan lahan tidak subur;
- sumber mata pencaharian seperti kebun rotan dan kebun karet sering terbakar;
- pemerintah tidak menciptakan lapangan pekerjaan;
- masalah pendidikan, sumber daya manusia masih rendah, tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi;
- masalah kesehatan: biaya berobat dan obat-obatan mahal;
- kurangnya sarana transportasi.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada infrastruktur jalan. Masyarakat juga merasakan adanya perbaikan pelayanan pemerintah. Satu hal yang cukup menarik di sini bahwa masyarakat merasa adanya kemudahan akses untuk melakukan eksploitasi hutan. Namun peluang untuk mengambil manfaat dari hutan tersebut malah meningkatkan konflik antar masyarakat, terutama konflik hak waris atas kawasan hutan.

Kebun karet yang ditanam sebelum adanya desentralisasi, saat ini telah dipanen dan memberikan penghasilan yang signifikan di masyarakat. Karet sudah menjadi pendapatan terpenting bagi sebagian besar warga masyarakat. Tapi di sisi lain, proyek perkebunan karet yang didanai dari dana hutang Asian Development Bank (ADB) ini juga telah memicu terjadinya jual beli lahan. Sejak tahun 2001, jual beli lahan karet telah mulai dilakukan. Saat ini masyarakat lebih melihat lahan dari sisi ekonomi daripada sisi sosial. Perubahan ini pasti akan berdampak cukup signifikan pada kehidupan sosial budaya masyarakat di masa depan.

Dari sisi kesehatan, terlihat kondisi kesehatan masyarakat sudah semakin membaik dibandingkan 5 tahun lalu. Penyakit-penyakit akibat sanitasi seperti TBC dan diare sudah menurun. Kesehatan ibu dan anak juga sudah semakin membaik.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Kampung Engkuni Pasek

Khusus untuk Kampung Engkuni Pasek, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 20 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- perawat;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan bersama dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Gemuhan Asa

Jumlah rumah tangga: 179	Jumlah jiwa: 736
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 191	Jumlah KK: 243
Jumlah rumah tangga miskin: 24	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Tunjung	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Gerekng	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Sulaiman M.	Jumlah SLTA: -
Nama Ketua BPK: Marsianus Mudin	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke kecamatan: 20 menit (sepeda motor)	Jumlah Pusban: -
Waktu tempuh ke Sendawar: 20 menit (sepeda motor)	Jumlah Polindes: 1
Posisi administratif: Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat	
Posisi geografis: 115.47 LS, 0.11 BT	
Tanggal survei: 18 - 22 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung¹

Kampung Gemuhan Asa telah ada sejak sekitar abad ke-18. Masyarakat Gemuhan Asa berasal dari Lamin (Lou) Gemuhan. Lamin sudah beberapa kali pindah. Pernah pindah ke Seberang Sungai Mahakam, kemudian kembali lagi ke Lamin Gemuhan. Di lamin lama pernah ada 8 bilik, 1 bilik dikepalai oleh 1 kepala keluarga dan di bilik itu tinggal kepala keluarga beserta anggota keluarga, anak, cucu, dan kaum kerabat. Pada saat terjadi perang dengan Belanda dan Jepang, orang-orang di lamin pindah ke ladang dan kembali lagi ke lamin setelah keadaan aman.

¹ Berdasarkan informasi Kepala Adat.

Kampung Gemuhan Asa

Masyarakat Gemuhan Asa berasal dari Rara Kuta di Sentawar, dalam perkembangannya Rara Kuta berpecah menjadi Gemuhan Asa, Ngenyan Asa, Ambo Asa serta masyarakatnya dikenal dengan nama suku Tunjung.

2. Kelembagaan Kampung²

Kelembagaan kampung yang ada di Kampung Gemuhan Asa adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Kelompok Tani Rotan Pulut Merah;
- Koperasi;
- Karang Taruna;
- Pemuda Masyarakat Adat.

Menurut Ketua BPK, kelembagaan kampung belum seluruhnya melakukan tugas dan fungsi mereka, termasuk Badan Perwakilan Kampung. Meskipun telah dibentuk pada Januari 2002, namun hingga tahun 2003 ini BPK belum pernah melakukan konsultasi program dengan masyarakat. Kegiatannya hanya sebatas pada mengikuti undangan-undangan rapat pengurus kampung. Sehingga praktis sejak pembentukannya BPK tidak pernah melakukan musyawarah dengan masyarakat. Hasil rapat pengurus kampung tidak disampaikan pula ke masyarakat.

Dari sisi kualitas, dampak, dan intensitas dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun terakhir ini tradisi musyawarah di kampung ini tidak mengalami peningkatan. Musyawarah hanya dihadiri pengurus kampung dan dampak keputusan pun tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Sama saja	Ketua BPK

² Berdasarkan informasi dari Petinggi dan BPK.

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah³

3.1 Dukungan

Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Usulan pelabuhan kabupaten	Belum ada jawaban
Kantor kepala kampung	Belum ada jawaban
Air bersih	Proyek akan dilanjutkan

Menurut petinggi, usulan bantuan pembangunan pelabuhan kampung di tepi Sungai Mahakam ini lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang diperkirakan akan menguntungkan masyarakat Gemuhan Asa. Wilayah kampung yang terletak di tepi Sungai Mahakam telah dipergunakan sebagai sarana bongkar dan muat barang dari kapal yang tenaga kerjanya adalah masyarakat setempat. Frekuensi pembongkaran dalam satu bulan terjadi antara 2 sampai 6 kali, tergantung pada pasang surutnya air Sungai Mahakam. Keberadaan aktivitas bongkar-muat selama ini telah memberikan kontribusi bagi penghasilan rumah tangga. Pembangunan pelabuhan ini sangat strategis, dari pelabuhan ke Linggang Amir bisa ditempuh melalui jalan di sepanjang tepian Sungai Mahakam. Lokasi pelabuhan ini dekat pula dengan pelabuhan udara (*air port*).

Dalam 5 tahun terakhir ini pemerintah telah memberi dukungan berupa program peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan antara tahun 1999 sampai 2003. Bantuan lainnya berupa uang operasional kampung dan juga bantuan berupa air bersih dari P.T. KEM atau Yayasan Rio Tinto. Bantuan infrastruktur air bersih juga diberikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kubar. Kendala prasana air bersih ini adalah tidak terdapat alokasi anggaran untuk pengelolaan, dan juga air bersih ini tidak dapat memenuhi keperluan air di seluruh rumah tangga. Hanya sebagian rumah tangga yang menikmati air bersih.

Program Tempat Penjualan Ikan (TPI) selesai tahun 2002. TPI ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Atas dasar pertimbangan ekonomis, warga yang berprofesi sebagai penjual ikan lebih melihat peluang usaha yang menguntungkan dengan menjual ikan ke kampung-kampung di sekitar Gemuhan Asa dan bahkan sampai Lambing serta Damai daripada memanfaatkan TPI.

Secara keseluruhan program dukungan pemerintah terhadap kampung Gemuhan Asa dalam 5 tahun terakhir ini adalah:

- irigasi sawah (tahun 2001 - selesai);
- jalan ke sawah sepanjang 2,3 kilometer (tahun 2001 - selesai);
- TPI (tahun 2002 - selesai);
- bantuan uang operasional kampung (1999 - 2003);
- proyek air bersih (tahun 2002 - selesai).

³ Berdasarkan informasi dari Petinggi, BPK, Kurmam.

Kampung Gemuhan Asa

Dukungan program pemerintah tingkat kabupaten yang dirasakan cukup membantu masyarakat adalah pembangunan jalan poros beraspal ke Gemuhan Asa. Keberadaan jalan poros ini telah memperlancar transportasi masyarakat, saat ada kepentingan ke Melak atau ke Barong Tongkok. Program air bersih dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dirasakan masih bermanfaat kendati air tidak lancar memenuhi keperluan tiap-tiap rumah tangga.

Berikut ini adalah daftar bantuan-bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut Ketua BPK
1	Irigasi sawah	Air bersih dari Rio Tinto	PT KEM, air bersih
2	Jalan sawah	-	Bantuan air bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat
3	TPI	-	-
4	Bantuan uang untuk operasional kampung	-	-
5	Proyek air bersih	-	-

Secara umum, bantuan pemerintah 5 tahun terakhir ini meningkat, namun demikian usulan-usulan bantuan yang diajukan masyarakat tidak mendapatkan jawaban yang pasti mengenai realisasi bantuan.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Pemerintah kabupaten dan kecamatan jarang melakukan tugas pelayanan di kampung. Intensitas layanan kurang dari sekali dalam sebulan. Padahal wilayah kampung sangat mudah dijangkau dari Sendawar atau Melak. Selama ini hanya Camat Melak dan anggota DPRD yang datang ke kampung melakukan pemeriksaan proyek jalan.

Dengan adanya otonomi daerah tahun 1999 dan berlanjut dengan pemekaran Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kertanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat, Gemuhan Asa secara administratif yang sebelum otonomi termasuk di Kabupaten setelah otonomi berada di Kutai Barat. Perubahan wilayah administratif ini memberi dampak pada pelayanan pemerintah kabupaten dari sisi jarak, tingkat kepedulian, akses informasi serta partisipasi pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Hanya saja terhadap aspek pelayanan sama saja atau tetap tidak ada perubahan selama 5 tahun terakhir ini.

Secara rinci perubahan dijelaskan pada tabel berikut:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Sama saja
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih baik

Kampung Gemuhan Asa

3.3 Sumber dan alat informasi

Informasi mengenai program-program pemerintah diketahui masyarakat dari keterangan orang-orang yang mempunyai akses pada program pemerintah dan melalui berita di koran serta siaran radio swasta di Kutai Barat. Perubahan lainnya adalah telah dibangunnya pemancar Telkom di Sendawar dan Barong Tongkok, sehingga informasi dan komunikasi dengan masyarakat di luar Gemuhan Asa dapat dilakukan dengan *Hand Phone* (HP)/telepon seluler.

3.4 Resume trend perubahan:

Komponen	Perubahan	Responden
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan	Sama saja	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya⁴

4.1 Perpindahan penduduk

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perpindahan penduduk seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan meninggalkan kampung
Waktu pendek/sementara	10 orang	Sekolah/pendidikan
Waktu panjang/selamanya	2 orang	- Mencari pekerjaan - Berkeluarga

Di Gemuhan Asa hanya terdapat satu sekolah dasar. Berdasarkan populasi penduduk terutama jumlah anak sekolah, di Gemuhan Asa sebenarnya memenuhi syarat didirikan sekolah minimal setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

4.2 Upacara adat

Upacara adat masih sering dilakukan di kampung. Upacara adat/ritual adat dibagi menjadi dua macam. Pertama, budaya adat hidup, dan yang kedua budaya adat kematian.

Budaya adat hidup yang masih dilakukan yaitu:

- *belian*, merupakan upacara adat penyembuhan orang sakit;
- upacara *gugu tautn* merupakan upacara adat yang dimaksudkan memperbaiki hari, cuaca dan alam dalam satu tahun;
- adat perkawinan, dalam adat ini diantaranya ada upacara lamaran (*pelulukng*) harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan diantaranya memberikan mandau,

⁴ Informasi dari responden Petinggi, Ketua BPK, Bidan Desa, Kurmam.

Kampung Gemuhan Asa

membayar dua antang bagi laki-laki dan satu antang bagi perempuan dan penyerahan piring putih (*jago bura*) sebagai tanda adat.

Budaya adat kematian yang masih dilakukan adalah:

- *kuangkai*, yang merupakan upacara pembongkaran tulang dari kubur untuk kemudian dikuburkan kembali, upacara *kuangkai* dipimpin oleh *wara*;
- *tohok* merupakan upacara kematian, dilakukan selama 3 hari, 7 hari, atau 9 hari. Upacara *tohok* dipimpin oleh *sentangih*.

Menurut kepala adat, upacara adat saat ini sudah mengalami perubahan terutama bila dilihat dari sisi waktu. Upacara adat saat ini dilakukan semakin lama.

Upacara adat kini, disamping mempunyai fungsi utama sebagai upacara ritual adat berfungsi pula sebagai sarana hiburan dengan berkumpulnya banyak orang.

Bahan upacara adat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan ketersediaan bahan upacara. Gotong-royong adat semakin melemah, sedangkan tujuan adat sebenarnya tetap, namun banyak masyarakat awam yang menilai upacara adat terlaksana karena motivasi uang. Padahal sebenarnya tujuan upacara adat tetap, upacara adat *kuangkai* tetap dilaksanakan untuk menguburkan ulang anggota keluarga yang telah meninggal. Perkembangan akhir-akhir ini, generasi muda masih berminat mempelajari atau mengkaji upacara adat, dari keseluruhan jumlah pemuda yang ada, kurang dari seperempatnya masih berminat mempelajari adat.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Penilaian terhadap tingkat solidaritas masyarakat terbagi menjadi dua hal. Terhadap masalah-masalah sosial seperti upacara pernikahan, kematian dan panen bersama responden menyatakan bahwa tingkat kerjasama masyarakat meningkat. Sedangkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja-kerja proyek kampung, tingkat kerjasama menurun. Penurunan tingkat kerjasama pada kerja proyek karena masyarakat telah mengetahui adanya alokasi dana atau budget bagi orang yang ikut bekerja di proyek.

Selama 12 bulan terakhir ini telah dilakukan 5 kali gotong-royong yaitu:

- pembuatan tempat penampungan air;
- membangun gereja;
- mendirikan kantor kepala kampung;
- menanam padi;
- upacara pernikahan.

Sekitar kurang dari separuh dari jumlah masyarakat ikut bergotong-royong. Antar keluarga juga terjadi saling menolong bila ada rumah tangga yang mengalami permasalahan ekonomi.

4.4 Konflik

Potensi konflik di kampung ini terutama berkaitan dengan penggunaan lahan dan air/sumber daya alam. Intensitas konflik lahan jarang dan cenderung menurun. Konflik lahan dikarenakan pengaruh perkembangan sosial ekonomi, nilai tanah yang semakin berharga memicu masyarakat menguasai tanah. Konflik bahkan terjadi sampai ke tingkat konflik antar keluarga dekat. Namun selama ini konflik masih dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Kampung Gemuhan Asa

Konflik sumber daya alam/air lebih dipicu pada pembagian air yang tidak merata. Rumah tangga yang tinggal di sekitar lapangan tidak mendapatkan air, karena hingga saat ini air dari tempat penampungan tidak mampu mengalir ke rumah tangga yang tinggal di sekitar lapangan karena letak tempat tinggal yang lebih tinggi daripada tempat penampungan air. Di kampung ini belum tersedia alat pompa air yang dapat dipakai sebagai sarana umum.

Walaupun masyarakat terdiri atas berbagai suku dan agama, namun konflik suku dan agama tidak pernah terjadi di kampung ini.

Konflik lahan juga pernah terjadi antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara (AU). TNI AU mengklaim bahwa tanah yang digunakan berladang oleh masyarakat Gemuhan Asa merupakan lahan milik TNI AU. Masyarakat mengklaim bahwa lahan yang digunakan TNI AU adalah lahan masyarakat yang dimiliki secara turun-temurun sebelum TNI AU menggunakannya sebagai pangkalan udara.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, situasi rumah tangganya dalam 5 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan. Hal ini karena mereka tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan cukup uang. Hasil ladang beberapa kali gagal panen karena terkena banjir. Pemerintah tidak pernah memberikan bantuan pengembangan usaha. Bantuan hanya datang dari keluarga, itu pun tidak terlalu berdampak pada pengembangan usaha, hanya cukup untuk mempertahankan hidup.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan hampir tidak ada sama sekali. Mereka tidak mendapatkan bantuan baik dalam bentuk beasiswa ataupun kartu kesehatan. Dalam proses pengambilan keputusan kampung mereka jarang dilibatkan sehingga mereka tidak mengetahui keputusan yang ditetapkan di kampung.

Permasalahan utama yang dihadapi rumah tangga kurang mampu adalah:

- tidak adanya usaha dan pekerjaan tetap;
- tanaman karet belum memberikan hasil karena baru saja ditanam;
- biaya pengobatan yang mahal.

Rumah tangga kurang mampu juga menyampaikan bahwa bila ada pihak lain yang mau membantu, maka prioritas bantuan yang dibutuhkan adalah: bantuan renovasi rumah (terutama lantai, atap dan dinding) dan bantuan bahan pokok.

4.6 Hiburan

Hiburan yang masih sering didapatkan adalah kesenian *tarian gantar* yang merupakan tarian yang dilakukan muda-mudi juga *tarian mengelawai* yaitu tarian dengan mempergunakan kain batik. Hiburan juga didapat dari permainan olah raga *volley* dan sepak bola. Hiburan lain adalah upacara adat *belian*.

Kampung Gemuhan Asa

4.7 Resume trend perubahan

Komponen	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Semakin lama	Kepala Adat
Bahan upacara adat	-	Berubah	Kepala Adat
Gotong royong adat	-	Melemah	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sudah berubah	Kepala Adat
Konflik lahan	-	Meningkat	Kepala Adat
Konflik suku	-	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	-	Sama	Kepala Adat
Konflik air dan SDA	-	Sama	Kepala Adat
Kerja sama antar masyarakat	-	Meningkat	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerja sama	-	Meningkat	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam⁵

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, di Kampung Gemuhan Asa terdapat enam macam tata guna lahan, yaitu:

- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- simpukng/lembo/buah;
- hutan.

Dalam 5 tahun terakhir ini luasan ladang dan simpukng berkurang, sedangkan luasan kebun rotan dan kebun karet bertambah karena masyarakat secara terus menerus menanam rotan dan karet. Sebagian lahan hutan berubah menjadi lahan karet dan rotan. Luasan ladang berkurang, karena masyarakat menilai budidaya rotan dan karet lebih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dibanding kerja ladang. Luasan lahan sawah tetap, masyarakat lebih menyukai kerja ladang.

Didasarkan pada perbandingan luasan, lahan karet dan lahan rotan merupakan jenis tata guna lahan yang paling luas. Luas lahan lebih dari setengah total luasan kampung.

Menurut Ketua BPK, jenis hutan yang ada di Gemuhan Asa adalah:

- hutan sekunder tua atau *batek begaq* (>30 tahun);
- hutan sekunder muda atau *batek mangur* (10-30 tahun);
- belukar tua atau *urat begaq* (5-10 tahun);
- belukar atau *urat mangur* (2-5 tahun);
- hutan raya;
- hutan kerangas (hutan tidak subur).

⁵ Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, Kurman, Rumah Tangga.

Kampung Gemuhan Asa

Hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda berkurang karena dirubah menjadi lahan pertanian tanaman karet dan rotan. Keperluan akan ketersediaan lahan perkebunan karet menyebabkan masyarakat memanfaatkan belukar bagi penanaman karet dan rotan. Aktivitas penebangan hutan dan perburuan telah mengakibatkan berkurangnya jenis tumbuhan dan hewan. Jenis hewan monyet dan babi hutan sudah sangat sulit didapatkan.

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan adalah sebagai berikut:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Perkebunan karet	Lahan untuk membuat ladang berkurang
Hutan lebih mudah diakses	-	-
Berkurangnya jenis tumbuhan dan hutan	Diburu	Sulit mendapatkan binatang tertentu (monyet dan babi hutan)

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Pemerintah kampung dan masyarakat telah menetapkan hutan seluas delapan hektar sebagai kawasan hutan lindung, yang difungsikan sebagai sumber mata air bersih bagi kampung. Aturan secara formal mengenai kawasan lindung belum ditetapkan, namun masyarakat telah menyadari dan memahami fungsi hutan lindung sehingga hingga saat ini masih dapat dipergunakan sebagai sumber mata air bersih.

Wilayah kampung tidak luas sehingga tidak terdapat cadangan lokasi hutan lainnya. Oleh karena itu rumah tangga tidak memiliki penghasilan dari penebangan pohon pada konsesi dalam bentuk *fee*. Lahan-lahan yang tersedia dimanfaatkan bagi usaha perkebunan produktif. Keterbatasan lahan atau SDA ini yang lebih memicu masyarakat mengembangkan peluang-peluang usaha produktif bagi peningkatan ekonomi keluarga.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut ketua BPK, lebih dari setengah jumlah rumah tangga di kampung ini memiliki keterjangkauan terhadap ladang. Dalam 5 tahun terakhir ini akses terhadap keterjangkauan ini menurun, terutama terhadap lahan. Dengan populasi penduduk yang cukup banyak sedangkan luas wilayah terbatas maka lahan yang tersedia dirasakan semakin tidak mencukupi kebutuhan kepemilikan ladang. Perebutan lahan antar anggota masyarakat atau antar keluarga mulai terjadi. Permasalahan lahan masih pada skala kecil dan masih dapat didamaikan.

Terjadi pula praktek-praktek penjualan lahan sejak harga lahan mulai menjadi lebih mahal. Penjualan lahan tidak hanya pada jual beli antar warga atau rumah tangga sesama warga Gemuhan Asa, namun pada tahun 1998 dan 1999 terjadi pula penjualan lahan oleh seorang warga Gemuhan Asa ke Ngenyan Asa dengan jumlah lahan yang cukup luas. Penjualan ini pernah mengakibatkan konflik di Gemuhan Asa, hingga harus melibatkan campur tangan pemerintah kampung.

Lahan milik rumah tangga sebagian besar belum didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau notaris guna mendapatkan sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan hukum formal. Pengakuan hak tanah hanya dilakukan dengan

Kampung Gemuhan Asa

mempergunakan surat keterangan dari pemerintah kampung. Pemerintah kampung berdasarkan keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta saksi-saksi yang disampaikan pemilik lahan. Petinggi sebagai kepala pemerintahan di kampung membuat surat keterangan kepemilikan lahan.

Jarak dan kondisi jalan menuju lahan tidak terlalu masalah bagi setiap rumah tangga, karena jarak relatif dekat antara yang berkisar antara 2 - 6 kilometer yang bisa dicapai dengan jalan kaki atau bersepeda motor. Kondisi jalan menuju lahan sebagian sudah beraspal terutama jalan poros kampung, sedangkan sebagian masih berupa jalan tanah yang menuju ke ladang.

5.4 Perladangan

Dalam tahun 1999 - 2003, masyarakat yang berladang berkisar antara 50 - 59%. Jumlah ini kecenderungannya semakin menurun setiap tahun karena masyarakat lebih menekuni kerja kebun rotan dan karet. Kerja ladang tanam padi lebih dimaksudkan guna mencukupi keperluan keluarga akan beras, belum pada tahap peningkatan produksi yang mendukung perekonomian keluarga. Sejak 2001 hingga sekarang hanya sekitar 5% responden yang bertanam padi di sawah.

Sekitar 83% responden yang berladang memiliki lahan sendiri, sisanya berladang di lahan pinjaman dan lahan bebas.

Pada tahun 2002, jumlah bibit yang ditanam responden yang berladang berkisar antara 0.5 - 8 kaleng. Pada tahun 2003, jumlah bibit yang ditanam berkisar antara 0.5 - 4 kaleng. Namun pada ke-dua tahun ini, kebanyakan responden menanam antara 1 - 2.5 kaleng.

Hasil panen responden bervariasi, bisa bertahan antara 1 - 10 bulan. Ada sekitar 13% responden yang hasil panennya mampu bertahan hingga panen berikutnya. Dalam 5 tahun terakhir, tidak ada bantuan beras baik dari tetangga, pemerintah, perusahaan maupun LSM. Hampir seluruh responden memenuhi kebutuhan akan beras dari membeli.

Walaupun ada sedikit rumah tangga yang bisa mencukupi keperluan beras, namun mereka tetap melakukan pembelian beras dengan alasan harga beras yang dibeli lebih murah dibandingkan dengan harga jual beras hasil panen padi.

Lebih dari separuh responden yang berladang menanam padi pada lahan bekas ladang yang berusia kurang dari 10 tahun, sisanya berladang pada lahan bekas ladang yang berusia antara 10 - 20 tahun.

Jarak dari kampung ke ladang bervariasi antara 5 - 120 menit. Sekitar 20% responden yang berladang mempunyai ladang yang jarak tempuhnya 30 menit dan 16% responden dengan waktu tempuh 60 menit. Hampir separuh responden pergi ke ladang dengan berjalan kaki sedangkan sisanya dengan sepeda motor, perahu ces, menumpang mobil perusahaan dan perahu.

5.5 Pendapatan uang

Sebagian besar pendapatan uang rumah tangga berasal dari hasil kebun karet dan usaha sebagai nelayan pencari ikan. Rumah tangga di Gemuhan Asa yang tinggal di dataran yang lebih tinggi yaitu orang-orang Tunjung, pendapatan uangnya berasal dari penjualan hasil kebun karet dan rotan serta penjualan ternak babi dan ayam. Harga karet berkisar antara Rp. 3.500/kilo dan harga daging babi sekitar Rp. 10.000/kilo.

Kampung Gemuhan Asa

Penghasilan dari hasil kebun rotan dan karet lebih besar dibanding dengan penghasilan lainnya. Penjualan ternak babi hanya kadang-kadang dilakukan terutama saat terjadi upacara adat. Kendala pada penjualan babi adalah karena saat ini belum ada pasar secara umum dikenal sebagai tempat penjualan daging babi.

Rumah tangga yang tinggal di sekitar pelabuhan atau tepi Sungai Mahakam sebagian besar orang-orang Kutai, pendapatan uang utamanya adalah menjual ikan. Ikan yang dibawa oleh pedagang dari Muara Muntai dibeli dan dijual ke kampung-kampung di sekitar Gemuhan Asa. Penjualan ikan sampai ke Lambing dan Damai dengan mempergunakan sepeda motor. Harga ikan bisa mencapai sekitar Rp. 20.000/kg, tergantung dari jenis ikan yang dijual.

Sumber pendapatan uang lainnya adalah tenaga angkut penurunan dan menaikkan barang dari kapal di pelabuhan Gemuhan Asa yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Ongkos sekali bongkar atau muat sekitar Rp. 100.000 - Rp. 300.000 sesuai dengan banyaknya barang yang dibongkar atau dimuat. Intensitas pekerjaan bongkar dan muat tergantung pada kedalaman tepi Sungai Mahakam, karena belum ada pembenahan dan pembangunan sarana fisik pelabuhan secara permanen. Dalam satu bulan paling tidak terdapat satu kali bongkar atau muat.

Di sektor rumah tangga, pendapatan uang didapatkan dari usaha membuka warung kebutuhan pokok, terdapat paling tidak 5 rumah tangga yang membuka usaha warung. Pendapatan uang dari usaha warung tidak dapat dipastikan dalam satu bulannya. Tergantung pada besarnya usaha warung dan penjualan barang.

Pendapat uang lainnya berasal dari gaji atau honor, terutama bagi tenaga guru yang mengajar di Sekolah Dasar dan para aparat pemerintah kampung. Aparat kampung telah mendapatkan gaji atau honor dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Terdapat satu rumah tangga yang mempunyai sumber pendapatan uang dari kerja sebagai pengemudi truk yang mengangkut kayu, dengan penghasilan dalam satu bulannya bisa mencapai Rp. 1,5 juta.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Pasar terdekat ada di Barong Tongkok dan Melak, di kampung belum terdapat pasar. Keperluan rumah tangga dengan mudah didapatkan di kampung karena terdapat beberapa rumah tangga yang membuka warung yang menjual bahan-bahan keperluan pokok rumah tangga. Harga tidak terlalu jauh berbeda dengan harga di Barong Tongkok dan Melak.

Transportasi reguler ke pasar terdekat di Barong Tongkok dan Melak biasanya mencapai Rp. 5.000 sekali jalan atau Rp. 15.000 sekali jalan bila dicarter. Sarana transportasi reguler masih terbatas hanya pada hari Senin dan Kamis.

Sarana jalan darat dalam 5 tahun terakhir ini menjadi lebih baik atau mengalami peningkatan. Jalan antara Gemuhan Asa ke Melak dan Barong Tongkok sudah diaspal, hanya sebagian jalan di tanjakan kampung yang belum diaspal dan masih berupa jalan pengerasan batu, kondisi jalan ini cukup berbahaya bagi pengendara motor dan mobil. Jalur sungai kondisinya cukup baik, tapi dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya mutunya berkurang dan sudah jarang digunakan, masyarakat lebih senang mempergunakan sarana jalan darat yang lebih baik dan cepat.

Akses komunikasi telah terbuka, telepon seluler (HP) sudah dapat digunakan di kampung, tapi penggunaannya masih terbatas, belum keseluruhan masyarakat mempergunakannya. Beberapa rumah tangga mempergunakan *Handy Talky (HT)* sebagai sarana komunikasi.

5.7 Keterjangkauan energi

Secara umum sumber energi terjangkau baik dari harga maupun ketersediaan. Perkembangan 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa ada dua macam energi yang baru dipergunakan yaitu: 1) gas; dan 2) listrik. Sumber energi lainnya yaitu: 1) kayu bakar; 2) minyak tanah ; 3) solar sudah lama dipergunakan.

Listrik digunakan oleh sebagian besar rumah tangga, hanya rumah tangga yang kurang mampu yang tidak mempergunakan listrik. Beberapa rumah tangga mempergunakan listrik dengan menyambung listrik dari rumah tangga yang sudah mempunyai sambungan listrik langsung dari PLN.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sekitar 53% atap rumah responden rumah tangga terbuat dari seng, 31% terbuat dari sirap sedangkan sedikit sisanya terbuat dari genteng dan daun rumbia. Hampir seluruhnya berdinding papan kayu biasa, yang lainnya menggunakan ulin dan bahkan ada satu responden yang berdinding permanen. Demikian juga dengan lantai rumah. Hampir seluruh responden lantai rumahnya terbuat dari papan kayu biasa, sedikit sisanya adalah semen dan keramik.

Sekitar 67% responden rumah tangga rumahnya sudah dialiri listrik dari PLN, ada sedikit yang menggunakan listrik kelompok. Namun di satu pihak masih terdapat 24% responden rumah tangga yang rumahnya belum menggunakan fasilitas listrik.

Hampir semua rumah mempergunakan WC. Sekitar 37% responden menggunakan WC darat dan 37% lainnya menggunakan WC sungai. Sudah ada sekitar 24% responden yang sudah mempunyai WC di dalam rumah.

Pada umumnya rumah penduduk berukuran 12 x 6 meter. Beberapa rumah tangga masih berumah ukuran 6 x 4 meter beratap keping, dengan banyak kayu yang rapuh dan kondisi rumah yang kotor. Semua rumah tangga mempergunakan WC, sebagian mempergunakan WC di darat dan sebagian lagi mempergunakan WC di sungai.

Rumah penduduk yang bermukim di dataran rendah seringkali terkena banjir saat air Sungai Mahakam meluap. Pada saat banjir tinggi air sungai bisa mencapai ketinggian 3 meter, sehingga rumah dilelapi air hingga batas jendela.

Kampung Gemuhan Asa

5.9 Resume trend perubahan

Komponen	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Terjangkau	Menurun	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai	Sedang	Berkurang	Petinggi
Ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Kebun sayur	Ada	Tetap	Ketua BPK
Kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Kebun karet	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Simpukng/buah/lembo	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Kebun kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Peternakan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (>30 thn)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (10-30 thn)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua (5-10 thn)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan rawa	Tidak ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luas hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Akses terhadap hutan	-	Lebih mudah	Ketua BPK
Jenis tumbuhan dan hewan	-	Berkurang	Ketua BPK
Pertumbuhan ekonomi	-	Sama saja	Ketua BPK

6. Pendidikan⁶

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar 20% dari 54 responden rumah tangga menyatakan bahwa ada anak putus sekolah dalam keluarganya. Pada umumnya mereka putus sekolah pada tingkat SD dan SMP dengan alasan biaya dan kurangnya motivasi belajar. Namun ada beberapa rumah tangga yang tidak menjelaskan alasan anak putus sekolah.

Menurut kepala sekolah, adanya acara keluarga dan keperluan bepergian ke luar kampung merupakan alasan sebagian kecil siswa sekolah tidak mengikuti pelajaran. Sebagian siswa tidak melanjutkan sekolah karena merasa tidak aman. SDN. No. 006 Gemuhan Asa terletak di bagian dataran tinggi, bagi siswa yang tinggal di dataran rendah sekitar pelabuhan, letak sekolah ini cukup jauh dengan kondisi jalan menanjak yang cukup panjang. Di beberapa tempat di sekitar jalan tanjakan jarang rumah penduduk dan jarak antar rumah penduduk ada yang mencapai sekitar 50 meter, situasi sekitar jalan kadang kala sepi.

Pada ujian tahun lalu, dari 13 siswa yang mengikuti ujian, 9 siswa lulus ujian, dengan demikian persentase kelulusan sekitar 70%. Dibandingkan dengan persentase kelulusan siswa pada tahun ajaran sebelumnya, persentase kelulusan tahun ajaran ini menurun. Jumlah siswa yang mendaftar tahun ajaran ini adalah 15 orang.

⁶ Informasi dari responden Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 006 Gemuhan Asa.

Kampung Gemuhan Asa

Tenaga pendidik atau guru aktif mengajar, hanya saja tingkat pendidikan guru masih tetap, belum ada program pemerintah yang ditujukan meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan formal. Program pemerintah yang juga telah dilakukan adalah pelatihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Sekolah yang ada di Gemuhan Asa adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTPT). Berdasarkan komposisi siswa, kurang dari sepertiga siswa SD berasal dari luar kampung, mereka tinggal di tempat keluarga.

Siswa SD yang telah lulus bisa melanjutkan ke pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Melak atau Barong Tongkok yang berjarak sekitar 12 kilometer dari kampung. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi terdekat ada di Melak. Hanya saja perguruan tinggi yang ada di Melak belum sepenuhnya aktif.

Dalam 5 tahun terakhir ini, kondisi fisik sekolah dan alat-alat serta buku-buku berkurang. Jumlah staf dan jumlah sekolah tetap, sedangkan gaji guru negeri menjadi lebih besar.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen	Keadaan Saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Staf	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Prosentasi kelulusan	-	Menurun	Kepala Sekolah
Tingkat orang bisa baca tulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah
Gaji guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Aktif	Kepala Sekolah
Prosentasi kelulusan	-	Menurun	Kepala Sekolah

7. Kesehatan⁷

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Menurut Bidan Kampung jenis penyakit yang ada di kampung ini adalah:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	ISPA
Orang dewasa	Hipertensi ISPA
Perempuan	Keputihan
Orang lanjut usia	TBC

⁷ Informasi dari responden Kepala Adat, Bidan Desa.

Kampung Gemuhan Asa

Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), diare, malaria, TBC merupakan penyakit yang sering diderita masyarakat Gemuhan Asa. Penderita penyakit hipertensi, asam urat, TBC, dan malaria kebanyakan adalah kelompok umur dewasa. Tingkat keseringan serangan penyakit malaria menurun, penyakit diare berfluktuasi, dan penyakit TBC tetap. Kelompok umur anak-anak lebih sering menderita ISPA dan diare. Penyakit keputihan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi sering diderita kaum ibu.

Perkembangan populasi penduduk dalam 12 bulan terakhir ini menunjukkan jumlah orang yang meninggal 4 orang, jumlah bayi yang lahir 10 orang dengan berat rata-rata 3 kg. Bayi yang meninggal 2 orang atau 2% dari jumlah kelahiran dengan penyebab utama kelahiran prematur. Jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan 1 orang. Umur rata-rata orang yang meninggal 70 tahun, dikarenakan penyakit atau karena usia lanjut.

7.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih didapat dari pancuran mata air. Kondisi air jernih dan tidak berbau. Jumlah debit air tidak menentu karena lebih tergantung pada musim. Pada musim hujan, debit air meningkat sedangkan pada musim kemarau debit menurun. Pada musim kemarau, sumber air tetap mengalir walaupun sedikit.

Perawatan dan pemeliharaan fasilitas air dilakukan secara berkala. Ada petugas khusus yang disertai tugas perawatan dan pemeliharaan. Air didistribusikan kerumah-rumah, yang kemudian disimpan dalam gentong dan drum. Fasilitas penampungan air umum belum tersedia.

7.3 Kebersihan Kampung

Jalan kampung yang berupa jalan pengerasan batu mulai dari depan lapangan bola sampai ke simpang pertigaan kampung menuju Muara Asa kondisinya cukup bersih. Jalan mulai dari simpang pertigaan sampai ke pelabuhan telah diuruk, sehingga tidak ada lagi air yang tergenang atau lobang-lobang di jalan. Dengan adanya pengurukan jalan ini, badan jalan tidak lagi terendam air saat air Sungai Mahakam naik. Jalan tanah dari pertigaan menuju ke Muara Asa, kondisinya cukup terawat baik, tidak terdapat lobang-lobang jalan, genangan-genangan air, atau pun badan jalan yang longsor, sehingga nyaman dilalui. Jalan aspal antara lapangan sampai ke jalan besar, kondisinya sangat baik, tidak terdapat lobang-lobang jalan atau rumput-rumput yang tumbuh di badan jalan.

Susunan rumah berjajar di kiri dan kanan jalan kampung. Di antara rumah satu dengan rumah lainnya terdapat celah ruang sekitar 1,5 meter. Tidak terdapat tumpukan sampah atau tumpukan kotoran lainnya.

Sarana rumah ibadah mesjid dan gereja serta sarana olah raga terawat dengan baik. Sarana ibadah telah dibenahi dengan penambahan ruang atau bangunan. Lingkungan di sekitar sarana ibadah cukup bersih.

Permasalahan terdapat pada tanah-tanah di sekitar tepian Sungai Mahakam. Arus sungai yang cukup deras dari hulu, mengakibatkan tanah-tanah di sekitar pelabuhan longsor, belum ada upaya pemerintah kampung melakukan penurapan guna mencegah tanah longsor atau sedimentasi.

Kampung Gemuhan Asa

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia adalah polindes dan dukun. Kurang dari separuh pasien yang berobat berasal dari kampung di sekitar Gemuhan Asa. Fasilitas kesehatan terdekat adalah Puskesmas di Melak yang berjarak sekitar 7 kilometer atau 20 menit dengan memakai sepeda motor dari kampung, ongkos perjalanan memakai ojek adalah Rp. 15.000 sekali jalan.

Alternatif pengobatan lainnya adalah pengobatan tradisional. Jumlah ahli pengobatan tradisional semakin menurun karena banyak yang sudah meninggal. Pengobatan tradisional dilakukan melalui upacara pengobatan tradisional yang hingga saat ini masih dilakukan, paling tidak sekali dalam sebulan.

Jumlah yang memanfaatkan pengobatan tradisional menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan masyarakat saat ini adalah berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Alternatif pengobatan tradisional dilakukan setelah pengobatan melalui rumah sakit tidak dapat menyembuhkan pasien.

Biaya upacara pengobatan tradisional tidak menentu sesuai dengan kemampuan dan kesenangan perasaan yang berobat. Biaya upacara pengobatan penyakit biasa mencapai Rp. 100.000. Biaya upacara pengobatan penyakit yang parah dengan syarat upacara memotong ayam dan babi bisa mencapai Rp. 2 juta, sedangkan upacara pengobatan dengan memotong kerbau bisa mencapai Rp. 10 juta.

7.5 Resume trend perubahan

Komponen	Kedadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Pancuran air	Berfluktuasi	Bidan Kampung
Mutu air bersih	Pancuran air	Meningkat	Bidan Kampung
Mutu air sungai	-	Sama saja	Bidan Kampung
Jumlah fasilitas kesehatan	Ada	Lebih banyak	Bidan Kampung
Kondisi fasilitas kesehatan	-	Sama saja	Bidan Kampung
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Ada	Sama saja	Bidan Kampung
Ketersediaan obat dan peralatan	Ada	Sama saja	Bidan Kampung
Gaji/honor	Ada	Lebih besar	Bidan Kampung
Penyakit malaria	Ada	Menurun	Bidan Kampung
Penyakit diare	Ada	Fluktuasi	Bidan Kampung
Penyakit TBC	Ada	Sama	Bidan Kampung
Jumlah ahli pengobatan tradisional	Banyak yang meninggal	Berkurang	Kepala Adat
Jumlah pengobatan tradisional	Lebih dari sekali sebulan	Menurun	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Menurut kepala adat, sepuluh tahun terakhir ini terjadi beberapa bencana yaitu: kebakaran hutan (tahun 1998/1999); kelaparan (1998/1999); kekeringan (1998/1999); banjir (1997/1998); serangan hama (1997/1999); perubahan iklim (sejak tahun 1974 hingga sekarang).

Bencana yang terjadi merupakan kejadian yang saling berhubungan dari mulai bencana kekeringan disusul dengan kebakaran hutan, kelaparan, dan banjir di semua tepian Sungai Mahakam. Kekeringan di musim kemarau panjang telah mengakibatkan kebakaran hutan dan bencana kelaparan.

Peristiwa yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Peristiwa	Dampak
1	Kebakaran hutan	Hutan-hutan habis, tidak ada kayu
2	Kelaparan	Banyak orang sakit, panen gagal
3	Kekeringan	Penen gagal, ada bantuan dari gereja
4	Banjir	Gagal panen Bantuan 10 ton beras untuk masyarakat yang di tepi Sungai Mahakam
5	Hama	Gagal panen
6	Perubahan pemerintah	Dengan adanya Kabupaten Kutai Barat, prasarana jalan lebih baik
7	Iklim	Hutan rusak, musim tidak bisa diprediksi sejak 1974, pembabatan hutan dengan alat mekanis mengakibatkan hutan rusak parah

Menurut informasi Kepala Adat Gemuhan Asa , pada musim kemarau, kayu-kayu hutan banyak yang mati yang mengakibatkan gagal panen, hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit karena kelaparan. Bencana kekeringan tahun 1997/1998 terjadi hampir merata di seluruh Kalimantan Timur. Bencana iklim terjadi sejak adanya eksploitasi hutan secara besar-besaran dengan mempergunakan alat-alat mekanis mulai 1974. Penebangan kayu mengakibatkan iklim tidak bisa lagi ditentukan secara pasti yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan dan penentuan masa tanam. Bencana kelaparan dapat diatasi setelah adanya bantuan beras sekitar 10 ton serta bantuan bahan makanan lainnya dari pemerintah dan lembaga gereja.

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Gemuhan Asa. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- masalah ekonomi, karena lahan untuk berladang dan berkebun sudah terbatas, rapak belum dapat dimanfaatkan untuk sawah karena belum ada irigasinya, tidak ada modal utk usaha, ikan di sungai sebagai sumber mata pencaharian sudah sulit didapat karena kena racun dan strum, beternak sering kena wabah penyakit;

Kampung Gemuhan Asa

- sarana dan prasarana air bersih dari sumber mata air belum berfungsi, ke Sungai Mahakam tidak terjangkau (jauh), sungai dekat kampung tidak ada;
- masalah kesehatan, biaya berobat mahal, fasilitas kesehatan belum memadai, jalan berdebu sehingga menimbulkan sakit mata;
- masalah pendidikan, tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena tidak ada biaya, sumber mata pencaharian (ekonomi) masih sulit.

Menurut masyarakat biasa:

- Masalah ekonomi, sarana produksi tidak ada seperti: potensi rapak yang belum diolah menjadi sawah, lahan kering terbatas, hutan tidak ada, tidak ada modal usaha.
- Masalah pendidikan, sumber daya manusia rendah karena tidak mampu sekolah lebih tinggi, pemerintah tidak pernah memberikan pelatihan atau kursus-kursus terutama kursus pertanian.
- Pemerintah tidak terbuka atas informasi tentang proyek-proyek atau peluang-peluang usaha yang masuk ke kampung. Yang dapat hanya orang luar atau orang-orang tertentu di kampung melalui cara-cara KKN, termasuk juga untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Untuk itu harus ada kuota bagi warga dari kampung ini agar dapat masuk menjadi pegawai.
- Sarana dan prasarana yang terkait dengan masalah nomor satu yakni pengadaan sarana produksi, misalnya cetak sawah dan membuat pelabuhan secara permanen di kampung sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut tokoh masyarakat:

- Peningkatan penghasilan masyarakat dan penciptaan peluang usaha yang berkesinambungan dan secara terus menerus.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Kondisi kelembagaan masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan. Kualitas musyawarah relatif buruk. Sementara BPK tidak menjalankan fungsinya. Hubungan dengan pemerintah kabupaten cenderung membaik, terutama dari sisi jarak, kepedulian, keterbukaan informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Konflik lahan cenderung meningkat karena nilai lahan semakin tinggi. Upacara adat mengalami perubahan dari sisi waktu dan tujuan. Saat ini waktu upacara adat semakin lama karena tujuan dari penyelenggara lebih kepada tujuan keuntungan finansial.

Beberapa rumah tangga mengaku mendapatkan penghasilan baru dari karet dan rotan. Beberapa yang lain mendapatkan dari penebangan pohon, jumlah rumah tangga yang mendapatkan penghasilan dari menebang pohon sangat sedikit.

Tidak ada perubahan jumlah sekolah, kondisinya terus menurun. Fasilitas sekolah seperti buku-buku semakin memburuk. Jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis meningkat. Gaji para guru meningkat yang diikuti oleh tingkat keaktifannya.

Jumlah fasilitas kesehatan meningkat, kondisinya tidak berubah. Fasilitas pendukungnya seperti obat-obatan tidak mengalami perubahan. Frekuensi kasus penyakit malaria menurun, namun belum ada perubahan pada penyakit TBC.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Gemuhan Asa, survei dilakukan dengan melibatkan:

- rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarainya adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- bidan kampung;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan bersama dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Jambuq

Jumlah rumah tangga: 67	Jumlah jiwa: 131
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 81	Jumlah KK: 275
Jumlah rumah tangga miskin: 6	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Kutai	Jumlah SD: 1
Responden pengganti Kepala Adat: Juliansyah	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Saili	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1,5 jam (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 5,5 jam (sepeda motor)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Bongan, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 116 ⁰ 84' BT, 0 ⁰ 42'LS	
Tanggal survei: 17 - 19 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Jambuq sudah berdiri sejak tahun 1911. Masyarakat Jambuq memiliki keyakinan bahwa nenek moyang mereka berasal dari *Lamin Tiwey Lou Lalay Balok*.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani;
- LKMD.

Kampung Jambuq

Menurut Ketua BPK, lembaganya didirikan pada tahun 2003 tepatnya pada bulan Januari. Sampai dengan saat ini mereka belum dilantik dan tidak mendapat gaji. BPK melakukan konsultasi dengan masyarakat rata-rata 1 bulan sekali.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Persoalan HPH PT. ITCI	Masyarakat bekerjasama dengan PT. ITCI ; Masyarakat dapat mengambil kayu yang tumbuh di areal perusahaan. PT. ITCI yang berhak menunjuk pohon yang akan ditebang
Persoalan dengan pengusaha kayu yang menebang di Jambuq	Hasil <i>fee</i> dari pengusaha yang mengambil kayu di lahan warga dipotong Rp.50.000 untuk kas kampung

Menurut Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir musyawarah semakin sering dilakukan. Meningkatnya frekuensi musyawarah dibarengi dengan kualitas dan tingkat dampak keputusan musyawarah yang semakin baik.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Meningkat	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Kampung Jambuq pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

	Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
1	Prasarana ibadah berupa Masjid	Belum ada jawaban
2	Pemadatan penduduk, penambahan jumlah penduduk	Belum ada jawaban
3	Peternakan	Belum ada jawaban
4	Perkebunan pisang	Belum ada jawaban
5	Reboisasi	Belum ada jawaban

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut Ketua BPK
1	Program air bersih tahun 2003	Kompensasi dari PT. ITCI tahun 2000 sebesar Rp.3.300.000	Program PMDH PT. ITCI
2	-	-	Yayasan KEHATI memberikan bantuan berupa beras dan bibit

Kampung Jambuq

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Frekuensi kunjungan petugas pemerintah dalam sebulan kurang dari 1 kali. Instansi yang pernah datang hanyalah dari pihak kecamatan. Bupati pernah singgah 1 kali ketika melakukan perjalanan melewati Kampung Jambuq.

Pada awal pemekaran Kutai Barat, Kampung Jambuq menolak untuk bergabung dengan Kutai Barat dan mereka menginginkan untuk bergabung ke Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan adanya program Desa 1 Milyar dari Pemerintah Kutai Kertanegara yang dinilai dapat membantu pembangunan Kampung. Alasan lain adalah jarak ke Kutai Kartanegara lebih dekat dibanding jarak ke Kutai Barat.

Menurut Ketua BPK, hubungan masyarakat dengan pemda kabupaten dalam 5 tahun terakhir cenderung lebih baik. Hal ini disebabkan perbaikan jalan yang menghubungkan antara kampung dengan kecamatan. Keterbukaan informasi dinilai sangat buruk karena jarak yang cukup jauh dari kabupaten, sementara partisipasi dalam pengambilan keputusan dinilai sama saja.

Secara lebih rinci, tabel berikut menjelaskan perubahan hubungan pemerintah dengan masyarakat:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Sama saja
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Sama saja
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Informasi pembangunan diperoleh melalui kunjungan-kunjungan pemerintah baik itu dari kecamatan maupun kabupaten atau dari orang lain. Komunikasi dengan pihak luar menggunakan pesawat *Handy Talky* (HT).

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih buruk	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Menurun	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan Penduduk

Dalam jangka pendek selama 5 tahun terakhir ini ada 2 keluarga yang meninggalkan kampung, hal ini dikarenakan susahnya mendapatkan pekerjaan sementara hasil hutan tidak dapat menjadi harapan karena banyak yang sudah terbakar. Selain itu, ada satu rumah tangga yang pindah karena pindah tugas ke Tenggarong.

Jangka Waktu	Berapa KK	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	2	Mencari pekerjaan
Waktu panjang atau selamanya	1	Pindah tugas

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan diantaranya adalah *buntukng*, *tolak bala* dan *gugu tautn*.

Secara keseluruhan hampir tidak ada perubahan pada upacara adat baik dari sisi waktu maupun bahan-bahan. Tingkat gotong-royong yang terjadi pada masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Begitupun halnya dari sisi tujuan tidak terjadi perubahan. Menurut Kepala Adat, banyak generasi muda yang tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari para orang tua. Hal ini merupakan ancaman bagi kelangsungan budaya dan ilmu pengetahuan tradisi.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan sama saja. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- perbaikan jalan;
- pembangunan rumah masyarakat yang tidak mampu;
- penanaman padi;
- pembukaan ladang.

Biasanya lebih dari separuh jumlah masyarakat ikut dalam kegiatan gotong-royong.

Sedangkan menurut rumah tangga kurang mampu, tingkat kerjasama di kampung dirasakan sama saja dalam 5 tahun terakhir. Jika mereka memerlukan bantuan, biasanya mendapatkan bantuan dari luar pihak keluarga.

Kepala Adat menjelaskan bahwa biasanya masyarakat mengajukan permohonan bantuan ke pihak kecamatan jika terjadi krisis pangan di kampung.

Kampung Jambuq

4.4 Konflik

Menurut staf lembaga adat, pernah terjadi konflik lahan antara warga di dua kampung yaitu Kampung Jambuq dengan Kampung Gusik. Keadaan konflik ini semakin memburuk. Konflik ini dipicu oleh kehadiran HPH PT. ITCI. Karena PT. ITCI “membeli” areal hutan yang kemudian dibayar dengan *fee* tebang, maka banyak masyarakat yang berebut kawasan hutan untuk “dijual” ke PT. ITCI. Sedangkan konflik keluarga maupun agama tidak pernah terjadi.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang dihadapi oleh mereka adalah:

- tidak ada lahan untuk berladang karena lahan diambil oleh PT. ITCI;
- tidak bisa membiayai anak untuk sekolah.

Secara umum, situasi kehidupan dirasakan memburuk dalam 5 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan oleh:

- kekeringan dan kebakaran hutan;
- karena adanya konflik lahan yang terjadi dengan PT. ITCI;
- karena adanya salah satu rumah masyarakat kurang mampu yang terbakar.

Rumah tangga kurang mampu merasa tidak bisa membayar pendidikan untuk anak cucu. Untuk masalah kesehatan, masyarakat kurang mampu merasa tidak terbantu karena mereka tetap harus membayar biaya pengobatan. Namun mereka sering mendapatkan bantuan secara sukarela dari Mantri Kampung Resak Tiga.

Untuk masalah kebutuhan pangan, mereka pernah mendapatkan bantuan sembako dari salah satu panti asuhan di Kutai Kartanegara.

Orang kurang mampu merasa jarang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di kampung. Jika ada pihak luar yang ingin membantu, dia merasa bantuan yang paling penting adalah perbaikan rumah dan lapangan usaha seperti peternakan kambing. Menurut Ketua Posyandu, jika seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan maka biasanya mereka membuat surat rujukan berobat yang direkomendasikan oleh kepala kampung.

4.6 Hiburan

Di Kampung Jambuq hiburan masyarakat hanya berupa televisi dan VCD.

Kampung Jambuq

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	Sesuai dengan ketentuan adat	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	Sesuai dengan ketentuan adat	Sama saja	Kepala Adat
Gotong-royong dalam upacara adat	Sesuai dengan ketentuan adat	Semakin kuat	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	Sesuai dengan ketentuan adat	Sama saja	Kepala Adat
Konflik lahan	Pernah	Meningkat	Kepala Adat
Konflik keluarga	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Pernah	Meningkat	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Kampung Jambuq adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun rotan;
- lembo;
- hutan;
- kebun karet.

Hutan di kampung Jambuq dulunya cukup luas, sekitar sepuluh kali luas pemukiman atau sekitar 15.000 hektar. Tetapi sejak datangnya PT. ITCI seluruh lahan tersebut bukan lagi milik kampung tetapi telah menjadi milik PT. ITCI. Sisanya hanya sekitar 5.000 hektar yang digunakan untuk transmigrasi. Sedangkan ladang jumlahnya berkurang dari tahun ke tahun karena banyaknya hama yang disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, banyak masyarakat yang meninggalkan ladang mereka. Kebun rotan banyak yang terbakar. Selain itu, banyak masyarakat yang meninggalkan kebun rotannya karena harga jual yang rendah.

Menurut Staf Lembaga Adat, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Jambuq adalah:

- hutan perawan (*himba*);
- hutan sekunder tua (*belukar kerengkakng*);

Kampung Jambuq

- hutan sekunder muda (*belukar rendah*);
- belukar tua (*belukar rendah*);
- belukar (*lati*);
- hutan rawa (*rapak*);
- hutan kerangas (*rapak*).

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/IPHH

Kampung Jambuq tidak memiliki kawasan hutan lindung karena semua hutan telah dikuasai oleh PT. ITCI. Masyarakat Jambuq mendapatkan kompensasi dari PT. ITCI yang besarnya Rp. 3.000/kubik. Biasanya uang kompensasi tersebut diterima per 3 bulan sekali dan kemudian dibagikan ke masyarakat kampung. Menurut responden rumah tangga kurang mampu, mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai konsesi hasil hutan dan juga mereka mempertanyakan jumlah *fee* yang berbeda-beda.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut petinggi, seluruh rumah tangga memiliki lahan. Sampai dengan saat ini belum pernah terjadi jual beli lahan. Walaupun PT. ITCI membayar kompensasi, tetapi masyarakat tidak mengartikan bahwa PT. ITCI membeli lahan mereka. PT. ITCI menggunakan lahan mereka tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Pembayaran kompensasi juga tidak berdasarkan perjanjian apapun. Semua masyarakat kampung mendapatkan pembagian kompensasi yang dilakukan per 3 bulan sekali, walaupun besarnya berbeda-beda.

5.4 Perladangan

Sekitar tigaperempat dari rumah tangga menanam padi. Sebagian besar menanam padi pada lokasi ladang, hanya sekitar 10% - 15% responden yang menanam padi di lokasi sawah. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang berladang meningkat hingga sekitar 84% pada tahun 2003.

Sekitar sepertiga dari yang berladang menggunakan lahan pinjaman, sisanya berladang pada lahan milik sendiri. Kebanyakan rumah tangga yang berladang menanam bibit padi antara 0,5 - 2 kaleng, walaupun khusus pada tahun 2002 ada yang menanam bibit sampai dengan 4 kaleng.

Sekitar 60% dari responden rumah tangga yang berladang dapat memenuhi kebutuhan beras mereka untuk 1 tahun dari hasil ladang mereka sendiri. Sisanya hanya cukup untuk kebutuhan 6 - 10 bulan. Bagi rumah tangga yang tidak tercukupi kebutuhan berasnya, mereka mendapatkan tambahan beras dengan cara membeli. Tidak ada responden rumah tangga yang menyatakan pernah mendapat bantuan dari keluarga.

Hampir 90% dari rumah tangga yang berladang, membuka ladang pada lahan bera yang telah berumur lebih dari 10 tahun. Kebanyakan umur lahan berkisar antara 10 - 30 tahun, bahkan beberapa diantaranya ada yang berumur 100 tahun.

Sekitar 70% lokasi ladang dapat ditempuh dengan berjalan kaki antara 0,5 - 1 jam. Sisanya harus ditempuh antara 1,5 - 2,5 jam. Hanya sedikit rumah tangga yang pergi ke ladang dengan menggunakan sepeda motor.

Kampung Jambuq

5.5 Pendapatan uang

Sekitar setengah dari penduduk mendapatkan penghasilan uang dari kerja kayu. Namun sering sekali pembeli kayu tidak membayar dengan tunai. Selain kerja kayu sendiri, masyarakat juga mendapatkan penghasilan dari pembagian *fee* kayu dari PT. ITCI. Dari kerja kayu, mereka bisa mendapatkan antara Rp.250.000 - Rp.350.000/kubik. Dalam keadaan lancar, satu orang bisa memproduksi sekitar 10 m³/bulan. Penghasilan dari kerja kayu dan *fee* kayu dari PT. ITCI merupakan pendapatan utama, walaupun pendapatan ini sebenarnya merupakan pendapatan baru yang muncul dalam 5 tahun terakhir.

Sebagian lain dari rumah tangga memperoleh pendapatan uang dari menyadap karet di kebun mereka sendiri, berjualan di warung, kerja bangunan dan kerja di perusahaan batu bara. Sebenarnya masyarakat memiliki kebun rotan, tetapi harga rotan yang rendah membuat aset tersebut menjadi tidak bernilai. Sehingga hanya sedikit sekali yang menjual rotannya.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Di Kampung Jambuq sudah ada bangunan pasar, tetapi belum pernah digunakan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat dapat memperolehnya di pasar terdekat yang berada di Kampung Resak Tiga yang jaraknya sekitar 7 kilometer dan dapat ditempuh selama 10 menit dengan menggunakan sepeda motor. Biasanya masyarakat menggunakan truk secara bersama-sama untuk menuju Pasar Resak Tiga.

Kampung Jambuq dilewati oleh jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Melak. Saat ini masyarakat merasakan aksesibilitas yang lebih baik karena adanya perbaikan pembangunan dan perbaikan jalan Trans Kalimantan tersebut. Perbaikan jalan memicu munculnya sarana transportasi seperti bis umum yang melayani trayek Samarinda - Melak.

5.7 Keterjangkauan energi

Sumber energi yang digunakan di Jambuq adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik;
- gas.

Dari sumber-sumber energi tersebut, gas merupakan sumber energi baru. Kayu bakar dirasakan masih terjangkau, sementara listrik dirasakan makin sulit terjangkau karena biayanya semakin mahal yang disebabkan naiknya harga BBM. Listrik yang digunakan di kampung ini adalah listrik lokal yang dihasilkan dari mesin-mesin pribadi. Seperti halnya listrik, minyak tanah juga semakin sulit dijangkau karena harga yang terus meningkat.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Seluruh rumah responden di kampung ini adalah rumah kayu. Seluruh dinding dan lantai rumah terbuat dari papan kayu yang bukan jenis ulin dan bengkirai. Sebagian besar atap rumah merupakan atap sirap dan keping, sisanya sekitar 10% merupakan atap seng.

Kampung Jambuq

Hanya sekitar 5% dari rumah responden yang tidak dialiri arus listrik. Di kampung ini tidak ada fasilitas listrik dari PLN, sehingga sumber listrik kebanyakan diambil dari mesin generator milik kampung atau milik kelompok. Beberapa dari rumah tangga memiliki mesin generator pribadi, sedangkan beberapa yang lain menyambung listrik dari tetangga.

Seluruh responden rumah tangga menggunakan WC. Sekitar 90% diantaranya menggunakan WC yang terletak di sungai, sisanya menggunakan WC yang terletak di dalam rumah.

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Menurun karena sudah dikuasai PT. ITCI	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Berkurang	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan simpukng	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>himba</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>belukar kerekakng</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>belukar rendah</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua (<i>belukar rendah</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar (<i>lati</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>rapak</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan lindung	Tidak ada	-	Ketua BPK
Akses kepada hutan	Mudah karena ada perjanjian dengan ITCI	Lebih mudah	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan hewan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Ada	Membaik	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar sepertiga dari rumah tangga yang disurvei menyatakan ada anak putus sekolah dalam rumah tangga mereka. Pada umumnya anak putus sekolah disebabkan oleh kurangnya biaya. Di kampung ini ada kebiasaan dimana anak sangat sulit berpisah dengan orang tua, akhirnya sulit bagi mereka ketika hendak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ke tempat yang cukup jauh.

Rata-rata anak yang dapat membaca pada kelas 3 SD. Selain pendidikan formal juga terdapat pendidikan non formal yang diadakan oleh PMDH PT. ITCI seperti kursus bengkel dan menjahit. Jumlah orang yang melek huruf meningkat. Tingkat pendidikan para guru sama saja.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Kampung Jambuq hanya ada 1 sekolah yaitu Sekolah Dasar 007. Keadaan bangunannya sudah banyak yang rusak karena tidak pernah diperbaiki sejak tahun 1977. Menurut penjaga sekolah, masyarakat pernah mengajukan perbaikan sekolah tetapi belum ada jawaban. Fasilitas sekolah sangat terbatas dan tenaga pengajar sangat kurang sekali. Hanya terdapat 3 orang guru pengajar tetap dan 1 orang penjaga sekolah. Pada tahun 2003 ada 5 orang murid Baru. Untuk melanjutkan ke SLTP dan SLTA, biasanya anak-anak pergi ke Jambuq Makmur yang dapat ditempuh selama 10 menit dengan sepeda motor.

Secara umum kondisi fasilitas pendidikan memburuk dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada penambahan jumlah sekolah, alat-alat dan buku-buku serta staf pengajar. Walaupun demikian gaji para guru diakui meningkat. Sayangnya kenaikan gaji tidak meningkatkan keaktifan para guru. Menurut penjaga sekolah banyak guru yang tidak masuk pada waktu mengajar. Seluruh siswa yang ikut ujian tahun 2003 telah lulus.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1 buah	Tetap	Penjaga Sekolah
Kondisi sekolah	Buruk	Berkurang	Penjaga Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	Sangat kurang	Berkurang	Penjaga Sekolah
Jumlah Staf	3 orang guru dan 1 orang penjaga	Berkurang	Penjaga Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Penjaga Sekolah
Tingkat pendidikan guru	SPG	Sama	Penjaga Sekolah
Tingkat keaktifan guru	Rendah	Berkurang	Penjaga Sekolah
Persentase kelulusan	100%	Sama	Penjaga Sekolah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Penjaga Sekolah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Keadaan kesehatan bisa dikatakan membaik. Salah satu indikasinya adalah tidak ada kematian dalam 12 bulan terakhir. Juga keadaan balita di Kampung Jambuq bisa dikatakan baik karena tidak ada bayi yang meninggal selama 12 bulan terakhir. Masih banyak terjadi pernikahan muda karena umur ibu pada saat kehamilan pertama hanya 17 - 18 tahun.

Jumlah kelahiran dalam 12 bulan terakhir adalah 10 orang dengan rata-rata berat sekitar 2 - 3 kg.

Jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	ISPA dan diare
Orang dewasa	Reumatik dan asam urat
Perempuan	Pendarahan dan keputihan

7.2 Fasilitas air bersih

Kebanyakan masyarakat kampung menggunakan air sumur pompa dan sebagian lagi mengambilnya dari sungai. Air yang disedot oleh sumur pompa sering tersumbat, padahal jumlah airnya cukup banyak. Sungai seringkali mengalami kedangkalan, walaupun demikian masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air ketika musim kemarau. Untuk mencegah kekurangan air, masyarakat menyimpan air di dalam gentong dan drum. Selain itu, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas penyimpanan air untuk kepentingan umum berupa gentong yang besar/tandon.

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Kampung Jambuq tidak ada fasilitas kesehatan. Jika masyarakat ingin berobat mereka pergi ke Kampung Resak yang jaraknya 7 kilometer dengan menggunakan sepeda motor. Jika menggunakan ojek, ongkos yang harus dibayar sekitar Rp.10.000.

Jumlah pengobat tradisional di dalam 5 tahun terakhir menurun. Saat ini hanya tinggal tiga orang. Frekuensi pengobatan secara tradisional kurang dari sekali dalam sebulan.

Kampung Jambuq

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Sumur pompa	Berkurang	Kader Posyandu
Mutu air bersih	Sumur pompa	Sama saja	Kader Posyandu
Mutu air sungai	Keruh	Sama saja	Kader Posyandu
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tetap	Kader Posyandu
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tetap	Kader Posyandu
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tetap	Kader Posyandu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	Tetap	Kader Posyandu
Gaji/honor	Tidak ada	Tetap	Kader Posyandu
Penyakit Malaria	Ada	Meningkat	Kader Posyandu
Penyakit Diare	Ada	Sama saja	Kader Posyandu
Penyakit TBC	Ada	Sama saja	Kader Posyandu
Jumlah ahli pengobatan tradisional	3 orang	Sama saja	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Kurang sekali per bulan	Menurun	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Berikut adalah daftar bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan 1997	Masyarakat kehilangan mata pencaharian dan banyak kebun buah yang terbakar
2	Kekeringan 1997	Banyak masyarakat yang terkena muntaber
3	Hama babi hutan dan tikus tahun 1998	Gagal panen

Berdasarkan informasi kepala adat, kebakaran hutan merupakan bencana alam yang paling besar di Jambuq. Salah satu dampak kebakaran hutan yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah terbakarnya kebun buah durian. Kampung ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu penghasil durian terbesar, namun setelah kebakaran sebagian besar dari kebun durian sudah musnah. Secara langsung dampak kebakaran ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Kekeringan terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena wabah muntaber dan kekurangan makanan. Serta pada tahun 1998 banyak hama yang mengganggu petani diantaranya babi hutan dan tikus.

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Jambuq. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- tidak ada tenaga medis dan puskesmas, polindes, pusban dan posyandu;
- kurang tenaga guru, dan perlu tutor kejar paket A;
- hasil ladang dan sawah tidak memuaskan karena hama, termasuk binatang dan rumput pengganggu;
- sumber daya manusia rendah, maka tidak dapat mengelola ekonomi keluarga dan sumber daya alam;
- tanah tidak subur sehingga harus jauh membuka ladang baru, sementara harga hasil kebun rendah.

Menurut masyarakat biasa:

- pengurus kampung tidak terbuka kepada masyarakat.

Menurut tokoh masyarakat:

- SDM (pendidikan rendah) termasuk fasilitas sekolah belum ada sehingga tidak punya pengetahuan mengelola sumber daya alamnya;
- tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tidak ada, sehingga masyarakat harus ke kampung lain untuk berobat. Sarana keagamaan tidak ada;
- hutan dikuasai oleh HPHH PT. ITCI, ganti rugi rendah. Orang kampung tidak berpartisipasi dalam menghitung kubikasi. Lahan berladang sempit, sementara rotan habis ditebas;
- tidak ada usaha lain karena rotan, buah-buahan, karet dan lain-lain telah habis terbakar. Sementara ikan habis pada musim kemarau;
- penduduk sehingga kurang perhatian dari pemerintah;
- sarana pendidikan dan tenaga guru masih kurang dan tidak berkualitas, perlu tutor paket A untuk buta huruf.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kampung Jambuq adalah perubahan pada sumber mata pencaharian. Dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa “kekuasaan” PT. ITCI melemah. PT. ITCI adalah *stakeholder* penting bagi kampung Jambuq karena hampir seluruh hutan mereka dikuasai oleh perusahaan HPH ini. Saat ini PT. ITCI telah membolehkan masyarakat untuk menebang pohon di hutan “milik” PT. ITCI. Dampaknya dapat dilihat pada respon rumah tangga tentang pendapatan baru, sekitar setengah dari rumah tangga yang disurvei menjawab bahwa *menyenso*⁸ merupakan pendapatan baru bagi mereka.

Perkembangan baru juga terlihat dengan adanya pembagian *fee* dari PT. ITCI berdasarkan kubikasi pohon yang ditebang. Walaupun perkembangan ini memang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dari kehadiran sebuah

⁸ Menyenso adalah istilah yang banyak digunakan untuk aktifitas menebang pohon dan menggergaji kayu dengan menggunakan alat gergaji mesin (*chain saw*).

Kampung Jambuq

perusahaan HPH, namun di sisi lain juga meningkatkan intensitas konflik antar warga. Hal ini terjadi karena kelembagaan adat yang berfungsi dalam resolusi konflik sudah tidak mampu lagi membendung kepentingan-kepentingan komersil dalam sengketa lahan dan sumber daya alam.

Perkembangan yang cukup unik terjadi pada perladangan. Biasanya satu kelompok masyarakat akan mengurangi perladangan ketika mereka mendapatkan lebih banyak uang dari sumber-sumber komersil. Tapi di Kampung Jambuq berbeda, pendapatan uang yang meningkat dari hutan dan *fee* berbarengan dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang membuat ladang.

Sebagai kampung yang berada di poros jalan Trans Kalimantan, aksesibilitas kampung Jambuq ke dunia luar semakin baik. Sayangnya keadaan sungai sebagai jalur transportasi semakin memburuk karena sungai semakin mendangkal dari tahun ke tahun.

Sarana pendidikan dan kesehatan tidak mengalami perbaikan. Sampai dengan saat ini belum ada sekolah dasar dan fasilitas kesehatan medis yang dibangun. Gaji guru mengalami kenaikan, tapi sayangnya tidak diikuti oleh keaktifan para guru dalam mengajar. Penyakit malaria menjadi semakin sering terjadi.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 Desa di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Jambuq, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 13 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 2 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- penjaga sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- kader posyandu;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan bersama dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok perempuan.

Kampung Jambuq

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Jerang Melayu

Jumlah rumah tangga: 50	Jumlah jiwa: 205
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 43	Jumlah KK: 68
Jumlah rumah tangga miskin: 7	Suku mayoritas: Kutai
Nama Petinggi: Abdul Wahab S	Jumlah TK: 1
Nama Ketua BPK: Lamri	Jumlah SD: 1
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1,5 jam (perahu ces)	Jumlah SLTP: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 3 jam (sepeda motor)	Jumlah SLTA: -
Posisi administratif: Kecamatan Muara Pahu, Kab. Kutai Barat	Jumlah Puskesmas: -
Posisi geografis: 115°52' BT, 0°25' LS	Jumlah Pusban: -
Tanggal survei: 7 - 9 Oktober 2003	Jumlah Polindes: -

1. Sejarah Kampung

Menurut staf lembaga adat, Kampung Jerang Melayu sudah berdiri lebih dari 100 tahun lalu, sampai dengan sekarang sudah terjadi penggantian petinggi sebanyak 13 kali. Masyarakat Jerang Melayu memiliki keyakinan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Brunei Darussalam.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani;
- Kelompok Pemadam Kebakaran hutan dan lahan (KPK);
- Linmas (hansip).

Kampung Jerang Melayu

Selain itu, terdapat satu lembaga swadaya masyarakat bernama Bioma yang bekerja untuk penelitian dan pendampingan yang berhubungan dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Selain Bioma, CARE juga banyak bekerja di kampung ini. CARE banyak membantu masyarakat dalam dukungan teknis pertanian dan bantuan pemberian beras.

Menurut Ketua BPK, lembaganya didirikan pada tahun 2001. BPK melakukan konsultasi dengan masyarakat rata-rata sebanyak sekali dalam sebulan.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Pembukaan lahan sawah	Menyepakati satu lokasi bersama untuk persawahan yang difasilitasi oleh CARE
Pembuatan masjid	Menyepakati lokasi masjid serta mekanisme pendanaannya

Menurut Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir musyawarah semakin sering dilakukan. Meningkatnya frekuensi musyawarah diikuti dengan kualitas dan tingkat dampak keputusan musyawarah yang semakin baik.

Dalam pengamatan langsung selama survei, memang dapat dirasakan tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat pada pemimpinnya di pemerintah kampung. Keadaan ini membuat pengorganisasian dan koordinasi lebih mudah dilakukan. Satu indikator adalah tingkat kehadiran masyarakat pada diskusi kelompok, tanpa usaha yang keras sekretaris kampung dapat mengumpulkan masyarakat dengan mudah. Dari sini dapat dilihat bahwa forum musyawarah masih efektif di kampung.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Meningkat	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Jerang Melayu pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

	Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
1	Pencetakan sawah	Belum ada jawaban
2	Pembuatan jalan ke luar kampung	Belum ada jawaban
3	Rumah sakit pembantu	Belum ada jawaban
4	Gedung balai pertemuan umum	Belum ada jawaban

Kampung Jerang Melayu

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan tiga pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut ketua BPK
1	Reboisasi lahan dari pemkab (2002)	Bantuan beras dari CARE	Bantuan dana untuk pembangunan dari perusahaan HPH
2	Dana untuk pemerintah kampung dari pemkab (2001 - 2003)	Bantuan beras dari KEHATI	Bantuan beras dari CARE
3	Pelayanan gratis kesehatan dari pemkab (2003)	-	Bantuan tangki air dan pengeras suara untuk mesjid dari Partai Bintang Reformasi
4	Pembinaan dokter kecil di sekolah dasar dari pemkab (2003)	-	-

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, CARE harus meningkatkan kualitas beras yang dibagikan. Masyarakat harus mengikuti program pengembangan pertanian jika ingin mendapatkan bantuan beras dari CARE. Namun kualitas berasnya buruk sehingga untuk memasaknya diperlukan tambahan daun pandan agar aroma kurang sedapnya dapat dikurangi.

Petinggi merasa bantuan pemerintah kepada pembangunan di perkampungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Salah satu yang dapat dicontohkan adalah peningkatan honor petinggi dari Rp.350.000/bulan menjadi Rp.750.000/bulan.

Selain dukungan-dukungan materil seperti disebutkan di atas, beberapa pihak sudah melakukan penelitian di kampung ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

- Bioma;
- Jatam;
- Care;
- UGM.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Kunjungan dari pihak pemerintahan ke Jerang Melayu rata-rata sekali dalam 3 bulan. Instansi yang pernah datang adalah:

- Dinas Kehutanan;
- Bappeda;
- Bupati;
- Camat.

Bupati pernah 1 kali singgah di Jerang Melayu walaupun hanya kunjungan singkat.

Menurut Ketua BPK, hubungan masyarakat dengan Pemda Kabupaten dalam 5 tahun terakhir cenderung membaik terutama pada keterbukaan informasi dan tingkat kepedulian. Masyarakat merasakan bahwa pemda saat ini lebih terbuka karena pemda selalu menjelaskan setiap informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu

Kampung Jerang Melayu

kegiatan penyuluhan kesehatan dan pertanian dirasakan meningkat. Kepedulian pemerintah dirasakan ketika membantu pembangunan mesjid.

Keterjangkauan ke kantor pemda tidak mengalami perubahan karena fasilitas jalan tidak pernah diperbaiki sampai dengan saat ini. Pelayanan ke masyarakat dirasakan tidak berubah karena pemda lebih fokus kepada pembangunan di sekitar ibukota kabupaten. Partisipasi dalam pengambilan keputusan juga tidak mengalami perubahan.

Secara lebih rinci, tabel berikut menjelaskan perubahan hubungan pemerintah dengan masyarakat:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Sama saja
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Sama saja
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat mengetahui informasi tentang program-program pemerintah dari kunjungan petugas-petugas pemerintah ke kampung. Petinggi dan sekretaris kampung mendapatkan informasi dari kantor kecamatan, informasi tersebut kemudian disampaikan ke masyarakat. Alat-alat lain untuk mendapatkan informasi adalah televisi dan radio. Di kampung ini ada warga masyarakat yang memiliki radio *Handy Talky* (HT) untuk alat komunikasi.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Sama	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Sama	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Karena sering terjadi kebakaran hutan yang menghilangkan mata pencaharian masyarakat, banyak penduduk Jerang Melayu yang meninggalkan kampung untuk bekerja di kampung lain. Kebanyakan dari mereka bekerja di perusahaan-perusahaan kayu, beberapa diantaranya juga menebang kayu sendiri bahkan ada juga yang menjadi buruh pemotongan rotan. Setelah hutan di kampung lain sudah rusak juga, dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada masyarakat yang meninggalkan kampung, malahan banyak masyarakat yang sudah pindah ke kampung lain kemudian kembali ke Jerang

Kampung Jerang Melayu

Melayu. Menurut BPS, penduduk Jerang Melayu tahun 1999 berjumlah 224 jiwa (Susenas 1999) meningkat menjadi 278 jiwa pada tahun 2000 (Sensus Penduduk 2000). Angka ini membuktikan tingginya jumlah orang masuk pada tahun 2000.

Perpindahan penduduk ke luar Jerang Melayu sebagian besar karena alasan pekerjaan atau mata pencaharian. Jarang sekali anak-anak dari Jerang Melayu yang sekolah ke luar kampung. Namun tidak ada informasi rinci mengenai jumlah perpindahan penduduk, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

4.2 Upacara adat

Menurut staf lembaga adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Jerang Melayu hanyalah selamatan naik ayun anak.

Secara keseluruhan hampir tidak ada perubahan pada upacara adat baik dari sisi waktu maupun bahan-bahan. Kecuali tingkat gotong royong yang dirasakan semakin kuat. Sedangkan dari sisi tujuan telah terjadi perubahan karena pada saat ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah.

Menurut Kepala Adat, hampir tidak ada generasi muda yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari para orang tua. Hal ini merupakan ancaman bagi kelangsungan budaya dan ilmu pengetahuan tradisi.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Staf Lembaga Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan meningkat. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- pembuatan sawah;
- upacara perkawinan;
- selamatan.

Biasanya lebih dari separuh jumlah masyarakat ikut dalam kegiatan gotong-royong.

Sedangkan menurut responden rumah tangga kurang mampu, tingkat kerjasama di kampung dirasakan sama saja dalam 5 tahun terakhir. Jika rumah tangga memerlukan bantuan, biasanya pihak keluarga akan membantu, bahkan warga kampung lain yang bukan keluarga juga biasanya membantu.

Jika terjadi krisis pangan di kampung, biasanya masyarakat mengajukan permohonan bantuan ke pihak kecamatan atau ke LSM yang bersedia membantu.

4.4 Konflik

Menurut Staf Lembaga Adat, hampir tidak pernah terjadi konflik, baik konflik lahan, keluarga, suku, agama maupun konflik sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa faktor:

- hubungan antara sesama masyarakat masih erat;
- masyarakat menghargai perbedaan suku;
- masyarakat hanya menganut satu agama;
- orang luar tidak pernah merebut/mengambil hasil.

Kampung Jerang Melayu

Pendapat responden rumah tangga kurang mampu sama dengan staf lembaga adat bahwa konflik tidak pernah terjadi. Menurutnya kedamaian tercipta karena di kampung ini seluruhnya masih memiliki hubungan keluarga.

Penyelesaian konflik masih menggunakan hukum adat baik untuk di dalam kampung maupun konflik di atau dengan pihak luar kampung. Jika masyarakat yang berkasus tidak bersedia menjalankan putusan Lembaga Adat, maka kasus diserahkan kepada petinggi. Jika petinggi juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka kasus dibawa ke tingkat kecamatan.

Pengalaman selama ini menunjukkan sekitar separuh konflik di tingkat kampung dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang dihadapi oleh mereka adalah:

- kekurangan bahan pokok;
- tidak punya biaya untuk berobat;
- banyak sumber usaha yang hilang di hutan akibat kebakaran, sehingga banyak orang yang mencari ikan. Hal ini mengakibatkan jumlah ikan menurun;
- tidak ada bantuan khusus untuk janda.

Situasi kehidupan dirasakan memburuk dalam 5 tahun terakhir, diakibatkan oleh:

- kekeringan dan kebakaran hutan yang terus menerus terjadi sejak 1997/1998;
- tidak ada bantuan dari pemerintah.

Mereka merasa tidak mampu membayar pendidikan untuk anak-anak, mereka juga tidak tahu siapa yang dapat membantu. Untuk masalah kesehatan, mereka merasa terbantu oleh sikap terbuka dari petugas-petugas di puskesmas di Muara Pahu atau Pusban di Jerang Dayak. Biasanya petugas kesehatan bersedia menolong walaupun masyarakat tidak mampu membayar.

Mereka juga tidak merasa memiliki masalah dalam berperan serta dalam pengambilan keputusan di kampung. Biasanya mereka selalu ikut dalam musyawarah kampung selama sedang ada di rumah. Jika ada pihak luar yang ingin membantu, mereka merasa bantuan yang paling penting adalah perbaikan rumah dan bantuan sembilan bahan pokok.

Menurut Ketua Posyandu, jika seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan maka biasanya mereka melakukan:

- pengobatan tradisional;
- meminjam uang;
- meminta bantuan keluarga;
- meminta rujukan dari pemerintah untuk dapat bantuan.

Namun kadang-kadang beberapa warga yang tidak mampu tidak berobat kemana-mana. Artinya mereka hanya pasrah saja.

Kampung Jerang Melayu

4.6 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Staf lembaga adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Staf lembaga adat
Gotong-royong dalam upacara adat	-	Semakin kuat	Staf lembaga adat
Tujuan upacara adat	-	Sudah berubah	Staf lembaga adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama	Staf lembaga adat
Konflik keluarga	Tidak pernah	Sama	Staf lembaga adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Staf lembaga adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Staf lembaga adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Staf lembaga adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Meningkat	Staf lembaga adat
Jumlah konflik	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Jerang Melayu adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- lembo;
- hutan.

Kebun rotan sega dan jepukng merupakan tipe tata guna lahan yang paling luas. Diperkirakan sekitar separuh dari total luasan. Tanaman padi saat ini lebih banyak di tanam di sawah atau rapak dan bukan di ladang lagi. Perpindahan dari ladang ke sawah dipicu oleh program pendampingan dari CARE. Masyarakat bersama-sama membuka satu hamparan rapaq untuk menanam padi. Rapaq tersebut masih belum memiliki penataan air yang baik sehingga rawan terkena banjir atau kekeringan. Saat ini masyarakat sudah melakukan perbaikan-perbaikan tata air dengan cara gotong-royong tanpa bantuan dari pemerintah, sedangkan pihak CARE berperan memberikan motivasi. Masyarakat sudah mengajukan permohonan bantuan pencetakan sawah namun belum ada tanggapan sampai dengan saat ini.

Kebakaran hutan menghilangkan banyak kebun rotan, kebun karet, lembo dan hutan. Namun masyarakat sangat giat mengganti tanaman rotan yang terbakar dengan tanaman baru sehingga jumlah menjadi seimbang lagi. Jerang Melayu dikenal sebagai salah satu kampung penghasil bibit rotan jepukng, proyek dana reboisasi pernah membeli bibit dari kampung ini.

Kampung Jerang Melayu

Masyarakat sudah mencoba menanami kebun karet, namun seringkali tanamannya mati. Kegagalan ini juga banyak diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Luasan lembo dan hutan terus berkurang karena tidak ada peremajaan atau penggantian tanaman setelah terbakar.

Menurut Staf Lembaga Adat, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Jerang Melayu adalah:

- hutan perawan (*himbar*);
- hutan sekunder tua (*belukar*);
- hutan sekunder muda (*berkurang*);
- belukar tua (*belukar*);
- belukar (*belukar*);
- hutan rawa (*rapaq*);
- hutan kerangas (*jaras*);
- hutan lindung.

Luasan *himbar* dan belukar tua terus berkurang karena kebakaran hutan, hal ini mengakibatkan bertambahnya belukar muda.

Pada saat ini masyarakat Jerang Melayu hampir tidak mungkin mencari kayu di hutan karena pohon-pohon hutan sudah hampir habis, mereka hanya memiliki belukar muda sisa kebakaran. Hal ini membuat harga kayu menjadi sangat mahal karena harus dibeli dari luar kampung.

Kebakaran hutan memang menjadi isu utama dalam pengelolaan sumber daya alam di kampung ini. Belum ada program pemerintah yang membantu memecahkan masalah ini. Masih menurut staf lembaga adat, Yayasan Bioma pernah membantu mendirikan Kelompok Pemadam Kebakaran (KPK), kelompok ini dilatih menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Kegiatan ini didukung oleh Ausaid dan GTZ-IFFM. Bioma juga mendampingi pembuatan peraturan kampung yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Kampung Jerang Melayu memiliki kawasan hutan yang dilindungi seluas 1,5 km². Hutan tersebut dilindungi karena terdapat banyak jenis tanaman anggrek. Sayangnya sampai dengan saat ini belum ada aturan kampung yang mengatur tentang pengelolaan hutan lindung tersebut. Walaupun demikian, menurut petinggi masyarakat tidak pernah menggunakan kawasan hutan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena tidak ada yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Jenis hutan yang dilindungi tersebut adalah hutan kerangas dimana kayunya berukuran kecil.

Di kampung ini tidak ada ijin pengelolaan hutan baik HPH maupun IPPK/HPHH yang bekerja. Masyarakat yang bekerja di bidang kehutanan biasanya bekerja di luar kampung

Pemerintah kabupaten pernah mengusulkan untuk membangun kebun kelapa sawit lewat investor, namun masyarakat dan perangkat pemerintah kampung menolaknya. Selain menolak perusahaan perkebunan, masyarakat juga pernah menolak kehadiran perusahaan tambang. Menurut petinggi, perangkat kampung selalu menyertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang ijin konsesi perusahaan.

Kampung Jerang Melayu

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut petinggi, seluruh rumah tangga memiliki lahan. Sampai dengan saat ini belum pernah terjadi jual beli lahan. Petinggi menekankan kepada masyarakat untuk tidak menjual lahan kepada pihak luar karena masyarakat Jerang Melayu menggantungkan hidupnya pada pertanian dimana lahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Jika jual beli lahan dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial di masa depan.

5.4 Perladangan

Lebih dari tigaperempat responden rumah tangga menanam padi. Sebagian besar dari tanaman padi ditanam di rapaq sedangkan sisanya di ladang lahan kering. Lebih dari tigaperempat dari rumah tangga yang menanam padi di rapaq memiliki lahannya sendiri, sisanya meminjam dari keluarga. Sebagian besar rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan beras dari tanaman sendiri, sebagian besar dari mereka menggantungkan pasokan beras tambahan dari bantuan CARE. Sebagian kecil masih ada yang membeli beras, biasanya jika ingin makan beras yang lebih enak.

Karena sebagian besar bertanam padi di rapaq maka masyarakat sudah menerapkan pertanian menetap. Rapaq dapat dicapai dengan berjalan kaki sekitar setengah jam. Bagi beberapa rumah tangga yang masih memiliki ladang, mereka mencapai ladangnya dengan cara jalan kaki dan naik perahu.

5.5 Pendapatan uang

Sumber pendapatan uang utama adalah ikan. Sebagian besar dari masyarakat mencari ikan di Sungai Kedang Pahu, beberapa dari mereka memiliki keramba ikan di sungai. Di kampung terdapat beberapa orang yang menjadi pedagang ikan. Pedagang kampung membeli dari masyarakat dan menjualnya ke pasar-pasar reguler. Beberapa masyarakat menjualnya langsung ke pasar. Untuk jenis-jenis ikan tertentu ada tengkulak yang datang ke kampung. Tempat penjualan ikan dari Jerang Melayu adalah Pasar Damai, Pasar Lambing dan Pasar Muara Pahu.

Berikut adalah harga ikan di kampung pada bulan Oktober 2003:

Jenis Ikan	Harga	Satuan
Baung	10.000	Per kg
Lempam	10.000	Per kg
Repang	10.000	Per kg
Gabus	5.000	Per kg
Lele	5.000	Per kg
Patin	6.000	Per kg
Pepuyu	3.500	Per kg
Toman	2.500	Per kg
Sepat Siam	2.500	Per kg

Sebagian kecil masyarakat yang lain bekerja menggergaji kayu di HPH atau di kampung lain dengan upah Rp.500.000/m³ untuk kayu ulin, sedangkan untuk kayu biasa upahnya Rp.100.000/m³. Beberapa rumah tangga mendapatkan penghasilan uang dari hasil menjual rotan dan bibit rotan.

Kampung Jerang Melayu

Menurut Ketua BPK, secara umum keadaan ekonomi masyarakat kampung memburuk. Salah satu contohnya adalah kegagalan panen pertanian karena serangan hama. Tanaman kacang panjang dan kacang tanah bahkan ladang seringkali mengalami gagal panen.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak ada pasar reguler di Jerang Melayu. Walaupun demikian, kampung ini didatangi oleh pasar keliling kadang-kadang 3 bulan sekali. Pasar keliling biasanya menyediakan barang-barang peralatan rumah tangga dan pakaian. Frekuensi kehadiran pasar keliling meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pasar reguler terdekat ada di Muara Pahu yang dapat dicapai selama 1,5 jam dengan menggunakan perahu ces.

Kondisi jalan dirasakan kurang baik, keadaan ini tidak mengalami perubahan sejak 5 tahun terakhir. Kondisi sungai juga dirasakan kurang baik, bahkan kondisinya cenderung memburuk. Hal ini terjadi karena aktivitas perusahaan yang menggunakan sungai untuk mengangkut barang.

Alat transportasi reguler yang ada di Jerang Melayu hanyalah kapal besar jurusan Damai-Samarinda. Sebenarnya ada jalan kecil yang dapat menghubungkan Jerang Melayu dengan Melak, namun jalan tersebut kondisinya sangat buruk. Dengan demikian tidak ada perubahan waktu perjalanan menuju ibukota kecamatan dan kabupaten sejak 5 tahun terakhir.

5.7 Keterjangkauan energi

Sumber energi yang digunakan di Jerang Melayu adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- gas;
- listrik;
- tenaga surya.

Dari sumber-sumber energi tersebut, gas merupakan sumber energi baru dimana hanya dua rumah tangga yang memakainya. Kayu bakar dirasakan masih terjangkau, sementara listrik dan minyak tanah dirasakan semakin sulit terjangkau karena harga semakin mahal. Listrik yang digunakan di kampung ini adalah listrik lokal yang dihasilkan dari mesin-mesin pribadi. Beberapa rumah menggunakan sumber listrik dari tenaga surya yang merupakan bantuan dari pemerintah.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Hampir seluruh rumah terbuat dari kayu yang bukan jenis ulin dan bengkirai. Hampir seluruh rumah memiliki aliran listrik. Sekitar setengahnya adalah listrik yang dihasilkan dari mesin sendiri sedangkan sisanya adalah listrik dari tetangga atau listrik kelompok. Ada juga rumah yang menggunakan listrik tenaga surya, peralatannya didapatkan dari bantuan pemerintah. Hampir seluruh rumah tangga menggunakan WC di sungai.

Karena sulitnya mencari kayu maka masyarakat merasakan kesulitan membangun rumah. Hal ini berdampak pada kepemilikan rumah. Kebanyakan keluarga muda tidak memiliki rumah sendiri sehingga satu rumah biasanya dihuni oleh 2 atau lebih keluarga. Bahkan ada satu rumah yang diisi oleh 5 keluarga berjumlah sekitar 15 jiwa.

Kampung Jerang Melayu

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Kurang baik	Sama saja	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Berkurang	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan simpukng	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>himba</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>belukar</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>berkurang</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar tua (<i>belukar</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar (<i>belukar</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>rapaq</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>jaras</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan lindung	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Akses kepada hutan	Tidak ada karena habis		Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan hewan	-	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Banyak tanaman kena hama	Memburuk	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar setengah dari responden rumah tangga memiliki anak putus sekolah. Sekitar sepertiga dari yang putus sekolah, tidak menamatkan sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan di kampung ini diyakini oleh masyarakat karena faktor biaya. Namun menurut kalangan pendidik, penyebab utamanya adalah motivasi yang kurang dari orang tua. Beberapa anak diminta oleh orang tuanya untuk membolos sekolah karena harus membantu di ladang atau membantu mencari ikan.

Kualitas pendidik dapat dikatakan meningkat, salah satu indikasinya adalah tingkat pendidikan para guru yang meningkat. Namun tingkat keaktifan guru belum meningkat. Persentase kelulusan siswa biasanya 100%, keadaan ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Jumlah masyarakat di kampung yang dapat membaca meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Kampung Jerang Melayu

Selain pendidikan formal, di kampung ini pernah dilakukan pendidikan non formal yaitu pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan Bioma. Jumlah siswa baru pada tahun ini adalah 5 orang.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Berdasarkan informasi kepala sekolah, di Jerang Melayu terdapat 1 buah TK Al-Quran dan 1 buah Sekolah Dasar. Untuk melanjutkan ke SLTP dan SLTA, biasanya anak-anak pergi ke Melak. Melak dapat ditempuh selama 3 jam dengan sepeda motor atau perahu ces.

Hingga sekarang, belum ada anak dari Jerang Melayu yang melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi.

Secara umum kondisi fasilitas kesehatan memburuk dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada penambahan jumlah sekolah, malah kondisi sekolah, alat-alat dan buku-buku serta staf pengajar berkurang. Walaupun demikian, dari sisi pendidik mengalami perbaikan. Tingkat pendidikan para guru meningkat, dimana hal ini bersamaan dengan peningkatan gaji atau honor. Sayangnya kenaikan gaji tidak meningkatkan keaktifan para guru.

Seluruh siswa yang ikut ujian tahun 2003 lulus. Jumlah orang yang dapat membaca dan menulis meningkat. Pada umumnya di kampung ini, anak mulai dapat membaca pada kelas 3 SD.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	2	Sama	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Lebih baik	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Persentase kelulusan	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Keadaan kesehatan belum bisa dikatakan membaik karena beberapa indikator menunjukkan situasi yang buruk. Tahun lalu masih dijumpai satu kasus kematian ibu dan satu kasus kematian anak pada saat kelahiran. Keadaan balita masih menyedihkan karena, menurut kalangan ibu-ibu sebanyak 25% dari balita berada di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Umur ibu pada saat kehamilan pertama adalah 18 - 19 tahun.

Walaupun balita tidak sehat, namun tahun ini tidak ditemukan anak-anak dengan umur sampai dengan 10 tahun yang meninggal. Jumlah kelahiran dalam 12 bulan

Kampung Jerang Melayu

terakhir adalah 7 - 10 orang dengan rata-rata berat sekitar 3 kg. Dari bulan Januari ada 1 orang yang meninggal dengan rata-rata umur sekitar 70 tahun. Penyebab kematian cukup beragam, salah satu penyakitnya adalah paru-paru basah.

Jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Demam, flu, diare
Orang dewasa	Asam urat, tekanan, malaria, TBC
Perempuan	Racun kehamilan (bayat)

Penyakit malaria hanya dapat terkena pada orang-orang yang bekerja di hutan yang terletak di luar kampung.

7.2 Kondisi fasilitas kesehatan

Di Jerang Melayu tidak ada fasilitas kesehatan. Mereka dilayani oleh tenaga perawat kesehatan yang keliling dan mengunjungi kampung setiap seminggu sekali. Fasilitas kesehatan terdekat terletak di Kampung Jerang Dayak yang dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan perahu ces. Hanya ada satu bidan di Jerang Dayak. Untuk masalah kesehatan yang lebih serius, masyarakat harus pergi ke Muara Pahu yang harus ditempuh selama 1,5 jam menggunakan perahu ces. Jika harus menyewa perahu ces maka masyarakat harus membayar Rp.100.000 untuk perjalanan pulang pergi.

7.3 Fasilitas air bersih

Seluruh masyarakat kampung menggunakan air Sungai Kedang Pahu untuk seluruh keperluan termasuk air minum walaupun mereka faham bahwa kualitas air sudah banyak menurun. Ketua Posyandu Jerang Melayu mengaku tidak tahu mengapa kualitas air menurun, dia hanya menjelaskan bahwa masyarakat harus menambahkan tawas pada air sungai sebelum digunakan sebagai air minum.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai	Sama	Ketua Posyandu
Mutu air bersih	Air sungai	Menurun	Ketua Posyandu
Mutu air sungai		Berkurang	Ketua Posyandu
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Gaji/honor	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Penyakit Malaria	Ada	Sama	Ketua Posyandu
Penyakit Diare	Ada	Sama	Ketua Posyandu
Penyakit TBC	Ada	Sama	Ketua Posyandu
Jumlah ahli pengobatan tradisional	5 orang	Sama	Staf lembaga adat
Upacara pengobatan tradisional	Lebih sekali per bulan	Sama	Staf lembaga adat

8. Sejarah Bencana

Berikut adalah daftar bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran Hutan	Banyak sumber mata pencaharian yang hilang seperti rotan alam dan kayu. Keadaan ini memperburuk perekonomian masyarakat
2	Kekeringan	Penyakit batuk baik pada anak-anak maupun orang dewasa
4	Banjir	Sawah digenangi air yang membuat gagal panen
5	Hama tikus	Gagal panen
6	Perubahan Pemerintahan	Belum ada peningkatan bantuan dari pemerintah. Masyarakat merasa pemerintah kabupaten menganaktirikan Kampung Jerang Melayu

Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang paling dominan di Jerang Melayu. Kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1982, sedangkan yang kedua terbesar pada tahun 1998. Akhir-akhir ini kebakaran terjadi hampir setiap tahun. Bencana kebakaran hutan ini menghilangkan banyak kekayaan kampung terutama rotan alam, kayu dan damar. Produk-produk tersebut sebelumnya menjadi mata pencaharian penting di kampung. Selain kebakaran hutan, banjir juga menjadi bencana alam yang merugikan masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat merasakan banjir terjadi hampir setiap tahun. Banjir sering membuat gagal panen karena tanaman padi tergenang air.

Menurut sekretaris kampung, masyarakat pernah mendapatkan dukungan dari CARE untuk melakukan studi banding ke daerah lain tentang penanggulangan kebakaran. Hal penting yang dipelajari wakil masyarakat yang turut studi banding adalah tentang penggunaan sekat bakar. Masyarakat dianjurkan untuk menanam tanaman yang dapat meredam api di sekeliling tanaman inti. Salah satu tanaman sekat bakar yang dapat bermanfaat adalah tanaman pisang. Namun sayangnya sampai dengan sekarang masyarakat belum menerapkan pelajaran tersebut.

Kebanyakan masyarakat yakin bahwa kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan oleh manusia.

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Jerang Melayu. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- tidak ada dukungan dari pemerintah;
- seringnya kebakaran hutan;
- kurangnya pendidikan. Di kampung ini belum ada satu orang pun yang menyelesaikan pendidikan S1;
- kurangnya kesadaran untuk memperbaiki kehidupan.

Kampung Jerang Melayu

Menurut tokoh masyarakat:

- tidak ada lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal;
- kebakaran hutan;
- kurangnya pendidikan.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Dalam 5 tahun terakhir terlihat jumlah dan kualitas kekayaan (aset) masyarakat Jerang Melayu terus menurun. Hal ini diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terus menerus terjadi setiap tahun. Beberapa sumber mata pencaharian telah hilang. Sampai dengan sekarang belum ada usaha yang signifikan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat memang merasa keterbukaan dari pihak pemerintah semakin baik, hal ini ditandai dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi. Namun infrastruktur ekonomi tidak mengalami perubahan. Sampai dengan saat ini Kampung Jerang Melayu masih cukup terisolasi dari dunia luar.

Solidaritas di tingkat masyarakat tidak mengalami perubahan. Konflik masih jarang terjadi, hal ini masih sama dengan 5 tahun lalu. Menurut petinggi, kohesivitas sosial yang masih baik ini diakibatkan oleh penolakan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan perkebunan dan tambang.

Dukungan untuk sektor pendidikan terlihat membaik terutama dari sisi gaji dan tingkat pendidikan guru. Namun infrastruktur dan fasilitas fisik sekolah tidak mengalami perbaikan, akibatnya keadaan menjadi semakin buruk.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Jerang Melayu, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 13 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 2 kelompok diskusi.

Kampung Jerang Melayu

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- ketua posyandu (menggantikan unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Jontai

Jumlah rumah tangga: 303	Jumlah jiwa: 74
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 78	Jumlah KK: 78
Jumlah rumah tangga miskin: 18	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Al. Entai. S	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: P. Hanisa. J	Jumlah SLTA: -
Nama Ketua BPK: Yunus	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1 jam (sepeda motor)	Jumlah Pusban: 1
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 1,5 jam (sepeda motor)	Jumlah Polindes: -
Posisi administratif: Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat	
Posisi geografis: 115° 28' BT, 0° 18' LU	
Tanggal survei: 7 - 9 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung¹

Menurut Kepala Adat, Kampung Jontai telah ada sejak sekitar 60 tahun lalu, hingga sekarang sudah ganti lamin sebanyak 2 kali. Masyarakat yang tinggal di Jontai sekarang ini merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang dahulu menempati Lamin Jontai yang terletak di tepi Sungai Nyuatan anak Sungai Kedang Pahu.

¹ Informasi dari Kepala Adat.

2. Kelembagaan Kampung ²

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- LKMD;
- LMD;
- Kelompok Tani.

BPK dibentuk dan disahkan pada tahun 2002. Selama menjalankan fungsi dan tugasnya dalam 1 tahun ini, BPK telah mengadakan 2 kali konsultasi dengan masyarakat.

Diskusi yang pernah dimusyawarahkan BPK adalah:

Topik diskusi	Keputusan
Peraturan Kampung	Peraturan tentang pungutan terhadap pihak luar dan di dalam kampung sendiri
Persiapan pemilihan petinggi	Pembentukan panitia
Program pembangunan kampung	Rencana meminta untuk didirikan gedung sekolah oleh pemerintah Rencana membangun pos-pos kampung

Dalam 5 tahun ini, kelembagaan musyawarah dari sisi kualitas semakin baik, sedangkan dari tingkat intensitasnya semakin sering dilakukan musyawarah. Keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah semakin berdampak dan dipatuhi masyarakat.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Semakin baik	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Semakin berdampak dan dipatuhi	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin sering	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten ³

3.1 Dukungan

Dalam 5 tahun terakhir, bantuan pemerintah kepada kampung berfluktuasi. Pemerintah kampung dalam 5 tahun terakhir ini aktif mengajukan bantuan kepada pemerintah kabupaten. Bila dibandingkan dengan realisasi program pemerintah di kampung, ternyata tidak satu pun dari empat usulan kampung yang dapat direalisasikan.

² Informasi dari Petinggi, Ketua BPK.

³ Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, Orang Kurang Mampu.

Kampung Jontai

Berikut usulan kampung dan tanggapan pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Sekolah dasar dan tambahan guru	Ditampung, tidak ada realisasi
Usulan pembangunan jembatan	Tunggu dana karena dana terbatas
Bangunan lamin adat, diusulkan mulai dari tahun 1990	Ditampung, belum ada realisasi
Bidan pemerintah	Belum ada realisasi

Berikut adalah daftar bantuan yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Orang Tidak Mampu	Menurut Ketua BPK
1	Semenisasi jalan bantuan dari Jepang (P2D)	Tidak tahu	Mesin lampu untuk kampung dari PT. Inhutani
2	Pembukaan badan jalan P2D dari Jepang, antara Jontai ke Dempar	Tidak tahu	Beras, bibit karet, kemiri, dan nanas dari Bioma dan Kehati
3	Bantuan rumah PDEKM. 1 unit rumah panjang 12 meter lebar 4 meter	Tidak tahu	Beras, bibit padi gogo dari Yayasan Rio Tinto

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut petinggi, petugas pemerintah berkunjung ke kampung lebih dari sekali dalam sebulan. Petugas pemerintah yang pernah berkunjung adalah:

- Anggota kecamatan;
- Bupati;
- Dinas Pendataan Propinsi;
- Tim pengecekan batu dari Dinas Pertambangan Bandung.

Secara umum, perubahan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi semakin baik dari sisi keterjangkauan jarak, tingkat kepedulian, pelayanan, keterbukaan informasi maupun dalam partisipasi pengambilan keputusan.

Perubahan hubungan dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih baik

Perubahan keterjangkauan dari sisi jarak menuju ke kecamatan, kabupaten dan kota menjadi lebih baik, karena telah dibangun jalan antara Jontai-Dempar. Sedangkan jalan dari Dempar menuju Kecamatan Damai sudah berupa pengerasan jalan hingga mencapai Kampung Mencimai. Kondisi jalan dari Mencimai ke Damai atau Melak sudah beraspal. Keterjangkauan dari sisi jarak lebih baik dibanding dengan

Kampung Jontai

kondisi tahun 90-an yang pada saat itu masih terdapat banyak jalan tanah yang belum diberi pergerasan batu.

3.3 Sumber dan alat informasi

Program-program pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat melalui beberapa sumber yaitu:

- kunjungan-kunjungan yang dilakukan pejabat pemerintah;
- mendengar penjelasan dari petinggi atau masyarakat lainnya;
- melalui surat edaran; dan
- melalui pengumuman.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemerintah kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat pelayanan Pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Berfluktuasi	Petinggi

4. Sosial Budaya⁴

4.1 Perpindahan penduduk

Menurut petinggi, selama 5 tahun terakhir ini, di Kampung Jontai tidak terdapat perpindahan penduduk, baik dalam waktu sementara atau selamanya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan meninggalkan kampung
Waktu pendek atau sementara	Tidak ada	Tidak ada
Waktu panjang atau selamanya	Tidak ada	Tidak ada

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat di Jontai, upacara adat masih dilakukan di kampung. Terdapat 3 jenis upacara adat yang masih dijalankan yaitu:

- *belian*, merupakan upacara adat penyembuhan penyakit;
- *gugu tautn*, merupakan upacara adat pengembalian keserasian alam dalam 1 tahun;
- *kuangkai*, merupakan upacara penguburan ulang tulang-belulang anggota keluarga yang telah meninggal.

⁴ Informasi dari Kepala Adat, Petinggi, Orang Kurang Mampu.

Kampung Jontai

Tidak ada perubahan pelaksanaan upacara adat yang dilakukan saat ini dibandingkan dengan masa lalu baik dari sisi waktu, bahan-bahan upacara, tingkat gotong royong maupun dari sisi tujuan upacara. Perkembangan akhir-akhir ini, tidak terdapat satu pun dari generasi muda di Kampung Jontai yang mendapatkan pengetahuan adat atau tradisi dari para orang tua.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, dalam 12 bulan terakhir ini telah dilakukan gotong-royong dalam bentuk:

- pembuatan ladang;
- membersihkan kampung; dan
- upacara adat *kuangkai*.

Semangat gotong-royong masyarakat di Jontai masih sangat baik. Pada pelaksanaan gotong royong biasanya semua masyarakat mengikuti kegiatan gotong royong. Tidak ada perubahan dari sisi tingkat kerjasama antar masyarakat. Masyarakat memiliki kesadaran akan kepentingan bersama dalam kegiatan gotong-royong.

Pendapat Kepala Adat ini sama dengan pendapat rumah tangga kurang mampu. Menurut rumah tangga kurang mampu, tingkat kerjasama dan solidaritas masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini masih tetap sama. Masyarakat masih mempunyai solidaritas yang tinggi dalam memperhatikan kepentingan bersama. Selama ini mereka selalu mendapat bantuan dari masyarakat, baik bantuan dari keluarga maupun yang bukan keluarga yang tinggal di kampung.

Menurut Kepala Adat, jika terjadi kekurangan makanan di kampung maka masalah ini akan disampaikan ke kecamatan dan sekaligus meminta bantuan bahan-bahan makanan dari kecamatan.

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, konflik yang terjadi di Jontai adalah konflik keluarga, konflik lahan dan konflik sumber daya alam. Konflik lahan dan sumber daya alam dipicu oleh petak-petak hutan konsesi HPHH. Konflik keluarga jarang terjadi dan cenderung menurun. Khusus untuk konflik keluarga, hukum adat masih dapat diterapkan dan ditegakkan. Lembaga adat biasanya menerapkan denda adat kepada pihak yang dinyatakan bersalah dalam konflik. Konflik-konflik lainnya seperti konflik suku dan konflik agama, tidak pernah terjadi di Jontai.

Penyelesaian konflik di dalam kampung diselesaikan dengan mempergunakan dasar hukum adat dengan menerapkan sanksi denda adat kepada pihak yang dinyatakan bersalah. Terhadap konflik yang terjadi dengan pihak di luar kampung tetap dipergunakan dasar hukum adat. Jika bisa diselesaikan secara adat, maka diterapkan sanksi hukum adat dengan membayar denda. Tapi jika tidak dapat diselesaikan secara adat, maka diselesaikan dengan mempergunakan dasar hukum negara, dengan menyerahkan kasusnya ke kepolisian. Contoh kasus pembagian petak atau lokasi penentuan batas. Pada kasus ini tidak ada kesepakatan dengan lembaga adat dan hukum adat. Dengan demikian lembaga adat meneruskan kasus batas petak ke kepolisian.

Kampung Jontai

Berdasarkan jumlah konflik yang ada di kampung, separuh dari keseluruhan konflik diselesaikan di tingkat kampung oleh lembaga adat dengan dasar pertimbangan hukum adat. Responden rumah tangga kurang mampu tidak mengetahui secara jelas tentang masalah konflik sosial di kampung serta jumlah perubahan konflik dalam 5 tahun terakhir.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Masalah utama yang dihadapi rumah tangga kurang mampu adalah:

- tidak adanya jembatan penyeberangan;
- tidak adanya bangunan sekolah;
- tidak adanya bantuan dari pemerintah;
- tidak adanya proyek dari perkebunan tentang pembukaan lahan karet;
- tidak adanya tenaga medik di kampung.

Sedangkan bantuan yang diperlukan rumah tangga kurang mampu adalah:

- dibangunnya jembatan penyeberangan;
- dibangunnya rumah sekolah;
- disediakan tenaga medis atau bidan kampung.

Selama 5 tahun terakhir ini kondisi rumah tangga kurang mampu tidak pernah mengalami perubahan atau tetap sama. Rumah tangga kurang mampu masih mampu membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya. Dalam proses pengambilan keputusan sering kali dilibatkan dalam pembahasan keputusan di tingkat kampung.

Menurut dukun beranak di Jontai, ketika seorang menderita sakit dan tidak punya cukup uang guna membayar biaya pengobatan, maka yang dilakukan adalah:

- berobat dengan cara pengobatan tradisional;
- mengadakan upacara belian;
- menunggu umur sampai umurnya habis.

4.6 Hiburan

Menurut Kepala Adat, tidak ada hiburan di Jontai. Sedangkan berdasarkan pengamatan pewawancara selama di Jontai, hampir setiap malam sekitar 10 - 20 orang di Jontai berkumpul di rumah anak Petinggi dan di rumah Petinggi untuk menonton acara televisi. Televisi tersebut dilengkapi dengan antena parabola digital, dengan cara tersebut maka siaran dari berbagai stasiun televisi dalam dan luar negeri dapat diterima dengan jelas. Selain itu, warga masyarakat juga selalu bermain bola *volley* di lapangan pada setiap sore hari.

Kampung Jontai

4.7 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	Sesuai dengan adat	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	Sesuai dengan adat	Sama saja	Kepala Adat
Gotong royong upacara adat	Baik	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	Tujuan menurut adat	Sama	Kepala Adat
Konflik lahan	Terjadi	Meningkat	Kepala Adat
Konflik keluarga	Jarang	Menurun	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	-	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	-	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Terjadi	Meningkat	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	Masih baik	Sama	Kepala Adat
Jumlah konflik	Tidak tahu	Tidak tahu	Rumah tangga tidak mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	Baik	Sama	Rumah tangga tidak mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam⁵

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang paling luas di Jontai adalah hutan. Luas hutan ini mencapai lebih dari setengah luasan kampung. Jenis tata guna lahan yang ada di Jontai adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- simpukng/lembo/buah;
- hutan.

Perkembangan keenam jenis tata guna lahan tersebut sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- ladang dan sawah sejak tahun 1999 luasnya tetap. Sawah tetap karena tidak pernah dikerjakan dan luasannya sedikit. Masyarakat lebih menyukai pengelolaan lahan ladang;
- kebun sayur, kebun rotan, kebun karet, simpukng/lembo/buah, bertambah luasannya karena ada yang melakukan penanaman baru;
- jenis tata guna lahan hutan mulai berkurang karena telah dilakukan penebangan pohon-pohon hutan oleh perusahaan bagi kepentingan HPHH dan pengalihan hutan menjadi ladang. Jenis hutan yang berkurang adalah hutan perawan (*bengkar mentut*) dan hutan sekunder (>30 tahun).

⁵ Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, Rumah Tangga Kurang Mampu, Rumah Tangga.

Kampung Jontai

Terdapat 7 jenis hutan dan lahan bera (*urat*) yang ada di Jontai, yaitu:

- hutan perawan (*bengkar mentut*);
- hutan sekunder tua (>30 tahun);
- hutan sekunder muda atau *kurat bataq* (10-30 tahun);
- belukar tua atau *kolowako* (5-10 tahun);
- hutan rawa.

Hutan perawan dan hutan sekunder tua telah berkurang karena adanya penebangan pohon oleh perusahaan, juga karena dipergunakan sebagai ladang (konversi). Hutan sekunder muda atau *kurat bataq*, belukar tua atau *kolowako* serta belukar tidak mengalami perubahan luasan.

Perubahan yang terjadi terhadap kawasan hutan menurut Ketua BPK adalah:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Banyak penebangan oleh perusahaan	Air sungai mulai tercemar
Hutan lebih mudah diakses sehingga memudahkan orang menebang	Tidak tahu	Penebangan lebih banyak dilakukan
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Penebangan oleh perusahaan HPHH	Sulit mencari hewan buruan

5.2 Pengelolaan hutan dan HPHH

Menurut Petinggi Jontai, di Jontai terdapat hutan yang dilindungi secara lokal oleh hukum adat. Hutan tersebut terletak di Gunung Murai seluas 4 km² dan dipergunakan sebagai sarana sumber air bersih bagi warga Kampung Jontai.

Penebangan pohon di kawasan hutan lindung harus dimusyawarahkan dengan petinggi dan kepala adat. Penebangan tanpa musyawarah akan dikenakan sanksi denda adat berupa pembayaran *antakng* sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. 1 *antakng* senilai Rp. 40.000. Penjatuhan sanksi adat dilakukan oleh lembaga adat.

Petinggi menjelaskan bahwa hampir setengah dari masyarakat Jontai mendapatkan penghasilan dari penebangan pohon pada konsesi HPHH. Pendapatan berupa *fee* dihitung berdasarkan kubikasi penebangan pohon yang dilakukan perusahaan. Kampung Jontai mengajukan ijin pengelolaan HPHH didukung oleh salah satu perusahaan kayu.

Menurut petinggi, pengambilan keputusan terhadap konsesi dilakukan melalui musyawarah masyarakat. Petinggi, kepala adat dan perangkat kampung lainnya memfasilitasi musyawarah masyarakat.

Cerita lain didapatkan dari responden rumah tangga kurang mampu, mereka menyatakan bahwa kampung atau seseorang di kampung tidak pernah ada yang mengajukan konsesi penebangan hutan. Pihak luar tidak pernah pula mengajukan permohonan ijin konsesi di kampung. Mereka juga tidak pernah mendapatkan penghasilan dari HPHH, baik berupa *fee*, ganti rugi, atau gaji dan tidak pernah pula dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi.

Kampung Jontai

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut petinggi, seluruh rumah tangga di Jontai memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Artinya semua rumah tangga di Jontai mempunyai hak atas lahan, jarak ke lahan masih dapat dicapai serta masih terdapat banyak cadangan lahan.

Semua rumah tangga memiliki lahan dan dalam 5 tahun terakhir ini keterjangkauan terhadap lahan sama. Artinya lahan masih dapat dinikmati dan dimiliki rumah tangga di Jontai baik dari sisi hak, jarak maupun ketersediaan.

Hingga saat ini belum pernah terjadi jual beli lahan baik secara resmi maupun tidak resmi. Hal ini terjadi karena masing-masing rumah tangga memiliki lahan.

5.4 Perladangan

Sekitar 80% dari responden rumah tangga menanam padi. Hampir seluruhnya menanam padi pada lokasi ladang. Terdapat pula lahan sawah namun tidak dikerjakan atau diolah. Bibit padi sebagian merupakan bantuan dari Yayasan Rio Tinto berupa bibit padi gogo. Dari yang berladang, lebih dari 90% berladang di lahan milik sendiri. Masih ada 1 atau 2 rumah tangga yang berladang pada lahan pinjaman.

Pada tahun 2002, mereka menanam padi dengan jumlah bibit yang beragam dari 1 - 12 kaleng. Namun kebanyakan menanam sebanyak 5 kaleng. Tapi pada tahun 2003, jumlah bibit yang ditanam berkurang, kebanyakan menanam kurang dari 5 kaleng saja.

Lebih dari separuh rumah tangga yang berladang dapat mencukupi kebutuhan beras dari hasil panen ladang, bahkan sebagian menjual beras hasil ladang ke pasar di Barong Tongkok dan Damai. Bagi yang tidak mencukupi (sekitar 40% dari rumah tangga yang berladang), melengkapi kebutuhannya dengan cara membeli.

Hampir 90% dari ladang dibuat pada lahan bera berumur kurang dari 10 tahun. Sebagian besar lokasi ladang dapat dicapai dengan jalan kaki sekitar 60 menit dari kampung. Walaupun beberapa rumah tangga harus mencapainya dengan perahu ces.

5.5 Pendapatan uang

Kurang dari setengah rumah tangga mendapatkan penghasilan dari adanya HPHH yang dijalankan oleh PT. RKR. Penghasilan didapatkan berupa *fee* maupun gaji untuk yang bekerja langsung di perusahaan. Bagi yang tidak mendapatkan penghasilan dari konsesi HPHH, kebanyakan menggantungkan mata pencaharian pada kebun rotan, menjual sayur-sayuran, jual ternak dan mencari ikan. Dari kebun rotan, masyarakat mendapatkan hasil dari penjualan rotan maupun dari upah memotong rotan di kebun.

Sayur-sayuran dan hasil ladang lainnya dijual sampai ke pasar di Barong Tongkok dan Damai, dengan mempergunakan angkutan mobil yang berangkat setiap pagi dari Jontai.

Hasil ikan dijual di sekitar kampung, harga ikan antara Rp.10.000 - Rp.15.000 setiap cucuk/ikat. Dalam 1 hari, satu rumah tangga kadang bisa mendapatkan ikan sampai 3 cucuk. Dan dari 3 cucuk ini kadang hanya 2 cucuk yang dijual, sisa 1 cucuk lainnya dikonsumsi sendiri.

Sebagian lainnya mempunyai sumber pendapatan dari honor aparat kampung, guru sekolah dasar, hasil warung dan jasa penyeberangan perahu di Sungai Nyuatan.

Kampung Jontai

5.6 Infrastruktur ekonomi

Di Jontai terdapat bangunan pasar, namun tidak pernah dipakai sebagai sarana jual beli. Dalam 5 tahun terakhir ini frekuensi buka pasar menurun. Pasar terdekat selain yang ada di kampung, terdapat pasar di Sembuan yang buka setiap seminggu sekali, dan berjarak sekitar 45 menit jalan kaki dari Jontai ke arah Hulu Sungai Nyuatan.

Kondisi jalan di Jontai saat ini kurang baik, namun demikian dibandingkan dengan perubahan dalam 5 tahun terakhir ini, kondisi jalan berubah lebih baik. Pemerintah telah mengadakan program semenisasi jalan kampung melalui program P2D. Kondisi sungai sekarang ini kurang baik, dan perubahan selama 5 tahun terakhir ini semakin memburuk.

Waktu perjalanan ke Damai (kecamatan) dan Melak atau Barong Tongkok (ibukota kabupaten) menjadi lebih cepat. Hal ini diakibatkan adanya proyek pengerasan dan pelebaran jalan antara Jontai sampai ke Mencimai yang telah dilaksanakan saat ini.

Untuk mencapai Damai dengan menggunakan perahu ketinting, masyarakat harus membayar Rp. 10.000 per sekali jalan. Jika menggunakan ojek sepeda motor membayar Rp. 50.000, sedangkan jika menggunakan taksi mobil membayar Rp. 25.000 per sekali jalan.

5.7 Keterjangkauan energi

Terdapat 4 macam sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- gas;
- listrik.

Listrik merupakan sumber energi yang baru digunakan. Mesin pembangkit listrik PLN yang dipergunakan bagi sambungan listrik di Jontai saat ini rusak. Sumber energi listrik PLN tidak dipergunakan lagi karena masyarakat Jontai tidak mampu membayar biaya listrik. Sumber energi kayu bakar dan minyak tanah sudah lama dipergunakan dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian besar rumah penduduk berdinding kayu yang bukan kayu ulin atau bengkirai. Sebagian besar beratap keping dan sirap, walaupun terdapat beberapa yang beratapkan seng. Seluruh rumah berlantai papan. Ukuran rumah berkisar antara 6 meter lebar dan 10 meter panjang.

Hanya sekitar 30% dari rumah yang dialiri listrik. Di sini tidak ada jaringan listrik PLN, sehingga rumah tangga mempergunakan listrik dari generator pribadi atau menyalur dari listrik tetangga.

Semua rumah tangga mempergunakan WC. Hampir 90% diantaranya mempergunakan WC yang terletak di sungai. Sisanya adalah WC di darat. Terdapat 4 buah WC di sungai yang dipergunakan secara bersama.

Kampung Jontai

5.9 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Dapat dijangkau seluruh masyarakat	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Kurang baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Memburuk	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan simpukng	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>bengkar mentut</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda	Ada	Tetap	Ketua BPK
Belukar tua (<i>kolowako</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Belukar (<i>bowaq</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan rawa	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas		-	Ketua BPK
Hutan lindung	Ada	-	Petinggi
Akses terhadap hutan	-	-	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Karena operasional HPHH	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Hasil penjualan sayur dan ikan	Membaik	Ketua BPK

6. Pendidikan⁶

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Dari 18 rumah tangga yang survei, terdapat 6 rumah tangga yang memiliki anak putus sekolah. Kebanyakan putus pada tingkat SD dan SLTP. Terdapat 1 orang anak yang terpaksa meninggalkan sekolah karena pindah ke kampung lain.

Tingkat pendidikan guru dirasakan sama saja. Pendidikan guru yang tertinggi adalah Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Keaktifan guru dalam mengajar lebih aktif, tapi mereka merasa terlalu dibebani dengan beban kerja. Di Jontai hanya ada 1 orang guru yang juga merangkap Kepala Sekolah dan mengajar di 3 kelas.

6.2 Infrastruktur pendidikan

Di Jontai belum terdapat gedung sekolah dasar. Siswa sekolah dasar dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 belajar di Balai Desa. Mereka belajar di ruangan yang sama tanpa ada penyekat ruangan. Sedangkan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 belajar ke sekolah dasar di Dempar, yang berjarak sekitar 4 kilometer dari Jontai.

⁶ Informasi dari Kepala Sekolah.

Kampung Jontai

Siswa yang ingin melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), bisa melanjutkan ke SLTP terdekat yang ada di Kampung Dempar. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdekat berada di Barong Tongkok yang berjarak sekitar 60 kilometer.

Kampung-kampung terdekat di sekitar Jontai telah memiliki bangunan sekolah dasar yang cukup permanen, sehingga tidak terdapat anak-anak dari luar kampung yang bersekolah dan harus tinggal di Jontai. Hanya terdapat 1 orang murid pindahan dari Muara Pahu yang pindah ke SD di Jontai karena mengikuti orang tuanya.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah sekolah tidak berubah yaitu hanya menggunakan Balai Desa. Alat-alat dan buku-buku berkurang, sementara jumlah staf guru berkurang, walaupun guru mengakui bahwa gajinya lebih besar.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1 sekolah dasar	Sama saja	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	Belum ada bangunan khusus	Sama saja	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih baik	Kepala Sekolah

7. Kesehatan ⁷

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Menurut Dukun Beranak, jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	- Sakit perut - Muntah - Demam
Orang dewasa	- Sakit pinggang - Pusing - Batuk-batuk - TBC - Sesak napas
Perempuan	- Sakit ketika menstruasi (<i>selagagut</i>) - Keputihan - Gatal-gatal
Orang usia lanjut	- TBC

Penyakit malaria, diare, dan TBC sering terjangkit di Jontai. Frekuensi penyakit malaria tidak mengalami perubahan. Penyakit malaria paling sering terjangkit pada kelompok umur dewasa. Penyakit diare paling sering terjangkit pada kelompok umur

⁷ Informasi dari Dukun Beranak dan Kepala Adat.

Kampung Jontai

anak-anak. Sedangkan penyakit TBC paling sering terjangkit pada kelompok orang usia lanjut, dengan tingkat keseringan berfluktuasi.

Dalam 12 bulan terakhir, 5 orang anak lahir dengan berat rata-rata 3,1 kg. Umur rata-rata ibu pada saat kelahiran pertama 16 tahun. Tidak terdapat kematian pada anak umur 5 tahun sampai 10 tahun. Jumlah orang dewasa yang meninggal 2 orang, satu diantaranya seorang ibu yang meninggal saat melahirkan di Rumah Sakit di Tering.

Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit di atas 40 tahun. Biasanya dikarenakan penyakit TBC. Penyakit TBC merupakan penyakit yang banyak menyebabkan kematian di Jontai.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut dukun beranak, semua rumah tangga di Jontai bisa mendapatkan sumber air bersih yang berasal dari pancuran air. Sumber air berasal dari Gunung Mesan. Jumlah dan mutu air dirasakan meningkat. Peningkatan jumlah dan mutu air dikarenakan adanya penyaringan batu dari gunung. Sebelum ditemukan dan dibuat sarana fasilitas air bersih, rumah tangga di Jontai mendapatkan sumber air dari Sungai Nyuatan anak Sungai Kedang Pahu.

Sumber air bersih dari Gunung Mesan ini tetap mengalir jernih dan tidak berbau serta bisa dipergunakan memasak dan air minum walaupun pada musim kemarau. Sehingga saat kemarau, rumah tangga di Jontai tidak memerlukan bantuan air bersih dari pihak luar.

Pemerintah telah membantu 3 buah alat penyimpan air bagi masyarakat umum yang terbuat dari *fiber glass* berwarna hijau. Kendalanya air dari sumber air tidak bisa naik dan masuk ke penampungan air tanpa alat bantu pompa air. Masalahnya pada saat pemberian bantuan alat penyimpanan air tidak diberikan alat bantu pompa air. Sehingga alat tersebut belum bisa digunakan dengan baik. Di rumah tangga, penyimpanan air dilakukan di gentong-gentong plastik berukuran 130 liter yang ada tutup gentongnya.

7.3 Kebersihan Kampung

Kampung Jontai yang bertopografi datar ini cukup bersih. Jalan-jalan utama di kampung telah dilakukan semenisasi. Lokasi sarana olah raga cukup terawat dan lingkungan sekitarnya cukup bersih. Di kampung ini tidak ditemukan tumpukan sampah. Rumah-rumah tersusun rapi di sepanjang jalur kiri dan kanan jalan kampung. Keadaan gereja dan lingkungan sekitarnya cukup bersih. Hanya terdapat beberapa bagian tanah di tepi Sungai Nyuatan yang longsor akibat erosi air serta 1 jamban yang tidak terawat dan banyak kayunya yang jabuk tapi tidak diganti.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Hanya terdapat fasilitas kesehatan Polindes dan dukun beranak. Namun polindes tersebut hanya berupa bangunan saja karena tidak ada tenaga medis yang bekerja. Hal ini membuat masyarakat hanya tergantung pada dukung beranak. Sayangnya sampai dengan saat ini belum ada bantuan atau dukungan berupa apapun dari pemerintah kepada dukung beranak. Padahal untuk menjalankan tugasnya, dukun beranak memerlukan bantuan berupa sarung tangan, ikatan tali pusat, gunting, dan alkohol. Selain melayani masyarakat Jontai sendiri, dukung beranak Jontai juga melayani

Kampung Jontai

masyarakat dari kampung lain. Salah satu pasiennya adalah dari Jengan Danum yang berjarak sekitar 21 kilometer dari Jontai.

Fasilitas kesehatan medis terdekat adalah Puskesmas di Damai, yang bisa dicapai dengan memakai ketinting selama sekitar 8 jam dengan biaya Rp. 20.000/sekali jalan. Atau pakai mobil selama 1 jam dengan biaya Rp. 20.000 sekali jalan. Tidak ada perubahan kondisi fasilitas kesehatan dalam 5 tahun terakhir.

Menurut Kepala Adat, jumlah ahli pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir, sama saja. Upacara pengobatan tradisional masih dilakukan lebih dari sekali dalam sebulan. Jumlah pengobatan tradisional berfluktuasi tergantung dari adanya orang yang sakit dan berobat. Biaya pengobatan tradisional tergantung pada berapa malam pengobatan itu dilakukan. Jika pengobatan dilakukan selama 3 hari, biaya pengobatan bisa mencapai Rp. 200.000.

7.5 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Kondisi saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air pancuran	Meningkat	Dukun Beranak
Mutu air bersih	Air pancuran	Meningkat	Dukun Beranak
Jumlah fasilitas kesehatan	Kurang berfungsi	Sama saja	Dukun Beranak
Kondisi fasilitas kesehatan	Kurang berfungsi	Sama saja	Dukun Beranak
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama saja	Dukun Beranak
Ketersediaan obat dan peralatan	Tidak ada	-	Dukun Beranak
Gaji/honor	Tidak ada	-	Dukun Beranak
Penyakit malaria	Ada	Sama	Dukun Beranak
Penyakit diare	Ada	Meningkat	Dukun Beranak
Penyakit TBC	Ada	Berfluktuasi	Dukun Beranak
Jumlah ahli pengobatan tradisional	7 orang	Sama	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Ada	Berfluktuasi	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Menurut Kepala Adat, selama sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada bencana di Jontai:

No	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan	Tidak ada
2	Kelaparan	Tidak ada
3	Kekeringan	Tidak ada
4	Banjir	Tidak ada
5	Hama	Tidak ada
6	Perubahan pemerintah	Tidak ada

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Jontai. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- kesadaran warga untuk menertibkan atau mengandangkan hewan ternak (mengurung hewan ternak dalam kandang) masih rendah walaupun sudah ada kesepakatan;
- ladang tidak menghasilkan padi sebab banyak hama;
- usaha kurang;
- hasil pertanian, kerajinan dan ternak tidak ada harga dan sulit pemasarannya;
- sulit mendapatkan pekerjaan terutama jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebab pendidikan rendah;
- tenaga medis tidak ada, fasilitas kesehatan jauh dari kampung, tenaga medis tidak betah tinggal di kampung;
- sekolah dasar tidak ada gedung sekolahnya, tenaga pengajar/guru hanya 1 orang, tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut masyarakat biasa:

- tidak ada sarana pendidikan, bangunan sekolah, tenaga guru, dan lain- lain;
- tidak mempunyai dana atau modal;
- kegagalan panen, penghasilan yang didapat hanya untuk beli beras, tidak dapat membangun rumah, sarana dan prasarana dalam pertanian, baik alat/bibit dan tenaga penyuluh pertanian;
- tidak ada sarana kesehatan Pusban dan tenaga medis serta obat-obatan.

Menurut tokoh masyarakat:

- Tidak ada sarana pendidikan (gedung SD);
- Tidak ada modal usaha untuk ternak (ikan, ayam, babi) dan kebun (karet, kemiri, jahe, lombok);
- Tenaga medis (bidan) tidak ada sehingga pelayanan kesehatan tidak maksimal. Bidan kampung harus diberi pengetahuan dan honor;
- Tidak ada sarana jalan tembus ke jalan perusahaan sehingga bisa menuju Linggang Bigung, Barong Tongkok, dan kampung lainnya serta pengadaan sarana jembatan di Kampung Jontai;
- Tidak ada pembinaan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian untuk pembuatan sawah.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Perubahan yang cukup signifikan dari sisi mata pencaharian adalah pendapatan dari konsesi HPHH. Hal ini terungkap dari wawancara dengan rumah tangga tentang jenis pendapat yang baru mereka dapatkan dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya pendapatan dari konsesi ini tidak merata karena kurang dari separuh warga yang mendapatkannya. Bahkan wawancara dengan 1 rumah tangga yang dianggap kurang mampu menunjukkan

Kampung Jontai

kepada kita bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak ikut dalam pengambilan keputusan tentang ijin konsesi tersebut.

Terbukanya akses kepada hutan ternyata memicu konflik lahan dan sumber daya alam. Walaupun Kepala Adat menyatakan tidak ada konflik, tapi pada bagian lain beliau menjelaskan tentang contoh konflik lahan dan sumber daya alam akibat persengketaan petak HPHH. Para responden mengakui bahwa kondisi hutan mereka semakin rusak akibat adanya aktivitas HPHH.

Pelayanan pendidikan di Kampung Jontai masih sangat rendah, hal ini tidak ada perubahan sejak 5 tahun terakhir. Buruknya fasilitas pendidikan ditunjukkan dengan tidak adanya bangunan sekolah dasar, bahkan hanya tersedia 1 orang guru yang juga merangkap kepala sekolah.

Kondisi kesehatan juga tidak mengalami perubahan berarti dalam 5 tahun terakhir. Penyakit TBC sebagai penyakit yang banyak menyebabkan kematian warga, masih belum dapat ditanggulangi dengan baik. Bahkan frekuensi penyakit diare diakui meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kondisi kesehatan yang buruk ini diperparah dengan tidak adanya fasilitas kesehatan medis. Di sisi lain, pemerintah juga tidak memberikan dukungan pada tenaga kesehatan tradisional seperti dukun beranak.

Satu perubahan yang baik terlihat pada infrastruktur jalan. Saat ini masyarakat dapat menjangkau ibukota kecamatan dan kabupaten melalui jalan darat dengan lebih cepat. Walaupun demikian, kondisi sungai sebagai jalur transportasi dirasakan semakin memburuk.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk kampung Jontai, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 18 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarainya adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- dukung beranak;
- warung.

Kampung Jontai

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Naha Aruq

Jumlah rumah tangga: 43	Jumlah jiwa: 117
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 50	Jumlah KK: 67
Jumlah rumah tangga miskin: 8	Suku mayoritas: Bahau
Nama Kepala Adat: Juan Juk	Jumlah TK: -
Nama Petinggi: Thomas	Jumlah SD: 1
Waktu tempuh ke kecamatan: ±15 menit (ces 10 PK)	Jumlah SLTP: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 28 jam (long boat + kapal)	Jumlah SLTA: -
Posisi administratif: Kecamatan Long Pahangai, Kab. Kutai Barat	Jumlah Puskesmas: -
Posisi geografis: 115 ⁰ 35' BT, 0 ⁰ 55' LU	Jumlah Pusban: 1
Tanggal survei: 7 - 10 November 2003	Jumlah Polindes: -

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Naha Aruq mengalami beberapa kali perpindahan. Kampung Naha Aruq awalnya berlokasi di Hulu Sungai Melaseh (anak Sungai Mahakam yang bermuara di Hulu Kampung Long Pahangai). Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, kampung asal Naha Aruq ini mengalami bencana kebakaran, sehingga seluruh masyarakat pindah ke Uma' Lirai yang berjarak kira-kira 5 menit perjalanan ces dari kampung asal. Mereka mendiami Uma' Lirai selama 50 tahun, kemudian memutuskan untuk kembali ke lokasi asal Naha Aruq.

Lima tahun kemudian, pemerintah melalui Kecamatan Long Pahangai memutuskan untuk mendekatkan kampung-kampung kecil dan terisolasi menjadi satu di Datar Suling. Datar Suling terletak di DAS Mahakam dan berjarak 15 menit perjalanan dengan ces 10 PK ke Kecamatan Long Pahangai. Kampung-kampung yang ditempatkan di Datar Suling adalah Kampung Naha Aruq, Kampung Datar Naha, Kampung Lirung Ubing dan Kampung Long Isun. Di Datar Suling mereka tetap menggunakan nama Kampung Naha Aruq dan tetap mempunyai tata pemerintahan dan adat tersendiri. Kampung Naha Aruq telah resmi pindah ke Datar Suling selama 12 tahun.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung antara lain:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani;
- Karang Taruna;
- Posyandu;
- Puskesmas Pembantu;
- PKK.

Badan Perwakilan Kampung (BPK) dibentuk pada Bulan Agustus 2003, personalianya terdiri atas 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Menurut Sekretaris BPK, sejak dibentuk hingga survei dilakukan (November 2003) BPK belum pernah melakukan musyawarah dan diskusi dengan masyarakat. Kebanyakan anggota BPK belum benar-benar paham akan tugas dan fungsinya.

Dalam 5 tahun terakhir, kualitas, frekuensi dan dampak dari keputusan musyawarah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama ini masyarakat selalu patuh terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Misalnya: di kampung ini ada kesepakatan bahwa tanggal 10 setiap bulan adalah hari posyandu dan pelayan kesehatan dari kecamatan dan tanggal 9 adalah hari bergotong-royong membangun lapangan di depan Lamin, sehingga setiap bulan sebelum tanggal tersebut, masyarakat yang pulang dari ladang harus membawa 1 karung batu kerikil untuk bahan pembuatan lapangan.

2.1 Resume trend perubahan:

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Sama saja	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Menurut Petinggi, Pemerintah Kampung Naha Aruq dalam 5 tahun terakhir mengajukan beberapa permohonan, antara lain:

Permohonan Bantuan	Tanggapan Pemerintah
Pembuatan jembatan ke gereja	Akan dilaksanakan tahun 2004
Pengadaan air bersih	Direalisasikan tahun 2003 namun tidak maksimal
Pembangunan rumah adat	Akan dilaksanakan tahun 2004
Pembuatan Jamban Keluarga (Kloset)	Belum ada jawaban

Kampung Naha Arug

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Masyarakat Kurang Mampu	Menurut Sekretaris BPK
1	Semenisasi blok atas kampung	Bantuan 'beras miskin'	Bantuan kayu/papan dari PT. KRT pada saat pindah kampung
2	Pembuatan rumah adat	Posyandu bagi balita dan pengobatan gratis dari Puskesmas kecamatan.	-
3	Pipanisasi 'air mudah' (bukan air bersih)	-	-

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, harga 'beras miskin' dan beras subsidi dari pemerintah masih mahal sedangkan kualitasnya rendah. Beberapa responden rumah tangga juga mengeluhkan kualitas 'beras miskin' dari pemerintah, mereka terpaksa membeli beras di toko dengan harga yang lebih mahal.

Diskusi kelompok dan responden rumah tangga juga mengeluhkan bantuan pemerintah yang mereka anggap tidak tepat sasaran. Misalnya, beberapa tahun yang lalu pernah ada bantuan bibit vanili yang setelah mereka tanam tidak mereka ketahui cara pengolahan dan pemasarannya, sedangkan penyuluhan juga tidak ada.

Menurut petinggi, bantuan yang diberikan juga tidak maksimal dan berkelanjutan. Bantuan 'pipanisasi air bersih' misalnya. Mereka lebih suka menyebutnya 'air mudah' karena air yang dialirkan adalah juga air sungai. Setelah peresmian, air hanya mengalir selama 1 minggu, karena mengalami kerusakan alat. Hingga survei dilakukan, belum ada kejelasan tentang kelanjutan proyek air bersih ini.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, kunjungan dari petugas pelayanan dari pemerintah rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Petugas dari kabupaten biasanya hanya sampai di kecamatan, sehingga jika masyarakat memerlukan mereka harus menjemput ke Long Pahangai.

Beberapa responden rumah tangga menginformasikan bahwa ada kunjungan rutin 1 kali sebulan dari petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Long Pahangai.

Hubungan dengan pemerintah kabupaten dalam 5 tahun terakhir ini mengalami perubahan yang umumnya ke arah yang lebih baik. Perubahan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

Kampung Naha Aruq

Menurut Sekretaris BPK, sebelum ada Kabupaten Kutai Barat kunjungan pemerintah kabupaten ke kampung sangat jarang. Pada waktu itu kunjungan hanya sampai di Kecamatan Long Bagun, bilapun sampai di Kecamatan Long Pahangai mereka hanya menyerahkan atau menandatangani surat-surat di kecamatan dan langsung kembali.

3.3 Sumber dan alat informasi

Pada umumnya, masyarakat mengetahui informasi tentang program-program pemerintah dari petinggi. Sedangkan Petinggi dan BPK mendapatkan informasi dari pemerintah (melalui kecamatan). Informasi dari luar didapat masyarakat melalui radio dan televisi. Televisi hanya bisa berfungsi dengan baik apabila ada antena parabola. Tidak ada fasilitas alat komunikasi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di kampung. Bila ingin berkomunikasi dengan daerah/kampung lain, masyarakat menggunakan wartel yang menggunakan telepon satelit yang dimiliki oleh satu orang warga. Bila mendesak, masyarakat menggunakan wartel dari kampung terdekat atau menggunakan radio di kecamatan.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Sekretaris BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Sekretaris BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Sekretaris BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Sekretaris BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Sama	Petinggi

4. Sosial Budaya

Menurut petinggi, belum ada data yang valid tentang perpindahan penduduk. Perpindahan karena pergi sekolah memang ada namun tidak dicatat. Pernikahan dengan kampung lain juga begitu lazim sehingga tidak didata, alasannya adalah karena mereka menikah dengan orang dari kampung yang dekat.

4.1 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Naha Aruq adalah Adat Dumaan yaitu rangkaian upacara yang berhubungan dengan perladangan. Dalam Adat Dumaan ini antara lain dilakukan ritual upacara Hudoq dan Lemaliiq Parai Atang.

Beberapa responden rumah tangga menginformasikan bahwa selain Adat Dumaan, upacara adat lain yang masih dilakukan adalah Adat Hawaq (berhubungan dengan rangkaian upacara perkawinan), Adat Anaak (berhubungan dengan upacara kelahiran, penamaan dan pendewasaan anak), dan Adat Patai (berhubungan dengan upacara adat kematian).

Bila dibandingkan dengan masa lalu, waktu pelaksanaan upacara adat tetap sama, demikian juga dengan bahan-bahan yang digunakan dan tujuan upacara menurut adat. Walaupun masyarakat lebih individual dan mulai menganut 'sistem uang' namun tingkat kepedulian untuk bergotong-royong untuk upacara adat tetap kokoh.

Kampung Naha Aruq

Kepala Adat juga menginformasikan bahwa upacara dan ritual adat bagi masyarakat Bahau tidak bisa dipisahkan dengan tradisi berladang. Sayangnya, generasi muda kurang berminat berladang atau mempelajari dan mendalami tradisi, mereka lebih suka pergi mencari uang dengan cara lain misalnya dengan bekerja di perusahaan atau menjadi pemetik sarang burung.

4.2 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir sama saja bila dibandingkan dengan sebelumnya. Masyarakat dari dulu selalu bekerjasama dan bergotong-royong dalam menyelesaikan masalah. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilaksanakan dalam 12 bulan terakhir adalah:

- membersihkan jalan;
- membangun lamin;
- menyemen lapangan di depan lamin;
- masyarakat telah sepakat bahwa setiap tanggal 9 setiap bulan adalah hari gotong royong untuk penyemenan lapangan di depan lamin. Biasanya gotong royong dilakukan oleh seluruh masyarakat.

Bertentangan dengan pernyataan di atas, responden keluarga kurang mampu menganggap bahwa tingkat solidaritas mulai menurun. Mereka merasa belum pernah mendapat bantuan baik dari keluarga maupun dari yang bukan keluarga.

Kepala Adat menjelaskan bahwa biasanya bila musim kemarau, ketika kekeringan dan paceklik tiba maka dilakukan rapat di kecamatan. Dalam rapat tersebut tiap kampung membuat usulan bantuan, biasanya bantuan berupa beras yang dapat dibeli dengan harga lebih murah. Masyarakat menginformasikan bahwa beras bantuan lebih murah Rp. 250/kg dari beras di toko.

4.3 Konflik

Menurut Kepala Adat tidak pernah terjadi konflik baik lahan, keluarga, suku, agama, maupun konflik sumber daya alam. Konflik lahan masih bisa dikontrol, dengan cara menetapkan bahwa siapapun yang akan membuka lahan baru harus meminta ijin. Konflik keluarga hampir tidak pernah terjadi karena pada umumnya seisi kampung Naha Aruq masih mempunyai keterkaitan keluarga dan hubungan darah satu sama lain, sehingga bila terjadi perselisihan biasanya bisa diselesaikan dengan '*petebaraa*' atau pemberian nasehat. Kebijakan lain yang disepakati oleh Kampung Naha Aruq adalah dengan tidak menerima orang luar (selain orang Naha Aruq) untuk menetap permanen di Naha Aruq, hal ini mereka lakukan untuk menghindari konflik suku.

Menurut masyarakat kurang mampu, sebenarnya ada konflik lahan dengan kampung tetangga, yaitu mengenai batas wilayah dengan Kampung Long Isun yang dalam proses penyelesaian.

Kepala Adat menegaskan bahwa seluruh konflik, baik konflik di dalam kampung maupun dengan pihak luar kampung bisa diselesaikan dengan hukum adat. Tidak pernah ada permasalahan yang berat, dan sanksi yang dikenakan oleh lembaga adat pasti ditaati pihak yang berkonflik.

Kampung Naha Aruq

4.4 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Masyarakat kurang mampu menginformasikan bahwa masalah utama yang mereka hadapi adalah:

- kekurangan pangan, karena gagal panen;
- rumah dalam kondisi belum selesai dibangun;
- keluarga meninggal.

Mereka menganggap bahwa situasi mereka berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Fluktuasi perubahan dan kemiskinan mereka disebabkan oleh:

- kekurangan pangan karena ladang diserang monyet;
- tidak bisa membuat ladang lebih jauh yang lebih subur karena biaya transportasi yang mahal. Ladang juga tidak bisa jauh-jauh karena mereka juga harus rutin pulang ke kampung untuk bergotong-royong, dll.

Tingkat keikutsertaan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di kampung sangat tinggi.

Bantuan yang diharapkan dari pihak luar adalah:

- pengobatan gratis;
- rehabilitasi rumah;
- beasiswa bagi anak sekolah;
- pembuatan ladang.

Masyarakat kurang mampu merasa bahwa mereka tidak mampu membayar untuk pendidikan anak-anak dan kesehatan. Selama ini mereka merasa terbantu dengan kegiatan posyandu dan pengobatan gratis, namun mereka belum pernah mendapat keringanan untuk pendidikan.

4.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di kampung adalah:

- televisi;
- radio (Pro 3 pada gelombang SW).

Kampung Naha Aruq

4.6 Resume trend perubahan:

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Gotong-royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama dengan tujuan menurut adat	Kepala Adat
Konflik lahan	Jarang	Sama	Kepala Adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	-	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama saja	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Sama Tidak ada konflik	Masyarakat kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Masyarakat kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Sekretaris BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Kampung Naha Aruq adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- kebun buah (*lepu'un*);
- kebun kopi;
- peternakan;
- kebun lain (vanili, kelapa, limau).

Hutan yang diakui sebagai hak milik Kampung Naha Aruq adalah hutan dan lahan yang ada di wilayah lama Naha Aruq di Sungai Melaseh, sedangkan lahan yang ditempati sebagai kampung sekarang adalah hibah dari Kampung Long Pahangai II.

Hutan dan *tana' pera'* merupakan tata guna hutan yang terluas dengan komposisi lebih dari setengah dari total luasan kampung. Dari tipe tata guna lahan di atas, hanya kebun buah dan kebun kopi yang mengalami penambahan luas, karena telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menanam bekas ladangnya dengan buah-buahan dan kopi. Saat ini banyak masyarakat yang baru memulai menanam karet. Umumnya luasan kebun rotan tidak mengalami perubahan, sejak harga rotan 'anjlok' mereka tidak lagi mengurus kebun rotannya.

Kampung Naha Aruq

Menurut Sekretaris BPK, jenis hutan dan lahan yang ada di Naha Aruq adalah sebagai berikut:

- hutan perawan (*tana lung/tana pera*);
- hutan sekunder tua (*Talun ayaq/lepuun unaq*);
- hutan sekunder muda (*talun sepitang*);
- belukar tua (*talun uk*);
- belukar (*talun uk*);
- hutan rawa (*pekaq*);
- hutan kerangas (*tana' ngatub*).

Luasan *tana pera*, *talun ayaq lepuun unaq* dan *talun sepitang* cenderung terus bertambah karena perpindahan kampung membuat masyarakat enggan membuat ladang lebih jauh. Banyak dari lahan yang dulunya *talun uk* sekarang berkembang menjadi *talun sepitang*. Masyarakat hanya membuat ladang di areal yang dekat dengan kampung.

Menurut Sekretaris BPK, perubahan pernah terjadi terhadap kawasan hutan adalah:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Pertambahan luasan hutan	Kampung pindah, masyarakat tidak membuat ladang jauh	Ladang tidak subur karena berotasi di tempat yang dekat
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	- Pencarian gaharu - Perburuan binatang (payau, babi, burung)	- Gaharu makin jauh dan susah dicari, sehingga pohon yang kecilpun dicoba - Payau tidak lagi menjadi hama padi sehingga masyarakat tidak perlu memagari ladang

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Petinggi, Kampung Naha Aruq mempunyai hutan lindung yang lazim dinamai *tana lung*. Luasan hutan lindung ini masih dalam proses pengukuran.

Hutan lindung dikelola secara adat, bila ada pelanggaran maka sudah ada aturan main yang ditetapkan, misalnya: Bila ada yang ketahuan mencuri kayu di areal hutan lindung, maka akan didenda.

Dari Kampung Naha Aruq belum pernah ada yang mengajukan IPPK/HPHH/IHPHH, sedangkan pihak luar pernah mengajukan permohonan untuk konsesi di wilayah kampung (Sungai Besangaq). Belum ada kejelasan tentang permohonan konsesi ini, untuk apa dan apakah diterima atau tidak. Sampai dengan saat ini juga tidak ada ijin konsesi HPH yang bekerja. Walaupun demikian, beberapa rumah tangga mengakui memiliki penghasilan dari kerja menebang pohon dan menggergaji kayu.

Menurut responden kurang mampu, pernah ada pihak luar yang memohon ijin untuk konsesi (banjir kap) namun permohonannya tidak disetujui.

Kampung Naha Aruq

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Petinggi, seluruh rumah tangga memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Keterjangkauan ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Hampir seluruh rumah tangga mempunyai lahan sendiri. Dalam wawancara tingkat rumah tangga, ada sedikit sekali yang meminjam lahan yang dekat dengan kampung dari keluarga sendiri. Di kampung Naha Aruq belum pernah terjadi jual beli lahan.

5.4 Perladangan

Setelah pindah ke kampung yang sekarang, salah satu keluhan responden adalah mereka tidak bisa membuat ladang jauh karena banyak program di kampung yang menuntut kehadiran masyarakat secara reguler seperti kerja bakti, pertemuan, dll. Karena tidak jauh maka ladang tidak subur dan rentan terhadap hama kepinding tanah dan monyet.

Sejak tahun 1999 - 2003, jumlah responden yang berladang berkisar antara 70% - 90%. Kecenderungannya menurun pada tahun 2003. Hanya sebagian kecil yang menggarap sawah dalam 2 tahun terakhir. Lebih dari separuh responden berladang di lahan sendiri, sedikit sisanya berladang di lahan bebas dan lahan pinjaman. Usia lahan yang digunakan responden rumah tangga untuk berladang bervariasi merata, dari hutan perawan hingga lahan bekas ladang yang berusia kurang dari 10 tahun.

Benih yang ditanam berkisar antara 1 - 8 kaleng pada tahun 2002 dan menurun menjadi 1 - 6 kaleng pada tahun 2003. Jumlah rata-rata yang ditanam umumnya 2 - 3 kaleng. Hampir separuh dari responden menyatakan bahwa hasil panennya mencukupi hingga panen berikutnya, sisanya mampu bertahan antara 2 - 8 bulan.

Kebutuhan akan beras yang tidak terpenuhi dari hasil ladang adalah dari membeli. Tidak pernah ada bantuan beras secara cuma-cuma di kampung ini. Jarak tempuh ladang dari kampung berkisar antara 15 - 90 menit, hampir semuanya harus ditempuh dengan perahu ces. Sangat sedikit yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kebanyakan ladang bisa ditempuh dalam waktu 30 - 40 menit.

5.5 Pendapatan uang

Menurut Sekretaris BPK, perkembangan ekonomi rata-rata di kampung membaik dalam 5 tahun terakhir. Indikasinya adalah tidak kekurangan pangan; pedagang bisa langsung datang ke kampung; dan hampir semua rumah tangga mempunyai ces sendiri. Sumber pendapatan uang responden sangat bervariasi, hampir tidak ada yang dominan. Beberapa jenis pendapatan tersebut adalah: berburu, mencari kayu (nyenso), jaga sarang burung, pembuatan produk kerajinan seperti manik-manik, motoris, tukang buat rumah, jual padi dari kelebihan hasil ladang, warung, gaji aparat kampung dan gaji guru PTT. Dari penghasilan tersebut, yang termasuk ke dalam penghasilan baru adalah: mencari kayu (nyenso), jaga sarang burung, gaji aparat kampung dan gaji guru PTT. Sebagai salah satu contoh, penghasilan motoris atau tenaga terampil yang disewa untuk mengemudikan *long boat* memiliki penghasilan sekitar Rp 400.000/ minggu tergantung frekuensi kerja.

Kampung Naha Aruq

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak ada pasar di kampung ini, bahkan di kampung-kampung lain di Kecamatan Long Pahangai juga tidak ada pasar. Kebutuhan masyarakat akan sayur mayur didapat dari kebun sendiri, sedangkan kebutuhan akan daging dan ikan juga dari hasil buruan sendiri atau membeli dari tetangga bila ada yang menjual.

Pakaian dan kain bisa dibeli di toko-toko atau dari penjual keliling yang datangnya tidak tentu.

Menurut petinggi, dalam 5 tahun terakhir kondisi jalan di kampung mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jalan yang melintasi kampung dan antar blok sudah disemen, jalan yang menghubungkan dengan kampung terdekat di Datarah Suling juga sudah disemen. Tidak ada perubahan berarti pada jalan sungai yang menjadi alur transportasi utama masyarakat.

Transportasi reguler yang melintasi di kampung adalah perahu ces, *long boat*, dan *speed boat*. Tarifnya adalah Rp. 30.000 ke Long Lunuk, Rp. 10.000 ke Long Pahangai dan Rp. 100.000 ke Long Bagun.

Petinggi dan masyarakat responden juga menilai bahwa waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke kecamatan, kabupaten dan kota menjadi lebih cepat karena sekarang alat transportasi reguler semakin banyak dan cepat (ada *speed boat* dan pesawat perintis DAS).

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik;
- bensin;
- solar.

Kayu bakar merupakan sumber energi yang sudah lama digunakan dan masih terjangkau. Minyak tanah dan bensin juga sudah cukup lama digunakan namun saat ini dirasakan semakin sulit terjangkau. Listrik umumnya didapat dari *genset* yang berbahan bakar solar yang juga dirasakan semakin mahal harganya. Hanya keluarga mampu (pedagang dan pegawai) yang memiliki mesin *genset* sendiri. Masyarakat lain menyambung saluran dari mereka dan harus membayar iuran setiap bulan, yang besarnya tergantung pada jumlah pemakaian.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah terbuat dari kayu, sebagian kecil terbuat dari kayu ulin atau bengkirai. Semua atap rumah responden rumah tangga terbuat dari keping atau sirap. Dinding rumah dan lantai umumnya terbuat dari kayu biasa, hanya sebagian kecil yang terbuat dari ulin atau kayu keras lainnya. Sebagian besar rumah memiliki aliran listrik yang berasal dari *genset* yang dimiliki oleh orang mampu tertentu di kampung. Hanya sekitar 10% dari responden rumah tangga yang rumahnya belum dialiri listrik. Seluruh rumah tangga memiliki WC, sekitar tigaperempatnya merupakan WC sungai dan sisanya adalah WC dalam rumah. Saat ini bantuan pemerintah untuk pembuatan WC dalam rumah untuk tiap rumah tangga sedang dalam proses.

Kampung Naha Aruq

5.9 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Terjangkau seluruh masyarakat	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Semakin baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik	Sama	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Sekretaris BPK
Luasan sawah	Tidak ada	Sama	Sekretaris BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Sama	Sekretaris BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Tetap, sama	Sekretaris BPK
Luasan kebun karet	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Luasan kebun buah	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	Tidak ada	Sekretaris BPK
Luasan kebun kopi	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Luasan peternakan	Ada	Berkurang	Sekretaris BPK
Luasan hutan	Ada	Sama	Sekretaris BPK
Hutan perawan (<i>tana pera'</i>)	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Hutan sekunder tua (<i>talun ayaq lumaq unaq</i>)	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Hutan sekunder muda (<i>talun sepitang</i>)	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Belukar tua (<i>talun uk</i>)	Ada	Bertambah	Sekretaris BPK
Belukar (<i>talun uk</i>)	Ada	-	Sekretaris BPK
Hutan rawa (<i>pekaq</i>)	Ada	Sama	Sekretaris BPK
Hutan kerangas (<i>tana ngatub</i>)	Ada	Sama	Sekretaris BPK
Hutan lindung	Ada	-	Sekretaris BPK
Akses kepada hutan	Mudah	-	Sekretaris BPK
Jenis tumbuhan dan hewan	-	Berkurang	Sekretaris BPK
Perkembangan ekonomi kampung	-	Semakin baik	Sekretaris BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Persentase kelulusan SD tahun 2003 adalah 100%. Hampir separuh responden rumah tangga mengakui bahwa ada anak putus sekolah dalam keluarganya. Putus sekolah umumnya terjadi pada tingkat SD dan SMP. Penyebab putus sekolah umumnya adalah faktor biaya. Penyebab lain adalah kondisi asrama di kecamatan yang tidak memadai, karena SMP dan SMA terdekat hanya ada di kecamatan.

Menurut Petinggi, tingkat pendidikan guru dalam 5 tahun terakhir ini tidak berubah, dan terjadi peningkatan dalam keaktifan mereka dalam mengajar. Jumlah penduduk yang bisa menulis dan membaca di kampung ini juga meningkat. Selain pendidikan formal, tidak ada pendidikan atau pelatihan-pelatihan informal untuk orang dewasa. Tahun ajaran 2003/2004 ini, jumlah siswa baru di SDN 04 Long Isun adalah 8 orang.

Kampung Naha Aruq

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Menurut Petinggi Naha Aruq, hanya ada satu SD di Datah Suling. Sekolah Dasar ini terletak di Kampung Long Isun yang bersebelahan langsung dengan Kampung Naha Aruq. SD inilah yang melayani siswa-siswa yang berasal dari empat kampung yang ada di Datah Suling yaitu Long Isun, Naha Aruq, Lirung Ubung dan Datah Naha. Sebelumnya SD ini adalah SD Katolik WR. Supratman dari Yayasan P3R Samarinda yang kemudian statusnya diubah menjadi SD Negeri.

Kondisi bangunan sekolah semakin buruk namun ada peningkatan pada staf pengajar dan buku-buku. Pernah ada bantuan perpustakaan dari HPH.

Tidak semua guru di SD ini merupakan guru negeri, karenanya gaji dan honor sering menjadi masalah. Karena jauhnya birokrasi maka kadang-kadang gaji terlambat dibayarkan hingga 8 bulan.

Karena di Datah Suling hanya ada 1 sekolah dasar maka tidak ada anak-anak dari kampung lain yang bersekolah di kampung ini.

Anak-anak dari kampung ini yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi harus ke kecamatan. Perjalanan dari Naha Aruq ke Long Pahangai hanya 10 - 20 menit dengan perahu ces. Di Kecamatan Long Pahangai ada fasilitas SMP Negeri dan SMA swasta. Alternatif lain untuk sekolah lanjutan bagi keluarga yang cukup mampu adalah ke Melak atau ke Samarinda.

Di Long Pahangai, anak-anak biasanya tinggal di asrama dan sebagian kecil tinggal dengan keluarga. Kondisi asrama di Long Pahangai yang tidak mempunyai pengawas dan pengasuh sering menjadi pemicu anak-anak untuk putus sekolah.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama	Petinggi
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Petinggi
Alat-alat dan buku-buku	-	Lebih banyak	Petinggi
Jumlah staf	8	Lebih banyak	Petinggi
Gaji/honor guru	-	Tidak tahu	Petinggi
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Petinggi
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih aktif	Petinggi
Persentase kelulusan	100%	Meningkat	Petinggi
Jumlah orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Petinggi

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut perawat pada puskesmas pembantu, jenis penyakit yang umum diderita di kampung ini adalah:

Kelompok	Jenis penyakit
Anak-anak	Batuk, pilek
Orang Dewasa	Nyeri ulu hati (maag), rematik
Lanjut Usia	TBC
Perempuan	Keputihan

Kelompok yang paling mungkin terkena penyakit malaria adalah orang dewasa sedangkan kelompok yang paling rentan terhadap diare adalah anak-anak. Tingkat frekuensi kedua penyakit ini adalah sama, tergantung cuaca dan musim.

Penyakit TBC yang umumnya diderita orang lanjut usia frekuensinya sudah menurun, terutama sejak ada program 'Pemberantasan TB Paru' dari Yayasan Rio Tinto melalui Puskesmas.

Selama bulan Januari - November 2003, tidak ada bayi dan ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Dalam kurun waktu tersebut, 1 orang anak berusia dibawah 10 tahun meninggal karena penyakit usus terlipat. Jumlah bayi yang lahir dalam 12 bulan terakhir adalah 10 bayi dengan berat rata-rata di atas 2,9 kg. Pada umumnya usia ibu pada kehamilan pertama adalah 20 tahun.

Dalam 12 bulan terakhir ada 3 orang masyarakat yang meninggal pada umur rata-rata 60 tahun, jadi asumsi penyebab kematian mereka adalah karena usia lanjut.

Perawat ini juga menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di kampung ini adalah diare.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut perawat pada Puskesmas Pembantu Datah Suling, semua keluarga bisa mendapatkan sumber air bersih yang umumnya berasal dari sungai. Perubahan dari sisi jumlah adalah sama saja sedangkan perubahan dari sisi mutu berfluktuasi tergantung musim. Pada musim kemarau air biasanya menjadi semakin jauh dan sulit serta menurun mutunya karena air tidak mengalir dan sampah yang dibuang di sungai.

Rata-rata masyarakat memiliki drum sebagai tempat penyimpanan air. Sebelum digunakan air ditampung dan diendapkan di dalam drum tanpa menggunakan obat.

Sebenarnya pemerintah kabupaten pernah mengupayakan kemudahan air bersih dengan mengalirkan air dari pegunungan ke tong-tong plastik besar yang disediakan di tiap beberapa rumah, namun fasilitas ini hanya sempat dinikmati selama seminggu karena kerusakan alat.

Kampung Naha Aruq

7.3 Kebersihan Kampung

Keadaan kampung ini cukup bersih dan tertata dengan baik. Karena kampung ini adalah kampung respen yang cukup baru maka penataannya relatif lebih mudah dilakukan. Jalan kampung adalah jalan semen yang menghubungkan antar blok dan antar kampung.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Kampung Naha Aruq terdapat sebuah Puskesmas Pembantu, namun saat ini perawat yang mestinya melayani di puskesmas pembantu ini tidak berada di tempat karena sedang menjalani tugas belajar (melanjutkan sekolah) ke Samarinda (pada saat survei dilaksanakan perawat yang bersangkutan sedang pulang liburan). Sehingga praktis tidak ada tenaga medis yang melayani masyarakat setiap hari. Setiap bulan, minggu kedua petugas kesehatan dari Puskesmas Long Pahangai datang untuk pengobatan gratis dan posyandu.

Fasilitas kesehatan lain yang terdekat adalah Puskesmas Long Pahangai yang berjarak kira-kira 10 - 20 menit menggunakan perahu ces. Di puskesmas kecamatan saat ini tidak ada lagi dokter karena dokter-dokter PTT yang sebelumnya tersedia sudah habis masa kontraknya. Untuk penyakit yang memerlukan penanganan serius maka pasien dirujuk ke rumah sakit di Tering atau di Samarinda. Fasilitas puskesmas pembantu dan puskesmas kecamatan didanai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kecuali program 'Pemberantasan TB Paru' yang merupakan kerja sama dengan Rio Tinto.

Biasanya bila puskesmas pembantu berfungsi, atau bila pengobatan gratis dilakukan, maka lebih dari separuh orang dari kampung-kampung terdekat di Dataran Suling datang berobat ke sini. Jarak kampung-kampung ini hanya 5 - 10 menit jalan kaki.

Pengobatan tradisional tidak lagi terlalu diminati di kampung ini. Menurut Kepala Adat, hanya ada 1 orang ahli pengobatan tradisional, sedangkan untuk perubahan jumlah dalam 5 tahun dia tidak tahu karena keahlian seperti ini cenderung dirahasiakan. Sekarang, tidak lagi diadakan upacara-upacara khusus untuk pengobatan tradisional, dan walaupun ada biasanya biayanya tidak ditentukan.

Kampung Naha Aruq

7.5 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	-	Sama saja	Perawat Pusban
Mutu air bersih	-	Berfluktuasi tergantung musim	Perawat Pusban
Mutu air sungai	-	Berfluktuasi, tergantung musim	Perawat Pusban
Jumlah fasilitas kesehatan	-	Sama	Perawat Pusban
Kondisi fasilitas kesehatan	-	Sama saja	Perawat Pusban
Jumlah staf fasilitas kesehatan	satu, tidak ditempat/Sedang tugas belajar	Sama	Perawat Pusban
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	-	Lebih kecil	Perawat Pusban
Gaji/honor	-	Lebih besar	Perawat Pusban
Penyakit malaria	Ada	Sama	Perawat Pusban
Penyakit diare	Ada	Sama	Perawat Pusban
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Perawat Pusban
Jumlah ahli pengobatan tradisional	Satu	Tidak tahu	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Tidak pernah	Dulu pernah, namun dukun dari tempat lain	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No	Bencana	Dampak
1	Kelaparan	<ul style="list-style-type: none">- Mengalami kesulitan mendapatkan beras sehingga terpaksa membeli singkong- Beras bersubsidi dari pemerintah dijual dengan 'harga Samarinda', sulit terjangkau
2	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none">- Terjadi kelangkaan sembako karena transportasi sungai terputus- Harga sembako dan barang-barang lain mahal- Hasil panen kurang
3	Perubahan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">- Sejak ada Kabupaten Kutai Barat, frekuensi kunjungan pemerintah ke kampung meningkat- Pembangunan meningkat, misalnya semenisasi jalan, air bersih, dan perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Naha Aruq. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- program pemerintah tidak terarah, pemasaran hasil pertanian dan kerajinan tidak ada;
- pendidikan: biaya mahal, tidak ada pengurus asrama, tenaga guru kurang;
- air bersih harus ditinjau kembali;
- adat istiadat pada generasi muda sudah berubah;
- tenaga medis tidak ada (dokter dan perawat).

Menurut masyarakat biasa:

- tidak ada usaha lain yang tetap selain bertani sehingga merasa miskin;
- harus ada bantuan beras murah kalau musim kemarau;
- tidak ada pembeli (pasar) bagi hasil rotan, buah dan karet. Bila ada, maka biasanya harga rendah;
- tidak ada tenaga medis di kampung;
- rumah tidak layak karena tidak ada WC, jendela dan pintu.

Menurut tokoh masyarakat:

- pendidikan: rata-rata pendidikan kurang, asrama di Long Pahangai tidak ada pembimbing;
- kesehatan: tenaga paramedis kurang, puskesmas masih di kecamatan, program JPS Kesehatan tidak berlaku di kota;
- pertanian: pengendalian hama, distribusi hasil tidak ada;
- orang lokal tidak diperlakukan dengan adil pada penerimaan PNS/PTT.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Tidak ada perubahan pada kelembagaan, walaupun BPK tidak aktif tetapi masyarakat selalu menjalankan hasil keputusan musyawarah. Hal ini mungkin terjadi karena budaya masyarakat yang masih mentaati pimpinan.

Hubungan dengan pemerintah kabupaten cenderung membaik, baik dari sisi keterjangkauan, kepedulian pemerintah pada kampung, pelayanan dan keterbukaan informasi.

Kondisi sosial budaya masyarakat hampir tidak mengalami perubahan. Konflik lahan, sumber daya alam, konflik suku, konflik keluarga dan konflik agama tidak pernah terjadi. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir.

Beberapa rumah tangga memiliki penghasilan baru sebagai penebang dan pengggaji kayu (nyenso), walaupun tidak ada ijin konsesi resmi di kampung ini. Di sisi lain, jumlah gaharu terus berkurang sehingga rumah tangga yang kerja gaharu semakin sedikit, bahkan hampir tidak ada lagi. Luasan hutan bertambah karena mereka menempati kawasan perkampungan baru. Luasan kebun kopi, kebun karet dan kebun buah juga meningkat.

Kampung Naha Aruq

Jumlah sekolah tidak berubah, kondisinya terus memburuk. Fasilitas sekolah seperti alat peraga dan buku-buku, termasuk jumlah guru cenderung meningkat. Keaktifan guru meningkat, jumlah orang yang dapat membaca dan menulis juga meningkat.

Tidak ada perubahan pada fasilitas kesehatan, namun jumlah obat-obatan dirasakan menurun. Penyakit TBC menurun, sementara belum ada perubahan pada penyakit malaria dan diare.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Naha Aruq, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 10 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi;

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi (juga merangkap untuk informasi pendidikan);
- sekretaris BPK;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- warung;
- petugas kesehatan pada Puskesmas Pembantu.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 2 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Karangan

Jumlah rumah tangga: 93	Jumlah jiwa: 382
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 72	Jumlah KK: 117
Jumlah rumah tangga miskin: 25	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Tunjung	Jumlah SD: 1
Nama Petinggi: Ardiansyah	Jumlah SLTP: -
Nama Staf Adat: Riyek	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: 40 menit (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: 60 menit	Jumlah Pusban: 1
Posisi administratif: Kecamatan Melak, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 115 ⁰ 51' BT, 0 ⁰ 11' LS	
Tanggal survei: 21 - 23 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung¹

Kampung Karangan sudah ada sejak kurang lebih 100 tahun yang lalu. Asal usul masyarakat Karangan berasal dari Kampung Bunyut. Sebelum berpindah ke Karangan sekarang ini, konon nenek moyang mereka menempati Lamin Merijan di Bunyut.

2. Kelembagaan Kampung²

Menurut Petinggi, lembaga-lembaga yang ada di Karangan adalah:

- Pemerintahan Kampung;
- Lembaga adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- LKMD;
- Kelompok Tani.

¹ Informasi dari Staf Adat.

² Informasi dari Petinggi, Staf BPK.

Kampung Karang

Badan Perwakilan Kampung (BPK) disahkan dan dilantik pada tahun 2002. Menurut Staf BPK, sekali dalam sebulan BPK melakukan konsultasi dengan masyarakat kampung.

Beberapa topik diskusi yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik diskusi	Keputusan
Perkebunan	Program yang tersendat, harus diselesaikan, yaitu program penanaman karet dan program penanaman rotan
Pekerjaan BPK	- Pembuatan pemetaan kampung - Kinerja Kepala Kampung yang tidak beres

Perubahan kelembagaan musyawarah dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: kualitas musyawarah sudah semakin baik dan keputusan musyawarah sudah semakin berdampak dan dipatuhi, serta musyawarah sudah sering dilakukan.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Semakin baik	Staf BPK
Dampak keputusan musyawarah	Semakin berdampak dan dipatuhi	Staf BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin sering	Staf BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten³

3.1 Dukungan

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah kampung pernah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah kabupaten. Usulan bantuan pemerintah kampung dan tanggapan pemerintah kabupaten dapat disimak dalam daftar berikut ini:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Peningkatan badan jalan sepanjang 3 km dan pengaspalan jalan antara Karang sampai Sungai Mahakam	Belum ada tanggapan
Usulan projek air bersih	Dalam tahun 2003 ini informasinya projek akan masuk
Usulan projek jalan dari Karang ke Plumpang, pembukaan jalan dan penimbunan	Usulan baru masuk ke tingkat kecamatan
Usulan jembatan beton di Sungai Merah	Usulan baru masuk ke tingkat kecamatan

³ Informasi dari Petinggi, Staf BPK, Rumah Tangga Kurang Mampu.

Kampung Karang

Berikut adalah daftar bantuan berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut Staf BPK
Mess guru SD, selesai tahun 2003	Tidak tahu	Tidak ada bantuan
Proyek pengerasan dan penimbunan jalan dari Karang ke Melak	-	-
Rumah ibadat semua agama	-	-
Reboisasi pola kebun	-	-
Proyek pembersihan sungai	-	-
Parit pembuang air di rapak	-	-

Pemerintah Kecamatan pernah melakukan survei atau penelitian di Karang tentang persawahan, peternakan, tambak ikan/karamba, namun tidak pernah ada hasilnya yang berupa program yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, selama ini mereka tidak mengetahui program pemerintah yang masuk ke kampung. Mereka tidak dapat menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan program, termasuk tidak dapat memberikan usulan perbaikan terhadap program yang telah dilaksanakan pemerintah di kampung.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, kurang dari sekali dalam sebulan petugas dari pemerintah datang mengunjungi kampung. Instansi pemerintah yang pernah datang ke Karang:

- Camat;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- Dinas Pekerjaan Umum;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Kehutanan.

Menurut Staf BPK, pada umumnya hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti atau hubungan masih tetap, bahkan pada partisipasi dalam pengambilan keputusan perubahannya dapat dikatakan menjadi semakin lebih buruk.

Tabel berikut ini menjelaskan perubahan hubungan secara rinci:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Sama saja
Pelayanan	Sama saja
Keterbukaan informasi	Sama saja
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih buruk

Kampung Karang

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat Karang dapat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah melalui kunjungan-kunjungan yang dilakukan pemerintah; pengumuman-pengumuman lewat radio; melalui informasi yang disampaikan oleh warga dari Kampung Muliak; dan melalui *Handy Talky (HT)* yang ada di rumah petinggi.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemerintah kabupaten	Lebih baik	Staf BPK
Tingkat kepedulian pemerintah kabupaten	Sama saja	Staf BPK
Pelayanan pemerintah kabupaten	Sama saja	Staf BPK
Keterbukaan informasi	Sama saja	Staf BPK
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih buruk	Staf BPK
Bantuan pemerintah kepada pemerintah kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya⁴

4.1 Perpindahan penduduk

Menurut Petinggi, perpindahan penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan orang meninggalkan kampung
Waktu pendek/sementara	- 4 orang - 1 orang	- Mencari pekerjaan - Kuliah di Samarinda
Waktu panjang/selamanya	10 kk	Mencari pekerjaan dan berkeluarga

4.2 Upacara adat

Menurut Staf Lembaga Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan adalah:

- upacara adat *belian*, merupakan upacara adat untuk melakukan pengobatan terhadap orang yang sakit. Upacara *belian* terdiri dari bermacam-macam *belian*, diantaranya *belian bawe*, *belian sentiyu*, dan lain-lain. Masing-masing upacara *belian* bisa berbeda dari sisi bahan upacara dan lamanya *upacara belian*;
- upacara adat *ngugu tautn*, merupakan upacara adat dengan tujuan mengembalikan keseimbangan alam;
- upacara *kuangkai*, merupakan upacara adat kematian yang terakhir, dimana tulang belulang anggota keluarga yang telah meninggal dikumpulkan kembali dan dibawa naik ke rumah atau lamin, kemudian dilakukan upacara *kuangkai*. Upacara adat *kuangkai* dipimpin oleh seorang *wara*.

Perubahan upacara adat sekarang ini dibandingkan dengan upacara adat yang dilakukan di masa lalu, hampir tidak ada baik dari sisi lamanya waktu upacara adat, bahan-bahan upacara adat, gotong royong upacara adat, maupun tujuan upacara adat.

⁴ Informasi dari Staf Adat, Petinggi, Rumah Tangga Kurang Mampu.

Kampung Karang

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kerjasama antara masyarakat masih berfluktuasi, artinya kadang terjadi peningkatan kerjasama antar masyarakat, kadang kala terjadi penurunan tingkat kerjasama.

Bentuk-bentuk gotong royong yang pernah dilakukan dalam 5 tahun terakhir ini adalah:

- pembuatan jalan;
- mengerjakan kebun dan ladang.

Kerjasama gotong royong biasanya diikuti lebih dari separuh jumlah masyarakat. Dalam hal terjadi masalah kekurangan makanan di kampung, masyarakat biasanya meminta bantuan ke kecamatan.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, perubahan tingkat kerjasama/solidaritas dalam 5 tahun terakhir masih tetap sama. Sebagai orang kurang mampu, bantuan terhadapnya biasanya datang dari anggota-anggota keluarganya. Orang-orang di sekitarnya yang tidak mempunyai hubungan keluarga tidak pernah membantunya saat keluarganya mengalami kesulitan ekonomi.

4.4 Konflik

Menurut salah seorang staf lembaga adat, di Karang hanya terjadi satu jenis konflik yaitu konflik keluarga, itu pun tingkat intensitasnya jarang. Penyebab konflik biasanya adalah masalah kekurangan ekonomi. Konflik lahan, konflik suku, konflik agama, dan konflik sumber daya alam tidak pernah terjadi di Karang. Hubungan antar suku dan antar agama masih relatif baik.

Pada prinsipnya penyelesaian konflik di dalam kampung dan konflik di/atau dengan pihak luar kampung diselesaikan melalui lembaga adat dengan dasar hukum adat, kecuali terhadap konflik yang dinilai sangat parah dan tidak dapat diselesaikan di tingkat kampung. Terhadap tingkat konflik sebagaimana disebut terakhir ini, penyelesaian konflik disampaikan ke kecamatan dan dipergunakan hukum negara sebagai dasar keputusan terhadap konflik tersebut.

Dari jumlah dan jenis konflik yang disampaikan ke lembaga adat, kurang dari separuh konflik dapat diselesaikan di tingkat kampung oleh lembaga adat. Apabila pihak yang berkonflik tidak mau menjalankan keputusan lembaga adat, maka konflik tersebut disampaikan ke kecamatan. Di kecamatan ada Kepala Adat Perhubungan yang menghubungkan antara kecamatan dengan kampung. Menurut responden rumah tangga kurang mampu, selama ini di Karang tidak pernah ada konflik, sehingga dia tidak mengetahui perubahan jumlah konflik dalam 5 tahun terakhir ini.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang dihadapi adalah:

- masalah ekonomi, lapangan usaha tidak ada;
- tidak punya biaya berobat, obat-obatan mahal dan tidak terjangkau;
- penghasilan dari berjualan ikan menurun karena ada peracunan ikan dan makin banyaknya orang yang mencari ikan;
- ladang di rapak sering kena banjir, ladang di tanah kering tidak subur dan tidak memiliki lahan hutan.

Kampung Karang

Perkembangan ekonomi dalam 5 tahun terakhir masih tetap sama, karena pemerintah kurang memperhatikan masyarakat kampung, terutama pada usaha peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Biaya-biaya pendidikan dan kesehatan tidak terjangkau dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selama ini mereka hanya mendapatkan bantuan sekedarnya dari pihak keluarga jika ada anggota keluarga yang sakit dan memerlukan biaya pengobatan. Di tingkat pengambilan keputusan di kampung, sebagai keluarga kurang mampu di kampung, mereka jarang sekali diikutsertakan bahkan tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat atau usulan. Selama ini mereka hanya berperan sebagai pendengar. Dengan kondisi yang demikian, bantuan-bantuan yang diperlukan dari pihak luar oleh orang kurang mampu adalah berupa:

- modal buat menjalankan usaha;
- biaya pendidikan bagi anak-anak;
- dibuatkan rumah yang layak huni.

Pendapat responden rumah tangga kurang mampu berbeda dengan pendapat Dukun Bayi di kampung. Menurut Dukun Bayi, bila seseorang di kampung tidak memiliki uang guna membayar biaya pengobatan maka orang itu akan meminjam uang dari tetangga.

4.6 Hiburan

Hiburan yang paling sering dinikmati masyarakat di Karang adalah bermain bola *volley*, tarian gantar hanya sekali-kali diadakan jika ada rumah tangga yang mengadakan. Hiburan lainnya adalah bersama-sama menonton televisi dan VCD.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Staf Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Staf Adat
Gotong royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Staf Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama saja	Staf Adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama saja	Staf Adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama saja	Staf Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama saja	Staf Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama saja	Staf Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama saja	Staf Adat
Tingkat kerja sama antar masyarakat	-	Berfluktuasi	Staf Adat
Jumlah konflik	Tidak tahu	Tidak tahu	Kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam⁵

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Staf BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Karang adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- peternakan;
- hutan.

Jenis tata guna lahan yang paling luas adalah sawah, luasan sawah mencapai sekitar 500 hektar atau antara seperempat sampai dengan setengah dari total luasan kampung.

Sedangkan jenis hutan dan lahan bera (urat) yang ada di Karang adalah:

- hutan sekunder tua;
- hutan sekunder muda;
- belukar tua;
- belukar;
- rawa;
- hutan kerangas.

Di Karang tidak terdapat hutan perawan, karena telah dijadikan ladang. Luasan hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda masih tetap dan terletak di antara kampung Karang dengan kampung-kampung di sekitarnya. Sedangkan belukar tua dan belukar luasannya bertambah disebabkan karena aktivitas peladangan yang menebang pohon di lokasi hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda. Hutan rawa dan hutan kerangas luasan tetap karena tidak pernah dijadikan tempat berladang.

Menurut Staf BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan adalah:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Dijadikan lokasi ladang dan kebun	Orang yang bekerja di hutan berkurang
Hutan lebih mudah diakses sehingga memudahkan orang menebang	Terbukanya sarana jalan	Hutan makin berkurang kayunya
Berkurangnya jenis tumbuhan dan hewan	Kebakaran hutan	Sulit mendapatkan hewan buruan dan jenis tumbuhan tertentu

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Petinggi, di Karang tidak terdapat jenis hutan yang dilindungi, sehingga tidak terdapat aturan kampung yang mengatur tentang hutan lindung kampung.

Pemerintah kampung dan orang di kampung tidak ada yang mengajukan ijin konsesi hutan. Namun demikian mereka tetap mendapatkan penghasilan *fee* dari

⁵ Informasi dari Petinggi, Staf BPK, Rumah tangga kurang mampu.

Kampung Karang

penebangan pohon pada konsesi, meskipun hanya dalam jumlah sedikit. Pendapatan *fee* ini didasarkan pada ijin yang didapatkan warga Kelumpang. Masyarakat Karang hanya mendapatkan pembagian dalam jumlah kecil dari pembagian pendapatan *fee* yang didapatkan warga Kelumpang. Pembayaran *fee* dilakukan dari pembayaran kubikasi penebangan pohon yang dilakukan PT. Adi Putra Bintang di Gadur. Pengambilan keputusan tentang konsesi, termasuk besarnya pembagian *fee* dari Kelumpang dilakukan oleh pengurus kampung dan warga kampung.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Hampir seluruh atau sekitar 95% responden rumah tangga di Karang memiliki keterjangkauan terhadap lahan, baik dari sisi hak, jarak lahan, maupun ketersediaan lahan. Perkembangan keterjangkauan lahan dalam 5 tahun terakhir masih tetap sama, dan hampir seluruh rumah tangga di Karang memiliki lahan sendiri. Namun demikian, antara tahun 2000 dengan 2003 telah terjadi penjualan lahan oleh satu rumah tangga kepada orang dari Melak.

5.4 Perladangan

Sejak tahun 1999 hingga 2002 persentase responden rumah tangga yang berladang adalah sekitar 56%, namun tahun 2003 terjadi penurunan hingga 48%. Sisanya menanam padi di lahan sawah atau rapak.

Benih rata-rata yang ditanam masyarakat pada tahun 2002 dan 2003 adalah 2 kaleng. Pada tahun 2003 masyarakat menanam antara 0,5 - 3 kaleng sedangkan pada tahun 2003 terjadi peningkatan karena benih yang ditanam bervariasi antara 0,5 - 5 kaleng.

Sekitar 47% responden berladang/sawah di lahan sendiri, sekitar 5% di lahan pinjaman. Sekitar 34% bertanam di rapak milik sendiri. Sisanya tidak memberikan status lahan yang mereka tanami.

Sekitar 84 % responden yang berladang menanam di lahan yang berusia dibawah 10 tahun, sisanya di lahan yang berusia antara 10 - 20 tahun. Jarak tempuh antara ladang dengan kampung adalah antara 5 - 30 menit, yang ditempuh sebagian besar (84%) dengan berjalan kaki, ada sedikit responden yang menggunakan sepeda motor.

Sekitar 43% responden menyatakan bahwa hasil panen tahun 2003 mencukupi hingga panen berikutnya. Sisanya hanya bertahan antara 1 - 7 bulan. Sekitar 34% mengalami gagal panen hingga harus membeli beras sepanjang tahun. Hampir semua responden menyatakan bahwa mereka harus membeli beras tambahan dan bukan mendapat bantuan dari pihak lain.

5.5 Pendapatan uang

Pendapatan uang kebanyakan didapatkan dari hasil penjualan ikan dan *fee* kayu. Penghasilan lain datang dari hasil kebun sayur, menjual padi dari hasil ladang, menjadi buruh di pelabuhan Melak, kebun karet, ternak (babi, ayam), kebun rotan dan lain-lain.

Harga ikan 1 *cucuk* (ikat) biasanya Rp. 10.000. Dalam 1 hari 1 orang nelayan bisa mendapatkan 3 - 4 *cucuk*. Namun pendapatan dari mencari ikan ini tidak menentu, kadang dalam 1 hari tidak mendapatkan ikan sama sekali terutama bila hari sedang hujan.

Kampung Karang

Pendapatan dari *fee*, jumlahnya tidak menentu tergantung dari jumlah kubikasi penebangan, tahun 2003 ini merupakan pendapatan dari pembagian *fee* yang terakhir. Pendapatan *fee* ini merupakan pendapatan baru, disamping pendapatan-pendapatan lain yang berhubungan dengan kayu seperti buruh angkut kayu.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Di Karang tidak terdapat pasar. Hanya ada warung-warung kecil yang menyediakan keperluan sehari-hari rumah tangga. Pasar terdekat terdapat di Melak, yang berjarak sekitar 6 kilometer dengan ongkos transportasi sepeda motor sebesar Rp. 7.500 sekali jalan atau Rp. 3.000 dengan memakai mobil.

Kondisi jalan sekarang ini masih baik dan perubahan dalam 5 tahun terakhir semakin lebih baik. Kondisi sungai sebagai jalan masih baik dan perubahan dalam 5 tahun terakhir ini semakin baik. Dalam 5 tahun terakhir, waktu perjalanan ke kecamatan, kabupaten dan kota semakin lebih cepat. Alat transportasi reguler yang tersedia adalah mobil dan sepeda motor (ojek).

5.7 Keterjangkauan energi

Terdapat 4 sumber energi yang digunakan di Karang yaitu kayu bakar, minyak tanah, gas, dan listrik PLN. Sumber energi gas baru saja digunakan sedangkan sumber energi lain sudah pernah digunakan sebelumnya. Hampir semua sumber energi yang tersedia masih terjangkau, kecuali kayu bakar yang jumlahnya semakin berkurang.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian besar rumah penduduk terbuat dari kayu bukan dari jenis ulin dan bengkirai. Sebagian besar atap rumah responden adalah seng (47%) dan sirap (30%) sisanya adalah rumah beratap keping dan rumbia. Sekitar 96% dinding dan lantai rumah responden terbuat dari papan kayu. Sekitar 78% responden rumah tangga rumahnya tidak memiliki listrik, sisanya memakai listrik pribadi dan listrik tenaga surya.

Sebagian besar responden rumah tangga menggunakan WC sungai, sedikit yang lainnya menggunakan WC darat.

Kampung Karang

5.9 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Bertambah	Staf BPK
Luasan sawah	Ada	Berkurang	Staf BPK
Luasan kebun sayur	Tidak ada		Staf BPK
Luasan rotan	Ada	Bertambah	Staf BPK
Luasan kebun karet	Tidak ada	-	Staf BPK
Luasan simpukng	Tidak ada	-	Staf BPK
Luasan kokoa	Tidak ada	-	Staf BPK
Luasan kopi	Tidak ada	-	Staf BPK
Luasan peternakan	Ada	Tetap	Staf BPK
Luasan hutan	Ada	Tetap	Staf BPK
Hutan perawan	Tidak ada	-	Staf BPK
Hutan sekunder tua	Ada	Tetap	Staf BPK
Hutan sekunder muda	Ada	Tetap	Staf BPK
Belukar tua	Ada	Bertambah	Staf BPK
Belukar	Ada	Bertambah	Staf BPK
Hutan rawa	Ada	Tetap	Staf BPK
Hutan kerangas	Ada	Tetap	Staf BPK
Hutan lindung	Tidak ada	-	Staf BPK
Akses kepada hutan	-	Lebih mudah	Staf BPK
Jenis tumbuhan dan hewan	-	Berkurang	Staf BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Penghasilan banyak dari ikan dan <i>fee</i>	Sama saja	Staf BPK

6. Pendidikan⁶

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Dari keseluruhan responden, terdapat sekitar 13% responden yang menyatakan bahwa ada anak putus sekolah dalam keluarganya. Umumnya anak putus sekolah pada tingkat SD karena kekurangan biaya. Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pendidikan guru sama saja. Guru aktif mengajar. Persentase kelulusan meningkat dan tingkat orang bisa membaca serta menulis masih sama saja.

Pendidikan terhadap orang dewasa pernah dilakukan oleh Yayasan Rio Tinto yaitu tentang cara beternak, pemeliharaan ikan di karamba dan pengelolaan tanaman musiman. Program ini gagal karena tidak ada pembinaan secara terus menerus. Siswa yang lulus pada ujian yang lalu adalah 2 orang atau lulus 100% , dan jumlah murid baru tahun ini adalah 19 orang.

⁶ Informasi dari Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 023/Karang.

Kampung Karang

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Berdasarkan informasi kepala sekolah, hanya terdapat 1 sekolah dasar di Kampung Karang. Murid sekolah dasar hanya dari Karang saja dan tidak terdapat murid dari kampung lain. Murid yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas harus melanjutkan ke Melak yang berjarak ± 6 kilometer dari kampung. Perguruan tinggi terdekat ada di Melak namun tidak ada warga Karang yang kuliah di Melak dan hanya 1 orang kuliah di Samarinda.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah masih sama saja. Kondisi sekolah menjadi berkurang. Alat-alat dan buku-buku masih sama saja. Staf makin bertambah banyak, sedangkan gaji/honor sama saja.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1 SD	Sama saja	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Jumlah staf	-	Lebih banyak	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Aktif	Kepala Sekolah
Persentasi kelulusan	-	Meningkat	Kepala Sekolah
Tingkat orang dapat membaca dan menulis	-	Sama saja	Kepala Sekolah

7. Kesehatan⁷

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Menurut Dukun Bayi, jenis penyakit yang lazim diderita masyarakat di kampung ini adalah:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	Diare
Orang dewasa	TBC
Perempuan	Senggugut (keputihan)
Orang usia lanjut	TBC

Tingkat keseringan terjangkitnya penyakit malaria yang sering diderita orang lanjut usia sudah menurun. Penyakit diare tingkat keseringannya masih sama dan yang mungkin terkena adalah anak-anak. Sedangkan orang usia lanjut paling mungkin terkena TBC, namun tingkat keseringannya sudah menurun.

Jumlah kelahiran dalam 12 bulan terakhir adalah 3 orang bayi dengan berat rata-rata 3,5 kg. Tidak terdapat bayi yang meninggal. Tidak terdapat anak berumur dibawah 10 tahun yang meninggal. Umur rata-rata ibu pada saat kelahiran pertama adalah 20 tahun. Tidak terdapat ibu yang meninggal saat melahirkan. Umur rata-rata

⁷ Informasi dari Dukun Bayi, Staf Adat.

Kampung Karang

orang meninggal antara 50 - 60 tahun dikarenakan penyakit. Sedangkan penyakit yang paling sering menyebabkan kematian adalah *hipertensi*, *thypus*, dan TBC.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut Dukun Bayi, kurang dari separuh keluarga mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari dari sungai. Perubahan jumlah dan mutu air berfluktuasi, karena tergantung pada hujan. Pada musim kemarau, rumah tangga di Karang tidak pernah mendapatkan bantuan air bersih. Di kampung pun tidak pernah diberikan bantuan alat penampungan air bersih bagi kepentingan umum, selama ini penyimpanan air di tingkat rumah tangga hanya disimpan di drum, gentong, dan jerigen.

7.3 Kebersihan Kampung

Kampung masih relatif bersih, kondisi jalan dan rumah masih tertata rapi. Hanya beberapa rumah yang kelihatan kotor tapi lebih dikarenakan faktor ekonomi dan pendapatan pemilik rumah yang kurang. Hanya jika terjadi hujan, jalan kampung masih cukup licin karena sebagian belum dilakukan pengerasan jalan. Kondisi lingkungan di sekitar rumah ibadah cukup bersih dan teratur rapi.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada hanya dukun dan posyandu yang didanai oleh pemerintah. Tidak ada orang yang berobat ke Posyandu. Fasilitas kesehatan terdekat adalah Puskesmas Melak yang berjarak sekitar 7 kilometer dengan ongkos transportasi reguler dari Karang ke Terminal sebesar Rp. 6.000, kemudian dilanjutkan dari Terminal ke Puskesmas sebesar Rp. 5.000 sekali jalan. Ojek dari Karang ke Puskesmas Melak sebesar Rp. 11.000. Keterjangkauan terhadap perawatan kesehatan dalam 5 tahun terakhir masih sama saja terutama karena tidak terdapat fasilitas kesehatan dan tenaga medis di kampung.

Untuk pengobatan secara non medis, jumlah ahli pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir semakin berkurang. Lebih dari sekali dalam sebulan dilakukan upacara pengobatan tradisional, itu pun tergantung pada orang yang sakit dan berobat. Dalam 5 tahun terakhir ini upacara pengobatan tradisional semakin menurun. Biaya upacara pengobatan tergantung pada penyakit, jika penyakitnya parah biaya bisa mencapai Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 karena harus mengadakan upacara pengobatan *belian sentiyu* dan *belian bawo*.

Kampung Karang

7.5 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai	Berfluktuasi	Dukun Bayi
Mutu air bersih	Air sungai	Berfluktuasi	Dukun Bayi
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Dukun Bayi
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Dukun Bayi
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Dukun Bayi
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Dukun Bayi
Ketersediaan obat dan peralatan	Tidak ada	Sama	Dukun Bayi
Gaji/honor	Tidak ada	Sama	Dukun Bayi
Penyakit malaria	Ada	Menurun	Dukun Bayi
Penyakit diare	Ada	Sama	Dukun Bayi
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Dukun Bayi
Jumlah ahli pengobatan tradisional	3 orang	Berkurang	Staf Adat
Upacara pengobatan tradisional	-	Menurun	Staf Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan	Kayu semakin habis
2	Kelaparan	Disebabkan karena banjir, adanya serangan hama dan kekurangan beras
3	Kekeringan	Gagal panen
4	Banjir	Gagal panen
5	Serangan hama	Gagal panen
6	Perubahan pemerintahan	Enam kali ganti petinggi, tetap biasa-biasa saja. Setelah ganti Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat pun masih belum ada perubahan

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Karang. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut masyarakat biasa:

- tidak ada pekerjaan, sehingga banyak orang menjadi pengangguran. Tidak punya peluang kerja sehingga tidak ada penghasilan;
- sumber daya manusia atau tingkat pendidikan rendah atau tidak ada yang berpendidikan tinggi sehingga kemampuan berpikir kurang.

Menurut tokoh masyarakat:

- masalah ekonomi, oleh karena itu pemerintah harus menciptakan sarana produksi (saprodi), antara lain: pembuatan irigasi, cetak lahan rapak jadi sawah, kolam ikan dan keramba dan tempat pemasaran hasil-hasil produk bila sudah menghasilkan;

Kampung Karang

- masalah pendidikan, SD: agar ada penambahan ruangan kelas, pengadaan kursi meja, rumah guru dan peralatan serta buku-buku sekolah, sedangkan tingkat atas agar ada beasiswa. Untuk orang dewasa agar ada pelatihan-pelatihan atau kursus pertanian, peternakan dan perikanan;
- sarana/prasarana: peningkatan badan jalan jadi beraspal, PLN, pembuatan terminal dan pelabuhan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan;
- masalah gizi dan kesehatan, tidak ada puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya, biaya berobat mahal, tidak ada penyuluhan tentang kesehatan gizi.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Keadaan kelembagaan musyawarah cenderung semakin baik. BPK sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk memperkuat musyawarah sudah dapat bekerja aktif. Hubungan dengan pemerintah kabupaten cenderung tidak mengalami perubahan, kecuali jarak ke kantor pemkab yang semakin dekat dan bantuan dari pemerintah yang dirasakan meningkat. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dirasa semakin menurun.

Tidak ada perubahan pada upacara adat baik dari sisi waktu, bahan-bahan maupun tingkat gotong royong. Diakui tidak ada perubahan pada tingkat konflik. Konflik yang ada hanyalah konflik keluarga yang dipicu oleh masalah ekonomi rumah tangga.

Infrastruktur ekonomi seperti jalan diakui membaik. Akses kepada hutan dirasakan semakin meningkat yang memicu peningkatan eksploitasi hutan.

Fasilitas pendidikan hampir tidak mengalami perubahan. Fasilitas-fasilitas sekolah tidak berubah, juga tidak ada perubahan pada jumlah sekolah. Jumlah guru diakui meningkat. Fasilitas kesehatan juga tidak mengalami perubahan. Tidak ada fasilitas kesehatan di kampung ini. Jumlah penyakit TBC dan malaria menurun. Sementara frekuensi penyakit diare tidak mengalami perubahan. Jumlah tenaga pengobatan tradisional dan upacara pengobatan tradisional cenderung menurun.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Karang, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 23 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Kampung Karang

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- staf adat;
- petinggi;
- staf BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- dukun bayi;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Lempunah

Jumlah rumah tangga: 68	Jumlah jiwa: 281
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 45	Jumlah KK: 84
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah TK: -
Jumlah rumah tangga miskin: 11	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Salim	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Nuheq	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 30 menit (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 5 jam (sepeda motor atau mobil)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Jempang, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 116° 6' BT, 0° 34' LS	
Tanggal survei: 12 - 17 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Lempunah sudah berdiri lebih sejak 150 tahun lalu, sampai dengan sekarang sudah terjadi penggantian lamin sebanyak 3 kali. Leluhur Kampung Lempunah berasal dari Lamin Akas yang terletak 12 kilometer dari posisi kampung pada saat ini.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani.

Kampung Lempunah

Badan Perwakilan Kampung (BPK) dibentuk pada bulan September tahun 2002. Menurut ketua BPK, lembaganya melakukan konsultasi dengan masyarakat minimal sebanyak sekali dalam setahun.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Rencana pembuatan kebun rotan jepukng	Konsultasi dengan Kabupaten

Menurut Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir kualitas musyawarah biasa saja. Yang dimaksud dengan biasa saja adalah bahwa musyawarah tidak menghasilkan program pembangunan yang berdampak nyata pada masyarakat, selain itu kepatuhan terhadap hasil keputusan masih rendah. Sedangkan menurut pengamatan pewawancara langsung di lapangan, musyawarah jarang sekali terjadi. Situasi ini disebabkan karena kurang baiknya hubungan pribadi dan koordinasi antara petinggi kampung dan ketua BPK. Selain itu, pengambilan keputusan masih jarang melibatkan masyarakat

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Sama	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Sama	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Lempunah pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Perbaikan jalan	Belum ada jawaban
Rehap Lamin	Belum ada jawaban
Rehab perumahan Guru	Belum ada jawaban
Bantuan perbaikan sekolah	Belum ada jawaban

Kampung Lempunah

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut ketua BPK
1	Program kelompok tani dari th 2003	IDT (Inpres Kampung Tertinggal) dari 1995	Bantuan berupa uang dari pengusaha setempat
2	Bantuan DPK (Dana Pembangunan Kampung) tahun 2003	-	Adanya pelatihan-pelatihan dari LSM
3	Sensus penduduk pada tahun dari 2003	-	Pembangunan Gereja dari organisasi keagamaan

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, kunjungan dari pihak pemerintahan ke Lempunah rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Instansi yang pernah datang adalah:

- Dinas Pendidikan;
- Camat Jempang.

Hubungan masyarakat dengan Pemda Kabupaten dalam 5 tahun terakhir telah mengalami perubahan. Pada umumnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik. Secara rinci perubahan dijelaskan pada tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Sama saja
Pelayanan	Sama saja
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat mengetahui informasi tentang program-program pemerintah dari petinggi. Sedangkan petinggi mendapatkan informasi dari kantor kecamatan dan lewat kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk mengakses informasi dari luar, masyarakat menggunakan radio dan televisi. Sedangkan alat komunikasi yang ada di kampung hanya pesawat HT.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Sama saja	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Sama saja	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Sama saja	Petinggi

4. Sosial budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perpindahan penduduk seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	4 orang	Sekolah
Waktu panjang atau selamanya	10 KK	Mencari Pekerjaan

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Lempunah adalah:

- upacara *kwangkai* yang merupakan bagian dari adat kematian;
- upacara *belian sentiu* dan *belian bawe* untuk pengobatan;
- upacara *Nalitr taun*.

Kepala Adat juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada praktek-praktek upacara adat baik dari sisi waktu, bahan-bahan, gotong royong maupun tujuan.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan meningkat, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anak muda yang selalu turut serta dalam gotong royong. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- upacara adat;
- tanam padi;
- pembersihan kampung;
- penebangan ladang.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, tingkat solidaritas masyarakat di kampung sudah menurun, hal ini dibuktikan dengan kurangnya bantuan dari keluarga maupun dari masyarakat yang ada di kampung ketika dirinya memerlukan bantuan.

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, sebenarnya di Kampung Lempunah jarang terjadi konflik baik konflik lahan, keluarga, suku, agama maupun konflik sumber daya alam. Namun semenjak adanya kehadiran PT. Sumber Mas konflik lahan sering terjadi.

Kampung Lempunah

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang mereka hadapi adalah:

- tingginya harga beras;
- kebakaran hutan sehingga tidak dapat berladang karena tidak ada lahan.

Mereka merasa bahwa keadaan dalam 5 tahun terakhir cenderung terus memburuk, yang ditandai dengan meningkatnya anggota keluarga yang terkena penyakit.

Rumah tangga kurang mampu merasa bahwa mereka mampu membayar untuk kesehatan namun tidak untuk pendidikan anak-anak. Untuk masalah kesehatan, biasanya pihak keluarga masih bersedia membantu. Sedangkan untuk masalah pendidikan biasanya lebih sulit, yang paling mungkin membantu hanyalah pihak pemerintah.

Jika ada program bantuan, rumah tangga kurang mampu merasa bahwa kebutuhan prioritas untuk dibantu adalah perumahan dan lapangan pekerjaan.

Ketika seseorang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan maka yang dilakukan biasanya menggunakan pengobatan tradisional dan/atau meminjam uang.

Rumah tangga kurang mampu merasa tidak pernah ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lewat berinuk.

4.6 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di kampung adalah televisi dan VCD.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Gotong royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama dengan tujuan menurut adat	Kepala Adat
Konflik lahan	Jarang	Meningkat	Kepala Adat
Konflik keluarga	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak sering	Sama	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	Sama	Meningkat	Kepala Adat
Jumlah konflik	Tidak tahu	-	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Lempunah adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- simpukng;
- peternakan;
- hutan (*bengkar*).

Dari tipe tata guna lahan tersebut, lahan kebun rotan merupakan tata guna lahan terluas. Sayangnya banyak kebun rotan yang terbakar, selain itu masyarakat kurang merawat kebun rotan tersebut karena harga jual rotan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Luas lahan dirasakan berkurang karena kawasan yang dulunya tempat mereka berladang kini telah dikuasai oleh perusahaan. Kebun sayur bertambah karena petani menanam sayur di sekitar ladang mereka. Kebun karet berkurang karena masyarakat kurang memperhatikan kesehatan kebun sehingga banyak pohon karet yang mati. Kebun buah campuran atau *simpukng (lembo)* berkurang karena banyak yang terbakar. Sementara hutan terus berkurang jumlahnya karena perusahaan banyak mengambil kayunya.

Menurut Ketua BPK, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Lempunah adalah:

- hutan perawan (*bengkar*);
- hutan sekunder tua (*kerengkng*);
- hutan sekunder muda (*urat batakng*);
- belukar tua (*batakng*);
- belukar (*urat*);
- hutan rawa (*payaq*);
- hutan kerangas (*jaras*);
- bengkar jaras merupakan jenis hutan lain yang terdapat di Lempunah yaitu hutan yang berbatu, air tawar, ada air terjun.

Ketua BPK menjelaskan bahwa hutan belukar tua (*batakng*) merupakan hutan yang paling luas, beberapa diantaranya berupa kebun rotan. Diperkirakan kawasan *batakng* terus bertambah jumlahnya karena adanya praktek perladangan gilir balik. Hutan sekunder muda (*urat batakng*) dan hutan sekunder tua (*kerengkng*) mempunyai luas kurang lebih. Sedangkan hutan belukar (*urat*) jumlahnya bertambah.

Kampung Lempunah

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	- Kebakaran hutan - Perladangan	Banyak kayu dan rotan yang terbakar dan mati
Hutan lebih mudah diakses	-	- Masyarakat mendapatkan uang penggantian lahan - Kayu Log yang diambil oleh perusahaan
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Kebakaran hutan	-

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Petinggi, ada hutan yang dilindungi yang luasnya 1 km² yang tidak digunakan untuk umum karena hanya untuk kepentingan adat. Apabila ada yang menggunakan hutan adat tersebut selain untuk kepentingan adat, maka akan diberikan sanksi berupa denda *antakng* dan sanksi dari pemerintah. Sampai dengan saat ini tidak ada eksploitasi hutan di Kampung Lempunah baik melalui HPH, IPPK maupun HPHH. Pernah ada masyarakat yang mengajukan permohonan IPPK namun belum disetujui. Menurut Petinggi, tidak ada masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari penebangan pohon pada konsesi hutan. Tidak pernah ada orang luar yang ingin melakukan permohonan konsesi pengelolaan hutan.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Petinggi, seluruh rumah tangga memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Keadaan ini tidak berubah sejak dahulu. Tidak pernah terjadi jual beli lahan karena tidak pernah ada yang beli. Dari yang berladang, hampir seluruhnya membuat ladang di lahan milik sendiri.

5.4 Perladangan

Dalam 5 tahun terakhir, sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari responden rumah tangga membuat ladang. Selain ladang, ada sedikit rumah tangga yang menanam padi di sawah. Kebanyakan rumah tangga hanya menanam sekitar 1,5 - 2 kaleng bibit pada tahun 2002, tapi pada tahun 2003 mereka menanam lebih banyak sampai dengan 6 kaleng bibit. Pada panen tahun 2003, kebanyakan hasil panen hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 6 bulan, bahkan beberapa diantaranya ada yang lebih sedikit lagi. Sebagian besar dari kekurangan beras dipenuhi dengan cara membeli. Umur lahan yang digunakan untuk ladang rata-rata berkisar antara 10 - 40 tahun, walaupun sudah ada dijumpai lahan ladang yang berumur di bawah 10 tahun. Jarak ladang ke kampung rata-rata sekitar 2 - 3 jam berjalan kaki.

5.5 Pendapatan uang

Pada saat ini sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan uang dari mengambil getah karet, kerja di perusahaan PT. Lonsum, mengambil kayu, menjual rotan dan kerajinan doyo. Selain sumber pendapatan utama, beberapa masyarakat juga mendapatkan penghasilan dari sektor jasa seperti warung dan motoris perahu ces.

Kampung Lempunah

Sepintas lalu dapat dilihat bahwa pendapatan dari kerja di PT. Lonsum dan menjual karet merupakan pendapatan utama masyarakat Lempunah.

Sementara menurut Ketua BPK, pendapatan uang masyarakat Lempunah memburuk dari 5 tahun terakhir hal ini disebabkan karena adanya perusahaan PT. Lonsum yang masuk sehingga masyarakat yang berladang berkurang. Hal ini diakibatkan karena sebagian masyarakat bekerja di perusahaan dan hanya sisanya saja yang berladang.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Di Kampung Lempunah tidak terdapat pasar tetap. Pasar terdekat adalah pasar keliling yang mengunjungi Kampung Pentat. Kampung Pentat berjarak sekitar 2 kilometer dan memerlukan biaya sebesar Rp. 5000 jika masyarakat menggunakan ojek sepeda motor.

Kondisi jalan yang menghubungkan dengan luar kampung dalam keadaan cukup baik walaupun masih merupakan jalan tanah. Keadaan ini membaik dibandingkan tahun lalu dimana tidak ada jalan yang menghubungkan antara Kampung Lempunah dengan Kampung Pentat. Kampung Pentat berada di poros jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Melak. Jalan yang melalui jalur sungai kondisinya tidak baik karena tercemar oleh limbah PT. Gunung Bayan, selain itu kondisi air pada saat ini lebih dangkal. Untuk mencapai Melak atau Samarinda, masyarakat cenderung menggunakan bis umum sebagai kendaraan reguler yang melewati Kampung Pentat. Untuk mencapai Samarinda atau Melak, mereka harus membayar ongkos sebesar Rp. 35.000.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik;
- gas.

Sumber energi dari listrik sudah digunakan sejak belasan tahun lalu. Tetapi listrik PLN sendiri baru masuk sejak tahun 1998. Sedangkan minyak tanah dan kayu bakar sudah lama digunakan sebagai sumber energi. Dan keduanya masih terjangkau bagi masyarakat.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian besar dari rumah penduduk adalah rumah kayu yang bukan terbuat dari kayu ulin atau bangkirai. Kebanyakan atap rumah adalah atap sirap atau keping. Hampir seluruh rumah dialiri oleh listrik, yang sebagian besar berasal dari PLN. Beberapa rumah menyambungkan listrik dari pihak keluarga. Beberapa rumah juga masih memiliki mesin generator listrik pribadi. Hampir seluruh rumah tangga menggunakan WC di sungai.

Kampung Lempunah

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Sama saja	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Berkurang	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Tidak ada		Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan simpukng	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>bengkar</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>batang</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>urat</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Belukar tua (<i>kloako</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar (<i>babarr</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>payaq</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>jaras</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan lindung	Tidak ada	Tetap	Ketua BPK
Berkurangnya luasan hutan	<ul style="list-style-type: none">- Terbakar- Berladang- Banyak rotan mati- Kayu bangunan mati	Berkurang	Ketua BPK
Hutan lebih mudah diakses	Kayu log diambil Perusda dan masyarakat mendapatkan uang	-	Ketua BPK
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Sudah banyak berkurang	Terbakar	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Jumlah anak sekolah di Kampung Lempunah kian meningkat ini terlihat dari banyaknya anak yang melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP Tanjung Isui yang jaraknya 12 kilometer. Sebagian dari lulusan SLTP melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA. Kebanyakan dari mereka melanjutkan SLTA di Tenggarong karena Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara membebaskan biaya pendidikan, selain itu akses jalan ke Tenggarong telah terbuka. Jumlah anak yang turut serta membantu orang tua untuk bekerja di ladang pada waktu jam sekolah sudah berkurang.

Tingkat pendidikan para guru berkurang karena ada yang hanya lulus SMP Para guru kurang aktif dalam kegiatan mengajar karena mereka merasa gajinya belum mencukupi walaupun secara jumlah memang sudah meningkat. Jumlah gaji yang

Kampung Lempunah

kurang membuat mereka perlu mencari pekerjaan tambahan. SD 008 Kampung Lempunah masih kekurangan guru terutama untuk pendidikan jasmani, agama dan KTK (Kerajinan Tangan dan Kesenian). Tingkat kelulusan siswa biasanya 100%, keadaan ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Jumlah masyarakat di kampung yang dapat baca meningkat dalam 5 tahun terakhir. Menurut beberapa orang guru, ada murid SD yang belum dapat membaca pada kelas 4 SD. Hal ini diakibatkan tingkat keaktifan guru yang rendah. Pada tahun 2003 jumlah murid baru 17 orang dimana 4 orang diantaranya tidak naik kelas. Terdapat 6 orang guru; 4 guru tetap (PNS) dan 2 orang guru honor.

Selain pendidikan formal, di kampung ini juga dilakukan pendidikan informal seperti yang diberikan oleh Depnaker dan sebuah LSM bernama Putijaji. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan menjahit, berkebun dan pelatihan *Credit Union* (CU).

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Menurut Kepala Sekolah SDN 008 Lempunah, sekolah yang dipimpinnya adalah satu-satunya sekolah di kampung sampai dengan tahun 2002 sebelum dibentuknya SMP terbuka. SMP terbuka tersebut menggunakan bangunan SD secara bersama-sama. Kondisi SMP terbuka semakin buruk dan terancam ditutup kembali karena tidak ada guru. Sementara itu, kondisi bangunan sekolah semakin buruk karena bangunan sudah berumur tua. Alat-alat peraga dan buku-buku berkurang jumlahnya. Selain itu jumlah staf pengajar berkurang.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	2	Bertambah	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Persentase kelulusan	-	Meningkat	Kepala Sekolah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut tenaga perawat di Kampung Pentat yang jaraknya 500 meter dari Kampung Lempunah, jenis penyakit yang ada di kampung ini adalah:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Diare, demam dan ISPA
Orang dewasa	ISPA, malaria, typhus
Perempuan	Keputihan, pendarahan
Orang usia lanjut	-

Kampung Lempunah

Frekuensi kejadian penyakit diare sama saja, namun penyakit TBC meningkat. Selama bulan Januari - Oktober 2003 tidak ada anak dan ibu yang meninggal pada saat kelahiran, juga tidak ada kematian pada anak-anak baik balita maupun anak berusia sampai dengan 10 tahun. Jumlah bayi yang baru lahir dalam 12 bulan terakhir sekitar 5 bayi dengan rata-rata berat sekitar 2 - 3 kg. Umur ibu pada saat kehamilan pertama adalah 16 - 17 tahun. Pada tahun 2003 terdapat 1 orang yang meninggal karena terkena diare. Penyebab kematian cukup beragam diantaranya, diare malaria, demam dan usia tua. Rata-rata umur yang meninggal di usia lanjut berkisar 70 tahun.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut perawat Kampung Pentat, banyak dari masyarakat Lempunah menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih, walaupun mereka faham bahwa air tersebut tidak bersih lagi karena tercemar oleh limbah PT. Gunung bayan.

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Kampung Lempunah tidak ada puskesmas, Puskesmas hanya ada di Kampung Pentat yang jaraknya 500 meter dari kampung. Pengobatan tradisional semakin kurang diminati di kampung ini. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi upacara pengobatan tradisional yang menurun. Menurut Kepala Adat, upacara pengobatan tradisional dilakukan kurang dari sekali per bulan. Hal ini mengakibatkan jumlah ahli pengobatan tradisional tidak pernah bertambah. Saat ini ada 5 orang dukun. Untuk 1 kali upacara pengobatan tradisional diperlukan biaya sekitar Rp. 200.000.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai	Berfluktuasi	Perawat
Mutu air bersih	Sama saja	Berkurang	Perawat
Mutu air sungai	Sama saja	Berkurang	Perawat
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Perawat
Kondisi fasilitas kesehatan	-	-	Perawat
Jumlah staf fasilitas kesehatan	-	-	Perawat
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	-	Perawat
Gaji/honor	Tidak ada	-	Perawat
Penyakit Malaria	Ada	Sama	Perawat
Penyakit Diare	Ada	Sama	Perawat
Penyakit TBC	Ada	Meningkat	Perawat
Jumlah ahli pengobatan tradisional	5 orang	Menurun	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Kurang sekali per bulan	Sama	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran Hutan	Hasil hutan berupa rotan dan kayu habis terbakar
2	Kelaparan	Anak-anak banyak kekurangan gizi dan orang tua banyak yang sakit
3	Kekeringan	Penyakit demam dan sesak napas karena asap kebakaran hutan
4	Banjir	Banyak tanaman yang mati
5	Hama	Tumbuhan padi banyak dimakan tikus

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Lempunah. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- tidak ada beras. Sementara kebun rotan, kebun karet dan hutan terbakar. Lahan sempit karena ada perusahaan dan tidak bisa kerja di perusahaan;
- tidak ada yang bantu kalau tidak bisa berladang misalnya ketika sakit-sakitan. Hal ini karena solidaritas antar warga sudah kurang;
- tidak ada usaha lain jadi susah hidup;
- air bersih tidak ada, susah pada saat kemarau karena harus mencari air ke gunung;
- pengetahuan akan obat KB tradisional hilang karena tidak tahan untuk berpantang, dan tidak ada layanan kesehatan (mantri);
- biaya sekolah tinggi, tidak ada sekolah, pendidikan rendah dan buta huruf tinggi.

Menurut masyarakat biasa:

- tidak ada fasilitas air bersih di Lempunah;
- kurangnya fasilitas sekolah dan tenaga guru;
- tidak ada transportasi dan tidak ada akses jalan untuk mendistribusikan hasil hutan, hasil ladang dan hasil *simpukng*;
- kebakaran hutan dan masuknya perusahaan membuat masyarakat Lempunah tidak dapat berusaha (rotan, karet, doyo, lembo hilang/habis).

Menurut tokoh masyarakat:

- hutan terbakar beserta isinya (rotan dan simpukng), sehingga tidak ada usaha lain yang berjalan baik;
- hadirnya perusahaan yang membuat warga susah berladang karena lahan sempit dan terkena limbah;
- masalah sumber daya manusia, pendidikan rendah dan tenaga guru kurang;
- tidak adanya sarana kesehatan, posyandu, mantri dan perawat;
- tidak adanya alternatif usaha jangka pendek oleh pemda bila musim paceklik.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Infrastruktur jalan dirasakan telah mengalami perbaikan terutama setelah dibangunnya jalan menuju ke Pentat. Perbaikan sarana jalan memicu perbaikan hubungan dengan pihak pemerintah kabupaten yang dirasakan semakin dekat.

Jumlah rumah tangga yang berladang menurun cukup drastis terutama setelah adanya PT. Lonsum. Saat ini hanya sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari rumah tangga yang berladang. Kecenderungan ini juga memicu perubahan pada sumber pendapatan masyarakat. Saat ini terlihat bahwa pendapatan dari perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting selain dari kebun karet.

Luasan hutan dirasakan berkurang akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Dari sisi kebijakan, masyarakat merasa ada peningkatan kebebasan bagi masyarakat untuk dapat mengakses hasil hutan termasuk kayu.

Fasilitas pendidikan tidak mengalami perbaikan, kecuali perbaikan gaji untuk para guru. Walaupun ada SMP terbuka, tetapi sebenarnya tidak menambah bangunan sekolah. Hal ini berarti kondisi fasilitas pendidikan terus memburuk.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Lempunah, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 20 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- perawat di Pentat (menggantikan unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Kampung Lempunah

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Long Daliq

Jumlah rumah tangga: 68	Jumlah jiwa: 281
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 45	Jumlah KK: 84
Jumlah rumah tangga miskin: 11	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Bahau	Jumlah SD: 1
Nama Staf Adat: Layah Ding	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Yosep Ding Mering	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 20 menit (ces 5 PK)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 2.5 jam (ces/kapal + mobil)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Long Iram, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 115° 35.4' BT, 0° 2.4' LS	
Tanggal survei: 4 - 7 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut salah seorang staf lembaga adat Long Daliq, seperti juga orang Bahau di Mahakam pada umumnya, asal-usul pendiri kampung ini adalah dari Datah Dian (Kabupaten Bulungan). Di Datah Dian mereka dulunya berdiam di Long Daliq. Dari Datah Dian (Long Dalik) mereka bermigrasi ke DAS Mahakam tepatnya di Lirung Dapek yang terletak di Hulu Long Iram yang kemudian kini lebih dikenal dengan nama Long Daliq.

Di Kampung Long Daliq yang sekarang, telah terjadi 3 kali pergantian lamin.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di Kampung Long Daliq adalah:

- Pemerintahan Kampung;
- Badan Perwakilan Kampung;

Kampung Long Daliq

- Lembaga Adat;
- LKMD;
- Kelompok Tani.

Menurut ketuanya, Badan Perwakilan Kampung Long Daliq dibentuk pada tanggal 1 Januari 2003. Selama terbentuk, BPK melakukan konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat sebanyak sekali per 3 bulan atau bisa berubah apabila ada hal penting dan mendesak untuk dibicarakan.

Hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Pembagian Raskin	BPK ditunjuk sebagai penyalur raskin

Dalam 5 tahun terakhir, dirasakan kualitas musyawarah semakin baik, namun frekuensi pelaksanaan musyawarah semakin jarang. Pada beberapa musyawarah hasilnya semakin berdampak dan dipatuhi, namun terkadang ada juga hasil musyawarah yang tidak dipatuhi.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Semakin baik	Kepala BPK
Dampak keputusan musyawarah	Semakin berdampak dan dipatuhi	Kepala BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin jarang	Kepala BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Kampung Long Daliq pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten. Daftar usulan dan tanggapan dari pemerintah adalah sebagai berikut:

Permohonan bantuan	Tanggapan Pemerintah
Semenisasi (P3OT)	Bukan prioritas
Lamin adat	Belum ada jawaban
Rehabilitasi gedung sekolah	Belum ada jawaban

Kampung Long Daliq

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Responden rumah tangga kurang mampu	Menurut Ketua BPK
1	Polindes tahun 2000	Bantuan Beras Miskin dari pemerintah	Semenisasi kampung dari pengusaha dan Anggota DPRD Kubar
2	Beras miskin tahun 1999-sekarang	-	Bantuan benih padi dari pengusaha

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, mestinya beras miskin disalurkan dan dijual dengan harga yang lebih murah atau bahkan gratis.

BPK menyampaikan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan di kampung ini. Di lain pihak, menurut petinggi, terjadi peningkatan dalam bantuan pemerintah kepada pembangunan di kampung ini dalam 5 tahun terakhir.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, rata-rata kunjungan dari pemerintah ke Long Daliq adalah kurang dari sekali dalam sebulan. Pihak-pihak yang pernah datang antara lain:

- Bupati Kutai Barat (Juli 2003);
- Ketua DPRD Kubar (tahun 2002).

Hubungan masyarakat dengan pemerintah telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam 5 tahun terakhir. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Lebih baik

Masyarakat merasakan bahwa peningkatan kepedulian dan pelayanan ini terlihat nyata dari kunjungan pejabat tinggi dari kabupaten yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat memperoleh informasi tentang pembangunan dari pengumuman, mendengar dari orang lain juga dari televisi. Televisi hanya bisa berfungsi jika menggunakan antena parabola digital. Untuk berkomunikasi dengan dunia luar masyarakat bisa pergi ke Kecamatan Long Iram untuk akses telepon.

Kampung Long Daliq

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemerintah kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Perpindahan penduduk yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Jumlah Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	4 orang	Mencari pekerjaan
Waktu panjang atau selamanya	4 orang	Menikah Pergi usaha sarang burung walet

4.2 Upacara adat

Menurut salah seorang staf lembaga adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Long Daliq adalah:

- *pemali* (Adat tanam padi, yang bisa berupa *Lali Ugaal* atau *Lali Lumaq*);
- adat *Pekifaan* (yang berhubungan dengan adat perkawinan);
- *ngayau dan dangai* (yang berhubungan dengan adat pendewasaan anak);
- *behabai, lali purut* (yang berhubungan dengan adat pembersihan kampung);
- *belian* campuran (untuk pengobatan).

Menurut Staf Lembaga Adat, tidak ada perubahan yang berarti dalam pelaksanaan upacara-upacara adat tersebut di atas. Bahan-bahan, waktu pelaksanaan dan tujuan upacara masih tetap sama dengan sebelumnya, bahkan tingkat gotong-royong semakin kuat.

Beliau juga menyampaikan bahwa lebih dari separuh generasi muda di kampung ini masih mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari orang tua.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Staf Lembaga Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat telah menurun dalam 5 tahun terakhir, walaupun secara kasat mata semua masyarakat yang ada di kampung ikut berpartisipasi bila ada kegiatan gotong-royong.

Kampung Long Daliq

Bentuk-bentuk gotong royong yang pernah dilakukan dalam 12 bulan terakhir adalah:

- gotong royong untuk kegiatan agama;
- membersihkan lingkungan.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, tingkat kerjasama dan solidaritas masyarakat di kampung ini tidak mengalami perubahan. Kualitasnya masih tetap sama dalam 5 tahun terakhir. Jika mereka memerlukan bantuan maka pihak keluarga atau warga kampung yang bukan keluarga akan membantunya.

Staf Lembaga Adat menjelaskan bahwa bila terjadi masalah kekurangan makanan di kampung, maka mereka akan meminta bantuan kepada pemerintah.

4.4 Konflik

Menurut Staf Lembaga Adat, sangat jarang terjadi konflik di Kampung Long Daliq. Konflik suku dan konflik agama tidak pernah terjadi. Konflik agama dan konflik lahan sangat jarang terjadi, walaupun ada itu hanyalah akibat salah pengertian antar keluarga saja. Masyarakat kurang mampu menyatakan bahwa secara umum konflik dalam 5 tahun terakhir ini menurun. Menurut beliau, pernah terjadi konflik suku yang disebabkan oleh kecelakaan, namun tidak ada keterangan lebih lanjut dan detail tentang hal ini.

Lebih lanjut, Staf Lembaga Adat menyampaikan bahwa konflik di dalam kampung dan konflik di/dengan pihak luar kampung diselesaikan dengan hukum adat. Bila hukum adat tidak mampu menangani maka akan diserahkan kepada pemerintah. Namun beliau menegaskan bahwa pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa seluruh konflik dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama adalah usia yang sudah lanjut.

Situasi mereka dalam 5 tahun terakhir tetap sama, namun dirasakan dukungan masyarakat kampung sangat baik terhadap mereka. Bila memerlukan bantuan maka keluarga atau warga kampung lain yang bukan keluarga akan membantu.

Walaupun tergolong kurang mampu namun mereka tidak mengalami permasalahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan karena memiliki kartu sehat. Kartu sehat bisa digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Jika ada bantuan dari pihak luar maka yang hendaknya yang diprioritaskan adalah bantuan berupa beras dan uang. Kondisi rumah tangga yang kurang mampu juga tidak menjadi halangan baginya untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di kampung.

Menurut perawat di kampung ini, ketika seseorang tidak mampu membayar biaya pengobatan maka yang dilakukan adalah:

- menggunakan pengobatan tradisional;
- meminjam uang;
- meminta bantuan keluarga.

Kampung Long Daliq

4.6 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di Kampung Long Daliq adalah:

- televisi;
- VCD;
- upacara adat;
- kesenian.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Staf Lembaga Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Staf Lembaga Adat
Gotong royong dalam upacara adat	-	Sama dengan tujuan menurut adat	Staf Lembaga Adat
Tujuan upacara adat	-	-	Staf Lembaga Adat
Konflik lahan	Jarang	Berfluktuasi	Staf Lembaga Adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama	Staf Lembaga Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Staf Lembaga Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Staf Lembaga Adat
Konflik air/sumberdaya alam	-	-	Staf Lembaga Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Menurun	Staf Lembaga Adat
Jumlah konflik	-	Menurun	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna hutan dan lahan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna hutan dan lahan yang ada di Long Daliq adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- kebun buah (*lepu'un*);
- kebun kopi;
- kebun jeruk;
- hutan.

Hutan merupakan jenis tata guna terluas dengan komposisi antara seperempat sampai dengan setengah dari total luasan kampung.

Kampung Long Daliq

Kebun sayur dan kebun kopi luasannya tetap karena umumnya ditanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Luasan ladang dan kebun rotan terus bertambah. Umumnya kebun rotan ini baru dan ditanami dengan rotan jenis sega dan pulut merah. Luasan kebun karet dan kebun buah berkurang karena banyak yang mati dan digusur untuk pembuatan jalan. Dan yang pasti terus berkurang adalah luasan hutan karena perusahaan kayu terus menebang.

Menurut Ketua BPK, tipe hutan dan lahan yang ada di Long daliq adalah:

- hutan perawan (*tu'an*);
- hutan sekunder tua (*tarah ayaq*);
- hutan sekunder muda (*tarah uk*);
- belukar tua (*tarah*);
- belukar (*talun*);
- hutan rawa (*pekaq*);
- hutan kerangas (*pringet*);
- bekas ladang (*sikau bae*).

Tu'an, *tarah ayaq*, *tara uk*, *tarah* dan *talun* terus berkurang luasnya. *Tu'an* dan *tarah ayaq* terus berkurang karena hadirnya perusahaan yang mengambil (menebang) kayu dan tipe yang lainnya juga terus berkurang karena aktivitas berladang masyarakat. Hutan rawa dan hutan kerangas jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan bertanam karenanya luasannya tetap tidak berubah.

Penebangan hutan oleh perusahaan baik legal maupun ilegal ini menurut beberapa sumber pernah menjadi pemicu konflik dengan pihak luar. Namun sampai sekarang belum ada peraturan di kampung yang secara formal mengatur tentang masalah ini.

Menurut Kepala BPK, perubahan yang terjadi terhadap kawasan hutan antara lain:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Perusahaan yang menebang kayu	Banjir
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Perusahaan yang menebang kayu Ladang masyarakat yang terbakar	Susah mencari binatang buruan

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Petinggi, sebenarnya Kampung Long Daliq mempunyai hutan yang dilindungi secara adat turun-temurun. Setengah dari luasan kampung adalah wilayah cadangan untuk bahan bangunan masyarakat.

Bila ada yang ingin memanfaatkan atau melanggar maka sanksi ditetapkan melalui musyawarah lembaga adat yang mengacu pada aturan dari hukum adat.

Petinggi menyampaikan bahwa sudah pernah ada pihak dari kampung ini yang mengajukan IPPK/HPHH. Beliau juga menjelaskan bahwa seluruh masyarakat kampung mendapatkan tambahan penghasilan dari konsesi tersebut. Pihak luar yang pernah mengajukan permohonan untuk konsesi IPPK/HPHH/IPHH untuk penebangan kayu pada wilayah Kampung Long Daliq adalah Pemuda Pancasila. Menurut Petinggi, yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi tersebut adalah

Kampung Long Daliq

masyarakat kampung melalui musyawarah kampung. Masyarakat kurang mampu menyampaikan bahwa mereka mengetahui bahwa memang pernah ada pihak kampung yang mengajukan konsesi HPHH, dan mereka juga menerima penghasilan dari konsesi tersebut, namun mereka tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan konsesi tersebut.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Petinggi, seluruh rumah tangga di Kampung Long Daliq memiliki keterjangkauan terhadap lahan, dan seluruh rumah tangga juga mempunyai lahan sendiri. Keterjangkauan ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir ini. Selama ini belum pernah terjadi kasus jual beli lahan di kampung ini.

5.4 Perladangan

Antara 68% - 80% responden rumah tangga berladang dalam 5 tahun terakhir ini. Ada sedikit (6%) responden yang pernah membuat sawah pada tahun 1999 dan 2000, namun 3 tahun terakhir tidak lagi digarap. Sekitar 75% responden menyatakan bahwa mereka berladang di lahan sendiri, namun sisanya tidak menjelaskan tentang status lahan yang mereka garap.

Sepuluh dari responden menyatakan bahwa mereka berladang pada lahan bekas ladang yang berusia kurang dari 10 tahun. Jarak tempuh ladang dengan tempat tinggal berkisar antara 3 - 45 menit. Lebih dari 80% berangkat menuju ladang dengan berjalan kaki, sisanya menggunakan ces/ketinting.

Pada tahun 2002, jumlah benih yang ditanam berkisar antara 1 - 8 kaleng padi dan rata-rata responden menanam 2 kaleng padi. Pada tahun 2003 terjadi penurunan, dimana jumlah benih yang ditanam berkisar antara 1 - 5,50 kaleng. Hasil panen tahun sebelumnya rata-rata hanya bertahan antara 4 - 10 bulan. Sekitar 44% responden rumah tangga menyatakan bahwa mereka memperoleh bantuan beras dari pemerintah tahun 2003. Selain pemerintah, tidak ada pihak lain yang memberi bantuan beras.

5.5 Pendapatan uang

Kebanyakan responden (40%) memperoleh penghasilan uang dari kayu. Bekerja di perusahaan kayu, menjadi operator *chainsaw* dan 'banjir kap' merupakan usaha yang banyak dilakoni responden.

Usaha lain yang juga menghasilkan uang adalah nelayan (menjual ikan), menjual sayur dan rotan. Sebagian kecil responden menjadi motoris perahu ces tenaga honor pada Dinas Pertanian.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak ada pasar di kampung ini. Yang ada hanyalah orang dari luar yang berjualan pakaian keliling pada saat ada keramaian seperti pada saat upacara adat dan perkawinan.

Bila masyarakat membutuhkan bahan makanan yang lebih lengkap atau untuk pemenuhan kebutuhan yang lainnya maka mereka harus pergi ke Long Iram yang berjarak setengah jam menggunakan ces dengan biaya Rp. 15.000,-. Alternatif lain

Kampung Long Daliq

adalah dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan tembus Long Daliq - Long Iram.

Menurut Petinggi, kondisi jalan darat saat ini adalah sedang. Kondisi ini menurun dalam 5 tahun terakhir. Kondisi sungai sebagai jalur transportasi juga sedang, kondisi ini dari waktu ke waktu terus berfluktuasi tergantung pada musim dan cuaca.

Namun beliau mengakui bahwa waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai kecamatan dan kabupaten dalam 5 tahun terakhir menjadi lebih cepat, terutama karena ada alternatif jalan darat ke Long Iram dan juga karena pes yang semakin laju dan ada jalan darat dari Tering ke Melak.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Sumber energi yang digunakan di Kampung Long Daliq adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- gas;
- listrik pribadi;
- listrik kelompok.

Listrik pribadi dan listrik dari PLN belum begitu lama dinikmati namun dirasakan masih terjangkau demikian juga halnya dengan gas. Kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak juga masih terjangkau. Yang dirasakan semakin sulit terjangkau adalah minyak tanah.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden rumah tangga, kebanyakan atap rumah penduduk terbuat dari seng, sebagian yang lain menggunakan keping dan sirap.

Dinding dan lantai seluruh responden terbuat dari papan kayu biasa. Lebih dari separuh responden menggunakan listrik pribadi, sisanya menggunakan listrik pribadi. Masih ada sedikit responden yang belum menikmati fasilitas listrik. Kebanyakan masyarakat menggunakan WC sungai, sedikit sisanya menggunakan WC dalam rumah.

Kampung Long Daliq

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Sedang	Menurun	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Sedang	Berfluktuasi	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan Sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun buah (<i>lepuun</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun jeruk	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	-	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>tu'an</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>tarah ayaq</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>tarah uk</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua (<i>tarah</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar (<i>talun</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>pekaq</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>pringet</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan lindung	Ada		Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan dan hewan	-	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Transportasi ke ladang mudah, sehingga bisa membuat ladang jauh	Membaik	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Hanya sekitar 20% dari responden rumah tangga yang menyatakan bahwa ada anak putus sekolah dalam keluarga mereka. Umumnya putus sekolah terjadi pada tingkat SMP.

Menurut salah seorang guru, faktor penyebab putus sekolah beberapa anak di kampung ini adalah:

- malas sekolah;
- tidak ada biaya;
- harus bekerja;
- menikah.

Kampung Long Daliq

Pada musim berladang, masih ada anak-anak yang terpaksa tidak pergi ke sekolah karena membantu orangtua di ladang. Sebagian anak juga punya kecenderungan untuk bolos pada saat ada keramaian atau upacara adat di kampung.

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pendidikan guru menjadi lebih baik, demikian juga dengan tingkat keaktifan guru dalam mengajar.

Dalam ujian tahun lalu, sekolah di kampung ini mampu meluluskan 100% siswanya. Jumlah siswa baru tahun ini adalah 14 orang. Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis di kampung ini juga mengalami peningkatan.

Disamping pendidikan formal untuk anak-anak, di kampung ini juga pernah dilakukan pelatihan untuk program pemerintah Kejar Paket A.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Menurut salah seorang guru pada SDN No. 013 Long Daliq, sekolah tempat dia mengajar adalah satu-satunya institusi pendidikan formal di kampung ini. Jika ingin melanjutkan ke jenjang SMP dan SLTA maka anak-anak harus ke Long Iram yang berjarak 8 kilometer dari Long Daliq. Pendidikan Tinggi atau perguruan tinggi biasanya harus ditempuh di Samarinda. Tidak ada anak dari kampung lain yang tinggal di kampung ini untuk melanjutkan sekolah. Jumlah dan kondisi sekolah berkurang, alat-alat dan buku-buku juga berkurang. Menurut guru di kampung ini, pada saat masih berada dalam wilayah Kabupaten Kutai, bantuan alat-alat dan buku-buku itu ada, namun kini setelah bergabung dengan Kutai Barat fasilitas tersebut semakin berkurang. Sekalipun demikian, jumlah staf semakin banyak, demikian juga dengan honor/gaji yang menjadi lebih besar.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Berkurang	Guru SD
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Guru SD
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Guru SD
Jumlah staf	-	Lebih banyak	Guru SD
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Guru SD
Tingkat pendidikan guru	-	Lebih baik	Guru SD
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih aktif	Guru SD
Persentase kelulusan	-	Sama saja	Guru SD
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Guru SD

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut Perawat yang ada di kampung, jenis penyakit yang lazim diderita di kampung ini adalah:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	ISPA
Orang dewasa	ISPA dan alergi
Perempuan	Infeksi, gatal-gatal
Laki-laki dewasa	Kencing bernanah
Lanjut usia	TBC

Penyakit malaria yang umumnya diderita anak-anak dan orang dewasa frekuensinya sudah menurun, demikian juga dengan diare yang umumnya diderita anak-anak. Penyakit TBC yang diderita kalangan lanjut usia tingkat keseringannya sama.

Dalam 12 bulan terakhir, lahir 18 bayi dengan berat rata-rata pada saat kelahiran 2,6 - 3,5 kg. Tidak ada ibu dan bayi yang meninggal selama proses persalinan, juga tidak ada anak-anak dibawah usia 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir. Usia rata-rata ibu pada kehamilan pertama adalah 20 tahun.

Menurut Perawat, rata-rata usia orang yang meninggal karena penyakit adalah 80 tahun dengan asumsi penyebab kematiannya adalah karena usia lanjut. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di kampung ini adalah *stroke*.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut perawat di Kampung Long Daliq, kurang dari separuh masyarakat di kampung ini bisa mendapatkan sumber air bersih. Air untuk konsumsi di kampung ini bersumber dari sungai dan sumur timba.

Jumlah dan mutu air bersih di kampung ini berfluktuasi yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, ketika air bersih sulit didapat di kampung, tidak ada bantuan yang didapat dari pihak luar.

Pada umumnya masyarakat menyimpan (menampung) air dengan menggunakan ember, gentong dan drum. Tidak ada fasilitas penyimpanan air bersih untuk kepentingan umum di kampung ini.

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Long Daliq tidak terdapat fasilitas fisik kesehatan. Tenaga kesehatan yang tersedia adalah 3 orang dukun dan tenaga PKMK (Pondok Kesehatan Masyarakat Kampung). Yang mendanai tenaga kesehatan tersebut adalah pemerintah dan swasta. Ketersediaan tenaga kesehatan tersebut membuat kurang dari separuh orang dari luar kampung datang berobat ke kampung ini.

Fasilitas kesehatan terdekat adalah Puskesmas Long Iram yang berjarak 8 kilometer jalan darat atau bisa di tempuh dalam waktu 30 menit dengan ces dengan biaya Rp. 10.000 - Rp. 15.000. Fasilitas kesehatan lainnya yang lebih lengkap adalah Rumah Sakit ST. Yoseph Tering yang ditempuh dalam waktu 1,5 jam menggunakan ces.

Kampung Long Daliq

Menurut Kepala Adat, pengobatan tradisional masih cukup diminati di kampung ini. Saat ini terdapat 5 orang ahli pengobatan tradisional di Long Daliq. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir.

Pengobatan tradisional dilaksanakan dengan frekuensi lebih dari sekali dalam sebulan. Frekuensi ini berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir, tergantung pada tingkat kesehatan masyarakat. Biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan bahan dan melaksanakan upacara (*belian*) adalah kira-kira Rp. 500.000.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai; sumur timba	Berfluktuasi	Perawat
Mutu air bersih	Air sungai; sumur timba	Berfluktuasi	Perawat
Mutu air sungai	-	Berfluktuasi	Perawat
Jumlah fasilitas kesehatan	-	Sama saja	Perawat
Kondisi fasilitas kesehatan	-	Kurang baik	Perawat
Jumlah staf fasilitas kesehatan	-	Sama saja	Perawat
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	-	Tidak tetap	Perawat
Gaji/honor	-	Sama saja	Perawat
Penyakit malaria	Ada	Menurun	Perawat
Penyakit diare	Ada	Menurun	Perawat
Penyakit TBC	Ada	Sama	Perawat
Jumlah ahli pengobatan tradisional	5 orang	Sama	Staf lembaga adat
Upacara pengobatan tradisional	Lebih dari sekali per bulan	Berfluktuasi	Staf lembaga adat

8. Sejarah Bencana

Peristiwa penting atau bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan	Potensi hutan musnah
2	Kekeringan	Aktivitas pertanian terganggu Gagal panen
3	Banjir	Aktivitas pertanian terganggu Gagal panen
4	Hama	Gagal panen
5	Perubahan pemerintahan	-

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Long Daliq. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- lahan sering dilanda banjir;
- tidak mampu membiayai anak sekolah karena tidak ada usaha tetap;
- usaha kurang produktif, sulit mendapatkan pekerjaan;
- sering sakit, uang habis untuk berobat;
- jenjang pendidikan terbatas.

Menurut masyarakat biasa:

- usaha tidak tetap;
- tidak ada kesadaran arti sekolah, masyarakat tidak bersatu;
- sulit mencari peluang usaha;
- tidak ada pengetahuan dalam memasarkan hasil kebun;
- penghasilan kecil (pas-pasan).

Menurut tokoh masyarakat:

- kebakaran hutan yang menyebabkan berkurangnya penghasilan;
- kurangnya pendidikan sehingga kesulitan ketika melamar kerja di perusahaan;
- kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan;
- kurangnya dukungan dari pemerintah, misalnya pemerintah lebih berpihak pada perusahaan ketika ada konflik antara perusahaan vs masyarakat;
- kurangnya penghasilan.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Kelembagaan masyarakat dalam 5 tahun terakhir diakui cenderung membaik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kualitas musyawarah yang semakin membaik. Hubungan dengan pemerintah kabupaten juga diakui membaik, terutama dari sisi jarak, kepedulian, layanan, keterbukaan informasi dan partisipasi dalam mengambil keputusan.

Kondisi sosial budaya cenderung tidak mengalami perubahan berarti, baik dari sisi upacara adat maupun konflik. Konflik jarang terjadi di kampung, kondisi ini tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Namun diakui juga bahwa tingkat kerjasama masyarakat semakin menurun.

Adanya HPHH di kampung ini memberikan perubahan pada kondisi ekonomi. Hutan menjadi semakin terbuka, lebih banyak orang bekerja kayu. Selain itu, pendapatan baru yang nampak sekali adalah pendapatan yang berasal dari perolehan *fee* HPHH. Cukup dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki ketergantungan kepada produksi kayu, baik yang dilakukan sendiri (*nyenso*) maupun yang dilakukan pihak lain (*fee*). Konsekuensinya adalah jumlah luasan hutan yang diakui menurun. Sementara itu, luasan ladang, kebun karet dan kebun rotan diakui meningkat.

Kampung Long Daliq

Fasilitas pendidikan cenderung menurun, kecuali jumlah dan gaji guru yang diakui mengalami peningkatan. Jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis meningkat.

Tidak ada fasilitas kesehatan, keadaan ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Frekuensi penyakit diare diakui menurun. Fasilitas pengobatan tradisional tidak mengalami perubahan.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Long Daliq, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 20 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- staf lembaga adat (menggantikan unsur kepala adat);
- petinggi;
- ketua BPK;
- guru SDN 013 Long Daliq (menggantikan unsur kepala sekolah);
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- perawat (menggantikan unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 2 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Long Pananeh II

Jumlah rumah tangga: 42	Jumlah jiwa: 173
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 41	Jumlah KK: 79
Jumlah rumah tangga miskin: 6	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Seputan	Jumlah SD: -
Nama Kepala Adat: Y. Sangiang Dalung	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Yohanes Lijiu Bulan	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 30 menit (jalan kaki)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 30 jam (long boat + kapal)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Long Apari, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 116 ⁰ 55' BT, 0 ⁰ 44' LU	
Tanggal survei: 14 - 16 November 2003	

1. Sejarah Kampung

Kampung Long Pananeh II berasal dari Long Pananeh yang berada di Hulu Sungai Kasau. Long Pananeh mengikuti program *resettlement* pemerintah bersama Kampung Long Pananeh I dan Long Pananeh III. Mereka pindah ke wilayah Kampung Tiang Buu yang berjarak 30 menit jalan kaki dari Tiang Ohang pada tahun 1972.

Alasan kepindahan mereka adalah supaya mempermudah pemerintah dalam melakukan pembangunan terutama dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan serta mendukung Long Apari menjadi sebuah kecamatan. Wilayah asli Long pananeh II di Sungai Kasau berjarak 9 jam perjalanan dengan menggunakan perahu ces.

Saat ini Long Pananeh II juga di kenal sebagai Muntai II, nama lain yang lebih dikenal setelah berada di daerah baru. Masyarakat dari kampung lain lebih akrab dengan nama Muntai II daripada Long Pananeh II.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di Kampung Long Pananeh II ini adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani (Hebung Lestari).

Selain lembaga-lembaga tersebut, tidak ada lembaga atau institusi lain yang bekerja mendampingi masyarakat.

Badan Perwakilan Kampung Long Pananeh dibentuk pada bulan Januari 2003. Setelah dibentuk hingga November 2003, BPK belum pernah melakukan konsultasi dengan masyarakat.

Menurut Anggota BPK, dalam 5 tahun terakhir kelembagaan musyawarah tidak mengalami perubahan yang banyak kecuali pada tingkat keseringan melakukan musyawarah yang menjadi semakin jarang.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Anggota BPK
Dampak keputusan musyawarah	Sama saja	Anggota BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin jarang	Anggota BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Long Pananeh II pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten. Berikut adalah daftar usulan bantuan yang pernah diajukan dan tanggapan pemerintah dalam 5 tahun terakhir:

Permohonan Bantuan	Tanggapan Pemerintah
Air bersih	Hanya diminta membuat Daftar Usulan Proyek (DUP) berulang-ulang setiap tahun.
Kebun jangka panjang	
Penerangan kampung	Usulan ditampung
Semenisasi	Terealisasi tahun 2000

Berdasarkan wawancara dengan 3 pihak, berikut adalah daftar bantuan yang pernah di terima:

No	Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut BPK
1	Semenisasi jalan kampung	Beras miskin	-

Kampung Long Pananeh II

Menurut rumah tangga kurang mampu bantuan raskin yang diterima dari pemerintah harganya sedikit lebih murah dari harga beras di toko.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, petugas pelayanan dari pemerintah (kabupaten dan kecamatan) tidak pernah mengadakan kunjungan ke kampung mereka. Yang paling sering terjadi adalah pihak Long Pananeh II diundang untuk rapat di Tiang Buu membahas tentang Kelompok Tani Lestari Hutan. Hubungan lain dengan pihak pemerintah terjadi dengan pihak Dinas Kehutanan (Dishut). Pihak Dishut pernah meminta kepada kampung untuk membuat usulan yang total pendanaannya mencapai ratusan juta rupiah.

Dari informasi anggota BPK diketahui bahwa petugas dari kecamatan cukup sering berkunjung ke kampung untuk memberikan informasi tentang pemerintahan dan pembangunan. Jarak dari kecamatan ke kampung hanya 30 menit berjalan kaki.

Dalam 5 tahun terakhir, hubungan dengan pemerintah kabupaten mengalami perubahan. Rincian tentang perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih buruk
Pelayanan	Sama saja
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah lewat kunjungan-kunjungan dari pemerintah dan mendengar dari orang lain. Anggota BPK menjelaskan bahwa biasanya bila ada program baru maka petugas dari kecamatan langsung datang ke kampung. Tiang Ohang sebagai ibukota Kecamatan Long Apari berdekatan dengan beberapa kampung asli dan kampung *resettlement*. Jarak antara kampung-kampung ini hampir tidak ada. Jarak antara Long Pananeh II dengan Tiang Ohang hanya 30 menit jalan kaki.

Informasi dari luar diakses masyarakat melalui radio dan televisi yang banyak dimiliki warga. Warung telekomunikasi yang menggunakan telepon satelit juga ada di kampung terdekat yang hanya berjarak 5 - 10 menit jalan kaki.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Anggota BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih buruk	Anggota BPK
Pelayanan pemkab	Sama saja	Anggota BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Anggota BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Anggota BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Sama	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Tidak ada data pasti tentang perpindahan penduduk baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Informasi dari responden rumah tangga menyebutkan bahwa ada warga masyarakat yang pergi mencari pekerjaan ke tempat lain.

Perpindahan penduduk sementara juga terjadi pada anak-anak sekolah yang melanjutkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ke Samarinda.

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat Long Pananeh II, upacara adat yang masih dilakukan adalah:

- *usut* (upacara penyambutan tamu);
- upacara yang berhubungan dengan kegiatan berladang (menugas, menebas, potong padi).

Upacara adat yang berhubungan dengan penyambutan tamu, perladangan dan perkawinan tidak mengalami perubahan yang berarti baik dalam dimensi waktu maupun dalam bahan-bahan upacara, tujuan upacara dan gotong royong pada penyelenggaraan. Kepala Adat menyampaikan bahwa lebih dari separuh generasi muda masih mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli dari para orang tua terutama yang berhubungan dengan hukum adat. Sebaliknya generasi muda tidak mempunyai minat untuk mempelajari pengetahuan asli masyarakat yang berhubungan dengan obat-obatan tradisional.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat Long Pananeh II, tingkat kerjasama masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini dirasakan sama saja. Kerjasama dan solidaritas ini tergambar antara lain dalam gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam 12 bulan terakhir untuk:

- pembuatan rumah atau penyelesaian rumah masyarakat tidak mampu;
- pembuatan rumah panjang atau lamin.

Gotong-royong ini diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di kampung, kecuali bila dalam keadaan sakit.

Di lain pihak, responden rumah tangga kurang mampu menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan tingkat solidaritas masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Jika dirinya memerlukan bantuan misalnya dalam keadaan sakit, tidak ada keluarga atau non keluarga yang sukarela membantu. Menurutnya, hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut banyak keluarga di kampung ini yang berbunyi "*Jika mampu maka kamu akan hidup, jika tidak mampu lebih baik mati saja*"

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, konflik terberat yang dialami oleh Kampung Long Pananeh II adalah konflik lahan. Lima tahun terakhir ini terjadi peningkatan dalam konflik lahan ini. Konflik lahan terjadi antara Kampung Long Pananeh II, Tiang Ohang dan Long

Kampung Long Pananeh II

Krioq. Konflik ini bermula dari perpindahan Kampung Long Pananeh II dari Sungai Kasau ke lokasi yang sekarang. Di wilayah baru ini masyarakat Long Pananeh II diberi hibah tanah untuk kampung dan lahan untuk berladang. Namun belakangan muncul berbagai konflik berkaitan dengan lahan ini yang menurut Kepala Adat antara lain disebabkan oleh:

- perjanjian pada saat perpindahan tahun 1972 adalah perjanjian lisan (tidak tertulis) antar pemimpin adat dan kampung dengan rasa saling percaya. Sayangnya, generasi muda banyak yang tidak lagi menghiraukan perjanjian dengan adat lama, termasuk perjanjian tentang lahan yang ditempati oleh Long Pananeh II;
- otonomi daerah yang berimbas pada otonomi kampung. Setiap kampung menelusuri kembali wilayah kampung dan memetakan wilayahnya, termasuk Tiong Ohang, Tiong Bu'u dan Long Krioq. Long Pananeh hanya berhak atas lahan kampung, tidak atas lahan lainnya;
- kepentingan kampung asli terhadap lahan mereka semakin tinggi ketika banyak ditemukan gua sarang burung walet di wilayah ini.

Sejalan dengan Kepala Adat, responden rumah tangga kurang mampu juga menyatakan bahwa konflik yang dominan di kampung ini adalah konflik lahan. Sebagai kampung pendatang, banyak keterbatasan yang mereka hadapi berkaitan dengan lahan, misalnya:

- lahan yang resmi dimiliki warga Long Pananeh II hanyalah tanah tempat berdirinya rumah tempat mereka tinggal;
- lahan untuk berladang harus dipinjam dengan warga kampung lain yang terkadang harus diikat dengan perjanjian tertulis;
- masyarakat Long pananeh II tidak boleh menanam tanaman keras seperti kayu, karet dan buah-buahan di ladang yang mereka pinjam.

Disamping konflik lahan, konflik lain yang pernah cukup meresahkan di kampung-kampung di wilayah ini adalah konflik sumber daya alam yang berkaitan dengan sarang burung walet. Pada tahun 1999 pernah terjadi konflik dengan warga Kalimantan Tengah yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 orang terluka parah.

Menurut Kepala Adat, penyelesaian konflik sebisa mungkin menggunakan hukum adat. Bila hukum adat tidak mampu menyelesaikan maka penyelesaian konflik akan diserahkan ke tingkat hukum negara. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa seluruh konflik dapat diselesaikan pada tingkat hukum adat, kecuali untuk kasus kriminal.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Responden rumah tangga kurang mampu menyatakan bahwa masalah umum yang mereka hadapi adalah:

- lahan untuk berladang adalah lahan pinjaman;
- hasil ladang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari karena:
 - lokasi ladang tidak subur;
 - tidak bisa membuat ladang yang lebih jauh karena repot mengurus anak;
 - ladang terserang hama;
 - tidak mampu membayar untuk biaya kesehatan.

Kampung Long Pananeh II

Responden rumah tangga kurang mampu tidak menyebutkan secara spesifik bentuk bantuan yang diharapkan dari pihak luar. Bila dirinya tidak punya cukup uang untuk berobat sementara ada anggota keluarga yang sakit maka jalan keluarnya adalah dengan berhutang pada dokter yang mengobati. Sekali berobat biasanya membutuhkan Rp. 10.000 - Rp. 30.000.

Perawat pada Puskesmas Tiong Ohang yang juga warga Long Pananeh II juga menyatakan bahwa ketika seseorang di kampung ini tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan maka dia akan meminjam uang.

Responden rumah tangga kurang mampu menyatakan bahwa yang sering turut serta dalam pengambilan keputusan di kampung adalah para suami (kaum laki-laki) saja.

4.6 Hiburan

Sumber hiburan di kampung ini adalah:

- televisi;
- radio;
- VCD.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Gotong-royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Konflik lahan	Sering	Meningkat	Kepala Adat
Konflik keluarga	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Pernah	Menurun	Rumah tangga kurang mampu
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Berfluktuasi	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Menurun	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna hutan dan lahan

Menurut anggota BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Kampung Long Pananeh II adalah:

- ladang;
- kebun buah;
- kebun kopi;
- peternakan;
- hutan;
- kebun singkong.

Jenis tata guna di atas adalah tata guna lahan pada lahan pinjaman. Di Long Pananeh II (Muntai II) ini hanya lahan untuk rumah yang benar-benar menjadi hak warga Long Pananeh II. Lahan lain seperti ladang dan kebun adalah pinjaman dari kampung lain. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat Long Pananeh dilarang menanam tanaman keras pada areal pinjaman. Tapi dalam kenyataannya beberapa dari mereka tetap menanam tanaman keras seperti kebun kopi dan buah-buahan. Berdasarkan perjanjian, mereka harus siap untuk kehilangan tanaman kerasnya tersebut jika pemilik lahan menghendakinya.

Di lahan pinjaman ini, perubahan tata guna lahan cenderung tetap dan berkurang. Ladang, hutan dan peternakan tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Kebun singkong dan kebun kopi cenderung berkurang. Kebun singkong dibutuhkan untuk makanan ternak dan cadangan untuk campuran nasi bila musim paceklik tiba, namun sekarang cenderung berkurang karena beras juga kopi selalu tersedia di toko.

Di Sungai Kasau, wilayah asal Long Pananeh II, tata guna terluas adalah hutan. Luasan hutan di sana masih tetap, demikian juga luasan kebun rotan yang sangat jarang dipanen karena lokasi yang jauh dan harga yang tidak menentu.

Menurut Petinggi, masyarakat Long Pananeh II juga telah menetapkan 100 hektar lahan di Sungai Kasau sebagai kawasan lindung. Beliau menegaskan bahwa akan ada peraturan adat yang akan mengatur tentang pemanfaatan kawasan ini kelak. Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang pasti tentang pengelolaan kawasan ini.

Anggota BPK menjelaskan bahwa jenis hutan yang dipinjamkan kepada Long Pananeh II adalah:

- hutan sekunder muda (*bele'ang*);
- belukar tua (*bere'ang tacap*);
- belukar (*koka*);
- hutan kerangas (*atub*).

Lahan ini dipinjam dari Kampung Tiong Ohang dan Krioq dengan dilengkapi surat pinjam-meminjam. Karena merupakan lahan pinjaman maka tidak ada perubahan luasan dalam 5 tahun terakhir. Lahan pinjaman ini hanya boleh untuk berladang dan tidak boleh ditanami tanaman keras, karena lahan ini sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemiliknya.

Setelah ditinggalkan sejak tahun 1972, lahan Kampung Long Pananeh II di Sungai Kasau yang berupa hutan, kebun buah, kebun kopi dan kebun rotan tidak mengalami

Kampung Long Pananeh II

perubahan. Jarak yang jauh menyulitkan mereka untuk mengakses lahan ini, juga harga rotan yang tidak menentu membuat mereka enggan untuk memanen rotan.

Saat ini luasan hutan perawan (*tu'an hawu*) diperkirakan 60% dan hutan sekunder (*bele'ang*) seluas 30%.

Informasi dari anggota BPK dan kepala adat serta beberapa tokoh masyarakat dalam diskusi menjelaskan tentang perubahan yang terjadi terhadap kawasan hutan di Sungai Kasau sebelum 1990 sebagai berikut:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Lebih sulit diakses	Resettlement kampung Jarak yang jauh Jalur transportasi yang sulit	Harus pinjam lahan di tempat baru
Luasan hutan sekunder tua dan kebun rotan bertambah	Tidak pernah dipakai sejak 1972 Rotan tidak pernah dipanen sejak 1972 Harga rotan tidak ada	-

Yang diakui sebagai hutan Kampung Long Pananeh II adalah hutan yang ada di Sungai Kasau yang berjarak 9 jam perjalanan dengan perahu ces 10 PK dari kampung sekarang. Untuk menuju ke tempat asal ada jalur sungai yang selama 1 jam terus-menerus adalah riam yang tidak akan bisa dilalui bila musim kemarau.

Petinggi menjelaskan bahwa di lokasi kampung lama di Sungai Kasau jenis-jenis tumbuhan dan binatang hutan tidak mengalami perubahan, masih tetap seperti dulu. Jarak yang jauh dan jalur transportasi yang sulit membuat perburuan dan pemanfaatan akan binatang dan tumbuh-tumbuhan ini sulit dilakukan.

5.2 Perladangan

Seluruh responden rumah tangga berladang dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Seluruhnya berladang di lahan pinjaman milik ketiga kampung di sekitarnya. Pada tahun 2002, mereka menanam sekitar 1 - 5 kaleng bibit padi, kebanyakan menanam sekitar 3 kaleng. Pada tahun 2003, mereka menanam lebih banyak yaitu antara 3 - 6 kaleng bibit. Sayangnya sekitar 80% dari rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan beras dari hasil ladang. Mereka harus membeli beras tambahan untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Lebih dari 80% rumah tangga berladang di lahan yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Untuk mencapai ladang, kebanyakan dari mereka menggunakan perahu ces dengan waktu tempuh antara setengah-dua jam perjalanan.

5.3 Pendapatan uang

Kebanyakan dari rumah tangga mendapatkan pendapatan uang dari hasil menjual gaharu yang didapatkan dari hutan. Beberapa dari mereka juga mendapatkan penghasilan dari menjual sarang burung dan menggergaji kayu. Sebagian kecil dari mereka juga mendapatkan penghasilan dari menjual sayuran, menjual ikan dan gaji sebagai petugas kampung serta petugas kesehatan.

Dari menjual gaharu, mereka bisa mendapatkan penghasilan antara Rp. 5.000.000 - Rp. 24.000.000/tahun. Namun modal kerja yang harus dikeluarkan juga sangat besar sehingga keuntungan bersih tidak terlalu besar.

Kampung Long Pananeh II

Ada 1 rumah tangga yang memiliki gua sarang burung. Sebagai pemilik gua sarang burung pasti lebih beruntung. Setiap sekali panen, mereka bisa mendapatkan sampai dengan Rp. 30.000.000.

5.4 Infrastruktur ekonomi

Tidak tersedia pasar di kampung ini. Namun masyarakat tidak mempunyai kesulitan untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Yang menjadi permasalahan adalah harga barang (termasuk sembako) yang sangat tinggi. Sebagai contoh, bawang merah yang di Samarinda hanya berharga Rp. 8.000/kg di Long Pananeh II berharga Rp. 20.000/kg.

Kebutuhan akan sayur-sayuran dipenuhi dari kebun sendiri atau dari penjual-penjual sayur yang umumnya berasal dari Delang Kerohong dan Long Kuling yang secara reguler datang ke kampung ini. Kampung ini berdekatan dengan paling sedikit 6 kampung lain yang terhubung dengan jalan yang baik, yang berjarak antara 5 - 40 menit jalan kaki. Toko-toko yang cukup lengkap banyak tersebar di kampung-kampung ini.

Menurut Petinggi, kondisi jalan adalah baik dimana jalan antar kampung terdekat sudah disemen dan perubahan dalam 5 tahun terakhir adalah sama saja.

Kondisi sungai sebagai jalur transportasi dirasakan kurang baik, banjir dan kemarau yang tidak tentu dalam 5 tahun terakhir membuat perubahannya berfluktuasi. Kampung Long Pananeh II terletak di pinggir Sungai Mahakam pada sisi yang berarus deras. Dermaga atau tambatan perahu yang permanen serta jamban tidak mungkin dibangun disini.

Waktu perjalanan yang diperlukan untuk menuju ke kecamatan dan kabupaten menjadi lebih cepat. Long Pananeh II dan Tiong Ohang dihubungkan dengan jembatan gantung yang cukup kokoh sehingga bisa dilalui oleh sepeda motor.

Transportasi reguler menuju kabupaten juga lebih baik daripada sebelum 5 tahun yang lalu. Sekarang ada *long boat* milik pedagang dan *long boat* serta *speedboat* khusus penumpang yang secara reguler berangkat ke Long Bagun dengan biaya antara Rp. 350.000 - Rp. 500.000. Dalam kondisi mendesak, masyarakat juga bisa menggunakan pesawat dari Long Lunuk ke Samarinda. Setiap kecamatan di hulu riam mendapat jatah 3 kursi untuk sekali penerbangan. Masyarakat bisa mengurus rekomendasi ke kantor kecamatan bila ingin ke Samarinda. Sayangnya, jumlah kursi yang tersedia tidak sebanding dengan minat masyarakat untuk bepergian dengan pesawat bersubsidi ini. Hal ini memicu munculnya lonjakan harga tiket. Normalnya, harga tiket pesawat ke Samarinda adalah Rp. 150.000/trip, namun terkadang tiket ini bisa berharga hingga Rp. 500.000. Jarak dari Long Pananeh ke Long Lunuk adalah 4 jam perjalanan menggunakan ces 10 PK.

5.5 Keterjangkauan terhadap energi

Sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- minyak solar;
- bensin.

Kampung Long Pananeh II

Kayu bakar sebagai sumber energi sudah digunakan sejak lama dan tidak perlu dibeli. Minyak tanah digunakan sedikit rumah tangga untuk kompor dan lampu minyak tanah serta lampu strongkeng, bensin digunakan untuk bahan bakar ces dan solar digunakan untuk bahan bakar *genset* lampu penerangan. Bensin, minyak tanah dan solar yang sudah pernah digunakan sebelumnya dirasakan semakin sulit terjangkau. Harga bahan bakar ini akan semakin mahal bila musim kemarau.

5.6 Kondisi rumah penduduk

Seluruh rumah responden berdinding kayu, sekitar 80% beratapkan keping dan sisanya adalah atap seng. Sekitar 70% dari rumah berlantaikan papan, sebagian besar dari mereka terbuat dari kayu yang bukan kayu keras, walaupun beberapa diantaranya terbuat dari kayu keras seperti ulin dan jenis lainnya. Di kampung ini kita dapat menjumpai rumah dengan lantai keramik walaupun jumlahnya sangat sedikit. Dari rumah tangga yang disurvei, sekitar 80% memiliki aliran arus listrik. Listrik bersumber dari mesin kelompok, mesin pribadi dan atau menyambung dari pihak keluarga. Belum ada listrik PLN di sini.

Jarak antar rumah sangat rapat, yang disebabkan karena keterbatasan lahan untuk kampung sementara penduduk dan keluarga baru terus bertambah.

Hanya 1 rumah yang mempunyai WC dalam rumah. Hampir seluruh masyarakat buang air besar langsung di sungai. Di kampung ini tidak mungkin dibangun jamban (WC sungai) karena kondisi sungai yang berarus deras akan segera merusak jamban tersebut.

Kampung Long Pananeh II

5.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Meningkat, namun seluruh lahan adalah pinjaman	Sama, sejak 1972	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Sama saja	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Berfluktuasi	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Tetap; Lahan pinjaman	Anggota BPK
Luasan sawah	Tidak ada		Anggota BPK
Luasan kebun sayur	Tidak ada		Anggota BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Tetap; di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Luasan kebun karet	Tidak ada		Anggota BPK
Luasan kebun buah	Ada	Tetap; di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun kopi	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Kebun singkong	Ada	Berkurang	
Luasan peternakan	Ada	Tetap	Anggota BPK
Luasan hutan	Ada	Tetap; di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Hutan perawan (<i>tu'an hawu</i>)	Ada	Tetap; di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Hutan sekunder tua (<i>bele'ang</i>)	Ada	Bertambah; di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Hutan sekunder muda (<i>bele'ang</i>)	Ada	Tetap; Lahan pinjaman	Anggota BPK
Belukar tua (<i>bere'ang tacap</i>)	Ada	Tetap; Lahan pinjaman	Anggota BPK
Belukar (<i>koka</i>)	Ada	Tetap; Lahan pinjaman	Anggota BPK
Hutan rawa	Tidak ada		Anggota BPK
Hutan kerangas (<i>atub</i>)	Ada	Tetap; Lahan pinjaman	Anggota BPK
Hutan lindung	Ada	Baru; di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Akses kepada hutan	Berkurang	Lahan jauh di Sungai Kasau (lokasi kampung lama)	Anggota BPK
Jenis tumbuhan hutan/hewan	Tetap	Di Kasau, kampung lama, tidak ada yang memburu karena jauh	Petinggi
Perkembangan ekonomi kampung	Memburuk	Panen sering gagal Gaharu semakin jauh	Anggota BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Tidak ada institusi pendidikan yang berdiri di kampung ini. Sebagai salah satu kampung *resettlement* maka keberadaan sekolah adalah kolektif di salah satu kampung terdekat. Tingkat anak putus sekolah cukup tinggi, 7 dari 10 rumah tangga yang

Kampung Long Pananeh II

disurvei menyatakan ada anak yang putus sekolah pada tingkat SD dan SLTP. Menurut salah seorang guru SMP Tiong Bu'u yang juga adalah warga Long Pananeh II, alasan anak-anak putus sekolah adalah karena tidak ada biaya. Namun berdasarkan wawancara dengan responden rumah tangga, selain alasan biaya juga karena anak-anak tersebut malas untuk bersekolah. Umumnya yang putus sekolah adalah anak laki-laki yang bekerja membantu orangtuanya mencari gaharu atau menjadi penjaga gua sarang burung walet.

Tingkat pendidikan para guru tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Tingkat keaktifan guru dalam mengajar mengalami penurunan karena pada umumnya guru-guru berasal dari kampung atau daerah lain sehingga sering memilih meninggalkan tugas.

Menurut informasi guru, persentase kelulusan SD dan SMP mengalami peningkatan. Selain pendidikan formal, di kampung ini juga ada program pemerintah untuk pendidikan orang dewasa yaitu Program Paket A.

Tidak ada informasi rinci tentang siswa baru tahun ini. Diperkirakan jumlah siswa baru SMU berjumlah 27 orang dan jumlah siswa kelas II SMP 64 orang.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Anak-anak dari kampung Long Pananeh II dan kampung *resertlement* sekitar harus bersekolah di SD sampai dengan SMA di Tiong Ohang. Dalam 5 tahun terakhir di Tiong Ohang terjadi peningkatan jumlah sekolah, SMA yang ada adalah sekolah baru yang mulai difungsikan pada tahun ajaran 2002/2003. Namun SMA ini belum mempunyai gedung sendiri sehingga harus bersekolah pada sore hari dan meminjam gedung SD. Secara umum kondisi fisik sekolah di kawasan ini mengalami penurunan. Di Tiong Ohang juga tersedia taman kanak-kanak (TK) namun sarana dan prasarana untuk TK inipun belum lengkap sehingga Kelas 0 Kecil dan Kelas 0 Besar harus masuk bergantian.

Terjadi peningkatan dalam ketersediaan buku-buku dan alat-alat serta gaji/honor guru.

Bagi keluarga yang cukup mampu, setelah lulus SMP kebanyakan anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke Samarinda atau Melak.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	4; kolektif untuk kampung resetlement	Meningkat	Guru
Kondisi sekolah	-	Memburuk	Guru
Alat-alat dan buku-buku	-	Meningkat	Guru
Jumlah staf	-	Berkurang	Guru
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Guru
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Guru
Tingkat keaktifan guru	-	Berkurang	Guru
Persentase kelulusan	-	Meningkat	Guru
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Guru

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut Perawat Puskesmas Tiong Ohang, jenis penyakit yang ada di kampung ini adalah:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Diare, ispa
Orang dewasa	Rematik, ispa, hipertensi
Perempuan	Keputihan
Orang lanjut usia	-

Penyakit malaria yang umumnya diderita oleh laki-laki dewasa tingkat keseringannya adalah sama. Penyakit diare umumnya diderita oleh anak-anak berfluktuasi tergantung cuaca dan musim. Penyakit TBC umumnya diderita orang dewasa dan anak-anak mengalami penurunan.

Dalam bulan November 2002 - November 2003 tidak ada bayi dan ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Pada kurun waktu tersebut ada 4 orang bayi yang baru lahir dengan berat rata-rata 3 kg. Umur rata-rata ibu pada saat kehamilan pertama adalah 16 tahun.

Tidak ada anak berusia dibawah 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir, namun ada 1 orang dewasa yang meninggal pada usia 35 tahun.

Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit adalah 70 tahun. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di kampung ini adalah TBC dan jantung.

7.2 Fasilitas air bersih

Perawat menyampaikan bahwa semua penduduk kampung ini menggunakan air sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Sungai Mahakam yang membelah kampung-kampung sekitar digunakan sebagai tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Untuk kebutuhan rumah tangga, air diendapkan terlebih dahulu tanpa menggunakan kaporit.

Sumber air dari sisi jumlah tidak mengalami perubahan, namun mutunya berfluktuasi berdasarkan musim. Pada musim hujan air menjadi keruh, sedangkan pada musim kemarau air lebih jernih.

Rata-rata masyarakat di sini menyimpan atau menampung air di dalam drum atau gentong. Tidak tersedia alat untuk menyimpan air untuk kepentingan umum.

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Long Pananeh II tidak mempunyai fasilitas kesehatan di dalam kampung. Hanya dukun beranak yang dilatih oleh pemerintah yang tersedia.

Sarana kesehatan terdekat adalah Puskesmas Kecamatan di Tiong Ohang. Jarak dari Long Pananeh II ke Tiong Ohang adalah 30 menit jalan kaki atau 5 menit dengan perahu ces.

Tidak ada peningkatan pada jumlah fasilitas kesehatan, namun kondisi fasilitas kesehatan menjadi lebih baik. Bangunan puskesmas ini baru direnovasi atap dan dindingnya serta baru membeli tambahan barang (peralatan kesehatan).

Kampung Long Pananeh II

Jumlah staf di puskesmas ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir, bahkan beberapa puskesmas pembantu yang berada di bawah puskesmas ini tidak mempunyai tenaga kesehatan yang tetap. Ketersediaan obat-obatan dan gaji/honor pegawai mengalami peningkatan.

Menurut keterangan Kepala Adat, dalam 5 tahun terakhir tidak ada perubahan jumlah ahli pengobatan tradisional di kampung ini. Jumlah upacara pengobatan tradisional juga semakin menurun. Beliau menegaskan bahwa sekarang hampir tidak pernah lagi dilakukan upacara pengobatan di sini, walaupun dilaksanakan maka masyarakat biasanya meminta bantuan ahli pengobatan dari kampung lain.

Tidak ditentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk upacara pengobatan tradisional, imbal jasa diberikan berdasarkan keikhlasan.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	-	Sama saja	Perawat Puskesmas
Mutu air bersih	Air sungai	Berfluktuasi	Perawat Puskesmas
Mutu air sungai	-	Berfluktuasi	Perawat Puskesmas
Jumlah fasilitas kesehatan	Ada (PKM Kecamatan)	Sama	Perawat Puskesmas
Kondisi fasilitas kesehatan	Ada (PKM Kecamatan)	Lebih baik	Perawat Puskesmas
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Ada (PKM Kecamatan)	Sama	Perawat Puskesmas
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Ada (PKM Kecamatan)	Lebih besar	Perawat Puskesmas
Gaji/honor	-	Lebih besar	Perawat Puskesmas
Penyakit malaria	Ada	Sama	Perawat Puskesmas
Penyakit diare	Ada	Berfluktuasi	Perawat Puskesmas
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Perawat Puskesmas
Jumlah ahli pengobatan tradisional	Ada	Sama	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Tidak pernah	Menurun	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Menurut Kepala Adat, kejadian atau peristiwa penting yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir adalah:

No.	Bencana	Dampak
1	Kekeringan	Ladang gagal panen Transportasi sulit
2	Hama (belalang)	Padi kurang subur Panen gagal
3	Perubahan pemerintahan	Hadirnya program otonomi kampung membuat Long Pananeh II yang dianggap pendatang tidak mempunyai kuasa atas lahan dan sumber daya alam
4	Pembunuhan/perselisihan	Pembunuhan dan perselisihan terhadap warga yang menjaga gua sarang burung sempat membuat warga dan kampung sekitar tidak merasa aman

Kampung Long Pananeh II

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Long Penaneh II. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- tidak punya lahan. Lahan milik ada di Sungai Kasau yang letaknya sangat jauh;
- harga barang mahal;
- biaya sekolah mahal untuk bayar honor guru, guru kurang, mutu pelajaran kurang ;
- masyarakat tidak kompak;
- anak muda mulai tidak tahu adat.

Menurut tokoh masyarakat:

- rendahnya potensi alam, yang ada hanya rotan. Harga rotan rendah, transportasi sulit untuk distribusi (pemasaran) hasil alam(kebun/hutan);
- masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berladang, bangun rumah dan tebang kayu, karena berada dalam wilayah Tiang Ohang dan Krioq ;
- perhatian Pemkab Kubar lambat bila dibanding Kutai Kartanegara;
- pelayanan kesehatan tidak maksimal dan mahal;
- tidak ada alternatif usaha lain selain bertani;
- infrastuktur tidak ada, misalnya: air bersih, WC dan listrik.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Tingkat kohesivitas masyarakat dirasakan semakin menurun, salah satu indikatornya adalah berkurangnya frekuensi musyawarah antar warga. Indikator lain adalah menurunnya tingkat solidaritas antar warga terutama kepada rumah tangga kurang mampu. Kondisi seperti ini tentunya akan semakin menyulitkan kehidupan masyarakat kampung di masa depan.

Walaupun masyarakat merasa pemerintah semakin terbuka dari sisi informasi, namun kepedulian pemerintah dirasakan semakin buruk. Aksesibilitas masyarakat ke lingkungan luar kampung dirasakan semakin membaik karena adanya sarana transportasi baru.

Masyarakat merasa bahwa otonomi pemerintah daerah yang berimbas pada otonomi kampung berdampak kepada peningkatan ketegangan sosial terutama mengenai batas lahan dan batas kampung. Dengan adanya otonomi, kampung-kampung bersemangat untuk memperjelas batas wilayahnya. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan Kampung Long Penaneh II yang merupakan kampung *resettlement*.

Keadaan penghidupan masyarakat secara umum dirasakan semakin buruk karena lokasi gaharu semakin jauh dari kampung. Padahal gaharu adalah mata pencaharian paling penting di sini. Keadaan ini diperburuk dengan semakin seringnya gagal panen di ladang.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Long Pananeh II, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 10 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- anggota BPK;
- guru (sebagai pengganti komponen pendidikan/kepala sekolah);
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- perawat pada puskesmas kecamatan;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 2 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Lotaq

Jumlah rumah tangga: 109	Jumlah jiwa: 450
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 102	Jumlah KK: 111
Jumlah rumah tangga miskin: 11	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Anen D.	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Chandra Saputra	Jumlah SLTA: -
Nama Kepala BPK: Salmun	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 10 menit (sepeda motor)	Jumlah Pusban: 1
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 60 menit (sepeda motor)	Jumlah Polindes: -
Posisi administratif: Kecamatan Muara Lawa, Kab. Kutai Barat	
Posisi geografis: 115 ⁰ 45' BT, 0 ⁰ 32' LS	
Tanggal survei: 4 - 7 November 2003	

1. Sejarah Kampung¹

Menurut Kepala Adat, masyarakat yang kini tinggal di Lotaq merupakan keturunan dari masyarakat yang berasal dari Tementang atau Idatn. Kampung Lotaq sudah ada sejak sekitar 420 tahun yang lalu, dengan bukti bahwa hingga saat ini telah 6 kali ganti lamin, dan 1 lamin bisa mencapai umur 70 tahun.

¹ Informasi dari Kepala Adat.

2. Kelembagaan Kampung²

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- Lembaga Masyarakat Desa (LMD);
- Kelompok Tani;
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Sebelum tahun 1999, LKMD diketuai oleh Petinggi. Anggota LKMD sekarang ini berjumlah 13 orang, tapi belum ada pelantikan dari kecamatan. Badan Perwakilan Kampung dilantik 17 Oktober 2002 dengan anggota 5 orang. BPK telah melakukan konsultasi dengan masyarakat kampung sekali dalam sebulan, meskipun sejak pelantikan belum pernah mendapatkan insentif atau honor.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik diskusi	Keputusan
Pokok-pokok pembangunan kampung tahun 2003, menentukan skala prioritas pembangunan kampung	- Peningkatan kualitas sumber daya manusia - Pengelolaan pertanian
Rancangan peraturan kampung tahun 2003	- Tata tertib kampung - Pengelolaan dana dari pemerintah dan bantuan lain - Sanksi adat - Pungutan-pungutan kampung

Keputusan-keputusan diskusi tersebut belum dijalankan, baru pada tingkat draft atau rancangan.

Perkembangan kelembagaan musyawarah dalam 5 tahun terakhir bervariasi. Kualitas musyawarah semakin baik, tetapi tingkat dampak dari keputusan musyawarah masih sama saja. Sedangkan dari sisi intensitas, musyawarah semakin sering dilakukan musyawarah oleh masyarakat di kampung.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Semakin baik	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin sering	Ketua BPK

² Informasi dari Petinggi dan Ketua BPK.

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten³

3.1 Dukungan

Menurut petinggi, selama 5 tahun terakhir, bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung menurun dibandingkan dengan pada masa Kabupaten Kutai. Usulan-usulan pembangunan telah dimasukkan atau disampaikan pada saat musyawarah di kecamatan, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Alasan dari pemerintah kabupaten adalah karena kabupaten Kutai Barat adalah kabupaten baru, dana lebih banyak digunakan pada sektor infrastruktur. Tapi kenyataannya pada daerah-daerah yang ada wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), banyak proyek-proyek pemerintah masuk. DPRD tidak memperjuangkan Kampung Lotaq.

Berikut adalah daftar usulan kampung serta tanggapan dari pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Minta semenisasi jalan kampung 2003	Baru diajukan ke kabupaten, pihak kecamatan menyampaikan bahwa akan ada tim sukses untuk masalah ini
Listrik pada tahun 2003	
Air bersih	
Rehab gedung Sekolah Dasar	
Rehab Balai Kampung	

Berikut adalah daftar bantuan yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut BPK
1	Irigasi lahan sawah tahun 2003	Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1994, sebesar Rp. 700.000 setiap KK	Perbaikan jalan bantuan perusahaan
2	Rehab Puskesmas Pembantu (Pusban), tahun 2001	-	Perbaikan sarana ibadah, bantuan pengusaha
3	Reboisasi tanaman ekspor kayu meranti tahun 2002	-	Bantuan pada upacara adat
-	-	-	Makanan anak dan beras dari Care
-	-	-	Bantuan sapi dari Dinas Pertanian
-	-	-	Kesehatan anak sakit TBC dari Rio Tinto

Menurut Petinggi, reboisasi merupakan program dari Perusda. Pelaksanaan program menggunakan tenaga kerja dari masyarakat. Anggaran pendanaannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kehutanan. Reboisasi dilakukan dengan dua tahap yaitu: tahap pertama untuk penanaman dan tahap kedua untuk pemeliharaan. Lahan program reboisasi akan diserahkan ke kampung. Program lainnya yang masih dalam tahap perencanaan adalah program peningkatan kualitas jalan dari Lotaq ke Begai.

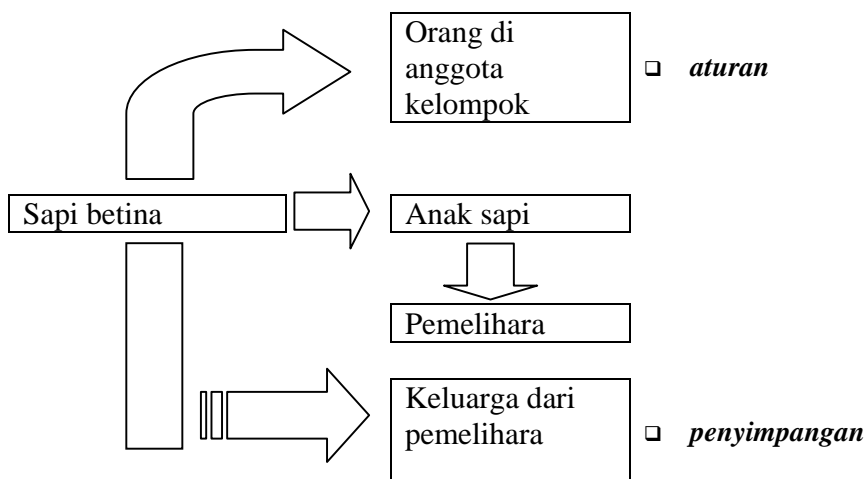
³ Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, Orang Kurang Mampu.

Kampung Lotaq

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, bantuan IDT dari pemerintah berdampak agak baik bagi masyarakat, dan cukup memuaskan masyarakat. Kekurangan dari program IDT adalah karena mereka hanya menerima IDT sekali saja, dan program IDT tidak ada kelanjutannya.

Di Lotaq pernah ada survei masalah peternakan dan perikanan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kampung Lotaq pernah menerima bantuan ternak sapi, tahap pertama mendapatkan bantuan 10 ekor sapi, dengan komposisi jantan 2 ekor, betina 10 ekor. Pembagian ternak secara gilir beranak. Aturannya adalah setelah sapi dipelihara oleh 1 anggota kelompok dan kemudian sapi beranak, maka sapi harus diserahkan ke 1 orang di anggota kelompoknya. Anak sapi menjadi hak yang memelihara sapi. Tapi yang terjadi adalah sapi betina setelah beranak, oleh orang anggota kelompok tidak digulirkan ke orang di anggota kelompoknya tapi digulirkan ke keluarga.

Aturan gilir beranak dan penyimpangan gilir beranak sapi betina:



3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Kurang dari sekali dalam sebulan atau 15 kali dalam setahun, petugas pelayanan dari kecamatan dan kabupaten datang ke kampung. Instansi yang pernah datang adalah:

- Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kutai Barat;
- Tim Pembangunan Kutai Barat (Dinas Sosial);
- Bapeda dan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah).

Hubungan masyarakat dengan pemerintah kabupaten dalam 5 tahun terakhir pada umumnya tidak begitu mengalami perubahan yang berarti. Terdapat perubahan yang mengarah menjadi lebih baik, namun ada yang mengarah lebih buruk.

Kampung Lotaq

Tabel berikut menjelaskan secara rinci perubahan tersebut:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih buruk
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih buruk

Dari sisi proyek yang turun ke kampung, perubahannya menjadi lebih buruk. Proyek berkurang dari sisi kuantitas. Sarana pendidikan masih jelek. Jalan yang digunakan saat ini merupakan pembangunan pada masa Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat memperoleh informasi tentang program pemerintah melalui kunjungan dari pemerintah. Informasi pembangunan diperoleh pula dari *Handy Talky (HT)*. Di Lotaq masih terdapat 2 *HT* yang diaktifkan, yang jangkauannya sampai ke Barong Tongkok, Bentas, dan Damai. Informasi lain didapatkan dari radio dan televisi.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke Pemerintah Kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian Pemerintah Kabupaten	Lebih buruk	Ketua BPK
Pelayanan Pemerintah Kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Lebih buruk	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Menurun	Petinggi

4. Sosial Budaya⁴

4.1 Perpindahan penduduk

Tabel berikut ini menjelaskan perpindahan penduduk yang terjadi dalam 5 tahun terakhir:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan meninggalkan kampung
Jangka waktu pendek atau sementara	Sekitar 5 orang	Kerja di PT. Truba Indo
Waktu panjang atau selamanya	Tidak ada	-

⁴ Informasi dari Kepala Adat, Petinggi, Orang Kurang Mampu, Dukun Beranak.

Kampung Lotaq

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilakukan di Lotaq adalah:

- *kuangkai*, acara terakhir dalam upacara adat kematian Suku Benuaq. Dimana tulang belulang dibongkar dan dikumpulkan serta dibawa naik ke dalam rumah atau *lamin*, ditaruh di atas dipan atau *pelangkaq*. Dilaksanakan selama tiga kali 7 hari kelipatannya;
- *nalitn tautn*, upacara memperbaiki kondisi alam selama 1 tahun;
- *belian sentiyu*, maksudnya untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh seseorang;
- *belian bawe*, lamanya sehari semalam. Penyembahan kepada dewa (*nyahuq timang, juata tonoi*) dengan biaya 1 ekor babi, 2 ekor ayam dan beras padi/pulut secukupnya. Alat/ramuannya: *longan ragag, ulap antek, ringit* daun kelapa, *kabung* daun enau, *tanoh* buah pinang dan *wiru* pelepang pinang. *Timai*, pisau bagi anak laki-laki, dan lading bagi anak perempuan. Bahan makanan (*kelelayakng*), pinggan, tong, kain, dan uang semampunya.

Perubahan-perubahan upacara adat sekarang ini dibandingkan dengan masa lalu, hanya pada sisi gotong royong upacara adat. Saat ini gotong royong upacara adat semakin lemah. Muda mudi tidak mau taat lagi dengan orang tua. Kurang berminat pada gotong royong untuk upacara adat.

Dari sisi waktu, bahan-bahan, dan tujuan upacara adat tidak ada perubahan antara upacara adat masa lalu dengan upacara adat saat ini. Perkembangan terakhir, tidak ada generasi muda di Lotaq yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari orang tua tentang pengetahuan pengobatan secara adat, hukum adat, cara pengelolaan hutan lahan, dan lain-lain.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, dalam 5 tahun terakhir tingkat kerjasama antar masyarakat menurun. Kaum muda tidak taat lagi dengan orang tua. Penurunan tingkat kerjasama terindikasi pada sedikitnya jumlah masyarakat yang ikut dalam gotong royong. Dalam setiap gotong royong, paling banyak hanya diikuti kurang dari separuh dari total masyarakat. Bentuk gotong royong yang dilakukan dalam 12 bulan terakhir ini adalah:

- tanam padi;
- nebas ladang;
- membersihkan lingkungan kampung.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, dalam 5 tahun terakhir ini, tingkat kerjasama/solidaritas masyarakat dalam upacara adat, gotong royong di ladang, dan lain-lainnya menurun. Indikasi menurunnya kerjasama dan solidaritas diantaranya selama ini orang tidak mampu jika mengalami kesulitan ekonomi atau masalah-masalah kehidupan lainnya, hanya mendapatkan bantuan dari keluarga. Tetangga yang tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya.

Dalam hal terjadi kekurangan bahan makanan secara merata di kampung, masyarakat meminta bantuan ke kecamatan atau ke yayasan-yayasan mana pun yang bersedia membantu.

Kampung Lotaq

4.4 Konflik

Di Lotaq hanya terdapat satu jenis konflik, yaitu konflik rumah tangga. Konflik inipun intensitasnya jarang. Perkembangan konflik keluarga tetap sama. Jenis konflik lainnya yaitu konflik lahan, konflik suku, konflik agama, dan konflik air/sumber daya alam tidak pernah terjadi di Lotaq. Perubahan konflik-konflik tersebut tetap sama. Konflik air/sumber daya alam tidak terjadi karena tidak ada perusahaan yang masuk dan beroperasi di Lotaq.

Mekanisme penyelesaian konflik di kampung diselesaikan melalui lembaga adat dengan mempergunakan dasar hukum adat. Terhadap konflik yang terjadi di atau dengan pihak luar, penyelesaian harus melewati hukum adat dan diputus dengan dasar hukum adat. Konflik yang tidak dapat diselesaikan lembaga adat, akan diteruskan ke Kepala Adat Besar di Kecamatan. Kalau di tingkat Kepala Adat Besar tidak selesai maka penyelesaian konflik diteruskan ke pemerintah kecamatan. Di tingkat kampung, lembaga adat telah berhasil menyelesaikan lebih dari separuh konflik yang terjadi di kampung, demikian menurut Kepala Adat.

Responden rumah tangga kurang mampu tidak mengetahui perubahan jumlah konflik dalam 5 tahun terakhir, dan tidak tahu pula tentang ada dan tidaknya konflik di kampung.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Masalah utama yang dihadapi rumah tangga kurang mampu adalah:

- tidak adanya lapangan kerja;
- mahalnya harga sembilan bahan pokok rumah tangga.

Selama 5 tahun terakhir ini, responden rumah tangga kurang mampu tidak ada merasakan perubahan sama sekali. Kondisi ekonomi keluarga tetap tidak menentu, bahkan cenderung menjadi lebih buruk. Mereka tidak mempunyai kemampuan mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Biaya pendidikan didapatkan berkat bantuan dari keluarga, sedangkan biaya kesehatan, dibantu dengan adanya kartu askes. Namun informasi tentang askes ini perlu diklarifikasi lebih lanjut karena akses rumah tangga kurang mampu ke program askes sepertinya kurang jelas, kecuali bila yang dimaksudkan adalah kartu JPS (Jaring Pengaman Sosial).

Di tingkat pengambilan keputusan di kampung, rumah tangga kurang mampu tidak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di kampung. Menurut responden rumah tangga kurang mampu, bantuan yang diperlukan dari pihak luar adalah adanya kesempatan bekerja, sehingga dari hasil kerja diharapkan mampu mencukupi keperluan kehidupan keluarga.

4.6 Hiburan

Hiburan sehari-hari masyarakat di Lotaq adalah menonton televisi dan VCD. Di Lamin Adat terdapat televisi dan VCD yang biasa ditonton bersama. Antena parabola model terbaru memungkinkan televisi mampu menerima siaran-siaran dari televisi dalam negeri dan juga siaran-siaran televisi luar negeri. Hiburan tarian adat dan upacara adat hanya sekali-kali dinikmati jika sedang ada tarian dan upacara adat.

Kampung Lotaq

4.7 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Semakin lama	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Gotong royong upacara adat	-	Lemah	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama dengan tujuan	Kepala Adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Menurun	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Tidak tahu	Kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Menurun	Kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam⁵

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang paling luas di Lotaq adalah kebun rotan sega dan rotan pulut merah. Luasannya mencapai lebih dari setengah total luas kampung.

Tata guna lahan selengkapnya serta perubahannya sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- ladang, perubahannya tetap. Pekerjaan masyarakat hanya membuat ladang secara manual tanpa dibantu dengan alat-alat mekanik pertanian;
- sawah, perubahannya tetap. Lahan sawah belum tertata dengan baik, terutama masalah penyediaan air dan pembangunan irigasinya. Lokasi sawah di Lotaq cukup luas;
- kebun sayur, perubahannya tetap, terdiri dari kebun sayur di pekarangan dan kebun sayur pada kelompok masyarakat;
- kebun rotan, perubahannya bertambah. Rotan telah dibudidayakan oleh masyarakat dengan cara pembuatan pembibitan rotan;
- kebun karet, perubahannya tetap, penjualan karet belum cukup banyak menghasilkan uang;
- *simpukng/lembo*/buah, perubahan tetap, hanya terbatas pada konsumsi di tingkat keluarga, belum dilakukan penjualan dalam skala besar;
- kebun kakao, tidak ada, masyarakat belum mengetahui cara menanamnya;
- hutan, perubahannya berkurang karena dibuat ladang dan sebagian digunakan sebagai tempat eksploitasi perusahaan tambang batu bara PT. Truba Indo.

⁵ Informasi dari Ketua BPK, Petinggi, Orang Kurang Mampu, Keluarga.

Kampung Lotaq

Jenis hutan dan bera yang ada di Lotaq adalah:

- hutan perawan;
- hutan sekunder tua (>30 tahun);
- hutan sekunder muda (10-30 tahun);
- belukar tua (5-10 tahun);
- belukar (2-5 tahun);
- hutan rawa;
- hutan kerangas.

Di Lotaq tidak ada hutan lindung. Dalam 5 tahun luasan hutan perawan dan hutan sekunder tua tidak berubah. Luasan hutan sekunder muda dan belukar tua berkurang karena sebagian dibuat berladang. Belukar, bertambah karena dibuat berladang dengan cara rotasi atau perputaran ladang di tempat. Hutan rawa luasannya tetap, belum pernah diolah/dikerjakan karena kendala irigasi dan teknis pengelolaan. Hutan kerangas sering ditanami tapi kurang memberikan hasil.

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi di kawasan hutan:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	- Kebakaran hutan - Perusahaan mengambil hutan	Tidak menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat
Hutan lebih mudah diakses sehingga memudahkan orang menebang	Belum ada peraturan dari pemerintah atau Perda	Kayu lebih cepat habis
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	- Kebakaran hutan - Diambil oleh perusahaan - Belum ada peraturan	Jenis tumbuhan dan hewan makin habis

5.2 Pengelolaan hutan dan IPKK/HPHH

Menurut Petinggi, di Lotaq tidak terdapat jenis hutan yang dilindungi termasuk hutan yang dilindungi secara lokal oleh hukum adat. Tidak terdapat lokasi hutan yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan pembuatan ramuan rumah dan ramuan upacara adat.

Karena tidak ada hutan yang dilindungi dan tidak ada peraturan kampung, sehingga memungkinkan orang-orang dari Lotaq menebang pohon di hutan. Bahkan orang dari luar Lotaq bisa menebang pohon yang ada di wilayah hutan Lotaq. Aparat kampung tidak bisa melarang penebangan, sepanjang penebangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris atau pemilik dengan orang yang menebang pohon hutan.

Pemerintah kampung dan masyarakat Lotaq tidak pernah mengajukan ijin konsesi IPKK atau HPHH atau IPHH. Sehingga tidak pernah ada musyawarah tentang proses pengambilan keputusan tentang konsesi. Pohon telah habis pada saat pemerintahan masa orde baru. Pada masa orde baru telah ada penebangan pohon hutan oleh perusahaan, namun kampung atau masyarakat tidak pernah diberikan kompensasi berupa *fee* atau kompensasi lainnya. Pemerintah kampung dan orang-orang kampung hanyalah sebagai penonton saat perusahaan melakukan penebangan pohon di hutan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh responden kurang mampu, bahwa pemerintah kampung dan orang-orang di kampung tidak pernah mengajukan ijin konsesi kayu, oleh karena itu tidak mempunyai penghasilan dari konsesi kayu.

Kampung Lotaq

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Seluruh rumah tangga di Lotaq memiliki keterjangkauan terhadap lahan, baik dari sisi hak, jarak, dan ketersediaan. Dalam 5 tahun terakhir, keterjangkauan terhadap lahan meningkat karena terdapat rumah tangga yang membuka lahan baru di rimba, bahkan orang dari luar kampung pernah membuat ladang di Lotaq.

Seluruh rumah tangga di Lotaq memiliki lahan, dan hingga saat ini belum terjadi penjualan lahan baik penjualan secara resmi maupun tidak resmi oleh orang-orang di Lotaq, kecuali di Dusun Titip, sejak Februari 2003 terdapat lahan yang sudah dijual oleh rumah tangga ke PT. Truba Indo.

5.4 Perladangan

Sejak 5 tahun terakhir, lebih dari setengah responden rumah tangga menanam padi. Namun persentasenya terus menurun dari tahun ke tahun. Tahun 1999 misalnya, jumlah responden rumah tangga yang berladang adalah 64%, namun pada tahun 2003 turun hingga 46%. Terdapat sebagian kecil (3 - 6%) masyarakat yang membuat sawah dan tidak ada yang bertanam di rapak.

Hampir semua petani menggarap dan bertanam di lahan sendiri, hanya sedikit (6%) yang bertanam di lahan bebas.

Bibit padi yang ditanam bervariasi antara 1 - 7,5 kaleng padi. Lebih dari separuh mengaku gagal panen dan hanya sekitar 42% yang menyatakan bahwa hasil panen mereka mencukupi kebutuhan akan beras hingga panen berikutnya.

Hampir semua responden mengaku tidak mendapatkan bantuan beras bantuan dan hanya 3% yang menyatakan mendapatkan beras bantuan dari perusahaan. Sebagian besar ladang dibuat di bekas ladang yang berusia dibawah 10 tahun, kemudian bekas ladang yang berusia lebih dari 20 tahun dan hutan rimba. Jarak ladang hampir seluruhnya dapat ditempuh kurang dari 60 menit jalan kaki dari Lotaq. Kecuali sebagian kecil ladang yang terletak jauh dari kampung, ditempuh dengan sepeda motor atau menumpang mobil perusahaan PT. Truba Indo sekitar 20 menit dari kampung.

5.5 Pendapatan uang

Pada umumnya pendapatan utama responden rumah tangga adalah dari gaji sebagai pekerja pada PT. Truba Indo. Pendapatan lainnya pada rumah tangga di Lotaq diantaranya berasal dari:

- penjualan ikan dari hasil tangkapan di Sungai Lawa atau di anak Sungai Lawa;
- hasil dari warung-warung rumah tangga;
- honor guru dan perangkat kampung;
- rotan (pencari, pengumpul rotan);
- ojek sepeda motor;
- penjualan ternak babi;
- pandai besi pembuatan alat pertanian;
- lain-lain (buruh tani, buruh bangunan, ojek ces).

Seorang penjual rotan menyatakan bahwa penjualan rotan dilakukan dengan mengumpulkan rotan di kampung dari orang-orang kampung, kemudian dijual ke Cempedas. Rotan yang dijual masih dalam bentuk bahan dasar dengan harga Rp.

Kampung Lotaq

800/kilo, kemudian setelah dibeli pengrajin rotan di Cempedas dan dijual dalam bentuk rotan olahan berupa kursi rotan, meja rotan, anjat, dan lain-lain kerajinan dan *mebeler* dari rotan.

Kerajinan pandai besi di Lotaq memproduksi alat-alat pertanian, dengan tenaga kerja 3 orang. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya tempat pemasaran hasil serta tidak memiliki modal bagi pengembangan usahanya. Harapan dari pandai besi agar diberi bantuan modal dari pemerintah atau perusahaan bagi pengembangan usahanya.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Di Lotaq belum ada pasar. Kondisi kampung belum memungkinkan untuk dibangun pasar. Pasar terdekat di Muara Lawa buka setiap hari Rabu. Ongkos transportasi reguler ke Muara Lawa adalah Rp. 5000 sekali jalan, dengan jarak 30 menit dari kampung bermobil atau ojek. Meskipun demikian, kebutuhan sehari-hari bahan keperluan dapur dan rumah tangga dapat dipenuhi dengan membeli di warung-warung yang ada di Lotaq.

Kondisi jalan kampung sekarang ini kurang baik dan perubahannya dalam 5 tahun terakhir menjadi lebih baik. Jalan pernah tidak dapat dilalui mobil pada saat PT. Truba Indo tidak beroperasi, setelah PT. Truba Indo beroperasi jalan diperbaiki lagi dan bisa dipakai. Meskipun masih berupa jalan tanah dan belum ada pengerasan jalan, kondisi jalan tetap berat dilalui pada saat hujan. Jalur sungai kondisi sekarang ini baik, kecuali pada saat kemarau, sungai dangkal dan tidak dapat dilalui. Perubahan jalur sungai dalam 5 tahun terakhir ini menjadi lebih baik.

Dalam 5 tahun terakhir, perubahan waktu perjalanan yang diperlukan ke kecamatan, kabupaten dan kota, menjadi lebih cepat. Alat transportasi yang tersedia di Lotaq adalah taxi (mobil angkutan) dan ces. Ongkos taxi reguler ke Muara Lawa atau Lambing adalah Rp. 5000 sekali jalan. Sedangkan ongkos ces berkisar antara Rp. 20.000 - Rp. 30.000 sekali jalan.

5.7 Keterjangkauan energi

Di Lotaq hanya dipakai 2 macam sumber energi, yaitu:

- kayu bakar, yang sudah pernah digunakan sebelumnya, dan dari sisi harga serta ketersediaan masih terjangkau;
- minyak tanah, baru digunakan dalam 5 tahun terakhir. Keterjangkauan dari sisi harga dan ketersediaan masih terjangkau. Harga minyak tanah di Lotaq pada saat survei adalah sekitar Rp. 1.500/liter.

Sumber energi listrik PLN dan gas LPG belum digunakan di Lotaq. Beberapa rumah tangga di Lotaq menggunakan sumber energi listrik dari mesin generator. Beberapa rumah tangga bisa membeli mesin generator setelah bekerja di PT. Truba Indo.

Kampung Lotaq

5.8 Kondisi rumah

Rumah penduduk berada di kiri mudik Sungai Lawa anak Sungai Kedang Pahu. Sebagian rumah terbuat dari kayu selain ulin atau bengkirai. Sekitar 48% atap responden rumah tangga terbuat dari keping, sekitar 30% terbuat dari seng, sisanya adalah sirap dan daun rumbia.

Hampir semua rumah responden rumah tangga berdinding papan kayu, hanya kira-kira 6% yang memakai bilik bambu. Lantai umumnya terbuat dari kayu/papan yang bukan ulin dan bengkirai.

Belum ada listrik dari PLN di kampung ini. Malahan sekitar 60% responden rumah tangga rumahnya belum dialiri listrik, sekitar 30% memakai listrik pribadi. Sisanya memanfaatkan listrik kelompok dan listrik kampung.

Ukuran rumah sekitar 6 x 10 meter. Hampir seluruh rumah tangga menggunakan WC sungai/jamban di Sungai Lawa dan hanya sedikit yang menggunakan WC darat.

5.9 Resume trend perubahan

Komposisi perubahan	Kondisi saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Meningkat	Petinggi
Kondisi jalan	Kurang baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan simpukng/buah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun koko	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder tua	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder muda	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan rawa	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan lindung	Tidak ada	-	Ketua BPK
Akses kepada hutan	Mudah	Berkurang	Ketua BPK
Jenis tumbuhan dan hewan	Banyak yang hilang	Berkurang	Ketua BPK
Perekonomian kampung	Hasil dari rotan, kerja perusahaan	Membaik	Ketua BPK

6. Pendidikan⁶

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar 15% dari responden rumah tangga mengakui kalau ada anak putus sekolah dalam keluarga mereka. Umumnya mereka putus sekolah pada tingkat SD dan SMP karena kekurangan biaya dan rendahnya motivasi belajar. Terdapat beberapa murid sekolah dasar yang meninggalkan sekolah dalam waktu sementara, dengan alasan membantu orang tua kerja di ladang. Sebagian besar murid sekolah dasar belajar sebagaimana mestinya sesuai dengan kegiatan belajar di sekolah.

Menurut kepala sekolah, perubahan kualitas pendidikan dalam 5 tahun terakhir, dari sisi tingkat pendidikan guru menjadi lebih baik. Keaktifan guru dalam mengajar menjadi lebih aktif. Terjadi pula peningkatan jumlah orang yang dapat membaca dan menulis. Pemerintah mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat melalui program pemerintah, diantaranya berupa pengkaderan petugas posyandu. Persentasi kelulusan murid, sama saja. Tingkat kelulusan murid yang mengikuti ujian mencapai 100% lulus. Artinya dari semua murid yang mengikuti ujian, semuanya lulus ujian. Sedang jumlah murid yang mendaftar tahun ini sebanyak 13 orang.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Lotaq hanya terdapat 1 Sekolah Dasar, yaitu sekolah dasar negeri 001 Lotaq. SD ini terletak 200 meter dari pertengahan kampung. Sedangkan anak yang akan bersekolah di taman kanak-kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), harus pergi ke Lambing yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Lotaq. Di SDN 001 Lotaq tidak terdapat murid yang berasal dari luar Lotaq.

Perubahan keterjangkauan terhadap pendidikan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: jumlah sekolah sama saja. Kondisi sekolah berkurang. Telah beberapa kali diajukan usulan renovasi ke pemerintah, tapi tidak pernah direalisasi. Alat-alat dan buku-buku, berkurang. Jumlah staf, sama saja. Sedangkan gaji guru/honor menjadi lebih besar.

6.3 Resume trend perubahan

Komposisi perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama saja	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah staf	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Lebih baik	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih aktif	Kepala Sekolah
Persentasi kelulusan	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat orang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

⁶ Informasi dari Kepala Sekolah Dasar.

7. Kesehatan⁷

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut Dukun Beranak, jenis penyakit yang ada di Lotaq adalah:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	Demam
Orang dewasa	Demam
Perempuan	Keputihan
Orang usia lanjut	TBC

Tingkat keseringan terjangkitnya penyakit:

- penyakit malaria keseringan keterjangkitannya meningkat, dan kelompok umur anak-anak dan orang dewasa yang paling sering mungkin terkena;
- penyakit diare, tingkat keseringan terjangkitnya berfluktuasi, dan kelompok umur anak-anak yang paling mungkin terkena;
- penyakit TBC, tingkat keseringan terjangkitnya menurun, dan orang usia lanjut yang paling sering terkena.

Dalam 12 bulan terakhir, jumlah orang yang meninggal hanya 1 orang, dengan umur di atas 60 tahun. Diperkirakan penyebab kematian terutama memang usianya sudah lanjut dan juga terkena bermacam-macam penyakit, mulai penyakit demam ringan sampai penyakit TBC.

Jumlah kelahiran dalam 12 bulan terakhir adalah 2 bayi, dengan berat rata-rata 2,5 kg. Tidak terdapat bayi yang meninggal, demikian pula tidak terdapat ibu yang meninggal saat melahirkan. Umur rata-rata ibu pada saat kehamilan pertama antara 16 - 20 tahun. Tidak terdapat anak di bawah usia 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir.

7.2 Fasilitas air bersih

Separuh dari total rumah tangga dapat mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dari sumur timba. Dari sisi jumlah dan mutu air, jumlah air di Lotaq berfluktuasi. Perubahan terjadi karena sumber air bersih tergantung pada musim, saat musim panas jumlah air berkurang, saat musim hujan jumlah air meningkat. Mutu air selama ini tetap sama saja.

Pada musim kemarau dimana sumber air timba sudah tidak keluar airnya, rumah tangga di Lotaq tidak pernah mendapatkan bantuan air bersih dari luar. Air bagi keperluan memasak dan merebus terpaksa diambil dari Sungai Lawa yang dipakai mandi, cuci, dan kakus (MCK), kondisi airnya sangat keruh dan kadang terlihat berbuih, sehingga saat kemarau penyakit diare sering menjadi wabah.

Lotaq pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat penyimpanan air bagi kepentingan umum. Di tingkat rumah tangga penyimpanan air dilakukan di ember-ember kecil dan gentong kecil.

⁷ Informasi dari Dukun Beranak, Kepala Adat.

Kampung Lotaq

7.3 Kebersihan Kampung

Kampung nampak kurang bersih, di beberapa tempat terutama di sekitar warung, banyak terdapat tumpukan sampah plastik. Kondisi jalan kampung yang hanya berupa tanah akan menjadi becek dan tidak nyaman dilalui pada saat hujan. Terlebih jalan poros kampung, jalan tanah sudah banyak kubangan-kubangan bekas ban mobil dan motor, dan sepertinya pemerintah kampung sudah kewalahan mengatasi kondisi jalan poros ini. Terdapat rumah-rumah di bagian atas kampung di jalan ke Lambing yang tidak begitu terawat.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Lotaq terdapat fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pusban), Polindes dan dukun beranak. Pusban dan Polindes didanai oleh pemerintah. Pasien yang berobat hanyalah orang-orang dari Lotaq, tidak terdapat warga kampung lain yang berobat secara medis di Lotaq. Hanya ditemui seorang dari luar kampung yang akan berobat melalui pengobatan secara tradisional.

Fasilitas kesehatan terdekat di luar kampung adalah Puskesmas Muara Lawa, yang berjarak sekitar 10 kilometer atau 25 menit perjalanan memakai mobil atau ojek, dengan ongkos Rp. 10.000 sekali jalan.

Perubahan keterjangkauan terhadap perawatan kesehatan selama 5 tahun terakhir menurut dukun beranak adalah sebagai berikut:

- jumlah fasilitas kesehatan, sama saja;
- kondisi fisik kesehatan, lebih baik;
- jumlah staf kesehatan, lebih banyak;
- ketersediaan obat-obatan dan peralatan, tidak diketahui;
- gaji/honor petugas kesehatan, tidak diketahui.

Di Lotaq terdapat 4 orang ahli pengobatan tradisional. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah ahli pengobatan tradisional sama saja. Upacara pengobatan tradisional hanya dilakukan kurang dari sekali dalam sebulan, itu pun tergantung pada ada tidaknya orang yang sakit dan berobat secara tradisional. Biaya pengobatan secara tradisional berkisar antara Rp. 100.000 - Rp.150.000. Perubahan upacara pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir ini menurun karena sudah ada rumah sakit dan orang yang sakit cenderung berobat ke rumah sakit.

Kampung Lotaq

7.5 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air	Air timba	Berfluktuasi	Dukun beranak
Mutu air	Air timba	Sama saja	Dukun beranak
Mutu air sungai	-	Berkurang	Dukun beranak
Jumlah fasilitas kesehatan	Ada	Sama saja	Dukun beranak
Kondisi fasilitas kesehatan	Ada	Lebih baik	Dukun beranak
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Ada	Bertambah	Dukun beranak
Jumlah obat-obatan dan peralatan	Ada	Tidak tahu	Dukun beranak
Gaji/honor	Ada	Tidak tahu	Dukun beranak
Penyakit malaria	Ada	Meningkat	Dukun beranak
Penyakit diare	Ada	Berfluktuasi	Dukun beranak
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Dukun beranak
Jumlah ahli pengobatan tradisional	4 orang	Sama saja	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Kurang dari sekali dalam sebulan	Menurun	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan	Banyak pohon buah mati, kebun rotan habis, hilang mata pencaharian
2	Kelaparan	Banyak masyarakat sakit dan anak-anak kurang gizi
3	Banjir	Tanaman habis mati, gagal panen
4	Kekeringan	Banyak yang terkena muntaber, sakit perut
5	Hama babi hutan, burung pipit, dan kera, tahun 1997	Tanaman banyak rusak dan mati, gagal panen

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Lotaq. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- masalah ekonomi terutama modal usaha, saat ini tidak memiliki modal usaha yang memadai. Rendahnya peluang pasar bagi pengembangan usaha masyarakat;
- rendahnya sumber daya manusia, terutama pendidikan orang dewasa tentang masalah ekonomi;
- kurangnya sarana pertanian modern untuk pembukaan lahan dan sawah, sarana mekanik (*hand sprayer*) dan obat hama.

Kampung Lotaq

Menurut masyarakat biasa:

- sumber daya manusia dari segi pendidikan penduduk sebagian besar hanya sampai Sekolah Dasar;
- sarana jalan dan kesehatan yang kurang mendukung masyarakat;
- tidak ada tenaga medis di kampung.

Menurut tokoh masyarakat:

- rendahnya kualitas sumber daya manusia: pendidikan, penyuluhan, diklat, magang, pendidikan informal bagi masyarakat;
- peningkatan kesadaran budaya yang menguntungkan;
- sarana dan prasarana kampung, peningkatan persediaan fasilitas kampung, jalan, listrik, pusban (perawat, bidan dan obat-obatan).

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Kualitas dan frekuensi musyawarah dirasakan meningkat. BPK sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk memperkuat lembaga musyawarah sudah bekerja. Persepsi tentang hubungan dengan pemerintah kabupaten bervariasi. Jarak ke pemkab dirasakan semakin dekat, pelayanan dan keterbukaan informasi dirasakan semakin membaik. Sedangkan dari sisi partisipasi, bantuan dan tingkat kepedulian pemerintah dirasakan semakin menurun.

Keadaan konflik tidak mengalami perubahan. Konflik yang ada hanyalah konflik keluarga yang jarang terjadi, hal ini tidak mengalami perubahan. Tingkat kerjasama antar masyarakat dirasakan semakin menurun. Hal ini dapat dilihat juga pada tingkat gotong royong dalam pelaksanaan upacara adat yang juga dirasakan menurun.

Infrastruktur ekonomi seperti jalan dirasakan semakin membaik. Aksesibilitas terhadap hutan meningkat. Luasan hutan menurun, sementara kebun rotan meningkat. Dalam 5 tahun terakhir muncul pendapatan baru yang saat ini menjadi sumber pendapatan utama masyarakat yaitu bekerja di perusahaan tambang batu bara.

Fasilitas pendidikan cenderung menurun. Jumlah sekolah tidak berubah, tetapi kondisi sekolah dan peralatan semakin memburuk. Namun, gaji dan pendidikan guru dirasakan meningkat. Jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis meningkat.

Fasilitas kesehatan dirasakan meningkat. Walaupun jumlah fasilitas kesehatan tidak berubah, namun kondisinya dirasakan membaik dan jumlah staf pelayan bertambah. Tingkat penyakit malaria meningkat, penyakit TBC menurun, sementara penyakit diare berfluktuasi tergantung kondisi air Sungai Lawa. Frekuensi upacara adat untuk pemulihan kesehatan cenderung menurun, namun pelayanan kesehatan tradisional tidak berubah.

11. Lampiran

Survei di Kampung Lotaq dilaksanakan pada tanggal 4 - 7 November 2003. Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Lotaq, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 19 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarainya adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- dukun beranak;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Muara Nayan

Jumlah rumah tangga: 77	Jumlah jiwa: 317
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 33	Jumlah KK: 56
Jumlah rumah tangga miskin: 10	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah SD: -
Nama Petinggi: Setiawan	Jumlah SLTP: -
Nama Kepala Adat: Jamaluddin	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1.5 jam (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 5 jam (sepeda motor atau mobil)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Jempang, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 116 ⁰ 5' BT, 0 ⁰ 39' LS	
Tanggal survei: 13 - 15 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Muara Nayan sudah berdiri lebih dari 150 tahun lalu. Sampai dengan sekarang sudah terjadi pergantian lamin sebanyak 3 kali. Masyarakat percaya bahwa nenek moyangnya berasal dari Lamin Kerayaq Muara Bomboy yang berjarak 10 kilometer dari kampung, tepatnya berada di Sungai Ohong.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani;
- Koperasi.

Kampung Muara Nayan

Badan Perwakilan Kampung (BPK) dibentuk pada tahun 2002. Menurut Ketua BPK, lembaganya melakukan konsultasi dengan masyarakat minimal sebanyak sekali dalam setahun.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Rencana Pembentukan ternak sapi	Diputuskan ada satu kelompok ternak sapi
Rencana pembuatan aturan kampung	Studi banding dahulu dengan BPK di kampung lain dan menunggu pelatihan dari kecamatan

Menurut keterangan beberapa warga masyarakat yang diwawancarai pada tingkat rumah tangga, pengambilan keputusan dan informasi tentang ternak sapi tidak jelas. Pengelola yang ditunjuk untuk mengelola ternak dianggap tidak transparan karena hanya orang-orang yang dekat dari Petinggi dan Ketua BPK.

Menurut Wakil Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir tidak ada perubahan pada musyawarah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan masih baik. Tetapi menurut responden rumah tangga kurang mampu, mereka tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama	Wakil Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Wakil Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Sama	Wakil Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Muara Nayan pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Air Bersih	Belum ada jawaban
Pencetak sawah	Belum ada jawaban
Rehab Kantor Kepala Kampung	Belum ada jawaban
Bantuan sekolah	Belum ada jawaban

Kampung Muara Nayan

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut ketua BPK
1	Rehab rumah penduduk dari pemerintah pada th 2003	Bantuan beras bulog dari Camat untuk menambah makanan	Tidak ada
2	Pembuatan tempat dan bantuan mesin penggiling padi pada th 2001-2002	-	-
3	Proyek ternak sapi dari pemerintah propinsi dengan bantuan 25 ekor sapi pada th 2003	-	-

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, kunjungan dari pihak pemerintahan ke Muara Nayan rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Instansi yang pernah datang adalah:

- Dinas Kehutanan;
- Dinas Pertanian;
- Dinas Kesehatan;
- Camat.

Hubungan masyarakat dengan pemda kabupaten dalam 5 tahun terakhir telah mengalami perubahan. Pada umumnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik.

Secara rinci perubahan dijelaskan pada tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Sama saja
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat mengetahui informasi tentang program-program pemerintah dari petinggi. Sedangkan petinggi mendapatkan informasi dari kantor kecamatan pada waktu berkunjung. Selain itu, informasi juga didapatkan lewat kunjungan yang dilakukan oleh petugas pemerintah baik dari kabupaten maupun dari propinsi. Untuk mengakses informasi dari luar, masyarakat menggunakan radio dan televisi. Alat komunikasi yang ada di kampung hanya pesawat HT.

Kampung Muara Nayan

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Sama saja	Wakil Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Wakil Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Lebih baik	Wakil Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Wakil Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Wakil Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Menurun	Petinggi

4. Sosial budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perpindahan penduduk seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	Tidak ada	-
Waktu panjang atau selamanya	50 KK	- Pendidikan anak - Lahan tidak subur - Tadinya kampung sangat terisolasi

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Muara Nayan adalah:

- upacara *kwangkai* yang merupakan bagian dari adat kematian;
- upacara *beliatn* untuk mengobati orang sakit;
- upacara *nalitn taun*.

Tidak ada perubahan praktek upacara adat saat ini dibanding masa lalu. Hanya tingkat gotong royong sudah mengalami suatu perubahan. Gotong royong menjadi semakin jarang terjadi dan anak muda semakin sulit untuk berpartisipasi.

4.2 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan meningkat, hal ini ditunjukkan dengan indikasi dimana seluruh masyarakat biasanya selalu turut serta dalam kegiatan gotong royong. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- pembuatan ladang;
- tanam padi;
- upacara *kuangkay*;
- pembersihan kampung;
- upacara *belian*.

Kampung Muara Nayan

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, tingkat solidaritas masyarakat di kampung sudah menurun. Indikasinya adalah tidak ada yang membantu ketika mereka memerlukan bantuan, baik dari keluarga maupun dari orang lain.

Kepala Adat menjelaskan bahwa masyarakat akan meminta bantuan kepada pemerintah atau pihak kecamatan ketika kampung mengalami kekurangan makanan.

4.3 Konflik

Menurut Kepala Adat, sebelum kehadiran PT. Lonsum jarang terjadi konflik baik konflik lahan, keluarga, suku, agama maupun konflik sumber daya alam. Tetapi semenjak kehadiran PT. Lonsum, konflik lahan lebih sering terjadi. Bahkan dampak kehadiran PT. Lonsum juga yang memicu konflik dengan Kampung Pentat dan Kampung Lempunah. Pada umumnya mereka memperebutkan lahan yang hendak dijual kepada PT. Lonsum. Menurut responden rumah tangga kurang mampu, konflik terjadi karena PT. Lonsum mengambil lahan masyarakat.

4.4 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang mereka hadapi adalah:

- tidak punya pendidikan sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak;
- tidak bisa berladang karena tidak ada lahan.

Keadaan terus memburuk selama 5 tahun terakhir yang dikarenakan banyaknya lahan yang terbakar sehingga tanaman masyarakat seperti rotan banyak musnah. Padahal tanaman masyarakat seperti rotan merupakan sumber pendapatan utama sebelumnya.

Rumah tangga kurang mampu merasa bahwa mereka tidak mampu membayar untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak. Biasanya keluarga selalu membantu jika terjadi masalah kesehatan. Sedangkan untuk masalah pendidikan, biasanya tidak ada yang dapat membantu mereka.

Jika ada bantuan dari pihak luar, orang kurang mampu merasa bahwa kebutuhan prioritas untuk dibantu adalah pendidikan dan kesehatan.

Menurut Sekretaris Kampung, ketika seseorang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan maka yang dilakukan adalah:

- menggunakan pengobatan tradisional;
- meminjam uang;
- meminta bantuan keluarga;
- menjual barang yang ada.

Rumah tangga kurang mampu menjelaskan bahwa mereka tidak pernah ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di kampung.

4.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di kampung adalah:

- televisi;
- VCD.

Kampung Muara Nayan

4.6 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	Sama saja	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	Sama saja	Sama saja	Kepala Adat
Gotong royong dalam upacara adat	Sama saja	Semakin lemah	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	Sama saja	Sama dengan tujuan menurut adat	Kepala Adat
Konflik lahan	Jarang	Meningkat	Kepala Adat
Konflik keluarga	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Sering	Meningkat	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	Jarang	Sama	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Meningkat	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Muara Nayan adalah:

- ladang;
- rawa yang pernah digunakan sebagai sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- simpukng;
- peternakan;
- hutan (bengkar).

Ladang, hutan dan rawa merupakan tata guna lahan terluas dengan komposisi sekitar lebih dari setengah dari total luas lahan. Namun saat ini sebagian besar dari ladang sudah berkurang, hal ini disebabkan oleh adanya perusahaan yang menguasai lahan mereka.

Adapun sawah atau yang disebut dengan rapak luasannya berkurang, hal ini disebabkan karena sawah atau rapak kurang diminati masyarakat. Minat masyarakat yang rendah diakibatkan seringnya gagal panen pada sawah atau rapak karena seringnya terjadi banjir pada saat musim panen.

Wakil ketua BPK menjelaskan bahwa luasan kebun rotan bertambah. Jumlah kebun karet tetap tidak mengalami perubahan sejak tahun 1997. Simpukng sering mengalami kebakaran sehingga luasan simpukng berkurang. Kebun sayur jumlahnya tetap.

Kampung Muara Nayan

Saat ini masyarakat memiliki usaha baru yaitu peternakan sapi yang dipicu oleh bantuan sapi sebanyak 25 ekor dari pemerintah provinsi pada bulan Oktober tahun 2003. Luasan hutan cenderung berkurang karena kebakaran dan konversi oleh pihak perusahaan.

Menurut Ketua BPK, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Muara Nayan adalah:

- hutan perawan (bengkar);
- hutan sekunder tua (batakng);
- hutan sekunder muda (urat);
- belukar tua (kloako);
- belukar (babar);
- hutan rawa (payaq)
- hutan kerangas (jaras).

Luasan *bengkar* berkurang karena Kampung Muara Nayan berada diantara 3 kampung yang sering terjadi permasalahan tapal batas dan selain itu juga karena adanya kebakaran hutan sehingga mengurangi hutan perawan atau *Bengkar*, hal ini mengakibatkan bertambahnya lahan-lahan bekas terbakar. Beberapa diantaranya sudah tumbuh menjadi *Kerangkakng, Kwakokng, batangng, puyas, jaras, uraq*. Seperti Batakng bertambah jumlahnya yang diakibatkan banyaknya ladang berpindah-pindah sehingga lokasinya bertambah. Banyaknya orang yang menggunakan cheinsau yang berdampak berkurangnya jenis hutan kwakokng dan juga karena adanya perusahaan PT. Lonsum.

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan adalah sebagai berikut:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	- Hadirnya Perusahaan - Ladang	- Tanah tidak subur - Tidak ada usaha lain
Hutan lebih mudah diakses sehingga memudahkan orang untuk menebang	- Ada jalan poros - Hadirnya perusahaan -	Bisa menjual hasil ke kota
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	- Kebakaran hutan - Hadirnya perusahaan	-

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut petinggi, Kampung Muara Nayan memiliki hutan yang dilindungi. Hutan keramat tersebut bernama lemo keramat yang luasnya sekitar 100 m². Hutan lindung tersebut tidak digunakan untuk umum hanya untuk kepentingan Adat. Apabila ada yang menggunakan hutan adat tersebut di luar kepentingan adat, maka akan diberikan sanksi berupa denda *antakng*. Tidak ada aktivitas eksploitasi hutan di kampung Muara Nayan baik itu HPH, IPPK maupun HPHH karena memang tidak ada hutan dengan jumlah pohon yang signifikan. Juga tidak pernah ada orang luar yang mengajukan permohonan ijin konsesi pengelolaan hutan. Walaupun tidak ada konsesi hutan, tapi banyak rumah tangga yang menggantungkan mata pencahariannya dari kerja kayu.

Kampung Muara Nayan

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Petinggi, seluruh rumah tangga memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Keadaan ini tidak berubah sejak dahulu. Jual beli lahan sudah pernah terjadi sejak tahun 1997. Biasanya lahan dijual ke PT. Lonsum.

Dari wawancara rumah tangga diketahui bahwa seluruh responden rumah tangga yang berladang memiliki lahan ladangnya sendiri.

5.4 Perladangan

Pada tahun 1999 sampai dengan 2001, hanya sekitar setengah dari responden rumah tangga yang berladang. Pada tahun 2002 dan 2003, jumlah rumah tangga yang berladang menurun menjadi hanya sekitar sepertiga dari rumah tangga. Ada beberapa rumah tangga yang menanam padi di sawah, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali.

Rumah tangga yang berladang hanya menanam bibit padi sejumlah 1 - 3 kaleng. Kebanyakan hanya 1 kaleng saja. Oleh karena itu, hampir seluruhnya tidak mencukupi kebutuhan konsumsi beras dari hasil ladang mereka. Bahkan sekitar setengah di antaranya hanya cukup untuk enam bulan saja. Kebanyakan dari mereka harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan 1 tahun. Hanya sedikit saja yang mendapatkan bantuan beras dari pihak keluarga.

Sekitar sepertiga dari ladang dibuat pada lahan bera berumur kurang dari 10 tahun. Sisanya berumur 15 - 25 tahun. Hampir seluruh ladang dapat dicapai dengan jalan kaki selama 15 - 60 menit. Ada beberapa diantara rumah tangga yang pergi ke ladang menggunakan sepeda motor.

5.5 Pendapatan uang

Kebanyakan responden rumah tangga mendapatkan penghasilan uang dari kerja kayu di hutan, walaupun diketahui bahwa tidak ada ijin konsesi hutan baik HPH maupun HPHH di kampung ini. Selain kerja kayu, cukup banyak dari rumah tangga yang menggantungkan mata pencaharian sebagai pekerja di perusahaan perkebunan PT. Lonsum dan perusahaan batubara PT. Gunung Bayan. Sebagian yang lain mendapatkan penghasilan uang dari menyadap karet. Sisanya mendapatkan penghasilan uang dari bekerja sebagai aparat kampung, guru, pelayan gereja dan kerja bangunan.

Menurut wakil ketua BPK, perekonomian secara umum di Kampung Muara Nayan dirasakan memburuk. Hal ini disebabkan harga sembako naik, harus membayar listrik, banyak orang yang sakit dan biaya kerja untuk menggergaji kayu meningkat.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak terdapat pasar tetap di kampung ini. Yang ada hanyalah pasar keliling yang mengunjungi kampung sekitar 2 minggu sekali. Pasar reguler hanya ada di Kampung Pentat yang jaraknya 2 kilometer. Untuk mencapai Kampung Pentat diperlukan biaya Rp.5000 naik ojek sepeda motor. Pasar Pentat hanya buka 1 hari per minggu yaitu pada hari Kamis.

Kampung Muara Nayan

Kampung Muara Nayan berada pada poros jalan trans Kalimantan yang merupakan jalan tanah berkerikil. Dulunya tidak ada jalan yang menghubungkan antara Kampung Muara Nayan dengan Melak dan Samarinda. Jalur sungai kondisinya memburuk karena kondisi air yang semakin dangkal dan oleh limbah PT. Gunung Bayan. Untuk mencapai kota Melak dan Samarinda, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan reguler yang setiap hari lewat yaitu bis, mereka mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000 baik untuk menuju Samarinda maupun Melak.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik;
- gas.

Listrik merupakan sumber energi yang baru digunakan sejak 2 tahun lalu. Sedangkan minyak tanah dan kayu bakar sudah lama digunakan sebagai sumber energi. Dan keduanya masih terjangkau bagi masyarakat. Listrik yang mengalir di kampung adalah listrik dari PLN.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Seluruh rumah adalah rumah kayu dengan atap terbuat dari sirap atau keping. Ada beberapa rumah yang beratapkan seng. Sekitar sepertiga dari rumah responden berlantai papan kayu ulin, sisanya berlantai papan dari kayu biasa. Seluruh rumah responden dialiri arus listrik. Sekitar 63% dari mereka mengambil aliran listrik dari PLN, sisanya masih ada yang menggunakan mesin listrik kelompok atau menyambung dari pihak tetangga. Seluruh responden rumah tangga menggunakan WC, sekitar sepertiganya menggunakan WC yang berada di sungai. Kebanyakan WC berada di darat, beberapa diantaranya berada di dalam rumah.

Kampung Muara Nayan

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Meningkat	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik	Berkurang	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	tetap	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan simpukng	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>bengkar</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>batang</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>urat</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar tua (<i>kloako</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar (<i>babarr</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>payaq</i>)			Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>jaras</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan lindung	Ada		Petinggi
Akses kepada hutan	Mudah	Lebih mudah	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan hewan	-	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	- Sembako naik - Susah cari kerja	Sama saja	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar 20% dari rumah tangga yang survei mengaku memiliki anak putus sekolah. Kebanyakan anak putus sekolah karena kekurangan biaya. Tingkat melek huruf meningkat hal ini disebabkan meningkatnya jumlah anak yang bersekolah ke luar kampung.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Kampung Muara Nayan tidak memiliki sekolah baik itu TK, SD,SLTP atau SLTA. untuk bersekolah, anak-anak kampung Muara Nayan sebagian besar pergi ke kampung tetangga yaitu Kampung Lempunah. Jarak antara Kampung Muara nayan dengan Kampung Lempunah sekitar 1 kilometer yang dapat ditempuh dengan jalan kaki selama 15 menit.

Kampung Muara Nayan

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Kondisi sekolah	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Alat-alat dan buku-buku	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Jumlah Staf	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Gaji/honor guru	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Tingkat pendidikan guru	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Tingkat keaktifan guru	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Persentase kelulusan	Tidak ada	Tetap	Guru sekolah di Lempunah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Guru sekolah di Lempunah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut sekretaris kampung, jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Muntaber, Ispa dan demam Panas
Orang dewasa	Typus dan malaria
Ibu-ibu berkaitan dengan fungsi reproduksi	Tidak ada

Frekuensi penderita penyakit Malaria sudah menurun, namun penyakit TBC meningkat. Yang umumnya terkena penyakit TBC adalah orang tua.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut petinggi, tidak ada masyarakat di Kampung Muara Nayan yang mendapatkan air bersih karena air sungai sudah tercemar limbah dari perusahaan tambang PT. Gunung Bayan. Sedangkan untuk mendapatkan air bersih masyarakat memperolehnya dari sumur timba. Adapun ketersediaan air tersebut tidak tetap (berfluktuasi) dan mutu air semakin menurun yang disebabkan oleh limbah. Limbah tersebut berasal dari Sungai Ohong dan Sungai Nayan yang tercemar limbah batubara dan limbah kelapa sawit. Ketika musim kemarau biasanya masyarakat kekurangan air. Oleh karena itu, mereka selalu menyimpan air di gentong dan drum. Selain itu, masyarakat juga melakukan penghematan air.

Kampung Muara Nayan

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Muara Nayan tidak terdapat puskesmas atau sarana pengobatan medis lainnya. Untuk pengobatan medis masyarakat sering mengunjungi Kampung Pentat yang berjarak 2 kilometer dari Muara Nayan dan dapat ditempuh selama 10 menit dengan jalan kaki. Jika menggunakan ojek sepeda motor diperlukan biaya Rp. 5000. Karena sudah ada pengobatan medis di Pentat, maka pengobatan secara tradisional mulai menurun selama 5 tahun terakhir. Hal ini juga disebabkan mahalnya ongkos untuk upacara pengobatan secara tradisional, terkadang mereka harus membayar sebesar Rp. 1.500.000 untuk sekali upacara adat. Salah satu upacara pengobatan ini disebut *bekuku*.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Sumur timba	Berfluktuasi	Petinggi
Mutu air bersih	Sumur timba	Menurun	Petinggi
Mutu air sungai		Berkurang	Sekretaris Kampung
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tetap	Petinggi
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tetap	Petinggi
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tetap	Petinggi
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	Tetap	Petinggi
Gaji/honor	Tidak ada	Tetap	Petinggi
Penyakit Malaria	Tidak ada	-	Petinggi
Penyakit Diare	Ada	Tetap	Petinggi
Penyakit TBC	Ada	Meningkat	Petinggi
Jumlah ahli pengobatan tradisional	3 orang	Sama	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Lebih sekali per bulan	Sama	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan	Kekurangan hasil panen
2	Kelaparan	Anak-anak banyak kekurangan gizi
3	Kekeringan	Wabah penyakit seperti demam dan muntaber
4	Banjir	Tanaman habis mati
5	Hama	Hama tikus dan burung pipit yang menyebabkan gagal panen

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Muara Nayan. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- tidak ada pekerjaan dan usaha lain karena gagal panen akibat kebakaran hutan;
- sumber daya manusia (pendidikan) rendah karena tidak ada sekolah;
- pemerintah tidak memperhatikan pencemaran sungai, padahal air sungai setiap hari dipakai sebagai sumber air bersih;
- hutan terbakar dan banjir terjadi setiap tahun;
- hama dan penyakit ayam membuat usaha tidak berjalan dengan baik;
- sulit mencari bibit rotan dan mencari biaya untuk menanam.

Menurut masyarakat biasa:

- hutan terbakar yang menyebabkan tanah tidak subur dan tidak dapat berladang ;
- pencuri kayu membuat masyarakat tidak dapat berusaha dan berladang karena tidak ada lahan;
- sumber daya manusia rendah (sekolah tidak ada), buta huruf, sehingga tidak bisa kerja di perusahaan;
- aparat kampung tidak terbuka terhadap masyarakat terutama masalah dana reboisasi;
- peraturan adat lemah, solidaritas masyarakat kurang.

Menurut tokoh masyarakat:

- sumber daya manusia (pendidikan) rendah dan tidak ada bangunan sekolah;
- kebakaran hutan yang menyebabkan kebun rotan dan hasil hutan lain tidak menghasilkan;
- tidak adanya fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Infrastruktur jalan dirasakan membaik karena adanya pembangunan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Melak dan melewati Kampung Muara Nayan. Perubahan infrastruktur ini mungkin mengakibatkan perubahan pada budaya masyarakat. Salah satu yang saat ini terlihat sekali berubah adalah adanya pergeseran dari budaya pertanian kepada budaya industri. Dari wawancara rumah tangga terlihat jumlah rumah tangga yang berladang terus menurun. Sedangkan dari responden kunci dapat dilihat penjelasan bahwa hampir seluruh tipe tata guna lahan menurun luasannya.

Mata pencaharian bergeser kepada pendapatan-pendapatan baru seperti kerja kayu serta kerja di perusahaan perkebunan dan batu bara. Perubahan ini pasti dipicu oleh beberapa faktor lain seperti *euforia reformasi* dan desentralisasi yang menyebabkan masyarakat bebas mengakses hutan, juga karena masuknya dua perusahaan besar yaitu PT. Lonsum dan PT. Gunung Bayan. Kehadiran dua perusahaan tersebut diakui memicu peningkatan konflik lahan dan sumber daya alam. Bahkan ada

Kampung Muara Nayan

warga masyarakat yang mengaku dipaksa menjual lahannya pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi mungkin bukan atas dasar sukarela.

Dari sisi infrastruktur fisik, masyarakat merasakan adanya perbaikan jalan sehingga mereka dapat mencapai Samarinda dan Melak dengan lebih mudah, karena perbaikan jalan juga memicu berkembangnya pelayanan transportasi dari pihak swasta. Tapi di sisi lain, mereka melihat kualitas sungai sebagai jalur transportasi semakin memburuk karena adanya gangguan dari kehadiran PT. Gunung Bayan.

Fasilitas kesehatan tidak mengalami perubahan, sampai dengan saat ini tidak ada satupun fasilitas kesehatan medis di kampung. Namun, saat ini sudah dibangun fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pusban) di Kampung Pentat, hal ini pasti membantu masyarakat karena jarak ke fasilitas kesehatan semakin dekat, walaupun bukan di kampung mereka sendiri. Sayangnya frekuensi penyakit TBC mengalami kenaikan.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Muara Nayan, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 20 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- wakil BPK;
- guru yang mengajar di SD Kampung ;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- sekretaris Kampung (menggantikan unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Naha Tivab

Jumlah rumah tangga: 48	Jumlah jiwa: 196
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 57	Jumlah KK: 93
Jumlah rumah tangga miskin: 9	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Bukat	Jumlah SD: -
Nama Ketua BPK: Piter	Jumlah SLTP: -
Nama Juru Tulis ¹ : Darius	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 6 jam (ces 10 PK)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 2 hari (ces + long boat + kapal)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Long Apari, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 115 ⁰ 4.2' BT, 0 ⁰ 57' LU	
Tanggal survei: 17 - 19 November 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Naha Tivab sudah berdiri lebih dari 160 tahun yang lalu, sejak pendudukan Belanda. Pendiri kampung ini berasal dari Hulu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Masyarakat yang mendiami kampung ini adalah masyarakat Bukat Punan yang dulunya adalah suku pengembara.

¹ Sekretaris Desa adalah jabatan kedua tertinggi setelah Petinggi (Kepala Desa) dalam pemerintahan desa. Panggilan resmi untuk jabatan Sekretaris Desa adalah Juru Tulis.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung.

Menurut Juru Tulis, tahun 2003 pernah ada rencana untuk membentuk kelompok tani namun tertunda karena dana dari kabupaten belum cair.

Badan Perwakilan Kampung Naha Tivab didirikan pada bulan April 2003. Menurut salah seorang anggota BPK, lembaga ini melakukan konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat setiap bulan.

Beberapa hal yang pernah didiskusikan oleh BPK dengan masyarakat adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Bantuan rehabilitasi rumah	- Penetapan tujuan dan sasaran rehabilitasi rumah - Ketetapan mengenai alat-alat yang dipakai
Pembangunan gereja	-
Rencana pembangunan rumah adat	- Laporan mengenai perincian kebutuhan bahan - Laporan mengenai penerimaan uang bantuan rumah adat

Menurut anggota BPK, dalam 5 tahun terakhir ini kualitas kelembagaan musyawarah semakin buruk. Tingkat dampak keputusan semakin lemah dan cenderung diabaikan dan frekuensi musyawarah juga semakin jarang.

Hal lain yang juga dikeluhkan masyarakat adalah ketidakhadiran petinggi di kampung. Petinggi lebih banyak berada di hutan untuk berburu dan melakukan usaha lain. Pada saat survei dimana petinggi sedang tidak berada di kampung.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Semakin buruk	Anggota BPK
Dampak keputusan musyawarah	Semakin lemah dan cenderung diabaikan	Anggota BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin jarang	Anggota BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kampung Naha Tivab pernah mengajukan beberapa usulan bantuan kepada pemerintah kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Daftar usulan dan tanggapan dari pemerintah adalah sebagai berikut:

Permohonan Bantuan	Tanggapan Pemerintah
Air bersih	Tidak tahu
Semenisasi	Terlaksana tahun 2003
Rumah layak huni	Sudah terlaksana untuk 10 rumah
Lamin/balai adat	Sedang dikerjakan

Kampung Naha Tivab

Berdasarkan wawancara dengan 3 pihak, bantuan yang pernah diterima adalah sebagai berikut:

No.	Menurut Juru Tulis	Menurut Orang Kurang mampu	Menurut Ketua BPK
1	Semenisasi jalan kampung dari pemerintah tahun 2002	Beasiswa untuk anak SD dari pemerintah	Pembangunan gereja
2	Program kelompok tani dari dana DAK-DR Dinas Kehutanan	Bantuan pelayanan kesehatan dari misionaris gereja	-

3.1 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Juru Tulis Kampung, kunjungan dari pihak pemerintah ke Naha Tivab rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Lembaga pemerintah yang pernah datang ke sini hanyalah Camat Long Apari.

Menurut Anggota BPK, daerah ini sering dimonitor aparat keamanan karena dianggap termasuk daerah yang rawan. Kerawanan terjadi karena banyaknya gua sarang burung yang dapat menjadi pemicu konflik dan tindak kriminal. Sulitnya jalur transportasi sungai yang melalui jeram-jeram yang berbahaya membuat kunjungan pihak pemerintah sangat jarang.

Hubungan dengan pemerintah kabupaten dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Kondisinya dianggap cenderung sama saja dengan sebelumnya.

Rincian perubahan ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Sama saja
Tingkat kepedulian	Sama saja
Pelayanan	Lebih buruk
Keterbukaan informasi	Sama saja
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

Saat ini, malah aparat keamanan yang lebih sering berkunjung. Daerah ini termasuk kawasan perbatasan yang dianggap rawan terhadap tindakan kriminal.

3.2 Sumber dan alat informasi

Masyarakat mengetahui tentang program-program pemerintah dari kunjungan-kunjungan pihak pemerintah. Petinggi atau Aparat Pemerintahan Kampung biasanya mendapat informasi dari petugas kecamatan yang datang berkunjung untuk kemudian diinformasikan ke masyarakat. Informasi juga kadang diperoleh dari orang lain di kampung tetangga. Beberapa tokoh masyarakat menjelaskan bahwa terkadang informasi dari kecamatan dikirim melalui surat. Radio transistor yang dimiliki oleh sedikit masyarakat hanya bisa mengakses siaran luar negeri dan luar daerah. Pesawat televisi yang dimiliki petinggi hanya digunakan untuk menghidupkan VCD karena tidak mempunyai antena parabola.

Kampung Naha Tivab

Tidak ada alat komunikasi yang tersedia di kampung ini. Bila ingin berkomunikasi dengan dunia luar maka mereka harus ke Tiong Ohang yang merupakan ibukota kecamatan yang berjarak 4 jam perjalanan milir menggunakan ces.

3.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke Pemkab	Sama saja	Anggota BPK
Tingkat kepedulian Pemkab	Sama saja	Anggota BPK
Pelayanan Pemkab	Lebih buruk	Anggota BPK
Keterbukaan informasi	Sama saja	Anggota BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Anggota BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Menurun	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Perpindahan penduduk ke kampung lain dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Jangka Waktu	Jumlah Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	Sekitar 3 keluarga atau ± 20 orang	- Mencari pekerjaan - Jalan-jalan - Sekolah/pendidikan
Waktu panjang atau selamanya	-	-

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Naha Tivab adalah:

- upacara perkawinan;
- upacara mandi anak (upacara penyucian untuk pemberian nama anak);
- upacara *mali'* (upacara yang berhubungan dengan kegiatan berladang dan dilaksanakan sekali setahun).

Bila dibandingkan dengan masa lalu, perubahan pelaksanaan upacara adat pada masa sekarang hanyalah pada waktu pelaksanaan. Sekarang waktu upacara adat cenderung diperpendek supaya singkat dan praktis. Bahan-bahan yang digunakan dan tujuan penyelenggaraan upacara masih sama. Tingkat kerjasama masyarakat dalam bergotong-royong pada pelaksanaan juga masih sama saja.

Kepala Adat menjelaskan bahwa minat generasi muda untuk mempelajari pengetahuan tradisional sangat kurang. Pengetahuan dan kearifan tradisional dalam bidang sosial dan kesehatan saat ini hanya dikuasai oleh generasi tua. Saat ini ada 4 orang masyarakat yang secara khusus belajar adat dengan kepala adat. Mereka khusus belajar tentang seluk beluk hukum adat dan cara menyelesaikan perkara sengketa (konflik).

Kampung Naha Tivab

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Peningkatan ini terlihat dari turut sertanya seluruh masyarakat dalam gotong-royong yang dilaksanakan di kampung. Supaya tidak berselisih dengan kegiatan berladang maka jadwal gotong royong disesuaikan dengan kegiatan di ladang.

Contoh bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 12 bulan terakhir adalah:

- membangun rumah;
- membuat ladang bagi masyarakat yang tidak mampu;
- pembuatan dan semenisasi jalan.

Di lain pihak, rumah tangga kurang mampu mengaku tidak mengetahui tentang perubahan tingkat kerjasama dan solidaritas dalam 5 tahun terakhir. Dia merasakan bahwa dia tidak pernah mendapat bantuan dari keluarga maupun dari yang bukan keluarga yang tinggal di sekitar kampung. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi mereka yang sama-sama tidak mampu membuat mereka tidak bisa membantu.

Menurut Kepala Adat, jika terjadi kekurangan makanan di kampung, maka mereka meminta bantuan dari pedagang (berhutang) atau mengusahakan beras subsidi pemerintah. Namun beliau mempertanyakan beras subsidi yang harganya masih dirasakan mahal.

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, konflik yang sering terjadi di kampung ini adalah konflik keluarga dan konflik sumber daya alam terutama sarang burung. Konflik suku dengan pendatang dari Kalimantan Tengah juga pernah terjadi namun sudah diselesaikan oleh petugas di kecamatan. Konflik keluarga dirasakan meningkat terutama karena kondisi rumah yang kerap dihuni oleh lebih dari 3 kepala keluarga.

Walaupun konflik sumber daya alam dinyatakan tidak sering namun intensitasnya semakin meningkat. Konflik yang terjadi biasanya adalah perebutan 'trip' (giliran) untuk memetik sarang burung dan perebutan hak petik sarang burung.

Konflik di dalam kampung dan konflik dengan pihak luar kampung ditangani dengan menggunakan hukum adat. Bila lembaga adat kampung tidak mampu menyelesaikan maka akan dibawa ke kepala adat besar. Bila di tingkat kepala adat besar juga tidak terselesaikan maka akan dibawa ke pemerintah dan aparat keamanan.

Kepala Adat menegaskan bahwa selama ini lebih dari separuh masalah dapat diselesaikan pada tingkat kampung kecuali untuk kasus perebutan gua sarang burung yang lebih kompleks.

4.5 Situasi umum keluarga kurang mampu

Menurut orang kurang mampu, masalah utama yang mereka hadapi adalah:

- bila anak sakit; tidak ada biaya untuk berobat;
- tidak mampu berladang karena sudah tua;
- tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak;
- rumah jauh dari sumber air.

Responden rumah tangga kurang mampu merasa situasi perubahan dalam 5 tahun ini berfluktuasi, terutama karena seringnya terjadi konflik keluarga. Mereka juga

Kampung Naha Tivab

menyatakan bahwa mereka tidak mampu membayar untuk kesehatan dan pendidikan. Anak-anak bisa bersekolah di sekolah dasar karena ada beasiswa, namun untuk ke jenjang yang lebih tinggi mereka tidak mampu membiayai. Misionaris gereja katolik yang bertugas di sini juga membantu untuk kesehatan namun tidak bisa maksimal bila biaya yang dibutuhkan tinggi. Jika ada bantuan dari pihak luar, maka prioritas utama adalah untuk kesehatan.

Menurut Kader Posyandu, jika seseorang tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan, maka yang biasanya dilakukan adalah meminta bantuan keluarga.

Keadaan ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, tidak menghalangi mereka untuk sering turut serta dalam proses pengambilan keputusan di kampung.

4.6 Hiburan

Menurut Kepala Adat, sumber hiburan di kampung adalah:

- tari-tarian;
- upacara pukul gong pada saat memotong padi;
- *musui* atau nyanyian tradisional.

Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa yang menjadi hiburan sebagian besar warga kampung terutama anak-anak adalah pemutaran VCD. VCD terdapat di rumah petinggi yang dipadati masyarakat setiap malam.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	Lebih pendek dari biasanya	Semakin pendek	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	Sesuai dengan ketentuan adat	Sama saja	Kepala Adat
Gotong-royong dalam upacara adat	Baik	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	Sesuai dengan ketentuan adat	Sama saja	Kepala Adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik keluarga	Sering	Meningkat	Kepala Adat
Konflik suku	Pernah	Menurun	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak sering	Meningkat	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	Baik	Meningkat	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Tidak tahu	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama dan solidaritas	-	Tidak tahu	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna hutan dan lahan

Menurut salah seorang anggota BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Kampung Naha Tivab adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- kebun buah;
- kebun kopi;
- peternakan;
- hutan.

Dari keseluruhan tipe tata guna tersebut, hutan dan ladang merupakan tata guna lahan terluas dengan komposisi lebih dari setengah bila dibandingkan dengan total luasan kampung.

Hanya sedikit masyarakat yang menambah tanaman rotan mereka dengan rotan sega karena harga rotan anjlok. Kebun karet baru dimulai oleh beberapa keluarga saja, sementara hampir setiap keluarga mempunyai kebun buah. Sayangnya, buah-buahan yang dihasilkan dari kebun buah masyarakat tidak dapat dipasarkan. Pada musim buah, limpahan buah-buahan ini hanya dikonsumsi sendiri karena untuk menjual ke kampung dan daerah lain biayanya tinggi. Ternak-ternak yang dimiliki cenderung menurun mutu dan kuantitasnya karena wabah penyakit.

Anggota BPK menjelaskan bahwa jenis hutan yang ada di Kampung Naha Tivab adalah:

- hutan perawan (*tu'an*);
- hutan sekunder tua (*bere'ang*);
- hutan sekunder muda (*bere'ang*);
- belukar tua (*bere'ang*);
- belukar (*iwut*);
- hutan rawa (*takung*);
- hutan kerangas (*tana' opup*).

Bere'ang dan *iwut* cenderung bertambah dari bekas ladang masyarakat setiap tahun. Hutan kerangas atau *tana' opup* juga bertambah karena bekas ladang yang ditinggalkan banyak yang ditumbuhi *havuk* sejenis perdu pada tanah tidak subur.

Menurut Anggota BPK, perubahan yang terjadi terhadap kawasan hutan adalah:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan	Banyak yang berburu dan mencari batu yang terdapat pada monyet ekor panjang dan lutung	Jumlahnya mulai berkurang. Harus mencari lebih jauh

Kampung Naha Tivab

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Juru Tulis, kawasan Sungai Lebuhi dan Sungai Prangi pernah diukur untuk dijadikan kawasan lindung yang akan menjadi hutan cadangan bagi kepentingan masyarakat banyak. Pihak manapun yang menebang sembarangan di kawasan tersebut akan didenda. Orang hanya boleh masuk ke kawasan itu bila sudah memperoleh ijin dari pemerintah kampung dan lembaga adat.

Belum pernah ada seseorang di kampung atau pihak luar yang mengajukan ijin untuk IPPK/HPHH/IPHH.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Belum pernah terjadi praktek jual beli lahan di kampung ini. Seluruh rumah tangga di kampung ini memiliki keterjangkauan terhadap lahan, dan memiliki lahan sendiri.

5.4 Perladangan

Dari tahun 1999 sampai dengan 2003, responden rumah tangga yang menanam padi berjumlah 80% - 100%, dengan jumlah yang fluktuatif. Sekitar 10% menanam padi di sawah, sedangkan sisanya menanam padi di ladang. Sekitar 90% berladang di lahan milik sendiri, sisanya berladang di lahan bebas. Pada tahun 2003, jumlah bibit yang ditanam sangat bervariasi antar 1 - 8 kaleng, sedangkan tahun 2003 antara 0,5 - 6 kaleng. Hanya sekitar 10% dari rumah tangga yang berladang dapat memenuhi seluruh kebutuhan berasnya dari ladang, sisanya harus mendapatkan beras tambahan dengan cara membeli. Sekitar 10% mengaku mendapatkan beras tambahan dari bantuan keluarga, sedangkan 20% mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kurangnya hasil panen terjadi karena hama meningkat, sehingga panen sering gagal.

Sekitar setengah dari ladang dibuat pada areal rimba, sedangkan sisanya dibuat pada lahan bera umur dibawah 10 tahun.

5.5 Pendapatan uang

Sekitar 60% dari rumah tangga mengaku mendapatkan penghasilan uang dari hasil pencarian gaharu. Sisanya mendapatkan penghasilan uang dari sarang burung, mendulang emas, pembuatan kerajinan, berburu dan menjual hasil ladang. Saat ini diakui bahwa pencaharian gaharu semakin sulit sehingga pendapatan mereka juga menurun. Harga gaharu bervariasi antara Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000/kg, tergantung tingkat kualitasnya. Untuk mendapatkan hasil sebanyak 1 kg, diperlukan waktu sekitar 2 - 3 bulan. Sedangkan dari sarang burung, masyarakat bisa mendapatkan sekitar Rp.15.000.000 per sekali panen.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak ada pasar di kampung ini. Warung yang menjual barang kelontong pun hanya ada 1 dan tidak lengkap. Masyarakat biasanya berjalan kaki ke Long Apari untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jarak antara Naha Tivab dan Long Apari hanya 15 menit dengan jalan kaki. Sayur-sayuran didapat dari kebun sendiri dan kebutuhan akan daging dan ikan dari hasil berburu dan menjala. Masyarakat masih menggunakan mekanisme tukar menukar barang (barter) dalam jual beli, misalkan beras ditukar dengan gula.

Kampung Naha Tivab

Menurut Juru Tulis, kondisi jalan dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan menjadi semakin baik. Jalan yang menghubungkan dengan Kampung Long Apari sudah disemen. Di lain pihak, kondisi sungai dirasakan sedang, tidak terlalu baik tidak juga terlalu buruk. Kondisi sungai ini mengalami penurunan terutama karena masyarakat Naha Tivab merasa sangat terganggu dengan limbah dedak dari gilingan padi warga Long Apari yang dibuang ke sungai. Bila masyarakat ingin ke ibu kota kecamatan di Tiong Ohang, selain dengan menggunakan perahu ces pribadi, masyarakat juga bisa memanfaatkan long boat yang kadang-kadang melintas. Biaya untuk sekali jalan ke Tiong Ohang adalah Rp. 100.000, dan bila memakai kendaraan sendiri akan menghabiskan 20 liter bensin. Biaya hidup dan transportasi ini akan semakin mahal bila musim kemarau tiba, karena jalur sungai menjadi sangat dangkal dan hanya bisa dilalui perahu kecil.

Waktu untuk mencapai ibukota kecamatan dalam 5 tahun terakhir menjadi lebih cepat, karena ada *long boat* dan *speed boat* yang melintas setiap minggu.

Bagi orang yang tidak terbiasa, perjalanan antara Kampung Naha Tivab dan Tiong Ohang merupakan masalah tersendiri. Sungai Mahakam yang terkadang hanya selebar 5-10 meter ditambah dengan batu-batu dan riam menjadi kendala yang menyulitkan. Dalam debit air normal, antara Naha Tivab dan Tiong Ohang terdapat 3 riam yang cukup berbahaya ditambah sekitar 40-an jeram-jeram kecil. Tingkat kesulitan jeram-jeram ini berubah-ubah tergantung pada debit air sungai.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik (*genset*).

Kayu bakar adalah satu-satunya sumber energi yang mudah dijangkau masyarakat karena tidak harus dibeli. Minyak tanah dan sumber listrik dirasakan semakin sulit terjangkau karena harganya yang mahal. Harga minyak tanah adalah Rp. 4.000/liter dan harga bensin berkisar antara Rp. 5.000 - Rp. 7.000/liter. Bandingkan dengan harga bensin di Samarinda yang hanya Rp. 1.810/liter. Hanya 1 rumah yang mempunyai mesin *genset* sebagai sumber listrik. Mesin tersebut hanya dihidupkan pada malam hari dari pukul 6 - 10 malam hari.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Rumah penduduk terbuat dari kayu bukan ulin dan bengkirai. Hampir seluruh atap rumah terbuat dari keping. Seluruh rumah berlantaikan papan. Rumah yang berukuran kecil rata-rata dihuni oleh 2 - 4 kepala keluarga dalam 1 rumah. Hampir semua rumah tidak memiliki aliran listrik. Hanya sekitar 10% dari rumah yang memiliki aliran listrik yang berasal dari mesin milik pribadi. Tidak ada rumah tangga yang memiliki WC dalam rumah. Karena kondisi sungai yang berbatu-batu (karangan) maka hanya ada 2 WC sungai (jamban) di kampung ini.

Kampung Naha Tivab

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruhnya	-	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Sedang	Berkurang	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Tetap	Anggota BPK
Luasan sawah	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Tetap	Anggota BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Luasan kebun karet	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Luasan kebun buah	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Luasan kebun kakao	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun kopi	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Luasan peternakan	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Luasan hutan	Ada	Tetap	Anggota BPK
Hutan perawan (<i>tuan</i>)	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Hutan sekunder tua (<i>bere'ang</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Hutan sekunder muda (<i>bere'ang</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Belukar tua (<i>bere'ang</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Belukar (<i>iwut</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Hutan rawa (<i>tokung</i>)	Ada	Tetap	Anggota BPK
Hutan kerangas (<i>tana opup</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Hutan lindung	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Akses kepada hutan	-	-	Anggota BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan dan hewan	-	Berkurang	Anggota BPK
Perkembangan ekonomi kampung	<ul style="list-style-type: none">- Ada yang menemukan gua sarang- Ada yang usaha dengan orang lain- Masih banyak yang tidak mampu	Fluktuatif	Anggota BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Berdasarkan survei tingkat rumah tangga diketahui sekitar 60% dari responden rumah tangga memiliki anak putus sekolah, dimana 55% diantaranya putus sekolah pada tingkat SD dan sebagian yang lain pada tingkat SLTP, 70% diantaranya putus karena alasan biaya. Namun menurut Guru SDN Naha Tivab alasan anak-anak meninggalkan sekolah adalah karena harus ikut keluarga bekerja.

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pendidikan guru lebih baik dan tingkat keaktifan guru dalam mengajar tidak mengalami perubahan. Persentase kelulusan siswa meningkat, tahun 2003 lalu persentase kelulusannya adalah 100%. Orang yang dapat membaca dan menulis juga meningkat dalam 5 tahun terakhir. Tahun ajaran

Kampung Naha Tivab

2003/2004 ini, SDN Long Apari ini menerima 24 siswa baru dimana 12 orang di antaranya adalah siswa dari Naha Tivab.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

SD yang terletak di perbatasan Kampung Naha Tivab dengan Kampung Long Apari adalah satu-satunya institusi pendidikan yang ada di dua kampung ini. Murid-murid sekolah ini berasal dari dua kampung tersebut.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat, pada saat program *resettlement* penduduk tahun 1980-an, sebagian masyarakat Naha Tivab dan Long Apari tidak turut serta. Imbasnya sekolah yang ada pada saat itu juga dipindahkan ke Naha Silat, yang menyebabkan dua kampung ini tidak memiliki sekolah selama beberapa tahun. Banyak siswa yang terpaksa putus sekolah pada waktu itu. SD yang ada sekarang adalah bangunan yang baru di bangun bertahap. Perbedaan pimpinan proyek dalam pembangunan sekolah ini juga menyebabkan perbedaan mutu bangunan. Satu bagian bermutu baik dan sebagian lagi kurang baik.

Dalam 5 tahun terakhir, tidak ada penambahan jumlah sekolah. Alat-alat dan buku-buku juga sama saja. Staf menjadi lebih banyak dengan gaji yang lebih besar.

Jika ingin melanjutkan ke SMP atau SMA, maka anak-anak harus ke Tiang Ohang. Untuk bersekolah di Tiang Ohang, anak-anak harus menginap di tempat keluarga atau tinggal di asrama.

Ada juga anak dari warga kampung ini yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan SMU di Malaysia. Di sana mereka tinggal dengan keluarga atau sekolah berasrama. Perjalanan dari Naha Tivab ke Malaysia dilakukan dengan perahu ces selama 1 hari yang dilanjutkan dengan jalan kaki selama 2 hari.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama saja	Guru SD
Kondisi sekolah	-	Lebih buruk	Guru SD
Alat-alat dan buku-buku	-	Sama saja	Guru SD
Jumlah staf	3	Lebih banyak	Guru SD
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Guru SD
Tingkat pendidikan guru	-	Lebih baik	Guru SD
Tingkat keaktifan guru	-	Sama saja	Guru SD
Persentase kelulusan	100%	Meningkat	Guru SD
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Guru SD

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut Kader Posyandu, jenis penyakit yang ada di kampung ini adalah:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Sesak napas, diare
Orang dewasa	ISPA, TBC
Perempuan	Keputihan
Lanjut usia	TBC

Penyakit malaria yang umumnya menjangkiti orang dewasa tingkat keseringannya berfluktuatif yang tergantung pada musim. Demikian juga dengan diare yang umumnya diderita anak-anak.

Kader posyandu menyampaikan bahwa kampung ini adalah endemi TBC. Terjadi peningkatan jumlah penderita TBC pada orang dewasa dan lanjut usia.

Dalam kurun waktu Januari - November 2003, tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. 1 orang anak berusia dibawah 5 tahun meninggal karena sakit demam dan perut kembung. Dalam kurun waktu yang sama 5 orang anak di lahirkan di kampung ini dengan berat rata-rata 3,5 kg. Usia rata-rata ibu pada saat kehamilan pertama adalah 16 tahun.

Dalam 12 bulan terakhir ada 2 orang penduduk yang meninggal dalam usia rata-rata 70 tahun, asumsi penyebab kematian mereka adalah karena usia lanjut. Penyakit yang paling banyak menjadi penyebab kematian di kampung ini adalah diare dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut Kader Posyandu, hanya kurang dari separuh masyarakat Naha Tivab yang sudah menikmati air bersih, sisanya masih memanfaatkan air sungai. Namun secara umum kualitas air sungai masih baik, hanya saja pada saat-saat tertentu sungai Mahakam yang mengalir lewat kampung ini dicemari oleh limbah gilingan padi warga Long Apari.

Sumber air bersih kampung ini adalah dari mata air atau pancuran di belakang kampung yang dibendung kemudian dialirkan ke rumah-rumah dengan menggunakan selang. Fasilitas ini masih sangat sederhana dan belum mampu menyalurkan dengan menggunakan pipa besar. Masyarakat yang tidak bisa menikmati air bersih ini umumnya adalah masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai uang untuk membeli selang.

Ketika musim kemarau tiba di mana air bersih tidak bisa didapatkan, tidak pernah ada bantuan dari pihak luar untuk menanggulungnya.

Rata-rata masyarakat menyimpan air bersih di dalam drum. Kampung ini tidak mempunyai alat untuk menyimpan air untuk kepentingan umum.

Kampung Naha Tivab

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Naha Tivab tidak ada satupun fasilitas kesehatan. Fasilitas terdekat adalah Puskesmas Long Apari, namun sekarang juga tidak ada petugas (mantri) yang melayani. Tidak ada perubahan yang berarti dalam 5 tahun terakhir, kondisi tetap sama saja dan cenderung memburuk.

Fasilitas yang relatif lebih lengkap adalah di Tiong Ohang, ibukota kecamatan Long Apari yang berjarak 4 jam perjalanan milir dengan menggunakan perahu ces, atau kira-kira menghabiskan 20 liter bensin. Bila kebetulan ada *speed boat* atau *long boat* melintas ongkosnya adalah Rp. 100.000/penumpang. Kader Posyandu mengeluhkan kurangnya perhatian puskesmas Tiong Ohang terhadap Kampung Naha Tivab. Laporan tentang penderita TBC misalnya tidak ditanggapi segera, padahal di Puskesmas Tiong Ohang ada kerjasama dengan Rio Tinto untuk pemberantasan penyakit TB Paru. Dengan keterbatasan seperti ini maka tidak ada orang dari luar kampung yang datang berobat ke Naha Tivab.

Menurut Kepala Adat, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah lagi dilakukan upacara pengobatan tradisional. Jumlah ahli pengobatanpun semakin berkurang, karena orang-orang tua yang menguasainya satu-persatu meninggal dunia. Secara umum pengetahuan dan penguasaan akan obat-obatan dan cara pengobatan tradisional mulai pudar. Generasi muda tidak lagi berminat untuk mempelajarinya. Padahal semestinya pengobatan tradisional bisa menjadi alternatif ketika pengobatan medis tidak tersedia.

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air pancuran	Sama saja	Kader Posyandu
Mutu air bersih	Air pancuran	Sama saja	Kader Posyandu
Mutu air sungai	Mulai tercemar	Menurun	Kader Posyandu/BPK
Jumlah fasilitas kesehatan	Sama saja	Sama saja	Kader Posyandu
Kondisi fasilitas kesehatan	Terdekat di kampung Long Apari	Kurang baik	Kader Posyandu
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Menurun	Kader Posyandu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Ada	Lebih kecil	Kader Posyandu
Gaji/honor	Tidak tahu	-	Kader Posyandu
Penyakit malaria	Ada	Berfluktuasi	Kader Posyandu
Penyakit diare	Ada	Berfluktuasi	Kader Posyandu
Penyakit TBC	Ada	Meningkat	Kader Posyandu
Jumlah ahli pengobatan tradisional	-	Menurun	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Tidak ada	Tidak tahu	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi di kampung ini dalam sepuluh tahun terakhir adalah:

Bencana	Dampak
Kebakaran rumah	Rumah yang dibangun baru lebih buruk
Kelaparan	- Masyarakat terpaksa makan sagu - Banyak yang meninggal akibat wabah muntaber
Kekeringan	- Air kering dan kotor. Jalur transportasi dari kecamatan putus - Sembako dan barang-barang langka dan mahal - Wabah muntaber
Banjir	Rumah tenggelam dan rusak
Hama	Panen gagal Paceklik

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Naha Tivab. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan

- sarana transportasi yang tergantung kepada alam, sehingga membuat pemasaran hasil hutan dan kebun menjadi sulit, sementara harga barang kebutuhan sehari-hari menjadi mahal;
- usaha yang tidak tentu;
- biaya sekolah mahal, jarak SLTP sangat jauh di Tiong Ohang;
- pelayanan tenaga medis ke kampung tidak tetap;
- tidak mampu memiliki penerangan (lampu) di kampung karena harga solar mahal.

Menurut masyarakat biasa

- pendidikan rendah, tidak ada yang bisa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- tidak ada tenaga medis yang tetap ;
- rumah tidak layak, terlalu banyak kepala keluarga di dalam rumah.

Menurut tokoh masyarakat

- tidak ada usaha jangka panjang;
- tidak ada pemasaran hasil kebun dan hutan;
- tidak ada kunjungan, penyuluhan pertanian dan kejelasan alih fungsi jabatan (perubahan struktur pemerintahan).

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Perubahan dari segi sosial dapat dilihat pada kualitas musyawarah yang semakin memburuk, salah satu indikatornya adalah keputusan-keputusan musyawarah semakin diabaikan. Sementara itu, pelayanan dan bantuan pemerintah keadaannya dirasakan semakin buruk sedangkan jarak ke Pemkab dianggap sama saja.

Dari sisi budaya, dapat dilihat bahwa upacara-upacara adat semakin pendek waktunya, sedangkan upacara adat untuk pengobatan hampir tidak pernah terjadi. Masyarakat mengandalkan pengobatan pada pengobatan medis. Padahal pelayanan kesehatan medis semakin buruk.

Konflik sumber daya alam cenderung meningkat terutama konflik gua sarang burung. Konflik lahan sama saja, sementara konflik rumah tangga meningkat. Peningkatan konflik rumah tangga karena meningkatnya jumlah keluarga yang tinggal dalam 1 rumah.

Kondisi jalan kampung diakui membaik dan luasan kebun meningkat. Kebun yang ada adalah kebun rotan, karet dan buah-buahan.

Kondisi bangunan dan fasilitas sekolah memburuk, tetapi kondisi guru baik dari sisi pendidikan maupun jumlah dan gajinya semakin membaik. Sayangnya perbaikan fasilitas guru tidak dibarengi dengan peningkatan keaktifan.

Mutu air sungai menurun karena adanya pencemaran dari penggilingan padi di Long Apari. Penyakit malaria dan diare berfluktuasi, namun penyakit TBC meningkat jumlahnya.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Naha Tivab, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 10 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- juru tulis kampung (yang menggantikan petinggi);
- anggota BPK (yang menggantikan ketua BPK);
- guru SD (yang menggantikan kepala sekolah);
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- kader posyandu (menggantikan unsur kesehatan);
- pemilik warung.

Kampung Naha Tivab

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 2 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Sembuan

Jumlah rumah tangga: 743	Jumlah jiwa: 180
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 64	Jumlah KK: 90
Jumlah rumah tangga miskin: 39	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah SD: 1
Nama Ketua BPK: K. Ingan	Jumlah SLTP: -
Nama Wakil Kepala Adat: Kaingan	Jumlah SLTA: -
Nama Petinggi: John Yatilivis	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke kecamatan: 60 menit (sepeda motor)	Jumlah Pusban: 1
Waktu tempuh ke Sendawar: 90 menit (sepeda motor)	Jumlah Polindes: -
Posisi administratif: Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat	
Posisi geografis: 115.28 BT, 0.18 LU	
Tanggal survei: 4 - 6 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung¹

Kampung Sembuan merupakan kampung yang keberadaannya sudah cukup lama. Usia sebuah kampung biasanya bisa diukur dari keberadaan lamin (rumah panjang). Sampai dengan tahun 2003 ini, lamin yang ada di kampung telah dibangun ulang 5 kali. Lamin seperti halnya bangunan-bangunan lain mempunyai masa layak huni, dan dalam kondisi biasa lamin sudah mulai dibangun setelah sekitar 25 tahun. Masyarakat yang tinggal di Sembuan saat ini merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang dulunya juga menetap di Lamin Sembuan yang terletak di jalur Sungai Nyuatan.

¹ Berdasarkan informasi Wakil Kepala Adat

2. Kelembagaan Kampung²

2.1 Kelembagaan Kampung

Kelembagaan kampung yang ada di Sembuan terdiri dari:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- Koperasi;
- Kelompok Tani;
- Lembaga Sosial;
- Karang Taruna;
- Posyandu.

BPK sudah pernah melakukan beberapa diskusi dengan masyarakat. Kendalanya adalah, selama ini BPK belum sepenuhnya difungsikan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Permasalahan keluhan masyarakat atau perusahaan tidak disampaikan ke BPK, tapi disampaikan langsung ke Petinggi.

BPK yang dilantik pada 2 Januari 2002 dengan berbagai kendala telah mampu memfasilitasi diskusi dengan masyarakat. Tiga permasalahan yang permasalahan didiskusikan adalah:

No.	Topik diskusi	Keputusan
1	Masalah hutan (HPHH)	<i>Fee</i> untuk BPK per meter kubik kayu Rp. 2.500 Disetujui perusahaan tetapi <i>fee</i> belum diterima
2	Pembangunan lingkungan kampung (air bersih dan batas kampung)	Batas kampung yang sudah diselesaikan dengan Jontai, Melapeh Baru Batas dengan kampung Lingau, Mentar, Dempar dan Temula belum terselesaikan
3	Masalah pendidikan	Mengaktifkan guru untuk mengajar

Lima tahun terakhir ini, secara umum kualitas musyawarah menurun, tetapi tingkat keseringan atau intensitasnya meningkat. Artinya budaya musyawarah di masyarakat semakin baik. Hasil musyawarah dipatuhi dan mempunyai dampak yang nyata, seperti keputusan tata batas kampung yang sangat dirasakan manfaatnya, terutama keputusan tentang penentuan batas ladang.

2.2 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Semakin berdampak dan dipatuhi	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin sering	Ketua BPK

² Berdasarkan informasi dari Ketua BPK

Kampung Sembuan

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten³

3.1 Dukungan

Bantuan pemerintah kepada pembangunan di Kampung Sembuan Asa dalam 5 tahun terakhir ini meningkat. Berikut adalah daftar usulan bantuan serta tanggapan pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan Pemerintah
Pembuatan jalan simpang Dempar - Sembuan	Sudah dilaksanakan
Pembuatan lokasi pasar kampung	Sudah dilaksanakan
P2D (pembuatan jalan sepanjang 3 - 4 km ke lokasi kebun	Sudah direalisasi, selesai 2003
Jembatan kampung	Belum ada tanggapan/tidak ada alasan
Kebun karet	Belum ada tanggapan/tidak ada alasan
Air bersih	Ada tanggapan, sudah survei tapi belum ada realisasi

Dari enam usulan bantuan masyarakat ke pemerintah, tiga diantaranya sudah direalisasikan yaitu:

- pembuatan jalan simpang Dempar- Sembuan yang terlaksana tahun 2001 - 2002;
- pembuatan lokasi pasar kampung, terealisasi tahun 2001 - 2002;
- pembuatan jalan P2 D sepanjang 3 - 4 kilometer ke kebun, terlaksana tahun 2003.

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut Ketua BPK
1	Pembuatan jalan simpang Dempar-Sembuan	Bantuan instalasi air bersih, dari PT KEM	Tidak ada
2	Pembuatan lokasi pasar kampung	-	-
3	Pembuatan 1 unit bangunan rumah sekolah 2 lokal	-	-
4	Rehabilitasi lahan kering 65 hektar	-	-

Hanya dua usulan masyarakat yang direalisasi pada empat program pemerintah. Artinya program pemerintah di kampung 50% berasal dari usulan masyarakat, dan 50% lainnya ditentukan oleh pemerintah. Bantuan lainnya berasal dari PT. KEM berupa instalasi air bersih dirasakan tidak memuaskan bagi masyarakat. Terhadap program bantuan PT. KEM, responden dari rumah tangga kurang mampu menyatakan perlu dilakukan pembenahan program atau minimal pengadaan program baru untuk lebih memajukan ekonomi.

³ Informasi bersal dari Petinggi, Ketua BPK, Rumah tangga Kurang Mampu.

Kampung Sembuan

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Lembaga pemerintah yang pernah datang ke Sembuan adalah Bupati (tahun 2003), dan Camat Kecamatan Damai (setiap tahun). Intensitas kunjungan pemerintah rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir ini secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Sisi perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih baik

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat memperoleh informasi tentang program pemerintah melalui kunjungan dari pemerintah, mendengar dari orang lain, lewat pengumuman di gereja. Alat komunikasi *hand phone* (telepon seluler) bisa digunakan di sekitar Barong Tongkok, belum bisa digunakan di Sembuan. Belum terdapat jaringan pemancar baik dari Telkom maupun dari operator telepon seluler di sekitar Sembuan, namun sudah ada beberapa masyarakat kampung ini yang mempunyai pesawat *hand phone* yang digunakan bila ke luar kampung.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke Pemerintah Kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian Pemerintah Kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan Pemerintah Kabupaten	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Meningkat	Petinggi

4. Sosial Budaya⁴

4.1 Perpindahan penduduk

Dalam kurun 5 tahun terakhir terjadi perpindahan penduduk sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Jangka waktu	Berapa orang	Alasan meninggalkan kampung
Waktu pendek/sementara	10 - 15	Sekolah/pendidikan
Waktu panjang/selamanya	-	-

⁴ Informasi berasal dari Petinggi, Wakil Ketua Adat, BPK, Kurmam, Tukang Belian.

Kampung Sembuan

4.2 Upacara adat

Menurut wakil kepala adat, upacara adat yang masih sering dilakukan adalah:

- upacara adat *Kuangkai* yaitu upacara adat pembongkaran dan penguburan ulang tulang-tulang anggota keluarga yang telah meninggal. Upacara adat ini merupakan bagian dari upacara adat kematian. Pelaksanaan bisa dilakukan lebih dari satu kelompok keluarga;
- *gugu tautn* yaitu upacara pengembalian keadaan alam agar menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Upacara *gugu tautn* merupakan bagian dari upacara adat kehidupan.

Meskipun saat ini masih dilakukan upacara adat, namun dibandingkan dengan upacara yang dilakukan di masa lalu, upacara adat saat ini telah mengalami perubahan. Waktu pelaksanaan semakin pendek, bahan upacara adat juga telah berubah dari sisi jenis dan bahan. Budaya gotong royong adat semakin lemah karena masyarakat lebih memikirkan pengembangan ekonomi keluarga. Tujuan pelaksanaan upacara adat juga telah mengalami perubahan.

Dari sisi transformasi budaya antara generasi tua dengan generasi muda, minat generasi muda terhadap adat masih cukup baik. Separuh dari generasi muda mendapatkan pengetahuan adat dari generasi tua.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Dalam 12 bulan terakhir telah dilakukan 5 kali gotong royong yang diikuti oleh separuh dari anggota masyarakat. Aktivitas gotong royong tersebut adalah:

- membersihkan jalan umum;
- memperbaiki tempat air;
- menugal;
- gotong royong upacara adat;
- menanam.

Terdapat perbedaan penilaian antara Wakil Kepala Adat dan responden rumah tangga kurang mampu terhadap aktivitas kerjasama. Responden dari rumah tangga kurang mampu menilai tingkat kerjasama menurun, sedangkan Wakil Kepala Adat menilai tingkat kerjasama meningkat. Dalam menghadapi kesulitan rumah tangga, responden rumah tangga kurang mampu hanya mendapatkan bantuan dari keluarga. Rumah tangga di sekitarnya yang tidak mempunyai ikatan keluarga tidak pernah membantu. Bila terjadi kekurangan makanan, masyarakat meminta bantuan kepada pemerintah setempat.

4.4 Konflik

Terdapat empat konflik utama yaitu: 1) konflik lahan, 2) konflik keluarga; 3) konflik agama; dan 4) konflik air/sumber daya alam. Konflik suku tidak terjadi di Sembuan, karena tiap-tiap kampung telah diberi pengertian melalui penyuluhan. Menurut BPK, yang memberi penyuluhan adalah pemerintah melalui pemerintah kampung.

Konflik yang sering terjadi adalah konflik lahan dan konflik air/sumber daya alam. Perkembangan nilai lahan yang makin meningkat akhir-akhir ini ditambah dengan kurang adanya sifat kebersamaan di antara masyarakat, telah memicu

Kampung Sembuan

terjadinya konflik lahan. Akibat konflik lahan, dua unit rumah di Sembuan dibakar, tersangka atau terdakwa pembakaran telah diproses secara hukum.

Konflik air/sumber daya alam lebih disebabkan karena sarana air belum disalurkan ke setiap rumah tangga padahal secara kuantitatif persediaan air ini mampu menjangkau keperluan seluruh rumah tangga.

Konflik keluarga jarang terjadi, frekuensi konflik tidak tentu, kadang-kadang jumlah konflik naik kadang-kadang menurun. Konflik keluarga lebih disebabkan oleh kurangnya pengertian dan toleransi antar anggota keluarga dan pemaksaan pendapat tanpa mempertimbangkan pendapat anggota keluarga lainnya.

Di Sembuan, mayoritas masyarakat beragama Kristen dan Katolik. Konflik agama jarang terjadi karena telah terjadi saling pengertian pada kedua belah pihak.

Secara umum, intensitas konflik di kampung berfluktuasi, artinya pada kondisi tertentu kuantitas dan kualitas konflik meningkat, pada kondisi lainnya kuantitas dan kualitas konflik menurun.

Lembaga adat mempunyai peran dalam penyelesaian konflik. Sekitar separuh dari jumlah konflik diselesaikan melalui lembaga adat. Mekanisme penyelesaian konflik diselesaikan melalui lembaga adat, pihak-pihak yang berkonflik mengajukan permasalahan ke lembaga adat, dan lembaga adat mempergunakan dasar hukum adat terhadap konflik yang di dalam kampung dan konflik dengan pihak luar.

Permasalahan yang dihadapi lembaga adat adalah lemahnya kekuatan mengikat keputusan adat serta kekuatan memaksa agar keputusan lembaga adat dipatuhi. Lembaga adat tidak memiliki perangkat paksa seperti pada lembaga pengadilan negara. Contoh pada kasus antara Pak Pulan (nama samaran) dengan Pak Badrun (nama samaran). Lembaga adat memutuskan Pak Pulan harus membayar 1 ekor kerbau dan mengembalikan lahan petak yang diambil dari Pak Badrun. Pak Pulan tidak mau mentaati keputusan adat. Lembaga adat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ketidaktaatan Pak Pulan terhadap hukum adat atau keputusan lembaga adat.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, secara umum mereka tidak mampu mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Terhadap kedua masalah tersebut tidak pernah ada bantuan dari pemerintah baik dari sisi beasiswa atau pun kartu sehat untuk pengobatan gratis. Selama ini dalam mengatasi biaya pendidikan dan pengobatan, masyarakat terpaksa harus meminjam atau meminta bantuan keluarga atau berobat secara tradisional yang tidak memerlukan biaya.

Di tingkat pengambilan keputusan, rumah tangga kurang mampu jarang dilibatkan, sehingga dalam banyak hal mereka kurang mengetahui kondisi di kampung.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, permasalahan utama yang mereka hadapi adalah:

- pendidikan; anak tidak mendapatkan bantuan beasiswa, dan gurunya kurang aktif dalam mengajar;
- masalah jembatan penyeberangan di kampung. Kalau ke seberang harus mempergunakan perahu dan harus mengeluarkan biaya tambahan;
- tidak ada bantuan rumah tinggal. Rumah tinggal hanya terbuat dari kulit kayu dan perlu dibenahi;

Kampung Sembuan

- tidak mempunyai sarana penerangan rumah yang layak, hanya menggunakan lampu minyak pada malam hari. Tidak ada listrik PLN, kalau pun ada tidak mampu menyambung atau membayar setiap bulannya.

Berdasarkan masalah utama yang dihadapi, bantuan yang diharapkan dari pihak lain adalah: 1) pemberian dana pembangunan rumah; 2) pembuatan jembatan penyeberangan di kampung; 3) bantuan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta penenguran terhadap guru SD yang tidak aktif mengajar; 4) subsidi bahan pokok.

Usulan bantuan pembangunan jembatan dimaksudkan untuk memperlancar penjualan hasil-hasil ladang ke Dempar, Barong Tongkok dan Damai. Dengan adanya jembatan kampung, hasil ladang dapat diangkut dalam jumlah yang banyak dari kampung tanpa biaya tambahan untuk penyeberangan perahu.

4.6 Hiburan

Hiburan utama dan hampir setiap hari dilakukan di Sembuan adalah ramai-ramai nonton televisi. Acara-acara hiburan televisi sangat beragam mulai dari televisi swasta di dalam negeri maupun luar negeri bisa diakses dengan mudah di kampung ini, karena ada rumah tangga yang memiliki antena parabola dengan alat digital. Hanya sekali-kali ada hiburan upacara adat *kuangkai*, jika terdapat rumah tangga yang mengadakan upacara adat *kuangkai*.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Semakin pendek	WK. Kep. Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Berubah jenis	WK. Kep. Adat
Gotong royong upacara adat	-	Semakin lemah	WK. Kep. Adat
Tujuan upacara adat	-	Sudah berubah	WK. Kep. Adat
Konflik lahan	Sering sekali	Meningkat	WK. Kep. Adat
Konflik keluarga	Jarang	Berfluktuasi	WK. Kep. Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Berfluktuasi	WK. Kep. Adat
Konflik agama	Jarang	Menurun	WK. Kep. Adat
Konflik air/sumber daya alam	Seringkali	Meningkat	WK. Kep. Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Meningkat	RT Kurmam
Jumlah konflik	-	Berfluktuasi	RT Kurmam
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Menurun	RT Kurmam

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam¹²

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Kampung Sembuan masih mempunyai potensi hutan yang cukup luas. Lebih dari setengah luas wilayah kampung adalah hutan. Hutan merupakan jenis tata guna lahan yang paling luas di Sembuan.

¹² Informasi dari Petinggi, Ketua BPK, Rumah Tangga Kurang Mampu, Rumah Tangga.

Kampung Sembuan

Jenis-jenis hutan yang masih ada adalah: 1) hutan perawan atau *pugaq*; 2) hutan sekunder tua atau *aweq ngelewango* (>30 tahun); 3) hutan sekunder muda atau *bengkelet* (20-30 tahun); 4) belukar tua atau *urat* (5-10 tahun); 5) belukar atau *urat bateq* (2-5 tahun); 6) hutan rawa atau *bau*; 7) hutan lindung.

Jenis hutan yang masih tetap adalah hutan perawan, hutan lindung dan hutan rawa.

Dalam 5 tahun terakhir, hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda berkurang karena pengambilan kayu oleh perusahaan dan adanya perubahan jenis hutan ini menjadi belukar tua dan belukar. Sehingga jenis hutan belukar tua dan belukar bertambah.

Penebangan skala besar oleh HPH dan HPHH telah mengakibatkan berkurangnya luasan hutan, jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan. Penebangan ini menyebabkan terjadinya penumpukan batang kayu di hutan-hutan dan sulitnya mendapatkan hewan buruan. Namun demikian dari sisi pendapatan rumah tangga, hampir semua rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan dari pembayaran berupa *fee* kayu dari perusahaan. Artinya terjadi peningkatan pendapatan di rumah tangga.

Menurut Wakil Ketua BPK, perubahan yang terjadi terhadap kawasan hutan:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Banyaknya penebangan (HPHH)	Banyak limbah batang kayu (dari tebangan PT. RKR yang tidak digunakan)
Hutan yang lebih mudah diakses	-	sehingga memudahkan orang untuk menebang
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Adanya HPHH	- Sulit mendapatkan hewan buruan - Sulit mendapatkan ikan - Kayu-kayu berkurang

Jenis tata guna lahan yang lainnya adalah:

- ladang;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- *simpukng*/buah;
- kebun kopi;
- kebun rempah-rempah dan bumbu (kunyit, kencur, jahe, lombok).

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Wilayah yang terletak di kiri dan kanan Sungai Nyuatan ini masih mempunyai potensi kayu yang cukup banyak. Dengan topografi tanah sekitar kemiringan sampai 50 derajat ini, sangat memudahkan penebangan kayu secara teknis.

Sebenarnya tiap-tiap rumah tangga atau kelompok rumah tangga di kampung ini bisa mengajukan ijin konsesi kayu, namun karena kendala teknis manajemen perkayuan, tidak satu pun rumah tangga atau kelompok rumah tangga mengajukan ijin pemanfaatan kayu. Sebagian besar rumah tangga di Sembuan mempunyai hak waris lahan secara turun menurun dan lahan hak waris tersebut masih mempunyai potensi kayu yang cukup banyak.

Kampung Sembuan

Mengetahui potensi kayu di Sembuan ini, PT. Rimba Karya Raya (RKR) mendatangi kampung dan minta persetujuan dari ahli waris lahan atau pemilik lahan, petinggi, dan Kepala Adat sebelum mengajukan permohonan konsesi IUPHHK di wilayah Kampung Sembuan. Tidak ada keterangan mengenai kapan konsesi IUPHHK di kampung ini dilaksanakan.

Berdasarkan musyawarah bersama antara ahli waris lahan atau pemilik lahan dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah kampung dan BPK, diputuskan untuk memberikan ijin IUPHHK pengelolaan kayu di lahan pewaris atau pemilik hak. Sebagai kompensasi PT. RKR harus memberikan *fee* dari hasil penebangan pohon sebesar Rp. 40.000/kubik, perusahaan menyepakati ketentuan yang diminta pemilik lahan.

Dengan kesepakatan ini, hampir seluruh rumah tangga di Sembuan mendapatkan penghasilan berupa *fee* dari penebangan pohon. Besarnya *fee* yang diterima berfluktuasi, tergantung dari jumlah kubikasi penebangan pohon, demikian pula dengan penerimaan *fee* tidak tentu, tergantung pada aktivitas penebangan. *Fee* diterima sejak 2001 sampai 2003. Bulan November 2003 merupakan pembayaran *fee* terakhir dari PT. RKR.

Selain lahan yang diijinkan dikelola PT. RKR, di Sembuan ditetapkan pula kawasan seluas 200 hektar sebagai kawasan lembo dan kebun rotan. Kawasan hutan lindung baru diusulkan seluas 5 km². Kawasan hutan lindung ini akan dipergunakan oleh masyarakat sebagai tempat cadangan persediaan kayu ramuan rumah atau bahan bangunan. Penggunaan kayu akan didasarkan pada ijin Petinggi dan Kepala Adat. Penebangan tanpa ijin dari Petinggi dan Kepala Adat belum diatur di peraturan kampung, karena kawasan hutan lindung ini baru pada tahap usulan, sehingga tidak ada sanksi terhadap penebangan yang dilakukan di kawasan yang direncanakan dijadikan kawasan hutan lindung.

Responden rumah tangga kurang mampu menyatakan bahwa pengajuan IPKK/HPHH/IPHH hanya diajukan oleh rumah tangga yang mempunyai petak lahan. Responden kurang mampu tidak mendapatkan penghasilan dari *fee* kayu karena tidak memiliki petak atau lahan dan tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan di kampung.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Di wilayah kawasan Sembuan masih terdapat cadangan tanah lahan dan pekarangan rumah yang cukup luas, sehingga akses masyarakat terhadap tanah masih mudah. Dengan adanya ketersediaan lahan ini, masyarakat tidak pernah menjual lahan di antara sesama masyarakat Sembuan atau dengan masyarakat di luar Sembuan. Transaksi tanah hanya sebatas sewa-menyewa tanah. Sewa-menyewa ini terjadi antara orang yang tinggal di kampung dengan warga kampung yang kembali lagi ke kampung setelah di tempat kerjanya diberhentikan atau di PHK oleh perusahaan.

Jarak lahan paling jauh yang dimiliki rumah tangga di Sembuan adalah sekitar 2 kilometer atau 30 menit jika jalan kaki. Lahan ini bisa dicapai melalui jalan kampung yang kemudian dilanjutkan dengan melalui jalan setapak ke ladang atau lewat sungai. Cukup banyak rumah tangga di Sembuan ini yang ke ladang dengan mempergunakan sepeda motor, sebagian jalan kaki. Keterjangkauan terhadap lahan dalam 5 tahun ini berfluktuasi berdasarkan harga. Bila harga rotan naik maka lahan dimana tanaman rotan ini tumbuh menjadi semakin mahal harganya.

Kampung Sembuan

5.4 Perladangan

Dalam 5 tahun terakhir ini, antara 75% - 89% masyarakat responden rumah tangga selalu membuat ladang. Umumnya jumlah yang berladang ini semakin tahun semakin meningkat. Dalam kurun waktu tersebut tidak ada masyarakat yang membuat sawah atau rapak. Pada tahun 2003 sekitar 83% responden berladang di lahan sendiri, sisanya berladang di lahan pinjaman dan lahan bebas. Yang berarti keterjangkauan terhadap lahan meningkat karena pada tahun 2002, 76% responden berladang di lahan sendiri.

Pada tahun 2002, jumlah benih yang ditanam petani bervariasi antara 0,5 kaleng hingga 18 kaleng, namun sekitar 27 % responden menanam 3 kaleng benih. Pada tahun 2003 jumlah benih yang ditanam bervariasi antara 0,5 - 12 kaleng benih, sekitar 23% menanam 3 kaleng benih dan 10% menanam 5 kaleng benih.

Pada tahun 2003, sekitar 15% responden mengalami gagal panen. Sekitar 43% responden hasil panennya mencukupi hingga panen berikutnya. Responden lainnya menyatakan bahwa hasil panen mereka hanya bertanam antara 1 - 10 bulan.

Sekitar 76% responden harus membeli beras tambahan pada tahun 2002/2003 karena tidak ada pihak manapun yang memberikan bantuan beras.

Sekitar 72% responden berladang pada lahan bekas ladang yang berusia dibawah 10 tahun. Sisanya berladang pada lahan yang berusia antara 10 - 20 tahun (16%), hanya sedikit yang berladang di rimba atau lahan yang berusia diatas 20 tahun.

Jarak tempuh kampung ke ladang bervariasi antara 2 - 120 menit. Sekitar 30% responden memerlukan waktu 60 menit ke ladang dan 24% memerlukan waktu 30 menit. Sekitar 88% responden berangkat ke ladang dengan berjalan kaki, sisanya berangkat dengan sepeda motor dan ces.

5.5 Pendapatan uang

Sebagian besar rumah tangga di Sembuan berpendapatan dari pembagian *fee* kayu dari PT. RKR. *Fee* terakhir akan diterima bulan November 2003. Jumlah *fee* tidak merata tiap-tiap rumah tangga. Pendapat lain dari hasil kebun sayur yang dijual di luar kampung dan penjualan rotan. Sebagian kecil lain berpenghasilan dari warung, guru, pemerintah kampung, penjualan kerajinan parang, sebagai tenaga upahan menebas di ladang orang. Pendapatan temporer lainnya sebagai wakil kesenian adat ke luar negeri, ahli pengobatan tradisional, dan tukang *wara* pada upacara *kuangkai*.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Terdapat pasar di Sembuan dengan frekuensi buka sekali dalam seminggu. Dalam 5 tahun terakhir, frekuensi buka pasar sama. Pasar terdekat dari kampung selain pasar yang ada di kampung adalah pasar di Barong Tongkok atau di Damai. Perjalanan bisa ditempuh selama 120 menit memakai mobil dengan ongkos Rp. 20.000/orang sekali jalan.

Perubahan kondisi jalan darat dalam 5 tahun terakhir semakin baik. Sedangkan kondisi sungai sebagai jalan tetap. Ruas jalan antara Melak ke Barong Tongkok beraspal. Barong Tongkok ke Sembuan sebagian telah diaspal, jalan mulai dari Mencimai sampai ke Sembuan sebagian masih berupa pengerasan jalan dengan batu kerikil. Ongkos transportasi reguler dari Sembuan ke Melak adalah Rp. 75.000 dengan sepeda motor atau Rp. 30.000 dengan mobil. Dalam 5 tahun terakhir ini waktu tempuh perjalanan darat ke kecamatan, kabupaten dan kota menjadi lebih cepat.

Kampung Sembuan

5.7 Keterjangkauan energi

Energi yang dipergunakan di Sembuan adalah: 1) kayu bakar; 2) minyak tanah; 3) gas. Energi minyak tanah dan gas baru dipergunakan pada 5 tahun terakhir ini. Kayu bakar sudah dipergunakan sebelumnya. Semua energi yang ada masih dapat terjangkau. Sebenarnya PLN telah membangun instalasinya di kampung ini, namun belum beroperasi dengan baik.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian besar rumah terbuat dari kayu biasa yang bukan ulin atau bengkirai. Lantai rumah sejumlah 82% responden terbuat dari kayu biasa dan hanya sekitar 4% yang memakai ulin. Sekitar 45% responden atap rumahnya terbuat dari seng, sisanya terbuat dari sirap, keping dan bahan lainnya. Sekitar 6% dinding rumah responden terbuat dari ulin sedangkan sebagian besar atau sejumlah 82% terbuat dari papan kayu biasa, serta masih ada sekitar 12% responden yang dinding rumahnya terbuat dari kulit kayu.

Tidak ada listrik PLN di kampung ini. Sumber listrik atau penerangan di dapat dari listrik pribadi (31%) dan sisanya listrik kelompok dan listrik kampung. Masih terdapat 37% responden yang belum mempunyai listrik.

Sekitar 64% responden menggunakan WC sungai, 20% menggunakan WC darat dan ada sekitar 16% responden yang sudah mempunyai WC di dalam rumah.

Rumah berjajar di kiri dan jalan blok kampung. Sebagian besar ukuran antara 8 x 12 meter, kondisi lingkungan di sekitar rumah cukup bersih. Hanya beberapa bagian rumah menuju jalan poros antar kampung kondisinya tidak terawat dan sering ditinggalkan penghuninya.

Beberapa rumah tangga masih menempati bangunan pasar. Satu rumah tangga di antaranya telah mempersiapkan rumah pribadi di samping pasar. Sebagian rumah tangga menggunakan listrik dari generator, instalasi listrik PLN sudah ada tapi listrik PLN belum menyala di kampung.

Kampung Sembuan

5.9 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat	Berfluktuasi	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik	Sama	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan sawah	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan <i>simpukng</i>	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Kebun jahe, kencur, lombok	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder tua	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder muda	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Belukar tua	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan kerangas	Tidak ada	-	Ketua BPK
Hutan lindung	Ada	Tetap	Ketua BPK
Akses kepada hutan	Mudah	Berkurang	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan dan hewan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Tidak tentu	Berkurang	Ketua BPK

6. Pendidikan⁵

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar 32% responden rumah tangga menyatakan bahwa ada anak putus sekolah dalam keluarga mereka. Pada umumnya mereka putus sekolah pada tingkat SD dan SMP. Alasan putus sekolah adalah karena kekurangan biaya, malas sekolah dan alasan lainnya. Dari jumlah anak sekolah yang ada, hanya sedikit yang meninggalkan sekolah beberapa saat dengan alasan bekerja. Kualitas pendidikan guru, berdasarkan tingkat pendidikan, kurang. Keaktifan mengajar berkurang. Persentase kelulusan siswa sama saja. Demikian pula tingkat orang yang dapat membaca dan menulis, sama saja. Pemerintah pernah mengadakan pendidikan program paket A di kampung.

Terdapat dua alasan anak-anak putus sekolah. Pertama, orang tua kurang mampu membiayai anaknya. Kedua, orang tua kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak. Prestasi siswa yang mengikuti ujian, dari seluruh siswa yang mengikuti ujian 90% lulus. Jumlah siswa baru pada tahun ajaran ini 8 orang.

⁵ Informasi dari Kepala Sekolah Dasar di Sembuan.

Kampung Sembuan

6.2 Infrastruktur dan pelayanan

Di Sembuan hanya terdapat 1 Sekolah Dasar Negeri. Siswa yang ingin melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dapat bersekolah di Kampung Dempar yang berjarak 10 kilometer dari kampung. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada di Melak yang berjarak 70 kilometer dari Kampung Sembuan. Dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah sekolah tetap sama tetapi jumlah alat-alat dan buku-buku berkurang. Di satu pihak kondisi fisik sekolah dan gaji guru menjadi lebih baik.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Tidak tetap	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Lebih baik	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Presentasi kelulusan	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat orang dapat membaca dan menulis	-	Sama saja	Kepala Sekolah

7. Kesehatan⁶

7.1 Keadaan umum penyakit

Jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok umur	Jenis penyakit
Anak-anak	Sakit perut, demam
Orang dewasa	Rematik, demam
Perempuan	Tidak dapat anak
Orang lanjut usia	TBC

Penyakit malaria menyerang seluruh kelompok umur, mulai anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tingkat keseringan berjangkitnya penyakit malaria berfluktuasi. Tingkat keseringan terjangkit penyakit diare yang diderita oleh setiap kelompok umur meningkat. Penyakit TBC paling sering diderita kelompok umur usia lanjut. Akhir-akhir ini tingkat keseringan serangan penyakit TBC menurun.

Dalam 12 bulan terakhir ini, jumlah orang yang meninggal adalah 2 orang dikarenakan penyakit lumpuh, stroke, dan muntah darah. Rata-rata orang meninggal berumur 50 tahun ke atas yang umumnya meninggal karena penyakit. Di Sembuan, penyakit yang paling sering mengakibatkan kematian adalah demam dan sakit perut.

Dalam 12 bulan terakhir, 7 orang bayi lahir dengan berat rata-rata kurang diketahui secara pasti. Umur ibu saat kehamilan pertama kali adalah 17 tahun. Tidak

⁶ Informasi dari Tukang Belian di Sembuan.

Kampung Sembuan

terdapat anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir ini. Tidak terdapat pula ibu yang meninggal saat melahirkan.

7.2 Fasilitas air

Sepuluh dari rumah tangga di Sembuan mendapatkan sumber air bersih dari pancuran air dan air sungai dari Kepala Sungai Pejuling. Jumlah air bersih menurun dan mutunya berfluktuasi. Perubahan ini terjadi karena hujan dan akibat penebangan hutan yang menyebabkan erosi. Saat terjadi kemarau, tidak pernah ada bantuan air bersih dari luar kampung. Di Sembuan tidak terdapat bak penampungan air untuk kepentingan umum, masyarakat umumnya menyimpan air di gentong dan jerigen.

7.3 Kebersihan Kampung

Keadaan kampung cukup bersih, blok-blok jalan di kampung cukup rapi dan telah dilakukan semenisasi. Hanya jalan setapak di tepian Sungai Nyuatan yang masih berupa jalan tanah. Ruas jalan ini rawan terkena erosi. Susunan rumah di tiap blok cukup rapi, hanya terdapat beberapa rumah yang terletak di jalan menuju jalan poros kampung yang tidak terawat karena sering ditinggalkan oleh penghuninya.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di kampung hanyalah tukang belian. Tidak terdapat orang dari luar kampung yang berobat pada tukang belian. Fasilitas kesehatan terdekat ada di Barong Tongkok. Perjalanan ke Barong Tongkok memerlukan waktu perjalanan 120 menit dengan mobil dari kampung, dengan ongkos Rp. 20.000/orang sekali jalan.

Jumlah ahli pengobatan tradisional di kampung adalah 5 orang. Namun dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah ahli pengobatan tradisional menurun. Frekuensi pengobatan tradisional dalam satu bulan kurang dari sekali. Pengobatan tradisional ini berbeda dengan pengobatan di puskesmas. Pengobatan tradisional dilakukan melalui upacara pengobatan tradisional. Bahan-bahan upacara pengobatan tradisional didapatkan dari kebun atau hutan. Kalau tidak didapatkan di kebun atau di hutan maka bahan harus dibeli. Pembelian bahan pengobatan dan upah tukang belian kira-kira sekitar Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 tergantung pada jenis bahan pengobatan dan upah tukang belian.

Kampung Sembuan

7.5 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air pancuran	Menurun	Tukang belian
Mutu air bersih	Air pancuran	Berfluktuasi	Tukang belian
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Tukang belian
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Tukang belian
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama	Tukang belian
Ketersediaan obat-obat dan peralatan	Tidak ada	Sama	Tukang belian
Gaji/honor	Tidak ada	-	Tukang belian
Penyakit malaria	Ada	Berfluktuasi	Tukang belian
Penyakit diare	Ada	Meningkat	Tukang belian
Penyakit TBC,	Ada	Menurun	Tukang belian
Jumlah ahli pengobatan tradisional	4 orang	Berkurang	Tukang belian
Upacara pengobatan tradisional	Ada	Berkurang	Tukang belian

8. Sejarah Bencana

Dalam 10 terakhir ini tercatat 5 peristiwa penting, diantaranya terjadinya perubahan pemerintah, perubahan dari pemerintah yang sentralistik ke pemerintah otonom sejak tahun 2000. Pemerintahan yang lama berpusat di Kabupaten Kutai di Tenggarong, saat ini telah berpusat ke Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, namun perubahan ini dirasa tidak ada dampaknya, khususnya bagi kampung ini.

Peristiwa lain adalah kelaparan, banjir, kekeringan dan serangan hama. Kekeringan yang terjadi selama berbulan-bulan telah mengakibatkan padi yang ditanam banyak yang mati, air bersih sangat sulit didapatkan, tanaman buah banyak yang mati, sehingga saat itu bukan hanya panen padi yang gagal, tapi juga gagal panen buah-buahan.

Gagal panen biasanya disusul dengan peristiwa kelaparan yang mengakibatkan banyak anak kekurangan gizi. Serangan hama belalang dan burung pipit, yang semakin memperburuk hasil panen. Kekeringan mengakibatkan banyak pohon yang mati, mengakibatkan permasalahan lain pada saat musim hujan. Akar-akar pohon tidak lagi dapat menampung air hujan sehingga selepas hujan mulai reda, menyusul bencana banjir yang mengakibatkan masyarakat susah melakukan aktivitas karena air naik sampai ke rumah dan jalan.

Bencana yang terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No	Bencana	Dampak
1	Kelaparan	Banyak anak yang kekurangan gizi
2	Kekeringan	- Banyak padi semua jenis mati - Susah mendapatkan air bersih
3	Banjir	- Susah beraktivitas - Air pernah naik sampai ke rumah dan jalan
4	Hama	Gagal panen hampir satu tahun
5	Pergantian pemerintahan	Namun tidak berdampak, khususnya bagi kampung ini

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Sembuan. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- tidak dapat menyekolahkan anak;
- tidak ada penghasilan, tidak dapat membangun rumah;
- tidak punya petak hutan, sulit mencari pekerjaan;
- tidak ada alat penyeberangan, tidak ada puskesmas pembantu;
- tidak mempunyai rumah adat, tidak punya Kantor Kepala Kampung yang layak.

Menurut masyarakat biasa:

- tidak cukup sandang (tempat tinggal, dll) dan pangan (makanan dan kesehatan);
- hasil pertanian (kebun) setempat tidak ada harga serta tempat pemasarannya terbatas;
- pendidikan masih rendah, fasilitas pendidikan masih terbatas, belum ada beasiswa atau pendidikan gratis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- listrik dan jalan belum maksimal;
- fasilitas kesehatan masih terbatas sebab belum ada pusban dan tenaga medis di kampung;
- hutan dikelola oleh orang luar sementara masyarakatnya hanya jadi penonton.

Menurut tokoh masyarakat:

- motivasi anak dan orang tua terhadap pendidikan masih rendah. Tidak ada biaya terutama utk melanjutkan pendidikan tingkat menengah dan tinggi;
- fasilitas kesehatan dan tenaga medis tidak ada;
- peluang usaha masih terbatas, sementara sumber daya alam diklaim pihak luar);
- produk pertanian dan perkebunan (seperti rotan dan sayur-sayuran) tidak ada harga;
- pemerintah kurang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat;
- listrik dari pemerintah belum maksimal karena belum menyala;
- jalan belum maksimal karena belum ada jembatan penghubung dari kampung ke seberangnya.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Kelembagaan musyawarah dirasakan semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan frekuensi musyawarah dan hasil musyawarah yang semakin berdampak pada masyarakat. BPK sebagai lembaga yang berperan dalam kelembagaan musyawarah sudah aktif bekerja. Hubungan dengan pemkab dirasakan meningkat, baik dari sisi jarak, tingkat kepedulian, pelayanan, keterbukaan informasi, partisipasi maupun bantuan.

Secara umum, tingkat kebersamaan masyarakat cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada rendahnya tingkat gotong royong dalam pelaksanaan upacara adat

Kampung Sembuan

dan meningkatnya frekuensi konflik lahan. Model upacara adat sudah berubah, baik dari sisi waktu maupun tujuan. Lembaga adat merasa hukum adat semakin tidak dipatuhi, hal ini membuat mereka kesulitan dalam menegakkan hukum adat. Selain konflik lahan yang meningkat, konflik air pun dirasakan meningkat. Sementara itu, konflik agama semakin menurun.

Infrastruktur ekonomi cenderung membaik, hal ini dapat dilihat pada perbaikan jalan. Akses terhadap hutan meningkat, salah satu dampaknya adalah munculnya pendapatan baru berupa *fee* dari HPHH. Namun di sisi lain, peningkatan akses terhadap hutan juga mengakibatkan menurunnya jumlah luasan hutan. Sementara itu, jenis tata guna lahan lain seperti kebun rotan, kebun karet, *simpukng* serta ladang meningkat jumlah luasannya.

Kondisi sekolah dirasakan membaik, walaupun jumlah sekolah tidak berubah. Sayangnya, peralatan serta jumlah staf menurun. Sementara itu, gaji guru meningkat, namun kenaikan gaji tidak diikuti oleh kenaikan keaktifan guru dalam mengajar. Tidak ada perubahan pada jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis.

Fasilitas kesehatan cenderung menurun. Sampai dengan saat ini tidak ada fasilitas kesehatan di kampung. Sementara tingkat penyakit diare cenderung meningkat.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Sembuan, survei dilakukan dengan melibatkan:

- rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- tukang belian (sebagai pengganti unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Kampung Sembuan

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah dipersiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Tanjung Soke

Jumlah rumah tangga: 23	Jumlah jiwa: 93
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 33	Jumlah KK: 57
Jumlah rumah tangga miskin: 6	Jumlah TK: 1
Suku mayoritas: Luangan	Jumlah SD: 1
Nama Petinggi: Atomsyah	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPK: Gri	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1 jam (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 5.5 jam (dengan bis)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Bongan, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 116 ⁰ 8' BT, 0 ⁰ 59' LS	
Tanggal survei: 19 - 21 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Staf Lembaga Adat, Kampung Tanjung Soke sudah berdiri sejak tahun 1954. Masyarakat Tanjung Soke memiliki keyakinan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lamin Luangan yang jaraknya sekitar 4 kilometer dari Tanjung Soke. Secara resmi, kampung ini baru berdiri pada tahun 2003, sebelumnya masih merupakan bagian dari kampung Gerunggung.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani.

Kampung Tanjung Soke

Menurut Ketua BPK, lembaganya didirikan pada tahun 2003 tepatnya pada bulan Januari, tetapi mereka belum dilantik dan digaji. BPK melakukan konsultasi dengan masyarakat rata-rata 3 bulan sekali.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Kondisi ekonomi kampung	Melakukan gotong royong
Bangunan rumah	Membangun rumah di sekitar jalan PU atau jalan poros kampung

Menurut Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir musyawarah semakin sering dilakukan. Meningkatnya frekuensi musyawarah dibarengi dengan kualitas dan tingkat dampak keputusan musyawarah yang semakin baik.

Menurut pengamatan pewawancara di kampung ini memang tingkat kualitas musyawarah semakin baik, hal ini disebabkan adanya orang yang disegani dan menjadi panutan masyarakat.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Meningkat	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Tanjung Soke pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

No.	Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
1	Prasarana jalan	Belum ada jawaban
2	Pembuatan kantor Kepala Kampung	Belum ada jawaban
3	Pembangunan Lamin adat	Belum ada jawaban
4	Pengadaan listrik	Belum ada jawaban
5	Reboisasi	Belum ada jawaban

Kampung Tanjung Soke

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut ketua BPK
1	-	-	Bantuan jalan dari pengusaha setempat
2	-	-	Mengadakan sunatan massal dan pengadaan Guru Pengajian, bantuan didapat dari organisasi keagamaan di Balikpapan

Menurut orang kurang mampu, tidak pernah ada bantuan yang didapatkan dari pihak manapun. Hal senada juga dijelaskan oleh Petinggi bahwa Kampung Tanjung Soke tidak pernah mendapatkan bantuan.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Kunjungan pejabat pemerintahan ke Tanjung Soke sebenarnya cukup sering. Bahkan tamu-tamu yang pernah berkunjung adalah tamu-tamu penting seperti:

- Camat;
- Gubernur;
- Bupati;
- Pangdam Tanjung Pura.

Namun kunjungan tersebut kebanyakan bukanlah kunjungan kerja, melainkan kunjungan wisata. Kampung Tanjung Soke memang menyimpan hal-hal menarik dan unik. Di kampung ini dapat ditemukan benda-benda pusaka seperti mandau sakti, mumi serta alat-alat belian asli. Konon Kodam Tanjung Pura menyimpan salah satu mandau sakti dari kampung ini. Selain untuk melihat benda-benda antik, orang luar mengunjungi Tanjung Soke untuk melihat pesta kebudayaan erau.

Kunjungan semacam ini ternyata tidak membawa dukungan dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ketua BPK, hubungan masyarakat dengan Pemda Kabupaten dalam 5 tahun terakhir cenderung membaik terutama pada saat jalan yang menghubungkan kampung dengan kecamatan mulai membaik. Keterbukaan informasi dan tingkat kepedulian pemerintah dinilai sama saja, hal ini terjadi karena Tanjung Soke baru saja berdiri. Sebelumnya masih merupakan bagian dari Kampung Gerunggung. Keterbukaan informasi dinilai sama saja karena jarak yang cukup jauh dari Kabupaten dan partisipasi pengambilan keputusan dinilai sama saja.

Secara lebih rinci, tabel berikut menjelaskan perubahan hubungan pemerintah dengan masyarakat:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Sama saja
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Sama saja
Partisipasi pengambilan keputusan	Sama saja

Kampung Tanjung Soke

3.3 Sumber dan alat informasi

Informasi yang diperoleh hanya dari mulut ke mulut karena jarak yang cukup jauh dari Kabupaten. Sementara tidak ada satu pun dari warga masyarakat yang memiliki alat komunikasi.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Sama saja	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Sama saja	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Sama saja	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Sama saja	Petinggi

4. Sosial Budaya

4.1 Migrasi penduduk

Tingkat perpindahan penduduk Tanjung Soke ke luar wilayah kampung cukup tinggi. Hal ini diakibatkan oleh sulitnya memperoleh mata pencaharian. Salah satu penyebab dari rendahnya harga hasil hutan adalah ketiadaan jalan sebagai komponen pendukung penting bagi distribusi hasil hutan. Kebanyakan masyarakat Tanjung Soke pindah ke kampung yang dekat dengan perusahaan dengan harapan mereka dapat memperoleh pekerjaan di sana. Selain itu, di kampung dekat perusahaan biasanya lebih mudah untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	29 orang	- mencari pekerjaan
Waktu panjang atau selamanya	2 orang	- mencari pekerjaan - lahan tidak subur

4.2 Upacara adat

Menurut Staf Lembaga Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Kampung Tanjung Soke diantaranya, *Erau*, *Belian*, *Gugu Tahun* dan *Gomlook*.

Secara keseluruhan hampir tidak ada perubahan pada upacara adat baik dari sisi waktu maupun bahan-bahan. Tingkat gotong royong yang terjadi pada masyarakat sama saja dari tahun ke tahun. Sedangkan dari sisi tujuan telah terjadi perubahan karena pada saat ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah untuk menjadikan Tanjung Soke sebagai daerah pariwisata. Sehingga tujuan upacara adat juga ditujukan untuk kepentingan pariwisata.

Menurut Kepala Adat, generasi muda banyak yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari para orang tua.

Kampung Tanjung Soke

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Staf Lembaga Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan sama saja. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- persiapan ladang;
- penanaman padi;
- membersihkan lingkungan perkampungan. Biasanya lebih dari separuh jumlah masyarakat ikut dalam kegiatan gotong royong.

Senada dengan Staf Lembaga Adat, responden rumah tangga kurang mampu juga menyatakan bahwa tingkat kerjasama di kampung dirasakan sama saja dalam 5 tahun terakhir. Jika rumah tangga memerlukan bantuan, biasanya pihak keluarga akan membantu, bahkan warga kampung lain yang bukan keluarga juga biasanya membantu.

Jika terjadi krisis pangan di kampung, biasanya masyarakat mengajukan permohonan bantuan ke pihak kecamatan.

4.4 Konflik

Menurut Staf Lembaga Adat, pernah terjadi konflik batas kampung antara Kampung Tanjung Soke dengan Kampung Deraya. Selain itu, juga sering terjadi konflik lahan antar warga atau keluarga. Frekuensi konflik lahan dirasakan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan konflik lahan ini diakibatkan oleh adanya HPHH. Pemberian ijin eksploitasi hutan HPHH oleh pemerintah kabupaten yang dilakukan tanpa melihat situasi di lapangan mengakibatkan peningkatan konflik. Hal ini terjadi karena nilai komersial hutan meningkat, namun di sisi lain kelembagaan masyarakat masih belum siap mengelola perubahan yang terjadi.

Konflik keluarga dan konflik agama masih jarang terjadi. Menurut Staf Lembaga Adat, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah mengenal agama secara baik.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang dihadapi oleh mereka adalah:

- tidak ada lapangan pekerjaan;
- kebakaran hutan;
- usia yang sudah tua.

Situasi kehidupan dirasakan memburuk dalam 5 tahun terakhir, diakibatkan oleh:

- kekeringan dan kebakaran hutan yang terus menerus terjadi sejak 1997/1998;
- tidak ada bantuan dari pemerintah;
- karena suami telah meninggal dunia.

Mereka merasa tidak mampu membayar pendidikan untuk anak cucu. Sementara itu, mereka juga tidak tahu siapa yang dapat membantu. Untuk masalah kesehatan, mereka merasa tidak terbantu karena pengobatan yang dilakukan tidak secara gratis.

Walaupun dukungan fasilitas kesehatan dirasakan sangat minim, tapi dirinya merasa tidak memiliki masalah untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan di

Kampung Tanjung Soke

kampung. Biasanya dia selalu ikut dalam musyawarah kampung selama sedang ada di rumah.

Jika ada pihak luar yang ingin membantu, dia merasa bantuan yang paling penting adalah perbaikan rumah, bantuan sembilan bahan pokok, serta pemasaran kerajinan. Kerajinan yang dibuat Tanjung Soke adalah produk-produk yang terbuat dari rotan seperti anjat dan bentuk-bentuk keranjang lainnya.

Menurut Ketua Posyandu, jika seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan maka biasanya mereka melakukan:

- pengobatan tradisional;
- meminjam uang;
- meminta bantuan keluarga.

4.6 Hiburan

Di Kampung Tanjung Soke hiburan masyarakat hanya berupa Televisi dan VCD.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Staf Lembaga Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Staf Lembaga Adat
Gotong royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Staf Lembaga Adat
Tujuan upacara adat	Diarahkan untuk mendukung pariwisata	Sudah berubah	Staf Lembaga Adat
Konflik lahan	Terjadi	Meningkat	Staf Lembaga Adat
Konflik keluarga	Jarang	Menurun	Staf Lembaga Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Staf Lembaga Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Staf Lembaga Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Staf Lembaga Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama	Staf Lembaga Adat
Jumlah konflik	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Kampung Tanjung Soke adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- lembo;
- hutan.

Kampung Tanjung Soke

Banyak kebun rotan yang terbakar, terutama kebun jenis sega dan *jepukng*. *Batankng* atau hutan sekunder merupakan tata guna lahan yang paling luas di kampung, diperkirakan sekitar 75% dari luas lahan keseluruhan. Sedangkan hutan perawan atau yang disebut juga dengan alas merupakan jenis tata guna lahan kedua terluas. Hutan ini banyak digunakan perusahaan untuk diambil kayunya.

Menurut Staf Lembaga Adat, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Tanjung Soke adalah:

- hutan perawan (*alas*);
- hutan sekunder tua (*alas tuha*);
- hutan sekunder muda (*batakng*);
- belukar tua (*kloako*);
- belukar (*urat*);
- hutan rawa (*payeq*);
- hutan kerangas (*jaras*).

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Sebenarnya Kampung Tanjung Soke memiliki kawasan hutan yang dilindungi, tetapi belum ada kesepakatan antara petinggi dan masyarakat tentang cara pengelolaan hutan lindung tersebut. Ketiadaan aturan main ini mengakibatkan kekacauan pengelolaan yang ditandai dengan kebebasan masyarakat kampung mengakses hutan. Juga tidak ada sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi hutan secara tidak benar. Masyarakat Tanjung Soke mendapatkan ganti rugi dari HPH PT. Balikpapan Forest Industry (BFI) jika ada lahannya yang terkena area kerja perusahaan. Besarnya ganti rugi beragam tergantung luas lahan yang tergusur.

Menurut rumah tangga kurang mampu, mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai ijin konsesi eksploitasi hutan.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Petinggi, seluruh rumah tangga memiliki lahan. Sampai dengan saat ini belum pernah terjadi jual beli lahan. Ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan bukan untuk memiliki lahan tersebut. Perusahaan hanya berkepentingan untuk mengambil pohon yang berada di atas lahan. Sehingga perusahaan hanya meninggalkan areal kerjanya jika pohonnya sudah habis. Walaupun demikian, ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan dilakukan tanpa adanya perjanjian yang jelas. Sehingga masih kemungkinan dapat terjadi sengketa di masa depan tentang status kepemilikan lahan tersebut.

5.4 Perladangan

Hampir seluruh rumah tangga menanam padi. Penanam padi seluruhnya dilakukan di ladang, tidak ada yang menanam di sawah atau rapaq. Hampir 90% responden rumah tangga yang berladang melakukannya di lahan milik sendiri, sisanya melakukan di lahan pinjaman pada keluarga. Pada tahun 2002, kebanyakan rumah tangga menanam padi sebanyak 2 - 3 kaleng. Namun setahun kemudian, sekitar 40% dari rumah tangga hanya menanam 1 kaleng saja. Sekitar 60% dari rumah tangga yang berladang tidak mencukupi kebutuhan beras dari hasil ladang. Mereka harus membeli beras tambahan. Sekitar 80% dari rumah tangga membuat ladang pada lahan yang sudah berumur lebih

Kampung Tanjung Soke

dari 10 tahun, namun sudah tidak ada yang membuka ladang dari lahan rimba. Hampir seluruh ladang dapat dijangkau dengan jalan kaki selama kurang dari 1 jam.

5.5 Pendapatan uang

Sebenarnya produk yang paling mungkin dijual dari kampung ini selain kayu adalah rotan. Namun sampai dengan saat ini, belum ada penampung rotan yang bersedia membeli rotan dari kampung ini. Hal ini membuat rotan di kampung menjadi kurang bernilai komersial. Sedangkan di sektor pertanian masyarakat sering mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama binatang seperti babi, kera dan payau. Hampir setengah dari responden rumah tangga hanya menggantungkan kehidupannya dari hasil ladang, ini berarti ada kemungkinan tidak memiliki pendapatan uang. Sisanya memiliki pendapatan uang dari menggergaji kayu di hutan, berburu, membuat anjat rotan dan mencari gaharu. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan uang di Kampung Tanjung Soke sangat sedikit, dan ketergantungan terhadap hutan masih sangat tinggi.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak ada pasar reguler di Kampung Tanjung Soke. Tetapi semenjak terbukanya jalan antar kampung yang menghubungkan dengan kampung luar, saat ini sering ada pedagang keliling yang menjual barang-barang peralatan rumah tangga dan pakaian. Pedagang tersebut biasanya menggunakan mobil untuk berkeliling. Frekuensi kehadiran pedagang keliling meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pasar reguler terdekat ada di Jambuq Makmur yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam naik ojek dan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000,-.

5.7 Keterjangkauan energi

Sumber energi yang digunakan di Tanjung Soke adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik;
- tenaga surya.

Dari sumber-sumber energi tersebut, minyak tanah dan listrik merupakan sumber energi baru. Sumber energi tenaga surya diperoleh lewat peralatan yang dibagikan oleh pemerintah kepada pengurus kampung lebih dari 5 tahun lalu. Sehingga hanya pengurus kampung yang memilikinya. Sebelumnya kayu bakar merupakan satu-satunya sumber energi. Sampai dengan saat ini kayu bakar dirasakan masih terjangkau. Sementara listrik dirasakan makin sulit terjangkau karena harga semakin mahal. Selain dari tenaga surya, listrik yang digunakan di kampung kebanyakan merupakan listrik lokal yang dihasilkan dari mesin-mesin pribadi.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Hampir seluruh rumah di Tanjung Soke adalah rumah kayu yang bukan kayu ulin atau bengkirai. Sebagian besar atap rumah adalah atap kepeng dan sirap, sekitar 20% terbuat dari seng. Seluruh rumah dialiri oleh aliran listrik. Sampai dengan saat ini belum ada aliran listrik dari PLN, sehingga listrik kebanyakan berasal dari mesin milik pribadi. Beberapa pengurus kampung memiliki pembangkit listrik tenaga surya yang

Kampung Tanjung Soke

dapat menghidupkan beberapa bola lampu. Seluruh rumah tangga buang air di WC, sekitar 70% WC berada di sungai dan sisanya adalah WC di dalam rumah.

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Menurun	Petinggi
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Kurang baik	Berkurang	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan sawah	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Tidak ada		Ketua BPK
Luasan <i>simpukng</i>	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>alas</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>klauko</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>batangkng</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Belukar tua (<i>belukar</i>)	Tidak ada	-	Ketua BPK
Belukar (<i>orep</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>payeq</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>jaras</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan lindung	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Akses kepada hutan	Tidak ada karena habis		Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan hewan	-	Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Banyak tanaman kena hama	Memburuk	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Dari sepuluh rumah tangga yang survei, hanya ada satu rumah tangga yang memiliki anak putus sekolah pada tingkat SLTP. Kejadian putus sekolah diakibatkan sebagian besar oleh kurangnya kemampuan rumah tangga untuk membayar biaya pendidikan.

Masih banyak anak-anak yang harus membolos sekolah karena harus membantu para orang tua bekerja di ladang.

Siswa yang ikut ujian akhir pada tahun 2003 lulus seluruhnya. Jumlah orang yang dapat membaca dan menulis meningkat. Pada umumnya, anak mulai dapat membaca pada kelas 3 SD.

Kampung Tanjung Soke

Tingkat pendidikan para guru mengalami peningkatan. Sayangnya kenaikan gaji tidak meningkatkan keaktifan para guru.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Menurut kepala sekolah, fasilitas pendidikan di Kampung Tanjung Soke sangat kurang. Walaupun sudah terdapat gedung sekolah tetapi fasilitas yang ada sangat terbatas dan tenaga pengajar sangat kurang sekali. Saat ini hanya terdapat 2 orang guru pengajar tetap dan 1 guru kunjung. Guru kunjung adalah guru yang tidak tinggal menetap di Tanjung Soke, dia merupakan guru SD di *Camp* Bongan. Selain itu minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan masih kurang, hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya motivasi dari para orang tua.

Di Tanjung Soke terdapat 1 buah TK Al-Quran dan 1 buah Sekolah Dasar. Untuk melanjutkan ke SLTP dan SLTA, biasanya anak-anak pergi ke Kampung Jambuq Makmur yang dapat ditempuh selama 1 jam dengan sepeda motor. Khusus untuk SLTA, banyak yang melanjutkan ke Balikpapan. Sampai dengan sekarang belum ada anak dari Tanjung Soke yang sekolah sampai ke perguruan tinggi.

Gedung sekolah dasar yang ada merupakan hasil sumbangan dari PT. BFI ditambah dengan swadaya masyarakat. PT. BFI membangun gedung SD pada tahun 1995. Sekolah mulai beroperasi pada tahun 1995, tetapi sempat terhenti selama 2 tahun pada tahun 2001 dan 2002 akibat kekurangan biaya. Sekolah beroperasi kembali pada tahun 2003. Pada awal tahun 2003, masyarakat menambah ruangan kelas dengan dana swadaya.

Karena sekolah dibangun dari dana perusahaan dan dana swadaya yang sangat terbatas maka kondisi bangunan sekolah masih sangat memprihatinkan.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	2	Bertambah	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih kecil	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Lebih baik	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih aktif	Kepala Sekolah
Persentase kelulusan	-	Meningkat	Kepala Sekolah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan mutu kesehatan

Keadaan kesehatan bisa dikatakan membaik karena jumlah kematian kecil sekali. Tahun lalu masih dijumpai satu kasus kematian. Keadaan balita di Kampung Tanjung Soke bisa di katakan baik karena tidak ada bayi yang meninggal selama 12 bulan terakhir. Usia ibu pada saat kehamilan pertama hanya 17 - 18 tahun.

Kampung Tanjung Soke

Jumlah kelahiran dalam 12 bulan terakhir adalah satu orang dengan rata-rata berat sekitar 3 kg.

Jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Demam, diare
Orang dewasa	Malaria, typhus, beri-beri
Perempuan	Pendarahan, keputihan.

Penyakit malaria hanya dapat terkena pada orang-orang yang bekerja di hutan yang terletak di luar kampung.

7.2 Kondisi fasilitas kesehatan

Di Tanjung Soke tidak ada fasilitas kesehatan. Mereka dilayani oleh tenaga perawat kesehatan yang keliling dan mengunjungi kampung setiap seminggu sekali. Fasilitas kesehatan terdekat terletak di *Base Camp* Bongan yang dapat ditempuh sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor.

7.3 Fasilitas air bersih

Seluruh masyarakat kampung menggunakan air sungai untuk seluruh keperluan termasuk air minum, walaupun mereka faham bahwa kualitas air sudah banyak menurun. Ketua Posyandu mengaku tidak tahu persis mengapa kualitas air menurun. Dia menduga penyebabnya adalah kerbau yang mandi di sungai tersebut .

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Jumlah orang yang dapat mengobati secara tradisional di Kampung Tanjung Soke dalam 5 tahun terakhir menurun hanya tinggal 1 orang. Frekuensi pengobatan secara tradisional kurang dari sekali dalam sebulan.

Kampung Tanjung Soke

7.5 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air sungai	Sama	Ketua Posyandu
Mutu air bersih	Air sungai	Menurun	Ketua Posyandu
Mutu air sungai		Berkurang	Ketua Posyandu
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Gaji/honor	Tidak ada	-	Ketua Posyandu
Penyakit Malaria	Ada untuk yang masuk hutan	Sama	Ketua Posyandu
Penyakit Diare	Ada	Meningkat	Ketua Posyandu
Penyakit TBC	Ada	Berfluktuasi	Ketua Posyandu
Jumlah ahli pengobatan tradisional	1 Orang	Menurun	Staf Lembaga Adat
Upacara pengobatan tradisional	Kurang sekali per bulan	Menurun	Staf Lembaga Adat

8. Sejarah Bencana

Berikut adalah daftar bencana yang pernah terjadi di Tanjung Soke:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran hutan 1997	Banyak kebun Rotan dan hasilnya habis terbakar
2	Kekeringan 1982	Penyakit muntaber mewabah
3	Banjir 1970	Sawah di genang air yang membuat gagal panen
4	Hama Babi, warik, payau 1962	Gagal panen
5	Kelaparan 1982	Masyarakat banyak yang sakit karena kekurangan makanan

Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang paling dominan di Tanjung Soke. Terbakarnya kebun rotan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Kelaparan dan kekeringan terjadi pada tahun 1982 yang mengakibatkan banyak masyarakat yang sakit terutama muntaber karena masyarakat kekurangan makanan. Pada tahun 1970 juga pernah terjadi banjir yang mengakibatkan banyak tanaman yang mati sehingga menyebabkan gagal panen serta pada tahun 1962 banyak hama yang mengganggu petani yaitu babi, warik dan payau.

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Tanjung Soke. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- harga hasil hutan (rotan) rendah karena sulitnya pemasaran. Tidak ada penampung atau pembeli rotan;
- susah mendapatkan air bersih;
- tidak ada fasilitas kesehatan dan rumah ibadah;
- hutan habis karena hadirnya perusahaan;
- pendidikan rendah, kurang guru.

Menurut masyarakat biasa:

- sarana sekolah SD dan tenaga guru;
- sarana air bersih dan rumah ibadah;
- adanya pihak perusahaan yang hadir dan ganti rugi tidak seimbang.

Menurut tokoh masyarakat:

- ganti rugi pihak perusahaan kecil;
- fasilitas kesehatan tidak ada yang baik, tidak ada tenaga medis;
- penerangan dan listrik tidak ada;
- perusahaan yang hadir tidak membawa keuntungan bagi warga;
- perhatian pemerintah kurang.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Perubahan yang cukup signifikan terjadi adalah kesempatan untuk mengambil kayu di hutan. Saat ini masyarakat merasa lebih terbuka untuk mengambil kayu. Pekerjaan tersebut terbukti menjadi mata pencaharian baru bagi beberapa rumah tangga.

Keterbukaan akses terhadap hutan selain meningkatkan pendapatan uang bagi sebagian rumah tangga, ternyata juga sekaligus meningkatkan konflik warga. Staf Lembaga Adat mengakui bahwa keterbukaan akses kepada hutan lewat kebijakan HPHH telah meningkatkan konflik lahan di kampung.

Ada hal yang juga menarik dari sisi upacara adat. Saat ini pemerintah kabupaten menetapkan Tanjung Soke sebagai salah satu daerah tujuan wisata budaya. Hal ini membuat tujuan upacara adat sedikit bergeser agar sesuai dengan kepentingan pariwisata.

Walaupun kampung ini cukup sering dikunjungi pejabat penting dari camat sampai dengan gubernur, tapi dukungan dan kepedulian pemerintah dirasakan tidak berubah sejak 5 tahun lalu. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan buruknya fasilitas pendidikan dan tidak adanya fasilitas kesehatan di kampung. Yang menarik dari kasus ini adalah tingkat kerjasama warga yang masih baik. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan sekolah dasar yang sebagian berasal dari usaha swadaya masyarakat.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Tanjung Soke, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 13 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 2 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- guru;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- kader posyandu (menggantikan unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 3 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok- kelompok diskusi.

Profil Kampung Tebisaq

Jumlah rumah tangga: 77	Jumlah jiwa:381
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I:68	Jumlah KK:109
Jumlah rumah tangga miskin:12	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Benuaq	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Ahen	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Rasmadi	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1 jam (sepeda motor)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 5 jam (sepeda motor atau mobil)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Muara Pahu, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 115 ⁰ 57' BT, 0 ⁰ 27' LS	
Tanggal survei: 12 - 14 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Tebisaq sudah berdiri lebih dari 110 tahun lalu. Sampai dengan sekarang sudah terjadi penggantian lamin sebanyak 4 kali. Pendiri Kampung Tebisaq sebelumnya berasal dari Lamin Karbinaq dan Lamin Demining yang berada di atas Kampung Sancang yang masih berada pada daerah aliran sungai yang sama.

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- LMD;
- Kelompok Tani;
- Koperasi.

Kampung Tebisaq

Menurut ketua BPK, selain lembaga-lembaga yang berbasis di kampung seperti tersebut di atas, juga ada satu lembaga swadaya masyarakat yang bekerja mendampingi masyarakat untuk penguatan hukum dan pendampingan teknis pertanian yaitu Bina benua Putijaji.

Badan Perwakilan Kampung (BPK) dibentuk pada tahun 2002. Menurut Ketua BPK, lembaganya melakukan konsultasi dengan masyarakat minimal sebanyak sekali dalam 2 bulan.

Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Perselisihan paham tentang penggunaan dana PKK	-
Keterbukaan pendanaan program pemerintah kampung	Pendanaan harus lebih jelas dan transparan

Menurut keterangan beberapa warga masyarakat yang diwawancarai pada tingkat rumah tangga, pengambilan keputusan dan informasi keuangan masih belum transparan.

Menurut Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir musyawarah semakin sering dilakukan karena masyarakat merasakan iklim yang lebih terbuka. Walaupun kualitas musyawarah sama saja namun keputusan musyawarah semakin berdampak dan dipatuhi oleh masyarakat. Pada masa lalu sebelum adanya BPK, masyarakat sering merasa dibohongi sehingga mereka malas untuk hadir dalam musyawarah.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama	Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Ketua BPK
Frekuensi musyawarah	Meningkat	Ketua BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Tebisaq pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari pemerintah:

Permohonan bantuan	Tanggapan pemerintah
Perbaikan lamin	Belum ada jawaban
Jembatan	Belum ada jawaban
Rehab sekolah/kampung	Belum ada jawaban
Rehab rumah penduduk	Diterima tetapi tidak semua

Kampung Tebisaq

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diperoleh berdasarkan wawancara dengan 3 pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut orang kurang mampu	Menurut ketua BPK
1	Rehab rumah penduduk dari pemerintah	Bantuan beras Bulog untuk menambah makanan dari Camat	Pembuatan jembatan dari pengusaha swasta
2	Pembuatan jalan kampung pada bulan Juli 2003 didukung pemerintah	Bantuan bibit kelapa dari Pemkab Kutai. Akhirnya mati setelah ditanam(Tenggarong)	Pemberian uang dan makanan untuk hari raya natal dari gereja
3	Pembuatan Puskesmas pembantu tahun 2002 dari pemerintah	-	-
4	Pelatihan pertanian tahun 2001 dari pemerintah	-	-

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, pemerintah kampung kurang bijaksana dalam mengelola bantuan beras bulog karena terjadi ketidakadilan dalam pembagiannya. Selain itu, hendaknya bantuan beras seperti ini diurus setiap tahun.

Selain dukungan materil seperti tersebut di atas, LSM Putijaji memberikan dukungan berupa penelitian dan peningkatan kemampuan dalam melakukan lobi dan negosiasi. Dukungan ini diberikan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi konflik.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Petinggi, kunjungan dari pihak pemerintahan ke Tebisaq rata-rata kurang dari sekali dalam sebulan. Instansi yang pernah datang adalah:

- Dinas Kehutanan;
- Dinas Pertanian;
- Dinas Pendidikan;
- Dinas Kesehatan;
- Camat.

Hubungan masyarakat dengan Pemda Kabupaten dalam 5 tahun terakhir telah mengalami perubahan. Pada umumnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik. Secara rinci perubahan dijelaskan pada tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Lebih baik
Pelayanan	Lebih baik
Keterbukaan informasi	Lebih baik
Partisipasi pengambilan keputusan	Lebih baik

Saat ini dirasakan intensitas kunjungan camat meningkat, bahkan kadang-kadang camat menyerahkan bantuan dari pemerintah secara langsung namun sayangnya petinggi seringkali tidak terbuka untuk masalah tersebut.

Kampung Tebisaq

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat mengetahui informasi tentang program-program pemerintah dari Petinggi. Sedangkan Petinggi mendapatkan informasi dari kantor kecamatan. Untuk mengakses informasi dari luar, masyarakat menggunakan radio dan televisi. Sedangkan alat komunikasi yang ada di kampung hanya pesawat *Handy Talky* (HT), pesawat tersebut dimiliki oleh 1 orang warga kampung.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Pelayanan pemkab	Lebih baik	Ketua BPK
Keterbukaan informasi	Lebih baik	Ketua BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Lebih baik	Ketua BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Sama	Petinggi

4. Sosial budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perpindahan penduduk seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek atau sementara	Sekitar 4 keluarga atau ± 20 orang	– Mencari pekerjaan – Sekolah/pendidikan
Waktu panjang atau selamanya	Sekitar 2 keluarga	Untuk menjalankan tugas dinas dan mencari pekerjaan

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan di Tebisaq adalah:

- upacara *kwangkai* yang merupakan bagian dari adat kematian;
- upacara *beliatn* untuk mengobati orang sakit;
- upacara *Parem Api*.

Perubahan praktek upacara adat saat ini dibanding masa lalu hanyalah pada waktu pelaksanaan. Dalam upacara *kwangkai* biasanya waktu pelaksanaan dibuat lebih lama dari ketentuan menurut hukum adat. Kepala Adat menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada bahan-bahan upacara, tingkat gotong royong dan tujuan upacara.

Perubahan waktu pelaksanaan upacara sebenarnya memunculkan pertanyaan baru yang berhubungan dengan motivasi dan tujuan penyelenggaraan upacara. Kalau tujuan upacara tidak berubah, mengapa waktu pelaksanaan harus diperpanjang.

Kampung Tebisaq

Pengetahuan-pengetahuan asli sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam memperkuat kehidupan sosial serta berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat. Sayangnya generasi muda kurang berminat untuk mempelajari tradisi. Hal ini ditunjukkan dengan keterangan Kepala Adat bahwa kurang dari seperempat anak muda yang mendapatkan pengetahuan asli/tradisi.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir dirasakan meningkat, hal ini ditunjukkan dengan indikasi dimana seluruh masyarakat biasanya selalu turut serta dalam kegiatan gotong royong. Contoh bentuk kerjasama dalam 12 bulan terakhir adalah:

- pembuatan ladang;
- pembuatan jalan.

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, tingkat solidaritas masyarakat di kampung masih cukup tinggi. Jika dirinya memerlukan bantuan, biasanya pihak keluarga atau warga kampung yang bukan keluarga bersedia untuk membantu. Kepala Adat menjelaskan bahwa masyarakat akan meminta bantuan dari pihak luar jika sesama mereka juga kekurangan sehingga tidak dapat diminta bantuan. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 pada saat sebagian besar warga kampung kekurangan makanan. Pada saat itu masyarakat meminta bantuan beras ke pihak kecamatan

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, hampir tidak pernah terjadi konflik baik konflik lahan, keluarga, suku, agama maupun konflik sumber daya alam. Hal ini terjadi karena tingkat *sempekat* (persatuan) yang baik. Namun menurut responden rumah tangga kurang mampu, sebenarnya konflik lahan dan konflik keluarga terjadi di Tebisaq. Bahkan dalam 5 tahun terakhir konflik lahan dapat dikatakan meningkat intensitasnya. Peningkatan ini terjadi karena jumlah orang yang semakin banyak sementara jumlah lahan tetap. Menurut responden rumah tangga kurang mampu, Lembaga Adat harus memperbaiki kinerjanya agar dapat menjalankan perannya dalam mengelola konflik, namun saat ini Kepala Adat lebih sering berada di luar kampung.

Menurut Kepala Adat, penyelesaian konflik masih menggunakan hukum adat baik untuk di dalam kampung maupun konflik di atau dengan pihak luar kampung. Jika masyarakat tidak mau menjalankan putusan Lembaga Adat biasanya kasus diserahkan ke pemerintah kecamatan.

Pengalaman selama ini menunjukkan lebih dari separuh konflik di tingkat kampung dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, masalah utama yang mereka hadapi adalah:

- kurangnya pendapatan uang;
- tidak ada dukungan untuk pendidikan anak-anak;
- kurangnya pelayanan kesehatan.

Kampung Tebisaq

Walaupun masalah-masalah tersebut masih belum teratasi, namun perbaikan keadaan dari sisi lain sudah dapat dirasakan. Salah satu perbaikan keadaan adalah ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Sebelum 5 tahun lalu dirasakan sulit untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

Responden rumah tangga kurang mampu merasa bahwa mereka tidak mampu membayar untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak. Biasanya keluarga selalu membantu jika terjadi masalah kesehatan. Sedangkan untuk masalah pendidikan, biasanya tidak ada yang dapat membantu. Sehingga di rumah tangganya selalu ada anak yang putus sekolah. Jika ada bantuan dari pihak luar, mereka merasa bahwa kebutuhan prioritas untuk dibantu adalah pendidikan dan kesehatan. Menurut Sekretaris Kampung, ketika seseorang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan maka yang dilakukan adalah:

- menggunakan pengobatan tradisional;
- meminjam uang;
- meminta bantuan keluarga.

Walaupun termasuk rumah tangga kurang mampu, namun mereka cukup sering turut serta dalam proses pengambilan keputusan di kampung.

4.6 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di kampung adalah:

- televisi;
- olahraga.

5.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Semakin lama	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Gotong royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama dengan tujuan menurut adat	Kepala Adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik keluarga	Jarang	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Meningkat	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Meningkat	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Tebisaq adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- *simpukng*;
- peternakan;
- hutan (*bengkar*).

Dari tipe tata guna lahan tersebut, *bengkar* merupakan tata guna lahan terluas dengan komposisi sekitar setengah dari total luas lahan. Namun saat ini sebagian besar dari *bengkar* sudah habis terbakar terutama pada kebakaran hutan tahun 1998. Secara kebetulan kebakaran hutan terbesar terjadi pada saat perusahaan perkebunan PT. Lonsum sedang menyiapkan lahan. Saat ini sekitar 80% kebun rotan habis terbakar, sedangkan rotan alam yang ada di hutan diperkirakan sudah habis terbakar seluruhnya. Masyarakat yakin bahwa kebakaran disebabkan oleh kesengajaan manusia.

Dari seluruh tipe tata guna lahan, hanya kebun sayur yang mengalami penambahan jumlah. Sebelum perusahaan batubara PT. Gunung Bayan berdiri, masyarakat Tebisaq sudah membuat kebun sayur. Semangat masyarakat menanam sayuran meningkat setelah PT. Gunung Bayan membeli produk sayuran masyarakat secara terus menerus.

Menurut Ketua BPK, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Tebisaq adalah:

- hutan perawan (*bengkar*);
- hutan sekunder tua (*batakng*);
- hutan sekunder muda (*urat*);
- belukar tua (*kloako*);
- belukar (*babar*);
- hutan rawa (*payaq*);
- hutan kerangas (*jaras*).

Luasan *bengkar* berkurang karena kebakaran hutan, hal ini mengakibatkan bertambahnya lahan-lahan bekas terbakar. Beberapa diantaranya sudah tumbuh menjadi *babar*, *kloako* dan *urat*, sehingga ketiga kategori lahan tersebut bertambah jumlahnya. Berkurangnya *bengkar* juga diakibatkan oleh konversi menjadi areal perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Perusahaan kebun kelapa sawit PT. Lonsum bekerja di daerah hutan *jaras*.

Sampai dengan sekarang belum ada program dari pemerintah untuk mengurangi atau mencegah kebakaran hutan. Masyarakat menerima informasi tentang kebakaran hutan dari Petinggi, dimana Petinggi mendapat informasi dari kecamatan.

Kampung Tebisaq

Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	Kebakaran hutan	Pendapatan berkurang karena tidak dapat mengambil kayu
Hutan lebih mudah diakses sehingga memudahkan orang untuk menebang	Kebijakan otonomi	Dapat lebih mencukupi kebutuhan masyarakat terutama untuk membuat rumah sendiri
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Kebakaran hutan	Berkurangnya sumber makanan

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Petinggi, kebakaran hutan telah menghilangkan sebagian besar hutan Tebisaq, oleh karena itu tidak ada lagi hutan yang dapat dilindungi. Sebelum terjadi kebakaran, Tebisaq memiliki hutan lindung yang dikelola secara adat. Pada saat itu, jika ada yang melanggar aturan maka lembaga adat menghukum dengan cara pelanggar harus membayar denda. Karena sudah tidak ada lagi hutan, maka tidak ada ijin pengelolaan hutan baik berupa HPH, IPPK maupun HPHH yang bekerja di kampung ini.

Perusahaan yang bekerja di dalam wilayah kampung adalah perusahaan batubara PT. Gunung Bayan dan perusahaan perkebunan PT. London Sumatera. Pada masa lalu masyarakat tidak dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Namun pada saat ini masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Salah satu masalah yang cukup sensitif adalah ganti rugi lahan masyarakat yang terkena areal konsesi.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Petinggi, seluruh rumah tangga memiliki keterjangkauan terhadap lahan. Keadaan ini tidak berubah sejak dahulu. Dalam wawancara di tingkat rumah tangga, diperkirakan sekitar tiga perempat dari masyarakat yang berladang memiliki lahannya sendiri, sisanya adalah lahan pinjaman dari keluarga sendiri. Jual beli lahan sudah pernah terjadi sejak tahun 1997. Biasanya lahan dijual ke perusahaan tambang batubara PT. Gunung Bayan.

5.4 Perladangan

Sejak 5 tahun terakhir, rumah tangga yang menanam padi berjumlah kurang dari tigaperempat dari total rumah tangga, kecenderungannya jumlah yang menanam padi menurun. Hampir seluruh penanaman padi dilakukan di ladang (padi lahan kering). Ada sedikit rumah tangga yang menanam padi di sawah atau rapak. Hampir tidak ada rumah tangga yang membuka rimba untuk ladang, sepertiga dari ladang dibuat pada hutan sekunder tua berumur lebih dari 20 tahun, seperempat dari ladang dibuat di hutan sekunder muda berumur 10 - 20 tahun dan seperempat lainnya dibuat di belukar muda berumur dibawah 10 tahun.

Hampir seluruh responden rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan berasnya dari ladang. Oleh karena itu sebagian besar dari mereka harus mendapatkan beras tambahan dengan cara membeli, sebagian kecil mendapatkannya dari bantuan

Kampung Tebisaq

keluarga. Sekitar duapertiga dari ladang dapat ditempuh dengan kurang dari 1 jam berjalan kaki.

5.5 Pendapatan uang

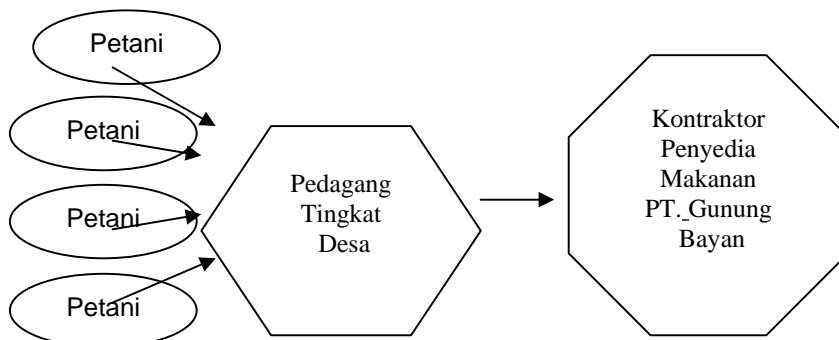
Seperti dijelaskan di atas, penghasilan uang kebanyakan didapat dari hasil kebun sayur. Walaupun jumlah penghasilannya sedikit tetapi didapatkan secara terus menerus dan ada kepastian pasar. Selain dari kebun sayur, masyarakat juga mendapatkan pendapatan dari kayu dan batubara lewat perusahaan kayu dan perusahaan tambang. Seperti dijelaskan di atas bahwa sebagian besar hutan Tebisaq sudah terbakar, sehingga masyarakat bekerja kayu di luar kampung lewat perusahaan HPH dan HPHH/IPPPK. Sebagian dari masyarakat masih mendapatkan penghasilan dari kebun rotan dan kebun karetinya. Sementara sebagian kecil berpenghasilan dari warung, pengrajin dan pedagang. Sisanya berpenghasilan dari gaji guru dan pemerintah kampung. Secara penghasilan, kebun sayur dipandang lebih penting daripada kebun rotan.

Pengrajin yang ada umumnya adalah pengrajin ulap dan rotan. Kain ulap yang dibuat bukanlah ulap doyo. Mereka menjual kain ulapnya sampai ke Kecamatan Damai. Selain itu juga terdapat pedagang atau pembeli yang langsung datang ke Tebisaq.

Berikut adalah situasi harga pada tanggal 4 Oktober 2003 untuk produk sayuran dan produk-produk lain yang dihasilkan di Tebisaq:

Nama Komoditas	Harga	Satuan
Timun	1.500	Kg
Kacang panjang	2.000	Kg
Labuh	1.000	Kg
Pucuk singkong	1.000	Kg
Lombok	5.000	Kg
Nangka	500	Kg
Bayam	1.000	Kg
Rotan jepukng	3.000	kg basah
Lampit	60.000	per lembar
Ulap bukan doyo	150.000	per lembar

Rantai perdagangan sayuran di Tebisaq adalah seperti terlihat melalui gambar berikut ini:



Kampung Tebisaq

Pedagang di tingkat kampung biasanya hanya 1 orang saja. Kemungkinan PT. Gunung Bayan meminta Petinggi untuk mengorganisir pembelian sayuran agar rantai perdagangan tidak terlalu panjang.

Menurut Ketua BPK, secara umum keadaan ekonomi dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Keadaan ekonomi kampung cukup terbantu dengan kehadiran perusahaan batubara karena masyarakat dapat menjual sayurannya ke perusahaan, bahkan sebagian dari mereka dapat bekerja di perusahaan.

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak terdapat pasar tetap di kampung ini. Yang ada hanyalah pasar keliling yang mengunjungi Kampung Tebisaq sekitar 2 bulan sekali. Frekuensi buka pasar cenderung tidak menentu. Masyarakat biasanya harus pergi ke Muara Pahu untuk berbelanja. Untuk itu masyarakat harus membayar ongkos ojek sebesar Rp. 30.000 - Rp. 50.000 pulang pergi.

Menurut petinggi, dalam 5 tahun terakhir kondisi jalan mengalami perbaikan walaupun kondisinya masih kurang baik. Jalan yang menghubungkan dengan daerah lain masih merupakan jalan tanah. Tetapi kondisi ini dirasakan lebih baik daripada tidak ada jalan sama sekali seperti masa lalu. Jalan sungai juga dirasakan semakin baik karena tidak banyak terdapat rakit-rakit kayu dari hulu sungai. Karena kondisi jalan dan sungai yang lebih baik maka waktu untuk mencapai ibukota kecamatan dan kabupaten menjadi lebih cepat.

Alat transportasi reguler yang ada hanyalah perahu ces untuk tujuan Gunung Bayan. Ongkos yang harus dibayar per penumpang adalah Rp. 5000.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik.

Listrik merupakan sumber energi yang baru digunakan sejak 2 tahun lalu. Sedangkan minyak tanah dan kayu bakar sudah lama digunakan sebagai sumber energi. Namun saat ini dirasakan semakin sulit untuk mendapatkan kayu bakar dan minyak tanah.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Sebagian besar rumah responden terbuat dari kayu yang bukan jenis ulin atau bengkirai. Sebagian besar atap rumah terbuat dari sirap atau keping, sekitar sepertiganya terbuat dari seng. Hampir seluruh rumah memiliki aliran listrik di dalamnya, sebagian besar listrik berasal dari PLN. Seluruh rumah tangga memiliki WC, sekitar tiga perempatnya merupakan WC sungai dan sisanya adalah WC di dalam rumah.

Kampung Tebisaq

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat dapat menjangkau	Sama	Petinggi
Kondisi jalan	Kurang baik karena masih merupakan jalan tanah, sehingga kurang stabil	Lebih baik karena sebelumnya tidak ada jalan	Petinggi
Kondisi sungai sebagai jalan	Baik, dapat dilewati oleh perahu atau alat transportasi sungai	Lebih baik karena sebelumnya banyak terganggu oleh kayu yang hanyut	Petinggi
Luasan ladang	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan sawah	Ada	Tetap	Ketua BPK
Luasan kebun sayur	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Luasan kebun rotan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun karet	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan <i>simpukng</i>	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada		Ketua BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada		Ketua BPK
Luasan peternakan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan perawan (<i>bengkar</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan sekunder tua (<i>batang</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan sekunder muda (<i>urat</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar tua (<i>kloako</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Belukar (<i>babarr</i>)	Ada	Bertambah	Ketua BPK
Hutan rawa (<i>payaq</i>)	Ada	Tetap	Ketua BPK
Hutan kerangas (<i>jaras</i>)	Ada	Berkurang	Ketua BPK
Hutan lindung	Tidak ada		Ketua BPK
Akses kepada hutan	mudah	Lebih mudah	Ketua BPK
Jenis-jenis tumbuhan hutan hewan		Berkurang	Ketua BPK
Perkembangan ekonomi kampung	Banyak yang mendapat penghasilan dari jual sayur	Sama saja	Ketua BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Sekitar 10% responden rumah tangga mengakui ada anak putus sekolah, dimana sebagian besar putus di tingkat SLTA. Dari anak-anak yang putus sekolah, sebagian besar karena masalah biaya. Beberapa anak masih bolos sekolah pada musim sibuk di ladang, karena pada saat tersebut anak-anak diminta bantuan orang tuanya untuk kerja di ladang.

Kampung Tebisaq

Tingkat pendidikan para guru sama saja. Para guru cukup aktif dalam mengajar. Presentase kelulusan siswa biasanya 100%, keadaan ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Jumlah masyarakat di kampung yang dapat membaca meningkat dalam 5 tahun terakhir. Menurut beberapa orang tua murid, ada murid SD di Tebisaq yang belum dapat membaca pada kelas 5 SD. Menurut mereka, hal ini diakibatkan tingkat keaktifan guru yang rendah.

Selain pendidikan formal, di kampung ini juga dilakukan pendidikan informal seperti yang diberikan oleh sebuah LSM Bina Benua Putijaji.

Pada tahun ini terdapat 8 orang siswa baru yang terdaftar di SDN 025 Tebisaq.

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Menurut Kepala Sekolah SDN 025 Tebisaq, sekolah yang dipimpinnya adalah satu-satunya sekolah di kampung. Dengan demikian tidak ada perubahan jumlah sekolah dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, kondisi bangunan sekolah semakin buruk karena bangunan sudah berumur tua. Alat-alat peraga dan buku-buku berkurang jumlahnya. Jumlah staf pengajar berkurang.

Untuk sekolah di tingkat yang lebih tinggi harus ke luar kampung. Untuk tingkat SLTP, umumnya anak-anak sekolah di Kampung Blusuh atau di kota kecamatan Muara Pahu. Untuk tingkat SLTA, kebanyakan dilakukan di Tenggarong sedangkan untuk Perguruan Tinggi dilakukan di Samarinda. Untuk sekolah di Muara Pahu, anak-anak harus menginap di sana karena jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 1 jam perjalanan dengan sepeda motor pada kondisi jalan yang buruk.

Karena di kampung ini hanya ada 1 buah sekolah dasar maka tidak ada anak-anak dari kampung lain yang bersekolah di kampung Tebisaq.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Sama	Kepala Sekolah
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Alat-alat dan buku-buku	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Jumlah Staf	-	Berkurang	Kepala Sekolah
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Kepala Sekolah
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Kepala Sekolah
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih baik	Kepala Sekolah
Persentase kelulusan	-	Meningkat	Kepala Sekolah
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Kepala Sekolah

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut sekretaris kampung, jenis penyakit yang ada di kampung ini:

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-anak	Diare, demam
Orang dewasa	Demam
Perempuan	Tekanan darah yang tidak stabil
Orang usia lanjut	TBC

Frekuensi kejadian penyakit diare sudah menurun, namun penyakit TBC masih tetap. Selama bulan Januari - Oktober 2003 tidak ada anak dan ibu yang meninggal pada saat kelahiran, juga tidak ada kematian pada anak balita dan anak usia sampai dengan 10 tahun. Jumlah bayi yang baru lahir dalam 12 bulan terakhir sekitar 8 bayi dengan rata-rata berat sekitar 2 - 3 kg. Umur ibu pada saat kehamilan pertama adalah 20 - 25 tahun. Dari bulan Januari ada 3 orang yang meninggal dengan rata-rata umur 50 - 60 tahun. Penyebab kematian cukup beragam, salah satu yang baru meninggal minggu lalu karena penyakit demam.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut sekretaris kampung, banyak dari masyarakat Tebisaq yang menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih, walaupun mereka faham bahwa air tersebut tidak bersih lagi. Pernah terjadi masyarakat terkena sakit perut dan ikan-ikan mati akibat air sungai yang sudah tercemar oleh kegiatan perusahaan batubara PT. Gunung Bayan yang bekerja di hulu sungai.

Sebenarnya Tebisaq memiliki sumber air bersih dari mata air yang berjarak 2 kilometer dari kampung, namun sampai dengan saat ini belum ada infrastruktur untuk menghubungkannya ke kampung. Sehingga masyarakat harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan air bersih tersebut. Rata-rata masyarakat di sini memiliki alat untuk menyimpan air. Alat tersebut biasanya berupa gentong plastik. Tidak ada alat menyimpang air untuk kepentingan umum.

7.3 Kebersihan Kampung

Keadaan kampung sudah mulai kotor oleh sampah plastik, walaupun jumlahnya belum banyak tetapi dapat dilihat tidak ada usaha dari pemerintah kampung untuk mengurus masalah sampah. Jalan kampung adalah jalan tanah. Dalam musim hujan, jalan kampung keadaannya semakin buruk karena digenangi oleh air.

7.4 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Tebisaq terdapat 1 buah puskesmas, namun sampai dengan bulan Oktober 2003 belum bisa digunakan karena belum ada tenaga kesehatan yang bekerja. Bangunan puskesmas memiliki masalah karena dibangun di atas lahan sengketa, dimana sampai dengan sekarang sengketa tersebut belum selesai. Menurut Petinggi, Dinas Kesehatan

Kampung Tebisaq

tidak bersedia menempatkan pegawainya di Puskesmas Tebisaq sebelum masalah sengketa diselesaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada fasilitas kesehatan, keadaan ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir.

Fasilitas kesehatan yang terdekat adalah Puskesmas Sang Sang yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Tebisaq. Puskesmas Sang Sang hanya dapat menangani penyakit sangat sederhana. Banyak masyarakat harus pergi ke Muara Pahu untuk berobat, jarak Muara Pahu adalah 20 - 24 kilometer lewat darat atau air. Biaya untuk mencapai Muara Pahu adalah Rp.30.000 s.d Rp.50.000 pulang pergi dengan menggunakan perahu ces atau ojek sepeda motor.

Seluruh fasilitas kesehatan yang ada dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Karena minimnya fasilitas kesehatan, maka tidak ada orang dari luar kampung yang berobat ke Kampung Tebisaq.

Pengobatan tradisional masih cukup diminati di kampung ini. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi upacara pengobatan tradisional yang cukup tinggi. Menurut Kepala Adat, upacara pengobatan tradisional dilakukan lebih dari sekali per bulan. Frekuensi ini tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Namun di sisi lain, jumlah ahli pengobatan tradisional tidak pernah bertambah. Saat ini ada 3 orang dukun dengan umur sekitar 70 tahun. Untuk satu kali upacara pengobatan tradisional diperlukan biaya antara Rp.30.000 - Rp.35.000.

7.5 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	Air pancuran	Sama	Sekretaris Kampung
Mutu air bersih	Air pancuran	Sama	Sekretaris Kampung
Mutu air sungai		Berkurang	Sekretaris Kampung
Jumlah fasilitas kesehatan	Ada tapi belum berfungsi	Lebih banyak	Sekretaris Kampung
Kondisi fasilitas kesehatan	-	Kurang baik	Sekretaris Kampung
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Sekretaris Kampung
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	-	Sekretaris Kampung
Gaji/honor	Tidak ada	-	Sekretaris Kampung
Penyakit Malaria	Tidak ada	-	Sekretaris Kampung
Penyakit Diare	Ada	Menurun	Sekretaris Kampung
Penyakit TBC	Ada	Sama	Sekretaris Kampung
Jumlah ahli pengobatan tradisional	3 orang	Sama	Kepala adat
Upacara pengobatan tradisional	Lebih sekali per bulan	Sama	Kepala adat

8. Sejarah Bencana

Bencana yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Bencana	Dampak
1	Kebakaran Hutan	Kekurangan hasil panen
2	Kelaparan	Selama 7 bulan banyak yang terkena mencret dan kekurangan gizi
3	Kekeringan	Kekurangan hasil panen karena ada kemarau
4	Banjir	Tanaman habis mati dan banyak yang kena muntaber
5	Hama	- Banyak ternak ayam terkena penyakit - Banyak anjing yang terkena penyakit rabies
6	Perubahan Pemerintahan	Terjadi peningkatan pembangunan, misalnya ada bangunan puskesmas dan bertambahnya kebun sayur (diperkirakan sekitar 30 ha)

Dari pengamatan di lapangan, sebenarnya masih perlu dipertanyakan tentang hubungan antara pertambahan kebun sayur dengan perubahan di tingkat pemerintahan. Berdasarkan wawancara di tingkat rumah tangga, dapat diketahui dengan jelas bahwa pertambahan kebun sayur dipicu oleh terbukanya pemasaran sayur-sayuran ke perusahaan tambang batubara PT. Gunung Bayan. Informasi lebih lanjut tentang hal ini dijelaskan pada bagian ekonomi dan sumber daya alam.

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Tebisaq. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, "permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?".

Menurut kelompok perempuan:

- seringnya gagal panen;
- kurangnya pelayanan kesehatan;
- kurang guru sehingga kelas 5 tidak dapat membaca;
- kurangnya sarana dan prasarana (terutama jalan);
- kurangnya dukungan pemerintah.

Menurut masyarakat biasa:

- harga-harga produk dari hasil pengelolaan lahan dan hutan murah;
- sulit untuk mendapat mufakat, sulit untuk berkelompok;
- kurangnya pelayanan kesehatan;
- kurang pola pikir masyarakat dalam berusaha. Pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara modern;
- lemahnya kesadaran untuk sekolah.

Kampung Tebisaq

Menurut tokoh masyarakat:

- kebakaran hutan yang menyebabkan berkurangnya penghasilan;
- kurangnya pendidikan sehingga kesulitan ketika melamar kerja di perusahaan;
- kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan;
- kurangnya dukungan dari pemerintah, misalnya pemerintah lebih berpihak pada masyarakat ketika ada konflik antara perusahaan vs masyarakat;
- kurangnya penghasilan.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Dalam 5 tahun terakhir terlihat infrastruktur ekonomi seperti jalan mengalami peningkatan. Walaupun kondisi jalan masih merupakan jalan tanah, namun perubahan ini telah membuka isolasi Kampung Tebisaq dari tempat lain.

Dari sisi ekonomi, terlihat sekali adanya perubahan sumber mata pencaharian. Sebelum kebakaran hutan besar tahun 1997/1998, sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah rotan, dan mereka juga masih mendapatkan banyak manfaat dari hutan. Tapi setelah tahun 1997/1998 dan setelah beroperasinya PT. Gunung Bayan, mata pencaharian masyarakat menjadi tergantung pada kehadiran perusahaan tambang batubara tersebut, lewat penjualan sayuran dan juga beberapa orang yang bekerja langsung di perusahaan. Perubahan jenis mata pencaharian ini diiringi dengan peningkatan konflik lahan. Walaupun kepala adat menyangkal tentang hal ini, namun berdasarkan wawancara dalam rumah tangga dapat dirasakan adanya peningkatan konflik lahan. Dari wawancara dengan beberapa rumah tangga diketahui bahwa peranan pemerintah masih sangat kurang dalam melakukan mediasi konflik. Beberapa warga masih melihat bahwa pemerintah berpihak kepada perusahaan tambang.

Sejak adanya pemerintah kabupaten baru yaitu kabupaten Kutai Barat, dukungan dan pelayanan pemerintah terasa membaik. Kondisi ini juga dirasakan di sektor pendidikan, misalnya dengan pemberian sepeda motor untuk Kepala Sekolah serta peningkatan gaji untuk para guru. Sayangnya perbaikan dukungan ini tidak diikuti oleh perbaikan kualitas pendidikan, misalnya masih ditemukan anak SD yang tidak dapat membaca pada kelas 5.

Gagal panen	Harga-harga produk dari hasil pengelolaan lahan dan hutan murah	Kebakaran hutan yang menyebabkan berkurangnya penghasilan
Kurangnya pelayanan kesehatan	Sulit untuk mendapat mufakat, sulit untuk berkelompok	Kurangnya pendidikan sehingga kesulitan ketika melamar kerja di perusahaan
Kurang guru sehingga kelas 5 tidak dapat membaca	Kurangnya pelayanan kesehatan	Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
Kurangnya sarana dan prasarana (terutama jalan)	kurang pola pikir masyarakat dalam berusaha. Pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara modern	Kurangnya dukungan dari pemerintah, misalnya pemerintah lebih berpihak pada masyarakat ketika ada konflik antara perusahaan vs masyarakat
Kurangnya dukungan pemerintah.	Lemahnya kesadaran untuk sekolah	Kurangnya penghasilan

11. Lampiran

Survei di Kampung Tebisaq dilaksanakan pada tanggal 12 - 14 Oktober 2003. Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Tebisaq, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 36 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- petinggi;
- ketua BPK;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- perawat;
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 4 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Profil Kampung Ujoh Halang

Jumlah rumah tangga: 27	Jumlah jiwa: 111
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 40	Jumlah KK: 47
Jumlah rumah tangga miskin: 6	Jumlah TK: -
Suku mayoritas: Bahau	Jumlah SD: 1 (filial)
Nama Kepala Adat: Liah Tekwan	Jumlah SLTP: -
Nama Petinggi: Hirung Liah	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 40 menit (ces 10 PK)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Sendawar: ± 3 jam (ces/kapal + mobil)	Jumlah Pusban: -
Posisi administratif: Kecamatan Long Iram, Kab. Kutai Barat	Jumlah Polindes: -
Posisi geografis: 115° 33' BT, 0° 36' LS	
Tanggal survei: 8 - 10 Oktober 2003	

1. Sejarah Kampung

Menurut Kepala Adat, Kampung Ujoh Halang sudah berdiri sejak abad ke-19. Beliau juga menyatakan bahwa telah terjadi pergantian lamin sebanyak 3 kali.

Sumber-sumber lain menerangkan bahwa kampung ini mengalami beberapa perpindahan. Kampung asli Ujoh Halang sebenarnya terletak di pulau yang berada di hilir Kampung Ujoh Halang yang sekarang, kira-kira 5 menit memakai ces. Puluhan tahun yang lalu, Kampung Ujoh Halang Lama mengalami kebakaran dan di kalangan bangsawan terjadi perpecahan. Akhirnya, sebagian warga pindah ke Kampung Ujoh Halang yang sekarang dan sebagian yang lain pindah ke kampung yang sekarang di kenal sebagai Kampung Mamahak Teboq Lama.

Ujoh Halang (sekarang) terdiri atas dua bagian. Bagian hilir dihuni oleh penduduk asli Ujoh Halang dan bagian hulu dihuni oleh sebagian kecil masyarakat Bakumpai dari Long Iram yang berkebun di seberang kampung dan kemudian memilih menetap di Ujoh Halang.

Kampung Ujoh Halang

2. Kelembagaan Kampung

Lembaga-lembaga yang ada di kampung ini adalah:

- Pemerintah Kampung;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Kampung;
- Kelompok Tani.

Selain lembaga-lembaga yang berbasis kampung seperti di atas, juga ada lembaga swadaya masyarakat yang bekerja mendampingi masyarakat khususnya kaum perempuan yakni Perkumpulan Nurani Perempuan. Lembaga ini mendampingi untuk pengembangan ekonomi melalui *Credit Union* dan pendampingan hak-hak perempuan. Lembaga lain yang pernah bekerja di sini adalah Yayasan Bioma yang mendampingi masyarakat dalam pembuatan peraturan kampung tentang kebakaran hutan.

Badan Perwakilan Kampung Ujoh Halang dibentuk pada tanggal 11 November 2002. Anggota BPK menyatakan bahwa lembaga ini melakukan konsultasi dengan masyarakat sekali per tiga bulan. Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:

Topik Diskusi	Keputusan
Permohonan sekolah	Pembangunan fisik dan penambahan tenaga guru
Perluasan Kampung	Pendorongan lokasi/lahan pemukiman baru
Jembatan	Pembuatan proposal
Mushola/sarana ibadah	Pembangunan fisik dan proposal

Menurut Anggota BPK, dalam 5 tahun terakhir, kualitas kelembagaan musyawarah adalah sama saja. Musyawarah semakin sering dilakukan dan keputusan semakin berdampak serta dipatuhi.

2.1 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Kualitas musyawarah	Sama saja	Anggota BPK
Dampak keputusan musyawarah	Meningkat	Anggota BPK
Frekuensi musyawarah	Semakin sering	Anggota BPK

3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten

3.1 Dukungan

Pemerintah Kampung Ujoh Halang dalam 5 tahun terakhir pernah mengajukan beberapa usulan bantuan kepada pemerintah kabupaten. Berikut adalah daftar usulan dan tanggapan dari pemerintah:

Usulan Bantuan	Tanggapan Pemerintah
Pembangunan jembatan	Ditunda
Pembangunan sekolah	Belum ada tanggapan
Pembangunan sarana air bersih	Belum ada tanggapan
Listrik kampung dan semenisasi	Belum ada jawaban

Kampung Ujoh Halang

Berikut adalah daftar bantuan yang pernah diterima berdasarkan wawancara dengan tiga pihak:

No.	Menurut Petinggi	Menurut Orang Kurang Mampu	Menurut Anggota BPK
1	Penguatan jalan pada tahun 2002	Bantuan beras miskin dari pemerintah	Bimbingan berorganisasi dari Nurani Perempuan dan Bioma
2	Pembuatan dermaga pada tahun 1999	Sarana air bersih dari Rio Tinto	<i>Credit Union</i> Petemai Urip dari Nurani Perempuan
3	Bantuan perlengkapan sarana kerja kantor petinggi	-	Pembuatan Peraturan Kampung dari Bioma
4	Bantuan beras miskin	-	Perbaikan gereja dan sarana gereja

Menurut orang kurang mampu, bantuan beras miskin dari pemerintah mestinya lebih rutin dan ditambah jumlahnya. Bantuan sarana air bersih yang dibangun oleh Rio Tinto juga mestinya dilakukan rehabilitasi untuk peningkatan mutu serta jumlah tong/baknya.

Selain dukungan seperti diatas, di kampung ini juga pernah diadakan penelitian tentang kesehatan dan kependudukan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

3.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Juru Tulis, kunjungan dari petugas pelayanan dari pemerintah yang datang ke kampung ini adalah kurang dari sekali dalam sebulan. Lembaga-lembaga yang pernah datang adalah:

- Puskesmas Long Iram;
- BKKBN.

Menurut Anggota BPK, hubungan masyarakat dengan pemda tidak mengalami perubahan yang berarti dan cenderung tetap sama dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut tergambar melalui tabel berikut:

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	Lebih baik
Tingkat kepedulian	Sama saja
Pelayanan	Sama saja
Keterbukaan informasi	Sama saja
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Sama saja

3.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat mengetahui tentang informasi tentang program pemerintah lewat kunjungan pemerintah, informasi dari pihak lain dan bertanya langsung ke pihak pemerintah.

Informasi dari luar diakses masyarakat melalui radio. Alat komunikasi yang ada di kampung ini adalah *Handy Talky* (HT). Sarana telepon (telepon satelit) yang memungkinkan dimanfaatkan masyarakat adalah di:

Kampung Ujoh Halang

- Perusahaan kayu HNI yang berjarak 20 menit dengan perahu ces;
- Long Iram yang berjarak 1 jam naik ces;
- Mamahak Teboq yang berjarak 1,5 jam naik ces.

3.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Perubahan	Responden
Jarak ke pemkab	Lebih baik	Anggota BPK
Tingkat kepedulian pemkab	Sama saja	Anggota BPK
Pelayanan pemkab	Sama saja	Anggota BPK
Keterbukaan informasi	Sama saja	Anggota BPK
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Sama saja	Anggota BPK
Bantuan pemerintah kepada pembangunan kampung	Berfluktuasi	Juru Tulis

4. Sosial Budaya

4.1 Perpindahan penduduk

Perpindahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Ujoh Halang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu pendek/sementara	11 orang	Mencari pekerjaan
	14 orang	Sekolah/pendidikan
Waktu panjang/selamanya	30 orang	Mencari pekerjaan

4.2 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, ritual upacara tradisional yang masih dilakukan di Ujoh Halang adalah:

- *laliq ugaal* dan *laliq ataq* yang berkaitan dengan *laliq lumaq* (ritual perladangan);
- *laliq hawaq* yang berkaitan dengan perkawinan;
- *laliq anaak* yang berkaitan dengan adat kelahiran, penamaan dan pendewasaan anak.

Bila dibandingkan dengan masa lalu, perubahan pelaksanaan upacara adat di kampung ini adalah pada sisi jenis bahan yang digunakan. Waktu, tujuan dan gotong royong pada saat pelaksanaan tetap sama.

Kepala Adat menyatakan bahwa seluruh generasi muda mendapatkan pengetahuan asli/tradisi dari orang tua.

4.3 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat, tingkat kerjasama masyarakat di kampung ini cukup tinggi. Hal ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Indikasinya adalah bahwa lebih dari separuh

Kampung Ujoh Halang

masyarakat biasanya turut serta dalam gotong royong. Contoh bentuk gotong-royong yang dilakukan dalam 12 bulan terakhir adalah:

- membangun dan memperbaiki gedung sekolah;
- memperbaiki gereja;
- membangun rumah pribadi masyarakat;
- membangun kantor dan balai kampung;
- membangun jalan dan lapangan *volley*.

Senada dengan Kepala Adat, responden keluarga kurang mampu juga menyatakan bahwa tingkat kerjasama dan solidaritas masyarakat adalah sama dalam 5 tahun terakhir. Jika dirinya memerlukan bantuan maka keluarga atau warga masyarakat yang bukan keluarga akan membantu.

Kepala Adat menjelaskan bahwa jika terjadi masalah kekurangan pangan di kampung, maka mereka akan meminta bantuan kepada pemerintah.

4.4 Konflik

Menurut Kepala Adat, sangat jarang dan hampir tidak pernah terjadi konflik di kampung ini. Perubahannya pun cenderung sama saja dari waktu ke waktu. Orang kurang mampu juga menyatakan bahwa tidak ada konflik yang terjadi di kampung ini.

Di pihak lain, informasi yang didapat dari lapangan dan juga dari lembaga yang pernah bekerja disini menyatakan bahwa walaupun belum mencuat, sebenarnya terjadi konflik lahan dengan kampung tetangga yang berkaitan dengan tapal batas kampung dan sumber daya alam kayu.

Menurut Kepala Adat, konflik didalam kampung diselesaikan dengan hukum adat. Konflik dengan pihak luar kampung sebisa mungkin diselesaikan dengan hukum adat, namun bila tidak terselesaikan (bila orang luar tidak mau taat dengan adat) maka akan digunakan hukum negara. Beliau menegaskan bahwa seluruh konflik di kampung diselesaikan oleh lembaga adat di kampung.

Beberapa warga masyarakat mengisyaratkan bahwa usia kepala adat yang sudah tua terkadang menyulitkan beliau dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola konflik. Hal ini mengakibatkan peran beliau sekarang lebih banyak diambil alih oleh pihak lain terutama peran-peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam.

4.5 Situasi umum rumah tangga kurang mampu

Menurut responden rumah tangga kurang mampu, permasalahan utama yang mereka hadapi adalah:

- kurangnya kesempatan kerja yang layak;
- belum bisa membangun rumah (masih tinggal di rumah orang lain);
- sarana penunjang kerja kurang memadai.

Situasi ini belum berubah dalam 5 tahun terakhir karena belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itu bila bantuan dari pihak luar, responden keluarga kurang mampu menganggap bahwa yang menjadi prioritas utama adalah penyediaan alat-alat kerja dalam profesinya (pandai besi).

Walaupun termasuk rumah tangga kurang mampu, namun mereka masih merasa mampu dalam hal pendidikan (pendidikan dasar) dan kesehatan. Situasi ini terjadi

Kampung Ujoh Halang

karena selama ini belum pernah ada yang membantu dalam pendidikan. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka sering sekali turut serta dalam proses pengambilan keputusan di kampung.

4.6 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di kampung ini adalah:

- televisi;
- VCD;
- radio;
- kesenian adat.

4.7 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Waktu upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Bahan-bahan upacara adat	-	Berubah	Kepala Adat
Gotong-royong dalam upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Tujuan upacara adat	-	Sama saja	Kepala Adat
Konflik lahan	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik keluarga	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik suku	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik agama	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Konflik air/sumber daya alam	Tidak pernah	Sama	Kepala Adat
Tingkat kerjasama antar masyarakat	-	Sama saja	Kepala Adat
Jumlah konflik	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu
Tingkat kerjasama/solidaritas	-	Sama	Rumah tangga kurang mampu

5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Anggota BPK, jenis tata guna lahan yang ada di Ujoh Halang adalah:

- ladang;
- kebun buah (*lepu'un*);
- hutan.

Dari tipe tata guna tersebut, hutan merupakan yang terluas dengan komposisi lebih dari setengah luasan kampung.

Luasan ladang makin bertambah karena pertambahan penduduk. Luasan kebun buah berkurang karena kebakaran hutan dan lahan. Luasan hutan juga berkurang karena HPHH yang dikelola oleh warga dan juga penebangan liar.

Kampung Ujoh Halang

Di lapangan terlihat bahwa sebagian warga mempunyai kebun sayur yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.

Menurut anggota BPK, jenis-jenis hutan yang ada di Ujoh Halang adalah:

- hutan perawan (*tuaan*);
- hutan sekunder tua (*talun*);
- hutan sekunder muda (*tarah*);
- belukar tua (*sepitang*);
- belukar (*ba'e*);
- hutan rawa (*pekaq*);
- hutan kerangas (*benale*).

Luasan *tuaan* dan *talun ayaq* dan *tarah* berkurang terutama karena sudah ditebang oleh HPHH. *Sepitang* dan *ba'e* luasannya bertambah dari bekas ladang dari tahun ke tahun. Jarang ada yang berladang pada *pekaq* dan *berale* sehingga luasannya tetap sama.

Saat ini sudah ada usaha preventif dari masyarakat untuk mengelola hutan dan lahan terutama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dengan didampingi Yayasan Bioma telah membuat Peraturan Kampung tentang Kebakaran Hutan dan Lahan.

Belum ada informasi mendalam tentang pelaksanaan peraturan kampung ini.

Menurut Anggota BPK, perubahan yang terjadi terhadap kawasan hutan adalah sebagai berikut:

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan	HPHH Kebakaran hutan	Berkurang jumlah usaha kayu
Hutan lebih mudah diakses	Ada kapal Banyak <i>speed boat</i> , banyak ces	Gelombang besar menghantam dan merusak jamban warga
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan	Berkurangnya hutan	Sekarang harus beli daging, dulu hanya perlu diburu di hutan

5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK/HPHH

Menurut Juru Tulis, di Kampung Ujoh Halang sudah ditentukan hutan cadangan yang dilindungi seluas 4x6 kilometer. Perlindungan terhadap hutan cadangan ini dilakukan dengan hukum *adat kaping*. Bila ada yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan lindung ini maka dia harus membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Ujoh Halang.

Dalam beberapa tahun ini terdapat IPPK/HPHH/IHPHH yang bekerja di wilayah Kampung Ujoh Halang. Petinggi menegaskan bahwa seluruh masyarakat mendapat penghasilan dan *fee* dari penebangan pada konsesi tersebut. Selama ini belum pernah ada pihak luar yang mengajukan permohonan untuk konsesi IPPK/IPHH/HPHH, pertambangan, dan perkebunan di wilayah Kampung Ujoh Halang.

Keputusan tentang konsesi yang bekerja di wilayah kampung diputuskan oleh seluruh masyarakat dan aparat kampung.

Kampung Ujoh Halang

Senada dengan Juru Tulis, responden keluarga kurang mampu juga menyatakan bahwa sudah pernah ada warga masyarakat di kampung ini yang mengajukan dan mengelola konsesi HPHH. Mereka juga mengaku terlibat dalam pengambilan keputusan tentang konsesi tersebut. Namun mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan penghasilan baik berupa *fee*, ganti rugi maupun gaji dari pengelolaan konsesi tersebut.

Ketersendatan *fee* ini juga disebabkan karena kerjasama beberapa pengurus HPHH dengan Pemuda Pancasila dalam penebangan dan pemasaran kayu.

5.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Juru Tulis Kampung, seluruh rumah tangga memiliki keterjangkauan terhadap lahan, hal ini tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Beliau juga menyatakan bahwa lebih dari separuh rumah tangga memiliki lahan sendiri. Di kampung ini belum pernah terjadi praktek penjualan lahan, baik resmi maupun tidak resmi.

5.4 Perladangan

Dalam 5 tahun terakhir, antara 70% - 90% responden rumah tangga berladang. Jumlah ini kecenderungannya meningkat pada tahun-tahun terakhir. Tidak ada responden yang menggarap sawah dan rapak. Ladang pada umumnya dibuat pada lahan bekas ladang yang berusia dibawah 10 tahun, sedikit sisanya membuka lahan baru di rimba. Hampir seluruh lahan adalah milik sendiri, sedikit sisanya merupakan lahan pinjaman.

Pada tahun 2002 dan 2003, benih yang ditanam berkisar antara 0,5 - 4 kaleng, namun umumnya responden menanam 1,5 - 2 kaleng.

Jarak tempuh ladang dari kampung berkisar antara 5 - 20 menit, yang ditempuh dengan berjalan kaki atau perahu ces.

Semua responden rumah tangga menyatakan bahwa hasil panen tahun sebelumnya tidak mencukupi hingga tahun berikutnya. Beras dari ladang sendiri hanya bertahan antara 3 - 10 bulan. Mereka harus membeli untuk beras tambahan. Tidak ada responden yang mendapat bantuan beras secara cuma-cuma, baik dari pemerintah, perusahaan, keluarga maupun LSM.

5.5 Pendapatan uang

Lebih dari separuh responden mendapatkan penghasilan dari usaha kayu. Sepertiga dari responden bekerja pada perusahaan kayu yang terletak di dekat kampung dan yang lainnya menggergaji dan usaha banjir kap kayu perupuk yang berharga Rp. 10.000/m³.

Usaha lainnya yang menghasilkan uang adalah nelayan (menjual ikan) dan menjual sayur. Sedikit lainnya bekerja sebagai guru PTT dan pekerja upahan di ladang yang dibayar rata-rata Rp.12.000/hari.

Selama tahun 2002 - 2003 masyarakat juga memperoleh *fee* dari tebangan kayu yang dilakukan mitra (HPHH) di wilayah Kampung Ujoh Halang.

Kampung Ujoh Halang

5.6 Infrastruktur ekonomi

Tidak terdapat pasar di kampung ini. Hanya terdapat beberapa warung yang menjual sembako yang juga tidak lengkap. Kebutuhan akan sayur diperoleh dari kebun sendiri atau membeli dari kebun orang lain. Untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih banyak, masyarakat biasanya pergi berbelanja ke Long Kelian yang berjarak 15 menit dengan perahu ces atau ke Long Iram yang berjarak 1-2 jam dengan perahu ces. Untuk ke tempat tersebut masyarakat biasanya memakai ces pribadi atau dengan kapal penumpang ke Long Iram dengan ongkos kapal Rp.10.000.

Menurut Juru Tulis, kondisi jalan darat dalam 5 tahun terakhir ini menjadi lebih baik, hanya jalan sungai yang tetap sama saja. Saat ini, tidak ada jalan darat yang menghubungkan kampung ini dengan kampung tetangga. Jalur transportasi utama ke kampung lain adalah sungai.

Alat transportasi reguler yang ada adalah kapal penumpang yang setiap hari melintasi kampung ini. Biaya yang harus dikeluarkan ke kecamatan adalah Rp.10.000 sedangkan bila ke kabupaten Rp. 50.000. Juru tulis juga menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir, perjalanan menuju kecamatan dan kabupaten menjadi lebih cepat.

5.7 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di Ujoh halang adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- gas;
- listrik (*genset*).

Kayu bakar, minyak tanah, solar (untuk *genset*) dan bensin adalah sumber energi yang sudah pernah digunakan sebelumnya, namun saat ini dirasakan semakin sulit terjangkau. Gas baru digunakan oleh sedikit rumah tangga yang juga menyatakan semakin sulit menjangkanya karena harga yang mahal.

Belum ada PLN di kampung ini, sarana penerangan yang digunakan bersumber dari *genset* berbahan bakar solar yang dimiliki oleh sedikit masyarakat yang mampu.

5.8 Kondisi rumah penduduk

Lebih dari setengah responden rumah tangga yang diwawancarai atap rumahnya terbuat dari seng, sisanya terbuat dari keping atau sirap. Hampir semua dinding rumah dan lantai terbuat dari papan kayu biasa.

Selama ini masyarakat menggunakan WC sungai yang dimiliki oleh hampir setiap rumah tangga. Saat ini masyarakat dan kelompok perempuan dampingi Nurani Perempuan sedang mengupayakan pembuatan WC dalam rumah untuk seluruh masyarakat yang mau berswadaya dalam pembuatannya.

Hampir separuh responden rumah tangga menyatakan bahwa tidak ada listrik di rumah mereka, sisanya memanfaatkan listrik kelompok.

Kampung Ujoh Halang

5.9 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Keterjangkauan terhadap lahan	Seluruh masyarakat	Sama	Juru Tulis
Kondisi jalan	Baik	Lebih baik	Juru Tulis
Kondisi sungai sebagai jalan	Sedang	Sama saja	Anggota BPK
Luasan ladang	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Luasan sawah	Tidak ada	Sama	Anggota BPK
Luasan kebun sayur	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun rotan	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun karet	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun buah (<i>lepuun</i>)	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Luasan kebun kokoa	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan kebun kopi	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan peternakan	Tidak ada	-	Anggota BPK
Luasan hutan	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Hutan perawan (<i>tuaan</i>)	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Hutan sekunder tua (<i>talun</i>)	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Hutan sekunder muda (<i>tarah</i>)	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Belukar tua (<i>sepitang</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Belukar (<i>ba'e</i>)	Ada	Bertambah	Anggota BPK
Hutan rawa (<i>peqaq</i>)	Ada	Berkurang	Anggota BPK
Hutan kerangas (<i>benale</i>)	Ada	Tetap	Anggota BPK
Hutan lindung	Ada	Baru/ tetap	Anggota BPK
Akses kepada hutan	-	Lebih mudah	Anggota BPK
Jenis- jenis tumbuhan hutan dan hewan	-	Berkurang	Anggota BPK
Perkembangan ekonomi kampung	-	Membaik	Anggota BPK

6. Pendidikan

6.1 Keadaan mutu pendidikan

Belum ada data yang valid tentang jumlah anak putus sekolah di kampung ini. Namun informasi dari wawancara dengan responden rumah tangga memperlihatkan bahwa sekitar seperempat dari responden mengakui kalau ada anak putus sekolah dalam keluarganya. Salah seorang guru menyatakan bahwa kadang-kadang seorang anak harus meninggalkan sekolah (walaupun sementara) untuk ke ladang membantu orang tua.

Tingkat pendidikan para guru tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir, namun mereka lebih aktif dalam mengajar. Tingkat orang dewasa yang dapat membaca dan menulis di kampung inipun meningkat.

Selain pendidikan formal, di kampung Ujoh Halang juga dilakukan pendidikan informal yang diberikan oleh LSM yang bekerja di wilayah ini seperti Yayasan Bioma dan Perkumpulan Nurani Perempuan. Pelatihan juga diberikan oleh Yayasan Rio Tinto yang membina beberapa wilayah yang berdekatan dengan PT. KEM.

Pada ajaran 2003/2004 ini terdapat 7 orang yang mendaftar pada SD Filial Ujoh Halang.

Kampung Ujoh Halang

6.2 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Menurut salah seorang guru, SD tempat dia mengajar adalah satu-satunya sekolah yang ada di Ujoh Halang. SD ini hanya sampai kelas IV, yang merupakan filial dari SDN Long Kelian. Bangunan SD ini kondisinya berkurang sehingga baru-baru ini harus di rehabilitasi dengan swadaya masyarakat tanpa bantuan pemerintah.

Alat-alat dan buku-buku juga tidak ada, kondisi yang sama sejak dulu. Jumlah staf menjadi lebih banyak dan honor (gaji) juga lebih besar.

Jika anak-anak di kampung ini ingin melanjutkan sekolah maka mereka harus ke luar kampung. Lanjutan SD dapat dilakukan di Kampung Long Kelian yang berjarak 15 menit dari kampung ini. SMP dan SLTA dapat dilanjutkan di Tering atau Long Iram yang berjarak 1,5 jam berjalan dengan ces 10 PK. Perguruan tinggi terdekat adalah di Melak, namun untuk perguruan tinggi negeri hanya ada di Samarinda.

Anak-anak yang melanjutkan SD di Long Kelian biasanya diantar-jemput oleh orangtua setiap hari. Namun bagi yang melanjutkan ke Tering, Long Iram, Melak atau Samarinda maka mereka harus menginap di tempat keluarga atau tinggal di asrama.

Karena di kampung hanya ada SD filial maka tidak ada anak-anak dari kampung lain yang bersekolah di kampung ini.

6.3 Resume trend perubahan

Komponen perubahan	Keadaan saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah sekolah	1	Bertambah	Guru SD
Kondisi sekolah	-	Berkurang	Guru SD
Alat-alat dan buku-buku	Tidak ada	Sama saja	Guru SD
Jumlah staf	-	Meningkat	Guru SD
Gaji/honor guru	-	Lebih besar	Guru SD
Tingkat pendidikan guru	-	Sama saja	Guru SD
Tingkat keaktifan guru	-	Lebih aktif	Guru SD
Persentase kelulusan	Belum ada	Tidak tahu	Guru SD
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis	-	Meningkat	Guru SD

7. Kesehatan

7.1 Keadaan umum kesehatan

Menurut Bidan Puskesmas Long Iram, jenis penyakit yang ada di kampung ini adalah:

Kelompok Umur	Jenis penyakit
Anak-anak	Batuk, pilek
Orang dewasa	Rematik
Perempuan	Tidak ada

Penyakit malaria yang umumnya diderita oleh orang dewasa frekuensinya berfluktuasi, sedangkan TBC yang umumnya diderita orang dewasa dan orang lanjut

Kampung Ujoh Halang

usia frekuensinya menurun. Diare yang lebih banyak diderita anak-anak frekuensinya meningkat.

Dalam 12 bulan terakhir tercatat 5 orang bayi dilahirkan dengan berat badan rata-rata 2,5 - 3 kg. Selama kurun waktu tersebut tidak ada bayi atau ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Usia rata-rata ibu pada kehamilan pertama adalah 17 tahun. Tidak ada orang yang meninggal di kampung ini selama 12 bulan terakhir. Rata-rata usia orang yang meninggal adalah 60 tahun dengan asumsi penyebabnya adalah karena sakit. Bidan ini juga menyampaikan bahwa penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di kampung ini adalah rematik dan penyakit tua.

7.2 Fasilitas air bersih

Menurut Bidan, seluruh masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang bersumber dari mata air atau pancuran. Warga menyebutkan bahwa sumber air di belakang kampung tersebut dibendung oleh Rio Tinto (PT. KEM) kemudian disalurkan ke bak yang ada di tengah kampung. Masyarakat mengambil air dari bak tersebut secara langsung, sedangkan bagi yang mampu mereka menyalurkannya ke rumah dengan menggunakan selang. Untuk kebutuhan mencuci dan mandi umumnya masyarakat masih menggunakan air Sungai Mahakam.

Jumlah air bersih meningkat sedangkan mutunya berfluktuasi. Bila musim kemarau maka debit air di bendungan akan menurun sehingga terkadang tidak bisa mengalir. Sebagian warga menganggap bahwa bak yang ada ditengah kampung ini harus ditambah karena tidak sanggup lagi mencukupi kebutuhan seluruh penduduk kampung yang semakin meningkat. Bila musim kemarau tiba, tidak ada pihak luar yang membantu warga dalam mendapatkan air bersih.

Rata-rata masyarakat menyimpan air didalam tong atau drum. Kampung ini juga mempunyai tong besar untuk menyimpan air untuk kepentingan umum yang diperoleh dari bantuan Rio Tinto (PT. KEM).

7.3 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Kampung Ujoh Halang tidak terdapat fasilitas kesehatan. Pendukung kesehatan yang ada disini hanyalah dukun beranak dan posyandu pembantu dari Puskesmas Long Iram. Keadaan ini tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Fasilitas kesehatan terdekat adalah Puskesmas Long Iram yang berjarak 1,5 - 2 jam perjalanan dengan perahu ces. Untuk kasus mendesak dan ringan warga lebih memilih berobat ke bidan yang ada di Kampung Long Kelian yang berjarak tempuh 15 - 20 menit dari kampung dengan perahu ces. Untuk penyakit yang lebih parah masyarakat biasanya langsung membawa pasien ke RS. ST. Yoseph Tering yang berjarak 2 jam berjalan dengan ces.

Pengobatan tradisional masih cukup diminati di kampung ini, walaupun ahli pengobatan tradisional jumlahnya terus berkurang. Pada upacara pengobatan tradisional, mereka kerap mendatangkan ahli pengobatan dari kampung lain.

Menurut Kepala Adat, upacara pengobatan dilaksanakan lebih dari sekali dalam sebulan dan biaya yang dikeluarkan adalah kira-kira Rp. 1.000.000 untuk 3 hari pengobatan.

Frekuensi dan perubahan jumlah pengobatan tradisional ini menurun dalam 5 tahun terakhir.

Kampung Ujoh Halang

7.4 Resume trend perubahan

Komponen Perubahan	Keadaan Saat Ini	Perubahan	Responden
Jumlah air bersih	-	Meningkat	Bidan Puskesmas Long Iram
Mutu air bersih	-	Berfluktuasi	Bidan Puskesmas Long Iram
Mutu air sungai	-	-	Bidan Puskesmas Long Iram
Jumlah fasilitas kesehatan	Tidak ada	Sama saja	Bidan Puskesmas Long Iram
Kondisi fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Bidan Puskesmas Long Iram
Jumlah staf fasilitas kesehatan	Tidak ada	-	Bidan Puskesmas Long Iram
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	Tidak ada	-	Bidan Puskesmas Long Iram
Gaji/honor	Tidak ada	-	Bidan Puskesmas Long Iram
Penyakit malaria	Ada	Berfluktuasi	Bidan Puskesmas Long Iram
Penyakit diare	Ada	Meningkat	Bidan Puskesmas Long Iram
Penyakit TBC	Ada	Menurun	Bidan Puskesmas Long Iram
Jumlah ahli pengobatan tradisional	Tidak ada	Menurun	Kepala Adat
Upacara pengobatan tradisional	Lebih dari sekali per bulan	Menurun	Kepala Adat

8. Sejarah Bencana

Kejadian atau peristiwa penting yang terjadi dalam 10 tahun terakhir:

No.	Kejadian	Dampak
1	Kebakaran hutan	Tidak seberapa
2	Kekeringan	Gagal panen
3	Banjir	Tanaman banyak yang mati
4	Perubahan pemerintah	Baik (mudah berhubungan)

Responden rumah tangga menambahkan bahwa pada tahun 2003 pernah terjadi kebakaran yang menghancurkan satu rumah penduduk.

Kampung Ujoh Halang

9. Persepsi Kemiskinan

Berikut adalah persepsi tentang kemiskinan menurut masyarakat Ujoh Halang. Persepsi ini digambarkan dengan cara menjawab pertanyaan, “permasalahan apa yang anda rasakan sehingga anda merasa miskin?”.

Menurut kelompok perempuan:

- tidak ada usaha yang layak;
- tidak ada modal kerja;
- jauh dari sarana kesehatan;
- tidak ada pemasaran hasil hutan karena pasar terlalu jauh;
- tidak mampu memberantas hama di kebun.

Menurut masyarakat biasa:

- tidak ada modal usaha;
- tidak ada usaha yang tetap;
- terbatas sarana untuk berusaha;
- hasil lebih kecil dari pengeluaran;
- pengalaman tidak sesuai dengan pekerjaan, kurang biaya sekolah.

Menurut tokoh masyarakat:

- kebakaran hutan yang menyebabkan berkurangnya penghasilan;
- kurangnya pendidikan sehingga kesulitan ketika melamar kerja di perusahaan;
- kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan;
- kurangnya dukungan dari pemerintah, misalnya pemerintah lebih berpihak pada masyarakat ketika ada konflik antara perusahaan vs masyarakat;
- kurangnya penghasilan.

10. Resume Kecenderungan Perubahan

Kondisi kelembagaan masyarakat cenderung membaik, dimana frekuensi musyawarah dan tingkat kepatuhan masyarakat dengan hasil-hasil musyawarah semakin meningkat. Hubungan dengan pemerintah kabupaten tidak ada perubahan, kecuali dari sisi keterjangkauan yang cenderung membaik.

Kondisi sosial budaya dirasakan tidak mengalami perubahan. Hampir tidak ada perubahan pada upacara adat. Konflik tidak terjadi, dimana kondisi ini tidak berubah dalam 5 tahun terakhir.

Kondisi jalan dirasakan membaik. Karena ada HPHH, terdapat pendapatan baru yaitu *fee* dari HPHH. Selain dari *fee* HPHH, beberapa rumah tangga mendapatkan penghasilan dengan kerja banjir kap. Terlihat sekali bahwa ketergantungan masyarakat kepada hasil hutan kayu sangat tinggi sekali. Kecenderungan ini semakin meningkat terutama setelah ada HPHH. Konsekuensi dari kecenderungan ini adalah luasan hutan yang semakin berkurang.

Dalam 5 tahun terakhir ada 1 sekolah yang baru dibangun sebagai satu-satunya sekolah di kampung ini. Namun kondisinya terus menurun. Beberapa fasilitas pendidikan meningkat seperti gaji guru dan tingkat keaktifan guru. Jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis juga meningkat.

Kampung Ujoh Halang

Fasilitas kesehatan tidak mengalami perubahan, sejak dahulu tidak ada fasilitas kesehatan di kampung ini. Tingkat penyakit diare meningkat, walaupun penyakit TBC diakui cenderung menurun.

11. Lampiran

Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.

Khusus untuk Kampung Ujoh Halang, survei dilakukan dengan melibatkan:

- 10 rumah tangga;
- 7 responden kunci;
- 3 kelompok diskusi.

Responden kunci yang diwawancarai adalah:

- kepala adat;
- juru tulis (menggantikan petinggi);
- anggota BPK;
- guru PTT pada SD Filial (menggantikan unsur kepala sekolah);
- satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
- bidan pada Puskesmas Kecamatan Long Iram (menggantikan unsur kesehatan);
- warung.

Diskusi kelompok dilakukan dengan:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Wawancara rumah tangga dan responden kunci dilakukan berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Jumlah pewawancara 2 orang yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pewawancara juga bertugas sebagai fasilitator pada kelompok-kelompok diskusi.

Lampiran

Kepala Adat

Kampung: _____ **Jam Mulai:** _____
Tanggal: _____ **Responden:** _____
Pewawancara : _____ **Jabatan Responden:** _____

I. SEJARAH DAN PERUBAHAN

1. Sudah berapa tahun kampung ini ada (mis: sudah ganti lamin berapa kali)?
2. Dari mana masyarakat berasal (mis: dari lamin mana?)?
3. Upacara tradisional/ritual apa yang masih dilakukan?
4. Apa perubahan-perubahan upacara adat dibandingkan dengan masa lalu?

Dimensi Perubahan	Perubahan
Waktu	1: Semakin Lama 2: Semakin Pendek 3: Sama Saja
Bahan-Bahan	1: Berubah dari sisi jenis bahan 2: Berubah dari sisi jumlah 3: Sama saja
Gotong Royong	1: Semakin kuat 2: Semakin lemah 3: Sama saja
Tujuan	1: Sama dengan tujuan menurut Adat 2: Sudah berubah

5. Kejadian atau peristiwa apa yang paling penting yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir?

Kejadian/Peristiwa	Pernah /Tidak Pernah	Dampak Terhadap Kampung
Bencana		
Kebakaran Hutan		
Kelaparan		
Kekeringan		
Banjir		
Hama		
Perubahan Pemerintahan		
Lainnya:.....		

II. PENGOBATAN TRADISIONAL

6. Ada berapa ahli pengobatan tradisional yang ada di kampung?
7. Bagaimana perubahan jumlah ahli pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir?
1: bertambah, 2: berkurang, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu
8. Berapa sering upacara pengobatan tradisional dilaksanakan?
(5: hampir setiap hari, 4: lebih dari sekali per minggu, 3: sekali seminggu, 2: lebih dari sekali per bulan
1: kurang dari sekali per bulan, 0: tidak pernah)
9. Bagaimana perubahan jumlah upacara pengobatan dalam waktu 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu
10. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk upacara pengobatan tradisional?

III. KONFLIK

11. Bagaimana perubahan dari sisi konflik yang ada di kampung?

Jenis Konflik	Tingkat Sering	Perubahan	Apa Penyebabnya
Konflik Lahan	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Keluarga	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Suku	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Agama	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Air/Sumber daya Alam	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Lainnya, sebutkan...	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Lainnya, sebutkan...	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	

11. Ketika terjadi konflik di dalam maupun di/dengan pihak luar kampung, hukum mana yang paling banyak digunakan?

Jenis Konflik	Jenis Hukum Yang Paling Banyak Digunakan
Konflik Di Dalam Kampung	1: Hukum Adat 2: Hukum Negara 3: Cara Lain, Jelaskan!.....
Konflik Di/Dengan Pihak Luar Kampung	1: Hukum Adat 2: Hukum Negara 3: Cara Lain, Jelaskan!.....

12. Bagaimana kalau masyarakat tidak menjalankan keputusan lembaga adat?, apa yang akan dilakukan?
Contoh kasus!

13. Berapa banyak konflik di kampung yang diselesaikan di tingkat kampung oleh lembaga adat?
(1: tidak ada, 2: Kurang Dari Separuh, 3: Separuh, 4: Lebih dari Separuh, 5: Seluruhnya)

IV. TINGKAT KERJASAMA

14. Apakah tingkat kerjasama antar masyarakat telah berubah dalam 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

15. Apa bentuk-bentuk gotong royong yang pernah dilakukan dalam 12 bulan terakhir?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

16. Berapa banyak biasanya masyarakat yang ikut dalam gotong royong?
4: semua, 3: lebih dari separuh, 2: separuh, 1: kurang dari separuh, 0: sedikit sekali

17. Jika terjadi masalah kekurangan makanan di kampung, kepada siapa meminta bantuan?

V. LAIN-LAIN

18. Seberapa banyak generasi muda yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari para orang tua (mis: pengetahuan pengobatan, hukum adat, cara pengelolaan hutan dan lahan, dll)?
(1: tidak ada, 2: kurang dari seperempat, 3: setengah s/d separuh, 4: separuh, 5: lebih dari separuh, 6: seluruhnya)

19. Ada hiburan apa di kampung?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Petinggi

Kampung:	Jam Mulai:
Tanggal:	Responden:
Pewawancara :	Jabatan Responden:

I. PEMERINTAHAN

1. Apa lembaga resmi dan yang tidak resmi yang ada di kampung?

Lembaga Di Kampung	Ada/Tidak Ada
Pemerintah Kampung	
Lembaga Adat	
Badan Perwakilan Kampung	
LKMD	
LMD	
Kelompok Tani	
Koperasi	
Lainnya, Sebutkan!.....	
Lainnya, Sebutkan!.....	

2. Apa saja program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir? Kapan?

Nama Program Pemerintah	Kapan Dilaksanakan

3. Bagaimana bantuan pemerintah kepada pembangunan di perkampungan selama 5 tahun terakhir?

1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

4. Apakah kampung ini pernah mengajukan usulan bantuan dalam 5 tahun terakhir? Jika pernah,

Bantuan Untuk Apa?	Apa Jawaban Dari Pemerintah?

5. Seberapa sering petugas pelayanan dari pemerintah (kecamatan & kabupaten) datang ke kampung-kampung?

5: hampir setiap hari, 4: lebih dari sekali dalam seminggu, 3: sekali dalam seminggu, 2: lebih dari sekali dalam sebulan, 1: kurang dari sekali dalam sebulan, 0: tidak pernah

6. Siapa (lembaga pemerintah) yang pernah datang?

1.

2.

3.

4.

5.

II. KEPENDUDUKAN

7. Ada berapa orang yang meninggalkan kampung selama 5 tahun terakhir?

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Kampung
Waktu Pendek/Sementara		1: Lahan Tidak Subur 2: Mencari Pekerjaan 3: Konflik 4. Sekolah/Pendidikan 5. Bencana Alam Lainnya, sebutkan?.....
Waktu Panjang/Selamanya		1: Lahan Tidak Subur 2: Mencari Pekerjaan 3: Konflik 4. Sekolah/Pendidikan 5. Bencana Alam Lainnya, sebutkan?.....

III. SUMBERDAYA ALAM

8. Apakah ada jenis-jenis hutan yang dilindungi (termasuk hutan yang dilindungi secara lokal oleh hukum adat)?, Jika ada, berapa luasnya?, bagaimana digunakan?

9. Bagaimana aturan pada hutan yang dilindungi tersebut ditegakkan, misalnya jika ada yang menebang sembarangan bagaimana memberikan sangsi?

10. Ada berapa rumahtangga yang memiliki keterjangkauan¹ terhadap lahan?
5: seluruhnya, 4: kebanyakan, 3: lebih dari setengah, 2: kurang dari setengah, 1: sedikit 0: tidak ada

11. Apakah keterjangkauan tersebut sudah berubah dalam 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

12. Ada berapa jumlah rumahtangga yang memiliki lahan?
5: seluruhnya, 4: kebanyakan, 3: lebih dari setengah, 2: kurang dari setengah, 1: sedikit 0: tidak ada

13. Apakah ada orang yang menjual lahan baik secara resmi atau tidak resmi?
Jika ada, kepada siapa lahan dijual?
Kapan praktek seperti ini mulai sering terjadi?

14. Apakah kampung atau seseorang di kampung sudah atau pernah mengajukan IPPK/HPHH/IPHH? **(ya/tidak)**

¹ Keterjangkauan harus diartikan dari 3 sisi yaitu: hak, jarak,/alat transportasi/kondisi jalan dan ketersediaan

15. Berapa jumlah orang yang mendapatkan penghasilan dari penebangan pohon pada konsesi IPPK/IPHH/HPHH tersebut (fee, ganti rugi, gaji)?
5: seluruhnya, 4: kebanyakan, 3: lebih dari setengah, 2: kurang dari setengah, 1: sedikit 0: tidak ada
16. Apakah ada pihak luar (mis: perusahaan) mengajukan permohonan untuk konsesi IPPK/IPHH/HPHH, pertambangan, perkebunan di dalam wilayah kampung? **(ada/tidak ada)**
17. Siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi tersebut?

IV. INFRASTRUKTUR

Pasar

18. Apakah ada pasar di sini?
Jika ada berapa sering pasar tersebut buka, misalnya berapa kali dalam seminggu?
19. Apakah frekuensi buka pasar berubah dalam 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu
20. Berapa jarak pasar terdekat dari kampung (waktu, biaya)?

Jalan, Transportasi & Komunikasi

21. Bagaimana kondisi jalan dan sungai?

	Kondisi Sekarang	Perubahan dalam 5 tahun terakhir
Jalan	1: baik 2: sedang 3: kurang baik	1: lebih baik 2: sama saja 3: berkurang 4: berfluktuasi 5: tidak tahu
Sungai	1: baik 2: sedang 3: kurang baik	1: lebih baik 2: sama saja 3: berkurang 4: berfluktuasi 5: tidak tahu

22. Apa alat transportasi reguler yang ada (contoh ongkosnya)?
22. Apakah ada perubahan waktu perjalanan yang diperlukan ke Kecamatan, Kabupaten, dan Kota selama 5 tahun terakhir?
1: perlu lebih lama, 2: lebih cepat, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu
23. Alat komunikasi apa yang tersedia?

Energi

Sumber energi yang digunakan di kampung

Sumber Energi	Digunakan?	Perubahan dalam 5 Tahun Terakhir?	Keterjangkauan (harga/ketersediaan)
Kayu Bakar	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Minyak Tanah	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Gas	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Listrik	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Lainnya, sebutkan!.....	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Lainnya, sebutkan!.....	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Tokoh Masyarakat

Kampung:

Tanggal:

Jam Mulai:

Fasilitator:

Reviewer:

Peserta/Jabatan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I Persepsi lokal tentang kesejahteraan dan kemiskinan setempat (30 menit)

I.1 Pendapatan

I.2 Sarana & Prasarana

I.3 Nutrisi & Kesehatan

I.4 Pendidikan

I.5 Tata guna lahan (termasuk akses terhadap hak, dll.)

II Masalah yang paling relevan

- Merengking 5 masalah yang paling penting tentang kemiskinan vs kesejahteraan dan mencari kesepakatan tentang masalah tersebut. Catat pendapat yang berbeda!

1.

2.

3.

4.

5.

Jam Selesai:

Tandatangan Fasilitator

Kepala BPK

Kampung:

Jam Mulai:

Tanggal:

Responden:

Pewawancara :

Jabatan Responden:

I. UMUM

20. Kapan BPK didirikan?

21. Apakah BPK melakukan konsultasi dengan masyarakat kampung? Dan jika ya, seberapa sering?
(1: tidak pernah, 2:sekali per bulan, 3: sekali per tiga bulan, 4: sekali per tahun, 5, kurang dari sekali per tahun)

3. Apa yang didiskusikan dalam musyawarah dan apa keputusannya?

Apa Yang Didiskusikan?	Apa Yang Diputuskan?

4. Bagaimana kelembagaan musyawarah berubah dalam 5 tahun terakhir?

Kualitas	1: Semakin baik 2: Semakin buruk 3: Sama Saja
Tingkat Dampak Dari Keputusan	1: Semakin berdampak dan dipatuhi 2: Semakin lemah dan cenderung diabaikan 3: Sama saja
Tingkat Sering	1: Semakin sering 2: Semakin Jarang 3: Sama Saja

II. TATA GUNA LAHAN

5. Apa tipe tata guna lahan yang paling luas di kampung? ,
6. Berapa besar luas tata guna lahan yang paling luas tersebut dibandingkan dengan total luasan kampung?
(1: kurang dari seperempat, 2: antara seperempat dengan setengah, 3: setengah, 4: lebih dari setengah, 5: seluruhnya)
7. Apa tipe tata guna lahan yang lain yang ada di kampung?

Tata guna lahan	Ada / Tidak Ada	Perubahan sejak 1999	Keterangan
Ladang		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Sawah		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun sayur		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun rotan		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun karet		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Simpukng/lembo/ buah		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun kokoa		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun kopi		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun lain		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Peternakan		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Hutan		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Lainnya		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	

8. Apa jenis hutan dan lahan bera (urat) yang ada?

Tipe hutan/urat	Nama Lokal	Luas (%) (tidak usah dipaksa)	Perubahan sejak 1999	Keterangan
Hutan Perawan			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Hutan Sekunder tua (>30 tahun.)			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Hutan Sekunder Muda (10-30 thn.)			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Belukar tua (5-10 thn.)			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Belukar (2-5 thn.)			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Hutan Rawa			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Hutan Kerangas (hutan tidak subur)			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	
Tipe hutan lainnya			1:bertambah, 2:berkurang, 3:tetap	

9. Apa perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan **sebelum tahun 1990**?

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan		
Lebih mudah diakses		
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan		
Lainnya, jelaskan.....		

III. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

10. Apakah hubungan masyarakat dengan Pemda telah berubah selama 5 tahun terakhir? Jika ya, bagaimana?

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Tingkat Kepedulian	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Pelayanan	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Keterbukaan Informasi	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Partisipasi Pengambilan Keputusan	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja

11. Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah?

Cara Memperoleh Informasi	Ya/Tidak
Lewat Kunjungan Dari Pemerintah	
Dengar Dari Orang Lain	
Lewat Pengumuman	
Lainnya.....	

IV. LAIN-LAIN

12. Bagaimana perkembangan ekonomi rata-rata di kampung dalam 5 tahun terakhir?
1:Membaik, 2:Memburuk, 3:Sama saja

apa contohnya?

13. Apakah ada bantuan dari pihak lain selain pemerintah?

Pemberi Bantuan	Ya/Tidak	Jenis Bantuan
Pengusaha		
LSM		
Organisasi Keagamaan		
Lainnya.....		

14. Apakah sudah pernah ada penelitian di kampung?
Jika ya, oleh siapa?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Dokter/Bidan/Dukun/dll

Kampung:

Jam Mulai:

Tanggal:

Responden:

Pewawancara :

Jabatan Responden:

I. INFRASTRUKTUR

1. Seberapa banyak keluarga yang bisa mendapatkan sumber air bersih?
(1:tidak ada, 2:kurang separuh, 3:separuh, 4:lebih separuh , 5:semua)
2. Untuk keluarga yang bisa mendapatkan air bersih, sumbernya darimana?
(1:Sungai, 2:Pancuran mata air, 3:Sumur Pompa, 4:Sumur Timba, 5:hujan, 6:PDAM, 7:air minum kemasan, 8:lainnya, sebutkan.....)
3. Bagaimana perubahan dari sisi jumlah dan mutu?

Jumlah	1: meningkat 2: menurun 3: sama saja 4: berfluktuasi 5: tidak tahu
Mutu	1: meningkat 2: menurun 3: sama saja 4: berfluktuasi 5: tidak tahu

4. Kenapa perubahan terjadi?
5. Ketika musim kemarau atau musim kering dimana air bersih tidak bisa didapatkan di kampung, apakah ada bantuan air dari pihak luar? (1, ada, 2, tidak ada)
Jika ada, bagaimana kualitas air tersebut?

6. Apakah rata-rata masyarakat di sini memiliki alat untuk menyimpan air? (1, ya, 2, tidak)
Jika ya, Apa jenisnya?

7. Apakah ada alat untuk menyimpan air untuk kepentingan umum? (1, ya, 2, tidak)
Apa jenisnya?

Alat tersebut dari mana didapatkan?

II. UMUM

8. Fasilitas kesehatan apa yang ada di kampung?

Fasilitas Kesehatan	Ada/ Tidak Ada
Rumah Sakit	
Puskesmas	
Puskesmas Pembantu	
Polindes	
Dukun	
Lainnya, sebutkan..... ...	
Lainnya, sebutkan..... ...	

9. Siapa yang mendanai fasilitas tersebut ?
(1:swadaya, 2:pemerintah, 3:swasta, 4:gereja, 5:lainnya, sebutkan.....)

10. Berapa banyak orang dari luar kampung yang berobat ke kampung ini?,
(1:kurang dari separuh, 2:separuh, 3:lebih dari separuh, 4:seluruhnya)

dan berapa jarak yang terjauh?

11. (jika di kampung ini tidak ada fasilitas kesehatan), Berapa jarak fasilitas kesehatan terdekat?

12. Bagaimana mencapai fasilitas kesehatan tersebut dan berapa biayanya?

13. Apakah keterjangkauan terhadap perawatan kesehatan telah berubah selama 5 tahun terakhir?

Jumlah fasilitas kesehatan	1. Lebih banyak 2. Kurang banyak 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Kondisi fasilitas kesehatan	1. Lebih baik 2. Kurang baik 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Jumlah staf	1. Lebih banyak 2. Kurang banyak 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Gaji/honor	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu

14. Apa jenis penyakit yang ada di kampung ini

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-Anak	
Orang Dewasa	
Ibu-Ibu (kaitan dengan fungsi reproduksi)	

15. Bagaimana tingkat keseringan terjangkitnya penyakit:

Jenis Penyakit	Tingkat Keseringan	Kelompok Yang Paling Mungkin Terkena Penyakit
Malaria	1: meningkat 2: menurun 3: sama 4: berfluktuasi	1:Anak-Anak 2:Orang Dewasa 3.Orang Lanjut Usia 4:Ibu-Ibu
Diare	1: meningkat 2: menurun 3: sama 4: berfluktuasi	1:Anak-Anak 2:Orang Dewasa 3.Orang Lanjut Usia 4:Ibu-Ibu
TBC	1: meningkat 2: menurun 3: sama 4: berfluktuasi	1:Anak-Anak 2:Orang Dewasa 3.Orang Lanjut Usia 4:Ibu-Ibu

16. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan)?
 (1:pengobatan tradisional, 2:pinjam uang, 3:minta bantuan keluarga, 4:tidak berobat, 5:lainnya, jelaskan.....)

III. DATA SEKUNDER

17. Ada berapa jumlah kelahiran anak dalam 12 bulan terakhir di kampung ini?
18. Berapa rata-rata berat bayi yang baru lahir?
19. Berapa bayi yang meninggal pada saat kelahiran dalam 12 bulan terakhir?
20. Berapa rata-rata umur Ibu pada saat kehamilan **pertama**?
21. Ada berapa jumlah anak-anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal dalam **12 bulan terakhir**, dan apa penyebabnya ?

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 s/d 5 tahun		
6 s/d 10 tahun		

22. Ada berapa jumlah Ibu yang meninggal pada saat melahirkan dalam 12 bulan terakhir di seluruh kampung ?
23. Ada berapa jumlah orang meninggal dalam 12 bulan terakhir?
25. Berapa rata-rata umur orang yang meninggal karena penyakit?
26. Apa asumsi penyebab kematian?
 (1:penyakit, 2:kecelakaan, 3:lainnya, jelaskan.....)
26. Penyakit apa yang paling banyak menyebabkan kematian di kampung ini?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Kepala Sekolah

Kampung:

Jam Mulai:

Tanggal:

Responden/Jabatan:

Pewawancara :

Nama Sekolah:

I. UMUM

1. Sekolah apa saja (termasuk Taman Kanak anak) yang ada di kampung?

Jenis Sekolah	Ada/Tidak Ada
Taman Kanak-Kanak	
Sekolah Dasar	
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	
Perguruan Tinggi	

2. Jika anak-anak dari kampung ini ingin bersekolah ke sekolah yang tidak tersedia di kampung, di mana mereka harus bersekolah?

Jenis Sekolah	Letak Sekolah	Jarak
Taman Kanak-Kanak		
Sekolah Dasar		
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama		
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas		
Perguruan Tinggi		

4. Apakah ada anak-anak dari luar kampung yang harus tinggal di kampung ini untuk bersekolah?

Jika ada,

Jumlah	Tempat Mereka Tinggal
1. kurang dari setengah 2. setengah 3. lebih dari setengah	1. Tinggal di tempat keluarga 2. Asrama 3. Kost atau sewa 4. Rumah sendiri 5. Lainnya, tolong jelaskan

5. Apakah ada anak-anak yang harus meninggalkan sekolah, walaupun untuk beberapa saat?

Jika ada, apa alasannya?

Alasannya	Jumlah
1. Bekerja 2. Ke ladang 3. Tidak ada biaya 4. Bolos, jelaskan apa alasannya? 5. lainnya, tolong jelaskan	1. sedikit 2. setengah 3. hampir semua 4. semua

6. Apakah keterjangkauan terhadap pendidikan telah berubah dalam 5 tahun terakhir?

Jumlah sekolah	1. Lebih banyak 2. Berkurang 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Kondisi sekolah	1. Lebih baik 2. Berkurang 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Alat-alat dan buku-buku	1. Lebih banyak 2. Berkurang 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Staf	1. Lebih banyak 2. Berkurang 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Gaji/Honor	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu

7. Apakah kualitas pendidikan telah berubah dalam 5 tahun terakhir?

Tingkat Pendidikan guru	1. Lebih baik 2. Berkurang 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Tingkat keaktifan guru dalam mengajar	1. Lebih aktif 2. Berkurang keaktifannya 3. Sama saja 4. Tidak aktif 5. Aktif
Persentase kelulusan	1. Meningkatkan 2. Menurun 3. Sama saja 4. Tidak tahu
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis (di kampung tempat sekolah ini berada)	1. Meningkatkan 2. Sama saja 3. Menurun 4. Tidak tahu

10. Apakah ada anak yang putus sekolah?
Jika ada, apa alasannya?

11. Apakah pernah ada pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk orang dewasa?

Jika pernah, dari mana pelatihan tersebut didapatkan?

(1:program pemerintah, 2:perusahaan, 3:LSM,

4:lainnya,jelaskan.....)

II. DATA SEKUNDER

12. Ada berapa persen jumlah siswa yang lulus ujian pada musim ujian yang baru lalu?

13. Ada berapa jumlah siswa baru tahun ini?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Masyarakat Biasa

Kampung:

Tanggal:

Jam Mulai:

Fasilitator:

Reviewer:

Peserta/posisi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

I. Persepsi lokal tentang kesejahteraan dan kemiskinan setempat (30 menit)

I.1 Ekonomi

I.2 Sosial

I.3 Sarana & Prasarana

I.4 Nutrisi & Kesehatan

I.5 Pendidikan

I.6 Tata guna lahan (termasuk akses terhadap hak, dll.)

II. Masalah yang paling relevan

- Merengking 5 masalah yang paling penting tentang kemiskinan vs kesejahteraan dan mencari kesepakatan tentang masalah tersebut. Catat pendapat yang berbeda!

1.

2.

3.

4.

5.

Jam Selesai:

Tandatangan Fasilitator

Rumah tangga

Kampung:

Tanggal:

Jam Mulai:

Pewawancara :

Responden:

I. Anggota Rumah tangga

Ada berapa anggota rumah tangga?	
Berapa orang yang memberi kontribusi terhadap pendapatan rumahtangga?	
Berapa anak-anak yang masih bersekolah?	
Berapa anak-anak yang belum bersekolah?	
Berapa ibu-ibu rumahtangga yang ada di rumah?	
Apakah ada anak yang putus sekolah? Jika ada, kenapa?	
Apakah ada keahlian pengobatan tradisional di rumah tangga (mis. dukun, ramuan obat hutan, dll.)?	

Atap rumah	Tembok/dinding	Lantai	Listrik	WC/Kamar Mandi
1. Genteng 2. Seng 3. Sirap 4. Rumbia	1. Permanen ² 2. Semi-perm ³ . 3a. Kayu ulin/ bengkirai 3b. Papan/ kayu lain 4. Bilik / bambu 5. Kulit kayu	1. Ulin 2. Keramik 3. Semen / ubin ⁴ 4. Kayu papan 5. Tanah 6. Lainnya, tolong didefinisikan?	1. PLN 2. Listrik kelompok 3. Listrik Kampung 4. Milik Pribadi 5. Listrik lainnya, apa? 5. Tidak ada Listrik	1. Di darat 2. Di sungai 3. WC di dalam rumah

² Konstruksi tulang terbuat dari baja

³ Konstruksi tulang beton terbuat dari kayu

⁴ Biasanya terbuat dari semen

II. Ekonomi

II.1 Bagaimana persepsi Anda tentang perubahan ekonomi rumahtangga anda sendiri selama 5 tahun terakhir?

PENDAPATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Lebih besar2. Lebih kecil3. Sama saja4. Tidak tetap5. Tidak tahu
PENGELUARAN	<ol style="list-style-type: none">1. Lebih besar2. Lebih kecil3. Sama saja4. Tidak tetap5. Tidak tahu
KESEJAHTERAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Lebih besar2. Lebih kecil3. Sama saja4. Tidak tetap5. Tidak tahu

II.2 **Kenapa** perubahan terjadi?

II.3 Apa sumber pendapatan **uang rumah tangga** yang utama dalam 12 bulan terakhir?

Tingkat Kepentingan	Sumber Pendapatan <i>Uang</i> , tolong berikan contoh
No.1 – Paling Penting	
No. 2 – Kedua Terpenting	
No. 3 – Ketiga Terpenting	
No. 4 – Keempat terpenting	

II.4 Apakah ada sumber pendapatan yang baru muncul dalam 5 tahun terakhir (**yang belum ada sebelumnya**)? Jika ya, apa?

II.5 Apa saja aset rumah tangga Anda?

Jenis Aset	Apakah Pernah Punya ? (ya/tidak)	Kapan diperoleh? 1 = sebelum 2000 2 = setelah 2000	Apakah Aset tersebut masih ada?
Mobil/Truk			
Sepeda motor/Sepeda			
Ces			
Chainsaw			
Penggilingan padi			
Babi			
Ayam			
Kerbau			
Sapi			
Tambak ikan / udang			
Parabola			
Televisi			
VCD Player			
Stereo/Radio			
Genset			
Lemari es			
Kompas gas			

II.6 Jika ada kebutuhan uang yang mendesak (mis.: jika ada keluarga yang sakit), **darimana** rumah tangga mendapatkan uang?

III. Nutrisi

III.1 Berapa kali makan dalam sehari? **1 kali** **2 kali** **3 kali** **4 kali**

Komoditas	Seberapa sering? 0 tidak pernah, 1 jarang, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu	Seberapa banyak yang dibeli? 0 tidak dibeli, 1 kurang dari setengah dibeli, 2 setengah dibeli, 3 lebih dari setengah dibeli, 4 semua dibeli
Nasi		
Daging		
Telur		
Ikan		
Sayur		

III.2 Seberapa banyak rumahtangga Anda rata-rata menghabiskan untuk:

Komoditas	Jumlah konsumsi Contoh: 1 kilo gula tahan berapa hari?
Beras	
Minyak goreng	
Minyak tanah	
Gula	
Garam	
Mie instan	
Bawang merah	
Rokok	
Sabun mandi	
Odol (pasta gigi)	

IV. Tataguna Lahan

IV.1 Jenis lahan apa yang Anda miliki?

Tata Guna Lahan	Jumlah satuan (bukan luas)	Perubahan sejak tahun 99 (Jumlah, ukuran, keadaan)
Kebun sayur		
Kebun rotan		
Kebun karet		
Simpukng/lembo/buah		
Kebun kokoa		
Kebun kopi		
Lainnya		

IV.2 Apakah Anda membuat ladang/sawah pada tahun:

Tahun	Ladang? (ya/tidak)	Sawah? (ya/tidak)
2003		
2002		
2001		
2000		
1999		

IV.3 Jika Anda membuat ladang pada tahun 2002 atau 2003 tersebut di atas (jawab: **ya/tidak**):

Status Milik	2002		2003	
	Ladang	Sawah	Ladang	Sawah
Milik Sendiri				
Pinjaman				
Lahan Bebas				

IV.4 Berapa kaleng ditanam?

2002:	2003:
-------	-------

IV.5 Hasil panen padi tahun 2003 tahan **berapa bulan**?

IV.6 Darimana Anda mendapatkan beras tambahan untuk tahun 2002 & 2003?

IV.7 Berapa umur hutan atau urat yang Anda gunakan untuk ladang (pakai kategori lokal)?

IV.8 Berapa jarak ladang dari tempat Anda tinggal? Pakai apa?

IV.9 Sumberdayahutan apa yang anda gunakan sebagai sumber **uang** dalam 5 tahun terakhir?

Sumberdaya	Tingkat Kepentingan 1 Sangat 2 Sedang 3 Sedikit	Perubahan Kepentingan 1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap	Perubahan Akses (ketersediaan, hak, transportasi, peralatan, dll) 1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap
Rotan yang ditanam			
Rotan yang tidak ditanam			
Sarang burung			
Kayu ulin/bengkirai			
Kayu lain			
Malau			
Gaharu			
Babi hutan			
Payau, Kijang, Pelanduk			
Tiong			
Madu			
Buah			
Lainnya			

IV.10 Apakah Anda melakukan pengolahan produk dari hasil hutan **dalam 12 bulan terakhir?**

Produk	Kepentingan 1 Sangat 2 Sedang 3 Sedikit	Perubahan Kepentingan Dalam 5 tahun terakhir 1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap	Catatan
Lampit			
Tikar			
Keranjang			
Sirap			
Kayu gergajian			
Ulap Doyo			
Gula merah			
Cinderamata			
Lainnya			

IV.11 Apakah ada pendapatan dari konsesi/perusahaan selama 5 tahun terakhir?

Sumber Pendapatan	Jenis Pendapatan (fee, gaji, ganti rugi, sewa, dll.)	Cara pembayaran (bulanan, tahunan, sekali saja, dll.)	Kepentingan 1 Sangat 2 Sedang 3 Sedikit	Catatan
Konsesi Hutan (IHPH, HPHH, IPK, IPPK)				
Konsesi Tambang				
Perkebunan				
Lainnya				

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Perempuan

Kampung:

Tanggal:

Jam Mulai:

Fasilitator:

Reviewer:

Peserta/Jabatan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I . Persepsi lokal tentang kesejahteraan dan kemiskinan setempat (30 menit)

I.1 Pendapatan

I.2 Sarana & Prasarana

I.3 Nutrisi & Kesehatan

I.4 Pendidikan

I.5 Tata guna lahan (termasuk akses terhadap hak, dll.)

II. Masalah yang paling relevan

- Merengking 5 masalah yang paling penting tentang kemiskinan vs kesejahteraan dan mencari kesepakatan tentang masalah tersebut. Catat pendapat yang berbeda!

1.

2.

3.

4.

5.

Jam Selesai:

Tandatangan Fasilitator

Kur Mam

I. DUKUNGAN

1. Apakah ada dukungan dari pemerintah atau lembaga lain dalam 5 tahun terakhir?
Jika ada,

Bentuk Bantuan	Dari Siapa	Apa Dampaknya	Tingkat Kepuasan
			1. sangat puas 2. puas 3. tidak puas 4. mengecewakan 5. tidak tahu
			1. sangat puas 2. puas 3. tidak puas 4. mengecewakan 5. tidak tahu
			1. sangat puas 2. puas 3. tidak puas 4. mengecewakan 5. tidak tahu

2. Jika ada yang kurang dari program tersebut, bagaimana program tersebut dapat diperbaiki?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

II. Umum

3. Apa masalah utama yang Anda hadapi?

- 1.
- 2.
- 3.

4.

5.

4. Apakah situasi Anda sudah berubah dalam 5 tahun terakhir?

1: Membaik, 2: memburuk, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

5. Kenapa perubahan terjadi?

6. Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan dari pihak keluarga dan non-keluarga, seperti:

Pemberi Bantuan	Ya/Tidak
Keluarga	
Non-Keluarga Yang Tinggal di Sekitar Kampung	

7. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan:

	Mampu/Tidak	Jika Tidak, Siapa Yang Pernah Membantu
Pendidikan		
Kesehatan		

8. Seberapa sering Anda ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di kampung?

1. tidak pernah, 2. jarang, 3. agak sering, 4. sering sekali

9. Bantuan seperti apa yang Anda perlukan dari pihak luar?

III. KEHIDUPAN SOSIAL

10. Apakah ada masalah konflik sosial di kampung ini, jika ada apa penyebabnya?

Jenis Konflik	Ada/Tidak Ada	Apa Penyebabnya
Konflik Lahan		
Konflik Keluarga		
Konflik Suku		
Konflik Agama		
Lainnya, sebutkan.....		
Lainnya, sebutkan.....		

11. Apakah jumlah konflik berubah dalam 5 tahun terakhir?

1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

12. Apakah tingkat kerjasama/solidaritas telah berubah dalam 5 tahun terakhir (mis: acara adat, gotong royong di ladang, orang membantu ketika ada yang sakit)?

1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

IV. KONSESI IPPK/HPHH/IPHH

15. Apakah kampung atau seseorang di kampung sudah atau pernah mengajukan IPPK/HPHH/IPHH)? **(ya/tidak)**

24. Apakah Anda pernah mendapatkan penghasilan dari IPPK/HPHH/IPHH, baik berupa fee, ganti rugi atau gaji ? **(ya/ tidak)**

16. Apakah ada pihak luar (mis: perusahaan) mengajukan permohonan untuk konsesi IPPK/IPHH/HPHH, pertambangan, perkebunan di dalam wilayah kampung? **(ya/tidak)**

17. Apakah Anda terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi tersebut? **(ya/tidak)**

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Warung

Kampung:	Jam Mulai:
Tanggal:	Responden:
Pewawancara :	

Nama Produk	Harga/Satuan	Satuan	Merek/Keterangan Lain
Beras			
Minyak goreng			
Minyak tanah			
Gula			
Garam			
Mie instan			
Bawang merah			
Rokok			
Sabun mandi			
Odol (pasta gigi)			

